



DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023-2026





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023-2026



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kelapa Daerah Berakhir pada Masa Tahun 2022, pada diktum Kesatu disebutkan Bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota tahun 2023-2026 dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2036 akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, menunjukkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah belum sepenuhnya menunjang visi dan misi Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah terakhir beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023-2026.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2023-2026 merupakan program prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 2023-2026;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Camat.

18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
20. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
21. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
22. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

RPD dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2023 - 2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergi dan terpadu.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
PEDOMAN, RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA
Pasal 4

RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada :

- a. RPJMN 2020-2024;
- b. RPJPD Provinsi Riau;
- c. RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025;
- d. Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022;
- e. RPJMD Provinsi Riau Tahun 2023-2026
- f. Isu Isu Strategi yang berkembang;
- g. Kebijakan Nasional;
- h. Regulasi yang berlaku;

Pasal 5

Ruang Lingkup RPD meliputi :

- a. permasalahan Isu Strategis;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi, arah kebijakan dan program prioritas;
- d. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah; dan
- e. kinerja penyelenggaran pemerintah daerah.

Pasal 6

(1). Sistematika RPD Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan tujuan, Hubungan Antar Dokumen, dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II Gambaran Umum

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Bagian ini

menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan, serta menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kinerja Pelaksanaan APBD, Neraca Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Proporsi Penggunaan Anggaran, Analisis Pembiayaan, Kerangka Pendanaan, Proyeksi Pendapatan dan Belanja, Penghitungan Kerangka Pendanaan. Bagian ini menjelaskan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

Menjelaskan Permasalahan Pembangunan, dan Isu Strategis, menjabarkan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

e. BAB V Tujuan dan Sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran, menguraikan tentang artikulasi atau menetapkan indikator kinerja dan target tujuan dan sasaran selama kurun waktu 2023-2026.

f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat program prioritas seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah

beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target kinerja Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

i. BAB IX : Penutup

Memuat pedoman transisi perencanaan tahun 2023-2026, selain itu juga kaidah pelaksanaan RPD yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten Kampar bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPD Tahun 2023-2026; dan
 - b. pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan perencanaan RPD Tahun 2023-2026;
 - b. pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026; dan
 - c. hasil RPD Tahun 2023-2026.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan kondisi antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- (2) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, penyusunan RKPD tahun pertama RPD periode berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar 2023-2026.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun

pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
- (4) RPD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pj.Kepala Daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 11 Maret 2022

 **BUPATI KAMPAR,**

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
Pada Tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

 **YUSRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 9 TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar 2023-2026 dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, Pimpinan dan segenap staf Bappeda Kabupaten Kampar mengucapkan terimakasih kepada Pusat Kajian SDGs Universitas Islam Riau yang telah membantu penyusunan dokumen ini.

Akhir kata semoga dokumen RPD ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kampar 2023-2026. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bangkinang, Maret 2022

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the words "PEMERINTAH KABUPATEN" are written in a semi-circle at the top, and "KAMPAR" is written in a semi-circle at the bottom. In the center, the word "BAPPEDA" is written in a bold, sans-serif font. There are two small stars on either side of the word "BAPPEDA".
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR

ARDI MARDIANSYAH, S.STP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19850305 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I Pendahuluan.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-59
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-59
 BAB II Gambaran Umum Daerah.....	 II-1
2.1 Sejarah Kabupaten Kampar.....	II-1
2.2 Aspek Geografis dan Demografi.....	II-3
2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-3
2.2.2 Demografi.....	II-45
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-55
2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-55
2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-89
2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-113
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-115
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-116
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-187
2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-241
2.4.4 Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-262
2.5 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-270
2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-270

2.5.2	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....	II-275
2.5.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-283
2.5.4	Fokus Sumberdaya Manusia.....	II-285
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-15
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-19
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-20
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-23
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-27
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-27
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-32
BAB IV	Permasalahan dan Isu Strategis.....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1	Aspek Geografi dan Demografi.....	IV-1
4.1.2	Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	IV-3
4.1.3	Aspek Pelayanan Umum.....	IV-6
4.1.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	IV-25
4.2	Isu-Isu Strategis.....	IV-29
4.2.1	Isu Strategis Internasional.....	IV-30
4.2.2	Isu Strategis Nasional.....	IV-33
4.2.3	Isu Strategis Provinsi.....	IV-37
4.2.4	Isu Strategis Kabupaten Kampar.....	IV-41
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	V-1
5.1	Visi dan Misi.....	V-1
5.1.1	Visi RPJPD.....	V-1
5.1.2	Misi RPJPD.....	V-1
5.2	Tujuan dan Sasaran.....	V-2

	5.2.1 Tujuan dan Sararan pada Misi Satu RPJPD..	V-3
	5.2.2 Tujuan dan Sararan pada Misi Dua RPJPD..	V-5
	5.2.3 Tujuan dan Sararan pada Misi Tiga RPJPD...	V-6
	5.2.4 Tujuan dan Sararan pada Misi Empat RPJPD.....	V-10
	5.2.5 Tujuan dan Sararan pada Misi Lima RPJPD...	V-12
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah.....	VI-1
	6.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-1
	6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial.....	VI-14
	6.3 Kebijakan Khusus Daerah.....	VI-21
	6.4 Program Pembangunan Daerah.....	VI-22
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah.....	VII-1
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VIII-1
BAB IX	Penutup.....	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Sasaran Makro Provinsi Riau Menurut Arah RPJMN 2020-2024.....	I-10
1.2 Target RPJMD Provinsi Riau untuk Kabupaten Kampar 2022-2024.....	I-16
1.3 Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.....	I-22
1.4 Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.....	I-36
1.5 Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Kampar 2019-2039.....	I-52
2.1 Luas Wilayah Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	II-4
2.2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	II-6
2.3 Ibu Kota, Ketinggian Tempat dan Jarak Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-8
2.4 Pos Duga, Sungai Induk dan Luas Daerah Pengaliran Sungai di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-12
2.5 Suhu dan Kelembaban Menurut Bulan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-14
2.6 Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-16
2.7 Curah dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-17
2.8 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-21
2.9 Jenis dan Tingkat Rawan Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-23
2.10 Bahaya dan Kapasitas Rawan Bencana di Kabupaten Kampar.....	II-31

2.11	Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-45
2.12	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-46
2.13	Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-48
2.14	Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-49
2.15	Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-51
2.16	Perkembangan Struktur Usia Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-53
2.17	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (Milyar Rupiah).....	II-59
2.18	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (%).....	II-60
2.19	Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (Milyar Rupiah).....	II-62
2.20	Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (%).....	II-63
2.21	Pertumbuhan Ekonomi Sektorial dengan Migas Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021 (%).....	II-67
2.22	Perkembangan Inflasi Sektorial Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021 (%).....	II-71
2.23	PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-74
2.24	Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2018-2021.....	II-76
2.25	Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-80
2.26	Penduduk Miskin Per Kecamatan Berdasarkan Basis Data Terpadu (BNBA) di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-88
2.27	Perkembangan IPM dan Indikatornya di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-90

2.28	Angka Melek Huruf di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021...	II-93
2.29	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-94
2.30	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-95
2.31	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-96
2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-97
2.33	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-99
2.34	Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-100
2.35	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-101
2.36	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-103
2.37	Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-104
2.38	Perkembangan Index Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-105
2.39	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-107
2.40	Perkembangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-108
2.41	Perkembangan Skor PPH Pangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-108
2.42	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-110
2.43	Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-111

2.44	Pekembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-112
2.45	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-113
2.46	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-114
2.47	Perkembangan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-115
2.48	Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-117
2.49	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-119
2.50	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-120
2.51	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-121
2.52	Angka Putus Sekolah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021....	II-122
2.53	Angka Kelulusan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-123
2.54	Angka Melanjutkan Pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-124
2.55	Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-125
2.56	Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-127
2.57	Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-129
2.58	Guru SD/MI - SMP/MTS yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikat di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-130
2.59	Angka Kematian Bayi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021...	II-132
2.60	Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-134

2.61	Angka Kematian Neonatal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-135
2.62	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-136
2.63	Rasio Posyandu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-138
2.64	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-139
2.65	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-140
2.66	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-141
2.67	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-142
2.68	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-143
2.69	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-144
2.70	Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-145
2.71	Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang, Stunting dan Balita Kurus Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021....	II-146
2.72	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang dimunisasi Campak Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-150
2.73	Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-151
2.74	Jenis Penyakit yang di Laporkan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-152
2.75	Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-154
2.76	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-155

2.77	Panjang Jalan Provinsi Riau Menurut Kondisi yang terdapat di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021	II-157
2.78	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) Provinsi Riau yang terdapat di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-158
2.79	Panjang Jalan Menurut Kondisi (KM) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-158
2.80	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-159
2.81	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-160
2.82	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-161
2.83	Persentase Rumah Tangga Tinggal Bersanitasi Layak (Fasilitas Pengelolaan Air Limbah) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-162
2.84	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-163
2.85	Perkembangan Pembangunan Irigasi Teknis di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-165
2.86	Perkembangan Akses Air Minum Bersih di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-166
2.87	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-167
2.88	Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.....	II-169
2.89	Perkembangan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021	II-170
2.90	Perkembangan Rasio Bangunan ber IMB di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-171
2.91	Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-174
2.92	Perkembangan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-175

2.93	Luas Pemukiman Layak Huni di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-176
2.94	Persentase Pemukiman Kumuh di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-177
2.95	Perkembangan Persentase Permukiman yang Tertata di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-177
2.96	Perkembangan Lingkungan Sehat dan Dukungan PSU di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-178
2.97	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-182
2.98	Jenis dan Jumlah PSKS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021	II-184
2.99	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Tertangani Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-185
2.100	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-186
2.101	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-187
2.102	Perkembangan Realisasi Perlindungan dan Keselamatan Pekerja di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-189
2.103	Perkembangan Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-192
2.104	Perkembangan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-194
2.105	Perkembangan Realisasi Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Beras di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-196
2.106	Perkembangan Realisasi Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-198
2.107	Perkembangan Realisasi Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-200
2.108	Perkembangan Realisasi Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-202

2.109	Perkembangan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-203
2.110	Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Air Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-204
2.111	Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-206
2.112	Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-206
2.113	Perkembangan Realisasi Cakupan Area Pelayanan Persampahan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021	II-207
2.114	Perkembangan Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-208
2.115	Perkembangan Realisasi Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Sudah Ber KTP di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-209
2.116	Perkembangan Realisasi Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-210
2.117	Perkembangan Realisasi LSM Aktif di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-213
2.118	Perkembangan Lembaga Pedesaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-216
2.119	Perkembangan Jumlah Desa Menurut Status Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-217
2.120	Perkembangan Realisasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021	II-221
2.121	Perkembangan Realisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-223
2.122	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-228
2.123	Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-231
2.124	Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-232

2.125	Perkembangan Organisasi Pemuda di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-234
2.126	Perkembangan Olahraga di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-235
2.127	Perkembangan Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021	II-237
2.128	Perkembangan Perangkat Daerah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-238
2.129	Perkembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-239
2.130	Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-240
2.131	Perkembangan Kearsipan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-241
2.132	Produksi Perikanan Menurut Jenis Pengelolaan Kabupaten Kampar Tahun 2017–2021.....	II-242
2.133	Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan Kabupaten Kampar Tahun 2017–2021.....	II-242
2.134	Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-243
2.135	Perkembangan Konsumsi Ikan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-244
2.136	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-246
2.137	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-247
2.138	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-248
2.139	Perkembangan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-249
2.140	Jumlah PAD Sektor Wisata Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-249

2.141	Perkembangan Realisasi Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-251
2.142	Produktivitas Padi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-252
2.143	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-253
2.144	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-254
2.145	Populasi Ternak Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-256
2.146	Perkembangan Realisasi Cakupan Bina Kelompok Petani Di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-257
2.147	Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-258
2.148	Perkembangan Volume dan Nilai Perdagangan Lokal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-259
2.149	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-260
2.150	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-261
2.151	Perkembangan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-263
2.152	Perkembangan Indikator Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-265
2.153	Perkembangan Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-266
2.154	Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-267
2.155	Perkembangan Indikator Pengawasan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-268
2.156	Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-269
2.157	Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-270

2.158	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-271
2.159	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-273
2.160	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-274
2.161	Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-276
2.162	Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-278
2.163	Persentase Luas Wilayah Industri Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-279
2.164	Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-279
2.165	Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-280
2.166	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-281
2.167	Persentase Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-282
2.168	Angka Kriminalitas Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-283
2.169	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-284
2.170	Perkembangan Realisasi Rasio Lulusan S1, S2 dan S3 Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-286
2.171	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	II-288
3.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021....	III-4
3.2	Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Rp. Juta).....	III-8
3.3	Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021...	III-10

3.4	Neraca Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016-2020.....	III-16
3.5	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-18
3.6	Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	III-21
3.7	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Belanja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.....	III-22
3.8	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp).....	III-24
3.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp. Juta).....	III-26
3.10	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022-2026.....	III-29
3.11	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022-2026.....	III-31
3.12	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022-2026.....	III-33
5.1	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.....	V-15
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.....	VI-8
6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.....	VI-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-7
2.1 Peta Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-5
2.2 Peta Geologi Kabupaten Kampar.....	II-9
2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Kampar.....	II-13
2.4 Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Bulanan dan Tahunan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-15
2.5 Rata-Rata Curah dan Hari Hujan Bulanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-18
2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kampar.....	II-20
2.7 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kampar.....	II-24
2.8 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar	II-25
2.9 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kampar.....	II-27
2.10 Peta Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Kampar.....	II-28
2.11 Peta Rawan Bencana Evidemi di Kabupaten Kampar.....	II-29
2.12 Peta Rawan Bencana Konflik Sosial di Kabupaten Kampar.....	II-30
2.13 Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-36
2.14 Perkebunan Karet Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-37
2.15 Perkebunan Kakao Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-38
2.16 Potensi Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-39
2.17 Potensi Peternakan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-40
2.18 Potensi Pertanian Pangan Padi Kabupaten Kampar Tahun 2021..	II-42
2.19 Potensi Hutan Tanaman Industri Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-43

2.20	Piramida Penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021.....	II-54
2.21	Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-57
2.22	Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Tahun 2011-2021.....	II-64
2.23	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-68
2.24	Perkembangan Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021.....	II-69
2.25	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-73
2.26	Posisi Relatif PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-75
2.27	Posisi Relatif Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-77
2.28	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kampar terhadap Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-81
2.29	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P0 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-82
2.30	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P1 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-84
2.31	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P1 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-85
2.32	Posisi Relatif Garis Kemiskinan (P3) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P3 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.....	II-86
2.33	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.....	II-89
2.34	Perkembangan IPM Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021.....	II-91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berhubung karena masa jabatan Bupati 2017-2022 berakhir dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, maka baru pada tahun 2025 kepala daerah terpilih akan dilantik, sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2023-2026 Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Provinsi Riau 2019-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Kampar selain memperhatikan beberapa dokumen perencanaan daerah lainnya juga disusun untuk menjawab permasalahan daerah dan isu-isu strategis yang muncul. Dokumen RPD merupakan instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efektif, efisien dan berkualitas dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Kampar tahun 2023-2026.

Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Kampar dilakukan dengan pendekatan teknokratis yang melibatkan para pakar/narasumber berkompeten di bidangnya. Sedangkan penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dilakukan melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan, serta konsultasi dengan DPRD Kabupaten Kampar dan Gubernur Provinsi Riau.

RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 merupakan dokumen transisi yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah selama periode tersebut yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta indikator kinerja yang mendukung perwujudan Visi RPJPD Kabupaten Kampar yaitu menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau

dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

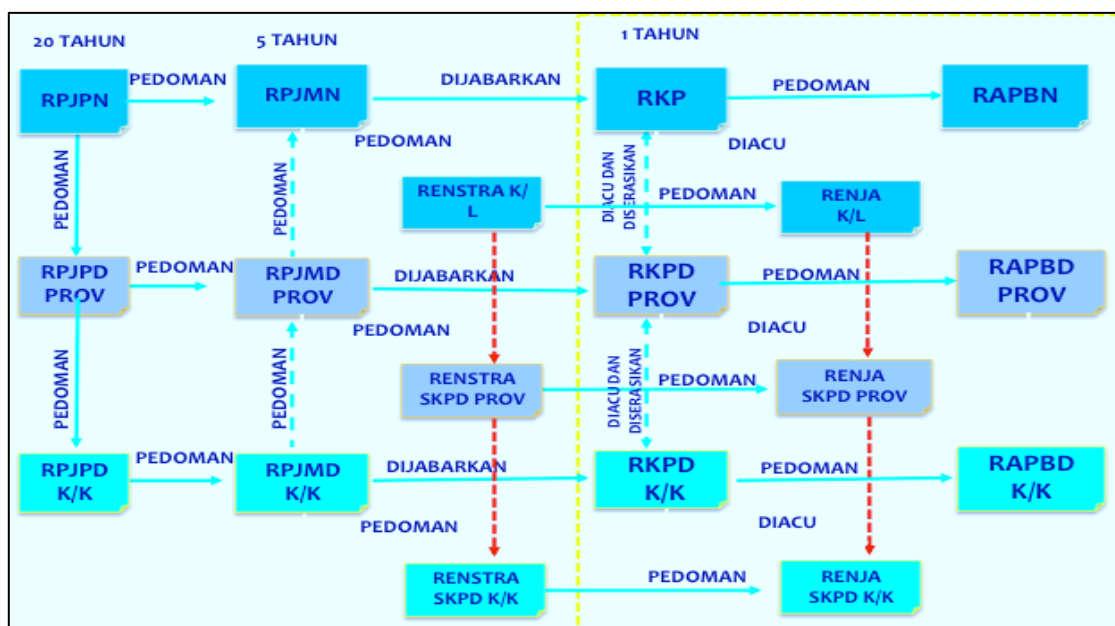
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor: 9);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor: 3);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terencana, pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD). Keenam dokumen tersebut memiliki tiga perbedaan rentang waktu yaitu dokumen perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk jangka waktu selama 20 tahun (RPJPD dan RTRW), perencanaan jangka menengah 5 tahun (RPJMD dan Renstra-OPD), serta jangka pendek yang dibuat tahunan (RKPD dan Renja-OPD).

RPD Kabupaten Kampar merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau pada RPJPD Kabupaten Kampar. RPD Kabupaten Kampar menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yakni RKPD sekaligus menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Renstra OPD. Renstra OPD menjadi acuan bagi penyusunan Renja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. RKPD dan RKA-OPD inilah yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.3.1 Penelaahan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Ma'ruf Amin, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

1.3.1.1 Visi dan Misi Pembangunan

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

1.3.1.2 Tujuh Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Tujuh agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain arahan yang bersifat umum, RPJMN memuat beberapa arahan teknis tertentu yang spesifik untuk wilayah kabupaten/kota seperti halnya untuk Kabupaten Kampar. Arahan untuk Kabupaten Kampar terdapat pada bagian Arahan Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional, yaitu pada sektor Sumber Daya Air yang meliputi:

- 1) Pembangunan *Chek* Dam Alur Sungai Silam Dusun Pulau Empat dan Dusun Sungai Lintang Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar.
- 2) Pembangunan *Intake*, Pengadaan dan Jaringan Pipa (Sungai Kampar) Kota Pekanbaru - Kab. Kampar Pekanbaru-Kampar
- 3) Pembangunan *Intake*, dan Jaringan Pipa Transmisi PAB Pekanbaru Selatan Pekanbaru-Kampar

Selain itu RPJMN membagi wilayah Indonesia ke dalam tujuh pulau besar yang meliputi, Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Wilayah Provinsi Riau sendiri masuk ke dalam wilayah pembangunan Sumatera yang dengan kata lain Provinsi Riau harus dapat menangkap peluang dan sinergitas pembangunan dalam memperhatikan arahan pembangunan RPJMN untuk Pulau Sumatera yang memiliki tema pengembangan wilayah sebagai berikut:

- 1) Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomasa
- 2) Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
- 3) Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin

RPJMN lebih lanjut menargetkan beberapa Sasaran makro untuk Provinsi Riau yang dapat menjadi catatan perbandingan regional dalam pencapaian target untuk pembangunan Kabupaten Kampar yang antara lain ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Sasaran Makro Provinsi Riau Menurut Arah RPJMN 2020-2024

No	Target Makro	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,6	4,9	5,1	5,8	6,8
2	Tingkat kemiskinan	%	7,0	6,4	5,8	5,3	4,7
3	Tingkat pengangguran	%	3,8	3,7	3,5	3,3	3,1
4	Indek pembangunan Manusia	Indek	70,00	70,05	70,90	71,00	71,05

1.3.2 Penelaahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024

Penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dengan cara menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Kabupaten Kampar merupakan satu diantara 12 kota/kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Riau. Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan, maka perencanaan pembangunan setiap daerah diharapkan dapat sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah lain dan mengacu juga pada perencanaan pembangunan provinsi yang menaunginya. Untuk mengukur sejauh mana perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar mengacu pada perencanaan pembangunan Provinsi Riau, maka dapat dilihat dari konsistensi RPD Kabupaten Kampar dengan RPJMD Provinsi Riau yang selanjutnya dijelaskan pada uraian berikut.

1.3.2.1 Isu Strategis

Salah satu bagian dokumen RPJMD Provinsi Riau memuat isu strategis yang dijadikan salah satu dasar untuk menentukan program-program yang dijalankan selama lima tahun. Terdapat 5 (lima) isu strategis yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan isu strategis perubahan RPD Kabupaten Kampar 2023-2026. Isu-isu strategis RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 tersebut antara lain meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dilakukan dengan:

- a) Peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang berbasis digital;
- b) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, upaya peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan dan penyembuhan;
- c) Pelayanan warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- d) Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui peningkatan produktivitas lapangan usaha masyarakat.

Peningkatan sumberdaya manusia yang beriman, dilakukan melalui;

- a) Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berprestasi dalam bidang keagamaan;
- b) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dilakukan melalui:

- a) Peningkatan konektifitas untuk penguatan daya saing melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi;
- b) Peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas air baku serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan;
- c) Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat;

- d) Peningkatan rasio elektrifikasi dan kapasitas elektrifikasi melalui peningkatan akses dan infrastruktur energi ke seluruh wilayah dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- e) Peningkatan infrastruktur sumber daya air; dan
- f) Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan pemulihan kawasan kritis dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan.

3. Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Penanggulangan Kemiskinan

Peningkatan produktifitas sektor unggulan dilakukan melalui;

- a) Peningkatan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal;
- b) Peningkatan kemandirian dan daya saing industri dengan peningkatan produksi industri dan nilai tambah dan peningkatan keunggulan kompetitif untuk pasar regional dan global;
- c) Peningkatan daya tarik investasi;
- d) Peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan pangan menuju kemandirian pangan;
- e) Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif berbasis digital.

Penanggulangan kemiskinan melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk pengurangan jumlah penduduk miskin;
- b) Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

4. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dan Pengembangan Pariwisata

Peningkatan perlindungan dan pengembangan pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dilakukan melalui:

- a) Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;

- b) Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- c) Peningkatan penyebaran, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- d) Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi;
- e) Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau;
- f) Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.

Pengembangan pariwisata dilakukan melalui:

- a) Pemanfaatan potensi pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan
- b) Pengelolaan pariwisata.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi

Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dilakukan melalui:

- a) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
- b) Peningkatan profesionalisme ASN dan peningkatan kapasitas kelembagaan sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
- c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

1.3.2.2 Visi Provinsi Riau 2019-2024

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau merupakan penjabaran visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah selama tahun 2019-2024. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Provinsi Riau sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur

Riau yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Provinsi Riau. Perumusan visi pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau 2005- 2025, isu strategis pembangunan Provinsi Riau dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi Pembangunan daerah dalam jangka menengah Provinsi Riau adalah:

"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAUBERSATU)".

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019-2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Berdaya Saing:** Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumberdaya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
- 2) **Sejahtera:** Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
- 3) **Bermartabat:** Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya Melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
- 4) **Unggul:** Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan

1.3.2.3 Misi Provinsi Riau 2019-2024

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Provinsi Riau 2019-2024 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 meliputi:

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender. Selain itu, untuk mewujudkan sumberdaya yang beriman melalui peningkatan kerukunan umat beragama.
- 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui peningkatan pelayanan transportasi, cakupan pelayanan air minum dan sanitasi rumah tangga, cakupan layanan listrik bagi rumah tangga, infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumberdaya air. Juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau) melalui peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca.
- 3) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdayasaing melalui peningkatan kemandirian ekonomi dan penurunan kesenjangan pendapatan, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
- 4) Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pemajuan Budaya Melayu melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Melayu Riau. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata melalui peningkatan kunjungan dan kenyamanan wisatawan mancanegara.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1.3.2.4 Target RPJMD Provinsi Riau Untuk Kabupaten Kampar

Dalam merealisasikan target-target Provinsi Riau pada jangka waktu pembangunan menengah 2022-2024, terdapat target-target yang diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap wilayah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Kampar. Konsistensi target tersebut diperbandingkan dengan indikator makro Kabupaten Kampar, yang disesuaikan dengan pola data pada tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan target-target tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Target RPJMD Provinsi Riau untuk Kabupaten Kampar 2022-2024

No	Target Makro	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan ekonomi	3,09	3,19	3,20	3,26	3,31
2	Tingkat kemiskinan	7,65	7,52	7,40	7,27	7,15
3	Tingkat pengangguran	5,06	4,99	4,92	4,84	4,77
4	Indek Pembangunan Manusia	72,85	73,00	73,15	73,29	73,44

Jika dibandingkan terhadap empat komponen pembangunan, Proyeksi Kabupaten Kampar masih berada di bawah target RPJMD Provinsi Riau. Perhatikan tabel di atas, terdapat sedikit perbedaan antara target-target provinsi dengan proyeksi indikator makro Kabupaten Kampar.

1.3.3 Penelaahan RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 diperlukan adanya konsistensi antara dengan RPJPD Kabupaten Kampar. Dalam pencapaian pembangunan jangka panjang, RPJPD Kabupaten Kampar memuat visi dan misi sebagai berikut:

1.3.3.1 Visi RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 telah dirumuskan Visi Pembangunan Daerah yang harus dicapai tahun 2025. Visi tersebut adalah:

"Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025".

1.3.3.2 Misi RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025

- 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
- 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan.
- 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Bertitik tolak dari visi Kabupaten Kampar dalam mewujudkan negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025, maka untuk mencapai visi tersebut pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan menjadi berbeda-beda. Tahapan tersebut menjadi berkesinambungan dari tahap ke tahap berikutnya untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang, sehingga atas dasar tersebut tahapan dan skala prioritas yang terkait dengan RPD Kampar tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1.3.3.3 RPD Kabupaten Kampar Periode ke 5 dalam RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap keempat RPJMD 2017-2022, maka RPD ke-5 (2023-2036) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan penekanan pada:

- 1) Peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 2) Peningkatan kemampuan aparatur dalam manajemen asset daerah dan pelayanan masyarakat
- 3) Peningkatan kualitas SDM (keimanan dan ketaqwaan, taat hukum, sehat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwwasan kedepan)
- 4) Peningkatan daya saing daerah dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif menjadi kompetitif yang berbasis sumberdaya local (sumberdaya alam dan sumberdaya manusia) untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5) Peningkatan kualitas pembangunan yang berlandaskan pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Daya saing perekonomian Kabupaten Kampar yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya agroindustri dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhi ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktifitas, penguasaan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

1.3.3.4 RPD Kabupaten Kampar dengan RTRW Kabupaten Kampar Struktur Ruang Kota

Penyusunan RPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan

pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

1) Struktur Ruang

Struktur ruang umumnya terbentuk dari tiga faktor utama yaitu pusat-pusat permukiman, aksesibilitas dan orientasi pasar (pergerakan barang dan manusia). Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Kampar yang luas dan beragam, maka struktur pusat pembangunan wilayah yang sesuai untuk Kabupaten Kampar adalah Pusat Jamak (Pusat lebih dari satu). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dikembangkan untuk melayani kegiatan dengan skala Regional (Kabupaten Kampar dengan Sekitarnya) dan Lokal (Kabupaten Kampar) serta Lingkungan (Kecamatan). Sedangkan lokasi dari Pusat Kegiatan Wilayah ini adalah Pusat Kabupaten Kampar yaitu Bangkinang.

Wilayah Kampar merupakan salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Riau, yaitu 11.289,28 Km². Pada sisi lain juga terjadi ketidakmerataan pertumbuhan wilayah antara kawasan utara, tengah dan selatan. Bagian atau koridor tengah merupakan jalur lintas nasional dengan frekuensi lalu lintas tertinggi di Sumatera. Karena merupakan jalur tradisional yang sudah berkembang sejak lama, maka di sepanjang jalan bertumbuh kawasan-kawasan perkotaan sehingga pertumbuhan koridor ini sangat maju dibanding kawasan bagian utara maupun kawasan selatan. Dengan pertimbangan agar terjadi pertumbuhan yang berimbang dan

dalam rangka pemerataan pembangunan, maka perlu didorong pusat-pusat pertumbuhan pada kedua kawasan tersebut. Untuk itu dalam rangka penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Kampar, maka diusulkan Patapahan dan Lipat Kain sebagai pusat pelayanan lokal. Hal ini sejalan dengan rencana peningkatan jalan utara selatan, yaitu Lipat Kain-Bangkinang- Patapahan yang tertuang dalam draft RTRW Provinsi Riau.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa PKL merupakan pusat pelayanan bagi beberapa kecamatan. Pada sisi lain kawasan bagian utara merupakan sentra perkebunan sawit skala besar dan potensi minyak bumi, sedangkan di Lipat Kain terdapat perkebunan karet, pertanian pangan, hutan produksi dan puluhan objek wisata. Potensi ini tentunya perlu dikelola melalui simpul-simpul kegiatan ekonomi sehingga dapat bertumbuh lebih produktif dan efisien.

Pusat pelayanan kawasan (PPK) ini merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, sedangkan lokasi dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ini adalah sebagai berikut: Kotagaro, pusat Kecamatan Tapung Hilir; Sungai Pagar, pusat Kecamatan Kampar Kiri Hilir; Batu Bersurat, pusat Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan gerbang masuk Provinsi Riau dari arah Sumatera Barat.

Kotagaro, Pantai Raja dan Batu yang dijadikan sebagai pusat pelayanan kawasan dalam sistem tata ruang Kampar diharapkan dapat menjadi katalisator dan mediator dalam pemerataan pertumbuhan wilayah di wilayah Kampar. Untuk mewujudkan sistem perkotaan (*System of Cities*) yang serasi, selaras dan berimbang seperti yang tertuang dalam UUPR maka selain PKW, PKLp dan PPK di kecamatan tersebut akan diarahkan menjadi pusat pelayanan lokal. PPL tersebut terdiri dari:

- 1) Gema, Pusat Kecamatan Kampar Kiri Hulu
- 2) Gunung Sahilan, Pusat Kecamatan Gunung Sahilan
- 3) Pantai Raja, Pusat Kecamatan Perhentian Raja
- 4) Simalinyang, Pusat Kecamatan Kampar Kiri Tengah

- 5) Tambang, Pusat Kecamatan Tambang
- 6) Kuok, Pusat Kecamatan Bangkinang Barat
- 7) Salo, Pusat Kecamatan Salo
- 8) Sinama Nenek, Pusat Kecamatan Tapung Hulu
- 9) Muara Uwai, Pusat Kecamatan Bangkinang Seberang
- 10) Air Tiris, Pusat Kecamatan Kampar
- 11) Kampar, Pusat Kecamatan Kampar Timur
- 12) Taratak, Pusat Kecamatan Rumbio Jaya
- 13) Sawah, Pusat Kecamatan Kampar Utara

Keseluruhan rencana struktur ruang serta indikasi program utama Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II 25-29	Tahap III 30-34	Tahap IV 35-39
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			
A	PERWUJUDAN RENCANA SISTEM PUSAT-PUSAT PERKOTAAN												
A1	Perwujudan PKW Bangkinang												
	Penyempurnaan RDTR kawasan perkotaan	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Perencanaan teknis kawasan prioritas perkotaan	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pembangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Peningkatan kawasan perdagangan, pasar Bangkinang	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil									
	Peningkatan terminal Bangkinang tipe A	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Perhubungan									
	Pembangunan jalur hijau sempadan sungai	Kota Bangkinang	Sepanjang Sungai Kampar di Kota Bangkinang	Dinas Lingkungan Hidup									
	Revitalisasi kawasan Bukit Candika (bumi perkemahan)	Kota Bangkinang	20 Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air minum	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pengembangan IPAL Komunal	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Pembangunan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST Bangkinang)	Pasir Sialang	1 keg	Dinas Lingkungan Hidup									
	Penanganan kawasan kumuh	Kota Bangkinang	1 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pembangunan sistem drainase kota	Kota Bangkinang	1 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Penyusunan masterplan dan	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	pembangunan sistem drainase kota			dan Penataan Ruang									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan RTH	Kota Bangkinang	1 keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
A2	Perwujudan PKL Patapahan												
	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan	Kota Petapahan	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Kota Petapahan	1 pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil									
	Pembangunan rumah sakit rawat inap	Kota Petapahan	1 rumah sakit	Dinas Kesehatan									
	Peningkatan pelayanan mesjid raya	Kota Petapahan	1 masjid	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda									
	Pembangunan kawasan industri agro	Kota Petapahan	1 kawasan	Dinas Perindustrian dan tenaga kerja									
	Pembangunan IPAL komunal dan IPAL industri	Kota Petapahan	1 keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,									
	Pembangunan terminal tipe C	Kota Petapahan	1 terminal	Dinas Perhubungan									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase kota	Kota Petapahan	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan RTH	Kota Petapahan	1 keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air minum	Kota Petapahan	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pembangunan TPA terpadu regional	Kota Petapahan	50 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup									
	Pembangunan dan peningkatan	Kota Petapahan	1 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	jalan produksi			dan Penataan Ruang									
A3	Perwujudan PKL Lipat Kain												
	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan	Kota Lipat Kain	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Peningkatan pelayanan rumah sakit rawat inap	Kota Lipat Kain	1 rumah sakit	Dinas Kesehatan Kab.Kampar									
	Peningkatan Mesjid Raya Lipat Kain	Kota Lipat Kain	1 masjid	Dinas Sosial									
	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa	Kota Lipat Kain	1 pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil									
	Pembangunan area istirahat transit (rest area)	Kota Lipat Kain	1 keg	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
	Pengembangan monumen katulistiwa	Kota Lipat Kain	5 Ha	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air minum	Kota Lipat Kain	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pembangunan terminal tipe C	Kota Lipat Kain	1 terminal	Dinas Perhubungan									
	Peningkatan sekolah kejuruan	Kota Lipat Kain	1 Sekolah kejuruan	Dinas Pendidikan dan olahraga									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase kota	Kota Lipat Kain	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan RTH	Kota Lipat Kain	1 keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Pengembangan sistem pelayanan air bersih	Kota Lipat Kain	1 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
A4	Perwujudan PPK Batu Bersurat												
	Pembangunan pusat pelayanan pariwisata	Kota Batubersurat	1 kecamatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
	Pembangunan kawasan agropolis (pusat agropolitan)	Kota Batubersurat	1 kawasan	Dinas Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air	Kota Batubersurat	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	minum												
	Pembangunan prasarana dan sarana pariwisata tirta	Kota Batubersurat	1 keg	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
A5	Perwujudan PPK Kota Garo												
	Pembangunan terminal barang (<i>dry port</i>)	Kota Garo	1 keg	Dinas Pehubungan infokom									
	Pembangunan tempat istirahat (<i>rest area</i>) kendaraan berat	Kota Garo	1 lokasi	Dinas Pehubungan									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air minum	Kota Garo	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pembangunan dan peningkatan jalan produksi	Kota Garo	1 kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
A6	Perwujudan PPK Sungai Pagar												
	Pembangunan pusat perdagangan skala kawasan	Kota Sungai Pagar	1 pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil									
	Peningkatan pelayanan kantor kecamatan	Kota Sungai Pagar	1 kawasan perkantoran	Bagian Tata Pemerintahan dan Ottda Setda									
	Pembangunan terminal tipe C	Kota Sungai Pagar	1 terminal	Dinas Perhubungan									
A7	Perwujudan PPL Gunung Sahilan												
	Revitalisasi kawasan Istana Gunung Sahilan	Kota Gunung Sahilan	1 kawasan istana	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air minum	Kota Gunung Sahilan	1 keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pembangunan prasarana dan sarana penunjang wisata budaya	Kota Gunung Sahilan	1 keg	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
A8	Perwujudan PPL Tambang												
	Penyusunan RTDTR kawasan perkotaan	Sungai Pinang, Rimbo Panjang, Tarai Bangun, Tambang	4 Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air minum	Sungai Pinang, Rimbo Panjang, Tarai Bangun, Tambang	4 kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Penyusunan program	Sungai Pinang, Rimbo		Dinas Perumahan									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	pengembangan permukiman (RP4D)	Panjang, Tarai Bangun, Tambang	4 kawasan	Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Kawasan Industri	Kecamatan Tambang, Tapung, dan Siak Hulu	1 Kawasan	Dinas Perindustrian dan tenaga kerja									
	Komplek Sekolah Polisi Negara	Kualu Nenas	1 kawasan	Kepolisian Daerah Riau									
	Peningkatan pusat perdagangan dan jasa kawasan	Tambang	1 pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil									
A9	Perwujudan PPL Kuok												
	Peningkatan prasarana dan sarana desa wisata Pulau Belimbing	Desa Pulau Belimbing	1 kawasan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
A10	Perwujudan PPL Sinama Nenek												
	Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pariwisata air panas	Kepanasa	1 lokasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
B	PERWUJUDAN RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH												
a	Perwujudan sistem jaringan jalan												
	Inventarisasi dan penetapan fungsi klas dan status jalan	kabupaten	seluruh ruas jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pengembangan data base jalan dan Jembatan	kabupaten	seluruh ruas jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang	kabupaten	seluruh ruas jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
b	Sistem jaringan jalan bebas hambatan												
	Penyusunan rencana trase jalan bebas hambatan	kabupaten	se kabupaten	Kementerian PUPR									
	Penyusunan database kepemilikan tanah	kabupaten	se kabupaten	Kementerian PUPR, BPN dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Penyusunan DED	kabupaten	se kabupaten	Kementerian PUPR									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pembangunan jalan bebas hambatan	kabupaten	se kabupaten	Kementerian PUPR, swasta									
c	Perwujudan Sistem jaringan arteri primer												
	Pembangunan jalan ganda Pekanbaru-Rantau Berangin	Ruas Jalan Subrantas (Pekanbaru) - Batas Kabupaten Kampar, Ruas Jalan Batas Kabupaten Kampar – Batas Kota Bangkinang, Ruas Jalan Ruas Jalan. Moh. Yamin (Bangkinang), dan Ruas Jalan Batas Kota Bangkinang - Rantau Berangin;	61 Km	Kementerian PUPR									
	Penataan bangunan sisi jalan arteri primer	Ruas Jalan Subrantas (Pekanbaru) - Batas Kabupaten Kampar, Ruas Jalan Batas Kabupaten Kampar – Batas Kota Bangkinang, Ruas Jalan Ruas Jalan. Moh. Yamin (Bangkinang), Ruas Jalan Batas Kota Bangkinang - Rantau Berangin, Ruas Jalan Rantau Berangin - Batas. Prov. Sumbar, dan Ruas Jalan Sikijang Mati - Simpang Lago.	112 Km	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PUPR Kabupaten Kampar									
d	Perwujudan Sistem jaringan Kolektor primer 1 (JKP1)												
	Peningkatan dan pembangunan, serta pemeliharaan jalan Kolektor Primer (JKP1)	Ruas Jalan Marpoyan-Batas Kuansing; dan Ruas Jalan Simpang Panam - Simpang Kubang	80 km	Kementerian PUPR									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
		(Pekanbaru).											
f	Perwujudan Sistem jaringan Kolektor primer 2(JKP2)												
	Peningkatan dan pembangunan, serta pemeliharaan jalan Kolektor Primer (JKP2)	Ruas Jalan Riau Ujung-Pantai Cermin, Ruas Simpang Air Hitam-Pantai Cermin-Petapahan, dan Ruas Jalan Rantau Berangin – Tandun.	67 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau									
g	Perwujudan Sistem jaringan Kolektor primer 3(JKP3)												
	Peningkatan dan pembangunan, serta pemeliharaan jalan Kolektor Primer 3 (JKP3)	Ruas Jalan Rumbio - Kebun Durian, Ruas Jalan Bangkinang – Petapahan, Ruas Jalan Kandis – Tapung, Ruas Jalan Lbk.Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar, Ruas Jalan Lingkar Kota Bangkinang, Ruas Jalan Lipat Kain - Lbk Agung, Ruas Jalan Sontang-Koto Lama-Simpang Suram (Suram - Sinama Nenek -	320 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau									
		Batas Rohul), Ruas Jalan Tapung – Tandun, Ruas Jalan Sei. Silam - Lubuk Agung-Tanjung Alai, Ruas jalan Simpang Batubersurat-Muara takus, dan Ruas jalan Muara Takus-Dusun Batas.											
h	Perwujudan Sistem jaringan Kolektor primer 4(JKP4)												
	Peningkatan dan pemeliharaan jalan Kolektor Primer 4 (JKP4)	Ruas Jalan Km. 2 Kuok - Kampung Godang, Ruas Jalan Kp Godang	132 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
		- Pulau Lawas, Ruas Jalan Lubuk Agung-Balung, Ruas Jalan Pulau Lawas - Pematang Kulim, dan Ruas Jalan Bangkinang - Lipat Kain											
	Pembangunan pembukaan jalan Kolektor Primer 4 (JKP4)	Ruas Jalan Simpang Sungai Jernih- Simpang Poro.	27 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar									
i	Perwujudan Sistem Jalan Lokal Primer (JKP)												
	Peningkatan dan pembangunan, serta pemeliharaan Jalan Lokal Primer (JKP)	Ruas Jalan Buluh Nipis - Rakit Penyebrangan, Ruas Jalan Bonca Kelubi-Kebun Akasia, Ruas Jalan Danau Bingkuang- Empang Poteh, Ruas Jalan Danau Lancang - Tebing Lestari, Ruas Jalan Deli Makmur - Air Terbit, Ruas Jalan Desa Baru - Pangkalan Baru, Ruas Jalan Gunung Sahilan-Gunung Sari, Ruas Jalan Gunung Sari - Batas Kuansing, Ruas Jalan Kebun Durian-Gunung Sahilan, Ruas Jalan Kijang Makmur - Tebing Lestari, Ruas Jalan Kinantan- Muara Mahat Baru, Ruas Jalan Km. 18 Sei.Putih - Air Terbit, Ruas Jalan Kota Bangun - Kijang Makmur, Ruas Jalan	430 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
		Lbk. Sakat - Teluk Petai, Ruas Jalan Lipat Kain-Kuntu, Ruas											
		Jalan Muara Mahat Baru-Sibuak II, Ruas Jalan Pangkalan Baru - Buluh Nipis, Ruas Jalan Pasar Minggu - Bonca Kelubi, Ruas Jalan Pasar Plamboyan (Sumber Makmur) - Kijang Rejo, Ruas Jalan Penghidupan- Bina Baru, Ruas Jalan Sei. Bungo - Gading Permai, Ruas Jalan Sei. Pagar – Mentulik, Ruas Jalan Sei. Pinang - Simpang Sei Galuh, Ruas Jalan Sei. Putih- Sibuak II, Ruas Jalan Simpang Membot - Kota Bangun, Ruas Jalan Simpang Sei Galuh - Deli Makmur, Ruas Jalan Sinama Nenek - Sp. Parabola, Ruas Jalan Sp. Petai - Maja Pahit (Sari Galuh), Ruas Jalan Sp. Sei.											
j	Perwujudan Sistem Jalan Lingkungan Primer (JLingP)												
	Peningkatan dan pembangunan, serta pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer (JLingP)	Ruas Jalan Kabupaten selain Jalan kolektor Primer 4 dan Jalan Lokal Primer	2.200 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
k	Perwujudan Sistem												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Jembatan												
	Pembangunan jembatan	Pembangunan Jembatan Tj. Berulak, Pembangunan Jembatan Pulau Belimbing, Pembangunan Jembatan Pulau Permai – Kemang, Pembangunan Jembatan Teluk Kenidai, Pembangunan Jembatan Batu Belah, Pembangunan Jembatan Buluh Cina, Pembangunan Jembatan Rantau Kasih, Pembangunan Jembatan Kepau Jaya, Pembangunan Jembatan Subarak,	20 jembatan	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PUPR Kabupaten Kampar									
		Pembangunan Jembatan Terantang, Pembangunan Jembatan Pantai Cermin Koto Aman Tapung, Pembangunan Jembatan Pantai Cermin - Koto Batak, Pembangunan Jembatan Tj. Beringin, Pembangunan Jembatan Gajah Bertalud, Pembangunan Jembatan Rumbio, Pembangunan Jembatan Pulau /Langgini; dan Pembangunan jembatan lainnya.											

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
I	Perwujudan terminal												
	Pembanguna sarana terminal Bangkinang sesuai kriteria terminal tipe A	Bangkinang Kota	1 terminal	Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan terminal tipe B di Patapahan	Patapahan	1 terminal	Dinas Perhubungan									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan terminal tipe C di Lipat Kain	Lipat Kain	1 terminal	Dinas Perhubungan									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan terminal tipe C di Sungai Pagar	Sungai Pagar	1 terminal	Dinas Perhubungan									
B2	Perwujudan sistem jaringan energi												
	Revitalisasi fungsi dan pemeliharaan instalasi PLTA Koto Panjang	Koto Panjang	1 unit	Kementerian ESDM dan PT PLN									
	Pembangunan PLTA Cascade pada aliran Sungai Kampar	Koto Panjang	1 unit	Kementerian ESDM dan PT PLN									
	Pembangunan PLTA Subayang	Kampar Kiri Hulu	1 unit	Kementerian ESDM dan PT PLN									
	Pemeliharaan dan Pembangunan PLTMH	Desa-desa dalam kawasan Rimbang Baling	5 unit	Dinas ESDM ProvRiau									
B3	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi												
	Penataan dan pembangunan menara telekomunikasi (BTS)	Kabupaten	seluruh kabupaten	Proveder									
	Pengembangan jaringan komunikasi untuk Kampar Kiri Hulu	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	12 titik	Proveder									
	Pengembangan jaringan telepon kabel ke kecamatan Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir	kecamatan Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir	LS	Proveder									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
B4	Perwujudan sistem jaringan sumber daya air												
	Normalisasi sungai yang mengalami abrasi dan sedimentasi (pendangkalan)	Sepanjang Sungai Besar	LS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan BWS III									
	Pemetaan potensi sungai sebagai sumber pembangkit tenaga listrik mini mikro hidro	Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu	LS	Kementerian dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Riau									
	Pembangunan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh jaringan irigasi	LS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pengembangan badan sungai untuk budidaya perikanan air tawar (arus deras) yang ramah lingkungan	Alur sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, Tapung	LS	Dinas Perikanan									
B5	Perwujudan sistem jaringan prasarana permukiman												
	Pembangunan 2 TPA Lokal untuk PKW Bangkinag, dan Ppk Lipat Kain	Lipat Kain	2 unit	Dinas Lingkungan Hidup									
	Pembangunan 1 unit TPA Regional di Kecamatan Tapung untuk pelayanan lokal dan Kota Pekanbaru	Kecamatan Tapung	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase kawasan permukiman perkotaan	Seluruh perkotaan (PKW, PKL, PPK dan PPL)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan permukiman perkotaan	seluruh perkotaan (PKW, PKL, PPK dan PPL)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Pembangunan IPAL rumah tangga di Bangkinang, Patapahan, Lipat Kain	Lipat Kain	5 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan									
				Kawasan Permukiman									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pemeliharaan dan Pembangunan instalasi dan jaringan pembagi air minum di PKW Bangkinang dan seluruh PKLp, PPK dan PPL.	PKW Bangkinang dan seluruh PKLp, PPK dan PPL.	LS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Pembangunan instalasi air minum untuk Pekanbaru Selatan di Kecamatan Tambang dan Siak Hulu	Kecamatan Tambang dan Siak Hulu	LS	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									

2) Pola Ruang Kota

Arahan rencana pola Kabupaten Kampar ruang terbagi menjadi dua, yaitu arahan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kabupaten Kampar memiliki luasan kawasan lindung yang cukup luas meliputi hutan, DAS dan daerah rawan bencana. Pada indikasi program perwujudan pola ruang Kabupaten Kampar 2019-2039, rencana kawasan lindung meliputi Perwujudan Kawasan hutan lindung, Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Perwujudan Kawasan perlindungan setempat, Perwujudan Tahura, Perwujudan Kawasan rawan bencana alam.

Untuk kawasan budidaya, Kabupaten Kampar memiliki potensi baik di bidang hutan produksi, pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri dan pertambangan yang perlu untuk dikembangkan yang didukung juga oleh kawasan permukiman. Hal tersebut menjadi bagian perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar 2019-2039 sesuai dengan masa waktu RPD Kampar tahun 2023-2026 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
A	PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN												
A1	Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya												
1	Perwujudan Kawasan hutan lindung												
	Identifikasi kawasan lindung	Hutan Lindung											
	Pemantapan tata batas hutan lindung	Hutan Lindung	53.570.39 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov Riau									
	Identifikasi kawasan deforestasi dan lahan kritis	Hutan Lindung	53.570.39 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov Riau									
	Rehabilitasi lahan kritis	Hutan Lindung	53.570.39 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov Riau									
	Reboisasi kawasan yang mengalami deforestasi	Hutan Lindung	53.570.39 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov Riau									
	Pembangunan jalur sabuk pengaman hutan lindung	Hutan Lindung	53.570.39 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov Riau									
	Pembangunan prasarana penunjang kegiatan ekowisata	Hutan Lindung	53.570.39 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov Riau, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kampar									
2	Perwujudan Kawasan Resapan Air												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pengembangan tanaman perkebunan yang berfungsi sebagai tanaman konservasi.	Kawasan resepan air PDAM Bangkinang	169 Ha	PDAM, DLH Kab									
	Penguasaan lahan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya.	Kawasan resepan air PDAM Bangkinang	169 Ha	PDAM, DLH Kab									
	Pengawasan dan pengendalian	Kawasan resepan air PDAM Bangkinang	169 Ha	PDAM, DLH Kab									
	Pengelolaan kawasan berbasis masyarakat adat	Hutan Adat Kenegerian Bangkinang, Hutan Adat Kenegerian Rumbio, dan Hutan Adat Kenegerian Kampa	1025 Ha	Masyarakat Adat, DLH Kab									
A3	Perwujudan Kawasan perlindungan setempat												
	Penyusunan masterplan RTH sempadan sungai dan danau	Sepanjang Sungai besar dan Danau	21 Kecamatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, DLH Kabupaten									
	Identifikasi disfungsi dan fungsionalisasi jalur hijau sempadan	Sepanjang Sungai besar dan Danau	21 Kecamatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Pembangunan jalur hijau sempadan sungai dan danau	Sepanjang Sungai besar dan Danau	21 Kecamatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Pembangunan prasarana penunjang fungsi jalur hijau sempadan	Sepanjang Sungai besar dan Danau	21 Kecamatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Pengembangan dan pemeliharaan	Sepanjang Sungai besar dan Danau	21 Kecamatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
A4	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi												
1	Kawasan Cagar Alam Geologi	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	181 Ha										
	Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi												
	a. Pengusulan			Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup									
	b. Penyelidikan			Badan Geologi Kementerian ESDM									
	c. Penetapan			Menteri ESDM									
2	Pemanfaatan Cagar Alam Geologi	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	181 Ha	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Geologi Kementerian ESDM, Masyarakat, Perguruan Tinggi									
A5	Perwujudan Kawasan Konservasi												
1	Kawasan Suaka Alam (KSA)												
	Kemitraan konservasi dengan program sebagai berikut:												
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan	Sm Bukit Rimbang Bukit Baling, CA Bukit Bungkok	Desa sekitar dan dalam kawasan	Kementerian LHK, dan Dinas LHK									
	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	Sm Bukit Rimbang Bukit Baling, CA Bukit Bungkok	Desa sekitar dan dalam kawasan	Kementerian LHK, dan Dinas LHK									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pembangunan sarana Penunjang berupa jalur interpretasi	Penghubung Desa dalam kawasan Sm Bukit Rimbang Bukit Baling sekaligus sebagai jalur pemantauan dan pengawasan	Jalur semenisasi 36 Km, jembatan 70-unit terdiri dari jembatan gantung dan besi	Kementerian LHK, Dinas PUPR Kab, Desa									
	Pembangunan prasarana penunjang kegiatan ekowisata	Sm Bukit Rimbang Bukit Baling, CA Bukit Bungkok	21 Kecamatan	Kementerian LHK, Dinas Pariwisata, Masyarakat									
	Pengawasan dan pemeliharaan	Sm Bukit Rimbang Bukit Baling, CA Bukit Bungkok	21 Kecamatan	Kementerian LHK									
2	Kawasan Pelestarian Alam (KPA)												
	Identifikasi lahan kritis	Tahura Sultan Syarif Qasim dan Taman Wisata Alam Buluh Cina	Tahura 4.229.62 Ha, TWA 945.1Ha	Kementerian LHK, dan Dinas LHK Prov									
	Identifikasi tingkat kerusakan tanaman	Tahura Sultan Syarif Qasim dan Taman Wisata Alam Buluh Cina	Tahura 4.229.62 Ha, TWA 945.1Ha	Kementerian LHK, dan Dinas LHK Prov									
	Identifikasi tingkat kerusakan prasarana dan sarana penunjang	Tahura Sultan Syarif Qasim dan Taman Wisata Alam Buluh Cina	Tahura 4.229.62 Ha, TWA 945.1Ha	Kementerian LHK, dan Dinas LHK Prov									
	Rehabilitasi lahan dan tanaman	Tahura Sultan Syarif Qasim dan Taman Wisata Alam Buluh Cina	Tahura 4.229.62 Ha, TWA 945.1Ha	Kementerian LHK, dan Dinas LHK Prov									
	Reboisasi dan peningkatan kualitas tanaman	Tahura Sultan Syarif Qasim dan Taman Wisata Alam Buluh Cina	Tahura 4.229.62 Ha, TWA 945.1Ha	Kementerian LHK, dan Dinas LHK Prov									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Tahura Sultan Syarif Qasim dan Taman Wisata Alam Buluh Cina	Tahura 4.229.62 Ha, TWA 945.1Ha	Kementerian LHK, dan Dinas LHK Prov									
	Perbaikan dan peningkatan jalan akses masuk kawasan Tahura	Tahura Sultan Syarif Qasim dan Taman Wisata Alam Buluh Cina	Tahura 4.229.62 Ha, TWA 945.1Ha	Kementerian LHK, dan Dinas LHK Prov									
A6	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya												
	Pengembangan dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	Kabupaten	3 Kawasan, 7 situs	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
	penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal.	Kabupaten	4 Kawasan, 7 situs	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
A7	Perwujudan Kawasan rawan bencana alam												
1	Penanganan Kawasan Rawan Longsor												
	Identifikasi kawasan rawan longsor												
	Penurapan dan atau pemasangan jaring pengaman dinding	Kabupaten	21 Kecamatan	BPBD									
	Pembangunan saluran pengelolaan airlimpasan	Kabupaten	21 Kecamatan	BPBD									
	Penghijauan lereng/tebing	Kabupaten	21 Kecamatan	BPBD									
	Penetapan areal non permukiman dari kawasan longsor	Kabupaten	21 Kecamatan	BPBD									
	Relokasi bangunan pada Kawasan bahaya longsor	Kabupaten	21 Kecamatan	BPBD									
2	Mitigasi kawasan rawan kebakaran hutan												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pemetaan dan publikasi titik-titik kebakaran (<i>hot spot</i>)	Kabupaten	Lokasi rawan karlahut	BPBD									
	Pembangunan menara pemantauan kebakaran hutan	Kabupaten	lokasi rawan karlahut	BPBD									
	Penyediaan perlengkapan pemadam kebakaran hutan	Kabupaten	Kantor BPBD	BPBD									
	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum	Kabupaten	Lokasi rawan karlahut	BPBD									
3	Mitigasi bencana banjir												
	Melakukan kajian potensi dan kawasan banjir	Kabupaten											
	Penetapan kawasan rawan banjir permanen menjadi Kawasan lindung (<i>enclave</i>)	Kabupaten	Lokasi rawan bajir	BPBD									
	Penghijauan kawasan tangkapan air hujan (<i>catchment area</i>)	Kabupaten	lokasi rawan bajir	BPBD									
	Pembangunan tanggul penghambat laju air (cekdam)	Kabupaten	lokasi rawan bajir	BPBD									
	Pembangunan kolam tandon air sebagai pengendali daya rusak air dan meningkatkan areal penyerapan air hujan	Kabupaten	Lokasi rawan bajir	BPBD									
	Normalisasi sungai	Kabupaten	Lokasi rawan Bajir	BPBD									
	Pembangunan sumur resapan pada dasar saluran drainase (eco drainage) pada kawasan permukiman	Kabupaten	Lokasi rawan bajir	BPBD									
	Penyediaan pompa air	Kabupaten	lokasi rawan bajir	BPBD									
B	PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN BUDIDAYA												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
B1	Perwujudan Kawasan peruntukan hutan produksi												
	Pemantapan tata batas hutan produksi	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Identifikasi kawasan deforestasi dan lahan kritis	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Rehabilitasi lahan kritis	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Reboisasi kawasan yang mengalami deforestasi	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Pembangunan prasarana penunjang produksi	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Pengembangan hutan produksi dengan pola HTR	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Revitalisasi industri kehutanan	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254 Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Pembuatan bibit tanaman kehutanan	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Pembentukan dan pembinaan Kelompok usaha produktif (KUP)	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Budidaya lebah	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Budidaya Rotan	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254 Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan-hutan	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian peredaran hasil hutan	hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi dapat di Konversi	HPT 112.893 Ha, HP 170.1254Ha, dan HPK 133.956 Ha	Kementerian LHK dan Dinas LHK Prov									
B2	Perwujudan Kawasan hutan rakyat												
	Pemantapan tata batas hutan rakyat												
	Sertifikasi lahan hutan rakyat	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas LHK Prov dan BPN									
	Identifikasi kawasan deforestasi dan lahan kritis	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas LHK Prov									
	Rehabilitasi lahan kritis	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas LHK Prov									
	Reboisasi kawasan yang mengalami deforestasi	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas LHK Prov									
	Pembangunan prasarana penunjang produksi	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas LHK Prov									
	Pengembangan hutan produksi dengan pola HTR	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas LHK Prov									
B3	Perwujudan Kawasan peruntukan pertanian												
1	Pertanian pangan												
	Pengembangan dan peningkatan kawasan pertanian pangan												
	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten	5.050 Ha	Dinas Pertanian tanaman pangan dan									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
				hortikultura									
	Perbaikan dan peningkatan sistem irigasi	Kabupaten	5.050 Ha	Dinas PU Bina marga dan Pengairan									
	Pengembangan pertanian organik	Kabupaten	5.050 Ha	Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura									
2	Pertanian hortikultura												
	Pemetaan kawasan sesuai pengembangan pertanian hortikultura	Kabupaten	27.282 Ha	Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura									
	Pembangunan jalan usaha tani	Kabupaten	27.282 Ha	Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura									
	Pengembangan pertanian hortikultura organik	Kabupaten	27.282 Ha	Dinas Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura									
c	Perwujudan Kawasan Perkebunan												
	Peremajaan tanaman perkebunan rakyat	Kabupaten	Perkebunan rakyat	Dinas Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan									
	Peningkatan dan pembangunan jalan produksi	Kabupaten	Perkebunan rakyat	Dinas Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pengembangan industri pengolahan sawit dan karet	Kawasan Industri	3 lokasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, swasta									
	Pengembangan industri pengolahan limbah karet dan sawit	Kawasan Industri	4 lokasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, swasta									
d	Perwujudan kegiatan Peternakan												
	Pemetaan potensi dan perwilayahan komoditas unggulan peternakan	Kabupaten	Seluruh kecamatan yang memiliki Potensi	Dinas Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan									
	Penyediaan prasarana dan sarana penunjang peternakan	Kabupaten	Seluruh kecamatan yang memiliki Potensi	Dinas Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan									
	Pengembangan sistem peternakan terpadu dengan pertanian dan perkebunan	Kabupaten	Seluruh kecamatan yang memiliki Potensi	Dinas Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan									
B4	Perwujudan Kawasan peruntukan perikanan		Dinas Perikanan & Kelautan										
	Pengembangan areal budidaya perikanan air tawar	Danau dan Sungai, kolam di daerah sumber daya air seperti irigasi, oxbow, sungai, Air bawah tanah	21 Kecamatan	Dinas Perikanan									
	Penyediaan prasarana dan sarana budidaya	Danau dan Sungai, kolam di daerah sumber daya air seperti irigasi, oxbow, sungai, air bawah tanah	21 Kecamatan	Dinas Perikanan									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Penguatan sentra produksi perikanan patin jambal	Danau dan Sungai, kolam di daerah sumber daya air seperti irigasi, oxbow, sungai, air bawah tanah	21 Kecamatan	Dinas Perikanan									
	Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Danau dan Sungai, kolam di daerah sumber daya air seperti irigasi, oxbow, sungai, air bawah tanah	21 Kecamatan	Dinas Perikanan									
	Pengembangan jenis ikan bernilai ekonomi tinggi	Danau dan Sungai, kolam di daerah sumber daya air seperti irigasi, oxbow, sungai, air bawah tanah	21 Kecamatan	Dinas Perikanan									
	Pengembangan kegiatan pengolahan ikan kaleng	Kawasan Minapolitan	1 kawasan	Kementerian KKP, Dinas Perikanan									
	Pembangunan <i>integrated cold storage</i> (ICS) atau fasilitas pendinginan ikan terintegrasi	Koto Perambahan Kecamatan Kampa	50 Ha	Kementerian KKP, Dinas Perikanan									
	Pengembangan kawasan Minapolitan di Waduk Koto Panjang	Kawasan waduk PLTA Koto Panjang	1 kawasan	Kementerian KKP, Dinas Perikanan									
B5	Perwujudan Kawasan peruntukan pertambangan												
	Pemetaan dan penetapan wilayah pertambangan	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas ESDM Prov									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pelaksanaan kegiatan eksplorasi pada kawasan pertambangan yang sudah dipetakan (inventarisasi) pada WPR	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas ESDM Prov									
	Memfasilitasi kegiatan eksploitasi	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas ESDM Prov									
	Pengembangan pertambangan ramah lingkungan (<i>green mining</i>)	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas ESDM Prov									
	Pembangunan sabuk hijau pengaman waduk	Kabupaten	21 Kecamatan	Dinas ESDM Prov									
	Normalisasi waduk dari pendangkalan pada jalur pasokan air ke turbin PLTA	Kabupaten	Kawasan waduk PLTA Koto Panjang	Dinas ESDM Prov									
B6	Perwujudan Kawasan peruntukan industri		3 kecamatan	Bappeda Kab.Kampar									
	Melakukan kajian pengembangan kawasan industri untuk wilayah Kampar	kabupaten	3 kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
	Penyusunan masterplan kawasan industri	Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tapung	3 kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, swasta									
	Pengembangan Kawasan Industri	Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tapung	3 kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, swasta									
	Perwujudan Kawasan												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
B7	peruntukan pariwisata												
	Penetapan potensi wisata menjadi Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	Kabupaten	Wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan tersebar di 21 kecamatan	Dinas Pariwisata dan budaya									
	Penyusunan prioritas pembangunan dan peningkatan prasarana ODTW	Kabupaten	Wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan tersebar di 21 kecamatan	Dinas Pariwisata dan budaya									
	Peningkatan aksesibilitas ke ODTW	Kabupaten	Wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan tersebar di 21 kecamatan	Dinas Pariwisata dan budaya									
	Penguatan kelembagaan pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat	Kabupaten	Wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan tersebar di 21 kecamatan	Dinas Pariwisata dan budaya									
B8	Perwujudan Kawasan peruntukan permukiman												
	Master Plan Kawasan Permukiman Tradisional dan bersejarah/Pusaka Kuok	Kec. Kuok	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Master Plan Kawasan Permukiman Terisolir	Kec. Kampar Kiri Hulu	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan PSU Kawasan Bersejarah/Pusaka Kerajaan Kampar Koto Perambahan	Kec. Kampa	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan PSU Kawasan Bersejarah/Pusaka Kerajaan Gunung Sahilan	Kec. Gunung Sahilan	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Penataan PSU Kawasan Tradisional Bersejarah/Pusaka Kuok	Kec. Kuok	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan PSU Kawasan Penyangga Kota Bangkinang Wilayah Barat	Kec. Salo	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan PSU Kawasan Penyangga Kota Bangkinang Wilayah Utara	Kec. Bangkinang	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan PSU Kawasan cepat Tumbuh	Kec. Siak Hulu	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan PSU Kawasan cepat Tumbuh	Kec. Tambang	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan PSU Kawasan Terisolir	Kec. Kampar Kiri Hulu	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Penyasawan	Kec. Kampar	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Padang Mutung	Kec. Kampar	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Kualu	Kec. Tambang	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Tarai Bangun	Kec. Tambang	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Kubang Jaya	Kec. Siak Hulu	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Tanah Merah	Kec. Siak Hulu	1 Keg	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									

3) Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis Kabupaten Kampar terdiri dari kawasan strategis dari sisi kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan dan kepentingan sosial budaya. Dari sisi kepentingan ekonomi terbagi ke dalam dua kawasan yaitu Kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru yang meliputi sebagian Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang, Kecamatan Perhentian Raja, dan kecamatan Siak Hulu.

Kemudian Kawasan Perkotaan Bangkinang yang merupakan ibukota Kabupaten Kampar. Sama hal nya dari sisi kepentingan lingkungan juga terbagi dua yaitu Kawasan Konservasi pada perbatasan dengan Sumatera Barat dan Kawasan Waduk Koto Panjang. Sedangkan dari sisi kepentingan sosial budaya adalah kawasan Candi Muara Takus.

Tabel 1.5
Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Kampar 2019-2039

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
1	Perwujudan Kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru (Pekansikawan)												
	Penyusunan rencana rinci (RDTR, RTBL. Masterplan)	Kecamatan Tapung, kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Siak Hulu		Dinas PUPR									
	Pembangunan jalan lingkar perbatasan	Kecamatan Tapung, kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Siak Hulu		Dinas PUPR									
	Pembangunan jalan lingkungan sesuai rencana rinci	Kecamatan Tapung, kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Siak Hulu		Dinas PUPR									
	Pembangunan IPAL terpadu	Kecamatan Tapung, kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Siak Hulu		Dinas PUPR									
	Pembangunan sistem drainase dan penyediaan air minum	Kecamatan Tapung, kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Siak Hulu		Dinas PUPR									
	Pembangunan bangunan fungsioanal pendukung kawasan stratregis	Kecamatan Tapung, kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tambang, dan Kecamatan Siak Hulu		Dinas PUPR									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
2	Perwujudan Kawasan konservasi pada perbatasan dengan Sumatera Barat												
	Pemantapan tata batas	Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu		Tata Pemerintahan									
	Identifikasi kawasan deforestasi dan lahan kritis	Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu		Dinas Perkebunan									
	Rehabilitasi kawasan kritis	Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu		Dinas Pertanian									
	Reboisasi kawasan yang mengalami deforestasi	Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu		Dinas Kehutanan									
	Pembangunan jalur sabuk pengaman hutan lindung	Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu		Dinas Kehutanan									
	Pembangunan prasarana penunjang kegiatan ekowisata	Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu		Dinas Pariwisata dan budaya									
3	Perwujudan Kawasan Waduk Koto Panjang												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Identifikasi lahan kritis pada kawasan tangkapan air hujan (<i>catchment area</i>)	Kawasan Waduk PLTA Koto Panjang		Dinas ESDM									
	Rehabilitasi lahan kritis	Kawasan Waduk PLTA Koto Panjang		Dinas ESDM									
	Pembangunan prasarana dan sarana penunjang wisata	Kawasan Waduk PLTA Koto Panjang		Dinas Kehutanan									
	Normalisasi waduk dari pendangkalan pada jalur pasokan air ke turbin PLTA	Kawasan Waduk PLTA Koto Panjang		Dinas ESDM									
	Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan jaring apung budidaya ikan air tawar	Kawasan Waduk PLTA Koto Panjang		Dinas Perikanan									
4	Perwujudan Kawasan perkotaan Bangkinang												
	Penyempurnaan RDTR kawasan perkotaan	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Perencanaan teknis kawasan prioritas perkotaan	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Pembangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Peningkatan kawasan perdagangan, pasar Bangkinang	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas Perdagangan									
	Peningkatan terminal Bangkinang tipe A	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas Perhubungan									
	Pembangunan jalur hijau sempadan sungai	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Revitalisasi kawasan Bukit Candika bumi perkemahan	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air minum	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Peningkatan politeknik Kampar	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Pengembangan IPAL Komunal	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Pembangunan TPST Bangkinang (di kawasan Bangkinang Seberang)	Kecamatan Bangkinang		Dinas PUPR									
	Penanganan kawasan kumuh	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Pembangunan sisitem drainase kota	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase kota	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan RTH	Kecamatan Bangkinang Kota		Dinas PUPR									
4	Perwujudan Kawasan perkotaan Petapahan, Lipat Kain, Air Tiris, Kampa, Sei Pinang, Siak Hulu												
	Penyempurnaan kawasan perkotaan RDTR	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									
	Perencanaan teknis kawasan prioritas perkotaan	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Pembangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									
	Peningkatan kawasan perdagangan, pasar Bangkinang	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas Perdagangan									
	Peningkatan terminal Bangkinang tipe A	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas Perhubungan									
	Pembangunan jalur hijau sempadan sungai	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									
	Penyusunan masterplan dan peningkatan pelayanan air minum	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									
	Pengembangan IPAL Komunal	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									
	Pembangunan TPA Regional	Kecamatan Tapung		Dinas PUPR									
	Penanganan kawasan kumuh	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									
	Pembangunan sistem drainase kota	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									
	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase kota	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan								
					Tahap I						Tahap II	Tahap III	Tahap IV
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	25-29	30-34	35-39
	Penyusunan masterplan dan pembangunan RTH	Kecamatan Tapung, Kampar, Kampa, Tambang, Siak Hulu, Kampar Kiri		Dinas PUPR									
5	Perwujudan Kawasan sosial budaya adalah kawasan Candi Muara Takus												
	Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Kawasan Candi Muara Takus		Dinas PUPR									
	Peningkatan akses masuk kawasan	Kawasan Candi Muara Takus		Dinas PUPR									
	Pengembangan kawasan sekitar kawasan yang mendukung kegiatan budaya dan wisata Candi Muara Takus	Kawasan Candi Muara Takus		Dinas Pariwisata Dan Budaya									
	Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat penunjang kegiatan kawasan	Kawasan Candi Muara Takus		Dinas Pariwisata dan Budaya									
	Pemeliharaan bangunan Candi Muara Takus	Kawasan Candi Muara Takus		Dinas Pariwisata dan Budaya									
	Pemeliharaan bangunan fungsional di kawasan Candi Muara Takus	Kawasan Candi Muara Takus		Dinas Pariwisata dan Budaya									

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 adalah:

- 1) Memberikan arah pembangunan dalam jangka 5 tahun ke depan yang menjadi bagian akhir dari masa berlakunya RPD Kabupaten Kampar 2023-2026;
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (lima) tahun yang akan datang;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Kampar;
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 5) Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah; dan
- 6) Memberikan tolak ukur keberhasilan pembangunan OPD dan Kepala Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/RPD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka dokumen RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan

- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Bab IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu-Isu Strategis

Bab V. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab IX. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No.: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No :02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain:

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau dan Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kota Madya.
2. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruhan wilayah Kabupaten Kampar.
4. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli
6. 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor: 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor: 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek

percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 Kecamatan. Pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan, hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar tahun 1949 sampai sekarang tahun 2022, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar.

2.2 Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografi dan demografi menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap rawan bencana dan kondisi demografi.

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11.289,28 km² atau 1.128.928 hektar. Kecamatan Tapung merupakan wilayah terluas yaitu 1.365,97 km² atau sekitar 12,10% dari luas wilayah Kabupaten Kampar sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan wilayah tersempit dengan luas yaitu 76,92 km² atau

sekitar 0,68% dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

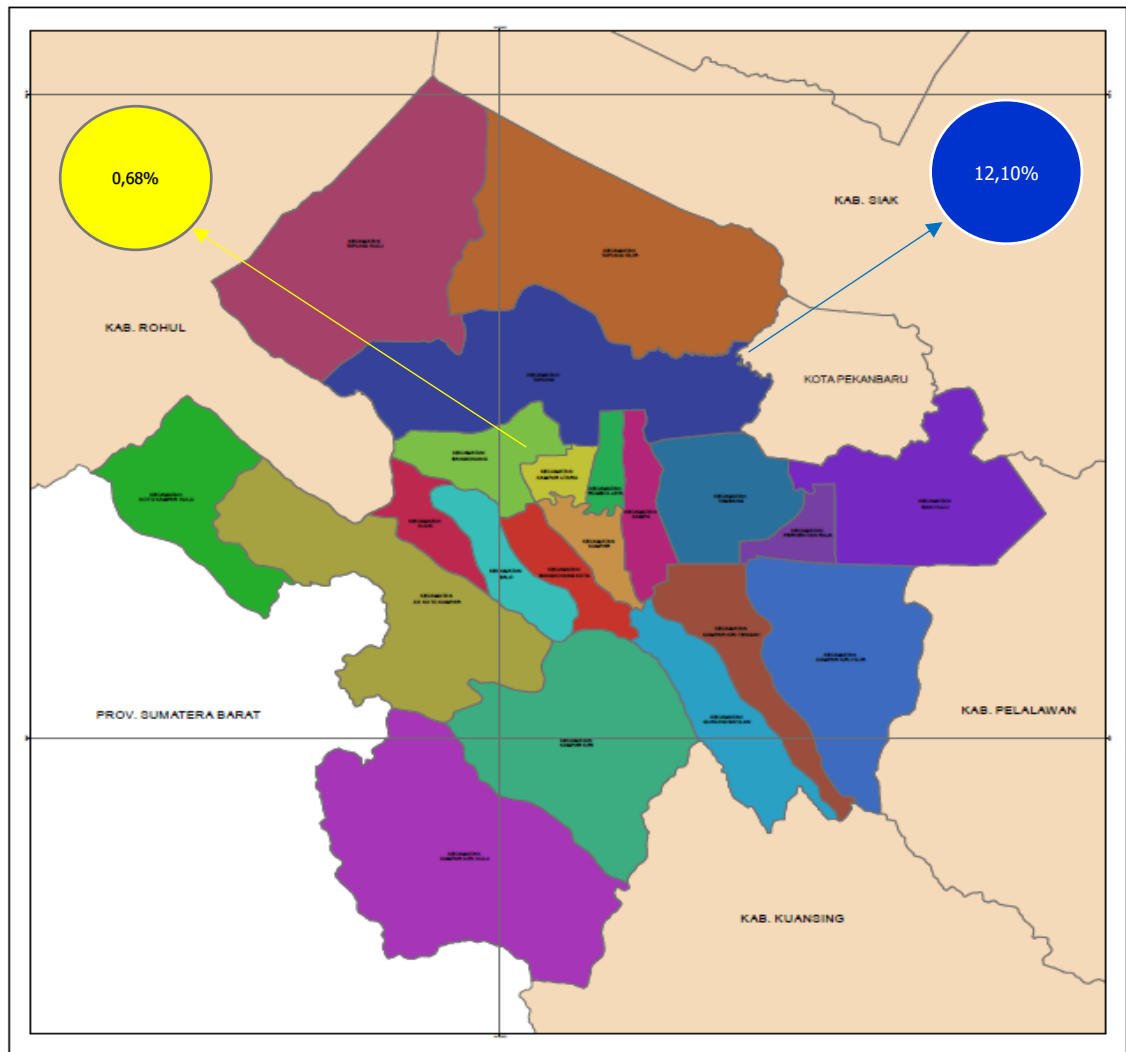
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah		
		Km ²	Ha	(%)
1	Kampar Kiri	915,33	91.533	8,11
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	130.125	11,53
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	75.974	6,73
4	Gunung Sahilan	597,97	59.797	5,30
5	Kampar Kiri Tengah	330,59	33.059	2,93
6	XIII Koto Kampar	732,40	73.240	6,49
7	Koto Kampar Hulu	674,00	67.400	5,97
8	Kuok	151,41	15.141	1,34
9	Salo	207,83	20.783	1,84
10	Tapung	1.365,97	136.597	12,10
11	Tapung Hulu	1.169,15	116.915	10,36
12	Tapung Hilir	1.013,56	101.356	8,98
13	Bangkinang Kota	177,18	17.718	1,57
14	Bangkinang	253,50	25.350	2,25
15	Kampar	136,28	13.628	1,21
16	Kampar Timur	173,08	17.308	1,53
17	Rumbio Jaya	76,92	7.692	0,68
18	Kampar Utara	79,84	7.984	0,71
19	Tambang	371,94	37.194	3,29
20	Siak Hulu	689,80	68.980	6,11
21	Perhentian Raja	111,54	11.154	0,99
Kabupaten Kampar		11.289,28	1.128.928	100,00

Sumber: BPS, Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Secara administratif Kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kabupaten Kampar yang terdiri dari 21 Kecamatan sebagaimana yang terdapat pada Gambar 2.1 dan memiliki 250 desa/kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Tapung yaitu sebanyak 25 desa atau 10% dari desa yang terdapat di Kabupaten Kampar. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Bangkinang Kota yaitu sebanyak 4 desa atau 1,60% dari desa yang terdapat di Kabupaten Kampar. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar Menurut
Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan			Distribusi (%)
		Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Kampar Kiri	1	20	20	8,00
2	Kampar Kiri Hulu	0	24	24	9,60
3	Kampar Kiri Hilir	1	8	8	3,20
4	Gunung Sahilan	0	11	11	4,40
5	Kampar Kiri Tengah	0	9	9	3,60
6	XIII Koto Kampar	1	13	13	5,20
7	Koto Kampar Hulu	0	6	6	2,40
8	Kuok	0	9	9	3,60
9	Salo	0	6	6	2,40
10	Tapung	0	25	25	10,00
11	Tapung Hulu	0	14	14	5,60
12	Tapung Hilir	0	16	16	6,40
13	Bangkinang Kota	2	4	4	1,60
14	Bangkinang	2	9	9	3,60
15	Kampar	1	18	18	7,20
16	Kampar Timur	0	9	9	3,60
17	Rumbio Jaya	0	7	7	2,80
18	Kampar Utara	0	8	8	3,20
19	Tambang	0	17	17	6,80
20	Siak Hulu	0	12	12	4,80
21	Perhentian Raja	0	5	5	2,00
Kabupaten Kampar		8	250	250	100

Sumber: BPS, Kampar Dalam Angka Tahun 2022

2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

1) Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40" Lintang Utara dan 00°27'00" Lintang Selatan dan antara 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Latitude, Latitude memberikan posisi utara / selatan suatu lokasi dalam referensi dari khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis horizontal yang ditarik di sekitar tengah Bumi yang jaraknya sama dengan Kutub Utara dan

Kutub Selatan. Garis khatulistiwa memiliki garis lintang 0 derajat. Bujur, Bujur memberikan posisi timur / barat dari suatu lokasi. Bujur umumnya diukur dalam derajat dari Prime Meridian.

2) Topografi

Topografi merupakan bentuk rupa permukaan tanah (bumi) dengan mengacu pada kondisi tinggi-rendahnya permukaan tanah tersebut, sehingga secara khusus bisa dikatakan bahwa topografi meletakkan fondasi yang mendasari lanskap. Sebagai contoh, topografi mengacu pada gunung, arti lembah, makna sungai atau kawah di permukaan. Bentuk lahan yang dipelajari dalam topografi dapat mencakup apa saja yang secara fisik berdampak pada area. Contohnya termasuk gunung, bukit, lembah, danau, lautan, sungai, kota, bendungan, dan jalan. Ketinggian tempat, gunung dan benda lainnya dicatat sebagai bagian dari topografi dengan mengacu pada permukaan laut (permukaan laut).

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 26-100-meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan dengan ketinggian tempat tertinggi terdapat di Kecamatan Kampar Hiri Hulu dengan ketinggian 100 mdpl dan Kecamatan dengan ketinggian tempat terendah terdapat di Kecamatan Tambang dengan ketinggian 26 mdpl. Ketinggian tempat dapat diukur dengan altimeter. Altimeter dapat memeriksa ketinggian, ketinggian atau koordinat lokasi. Manfaat mengetahui ketinggian tempat digunakan untuk mengetahui perbedaan tekanan udara, pengaruh terhadap pertumbuhan dan vegetasi tanaman.

Sedangkan tingkat kemiringan wilayah adalah berkisar antara 0-40%. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, dan terobosan yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah bagian barat ke arah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorfosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur

terbentuk dari batuan sedimen. Wilayah Kampar juga dilalui sesar membujur dari timur laut ke arah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat.

Tabel 2.3
Ibu Kota, Ketinggian Tempat dan Jarak Ibu Kota Menurut
Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

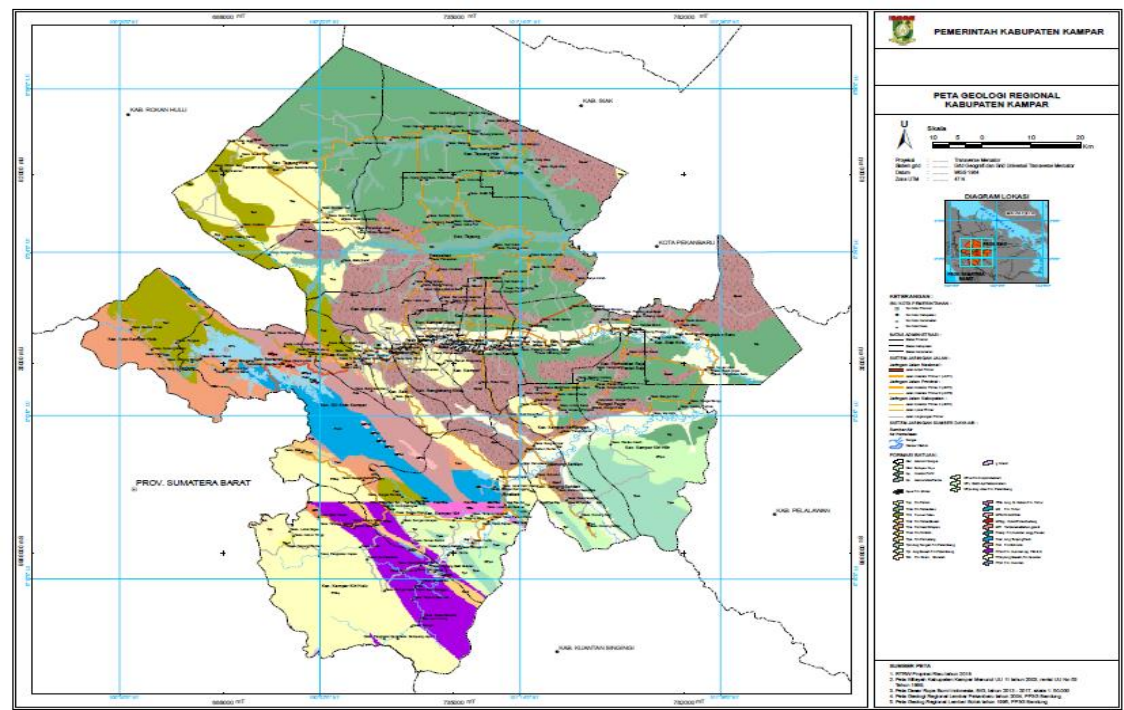
No	Kecamatan	Ibu Kota	Ketinggian Tempat (mdpl)	Jarak Ibukota (km)	Waktu Tempuh (jam)
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	51,00	110,00	1,83
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	100,00	140,00	2,33
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	51,00	85,00	1,42
4	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	51,00	98,00	1,63
5	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	51,00	83,00	1,38
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	85,00	50,00	0,83
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	92,00	65,00	1,08
8	Kuok	Kuok	44,00	10,00	0,17
9	Salo	Salo	40,00	6,00	0,10
10	Tapung	Petapahan	51,00	30,00	0,50
11	Tapung Hulu	Sinama Nenek	50,00	80,00	1,33
12	Tapung Hilir	Kota Garo	48,00	75,00	1,25
13	Bangkinang Kota	Bangkinang	40,00	0,00	0,00
14	Bangkinang	Muara Uwai	40,00	3,00	0,05
15	Kampar	Air tiris	38,00	10,00	0,17
16	Kampar Timur	Kampar	38,00	25,00	0,42
17	Rumbio Jaya	Teratak	38,00	25,00	0,42
18	Kampar Utara	Sawah	38,00	15,00	0,25
19	Tambang	Sungai Pinang	26,00	34,00	0,57
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	35,00	65,00	1,08
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	35,00	86,00	1,43
Kabupaten Kampar		Bangkinang	40,00	0,00	0,00

Sumber: BPS, Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Jarak ibu kota Kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jarak sejauh 140 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,33 jam dengan rata-rata kecamatan 60 km/jam. Sedangkan Jarak ibu kota kecamatan terdekat dari ibu kota Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Bangkinang dengan jarak sejauh 3 km dan dapat ditempuh dalam waktu 0,05 jam dengan rata-rata kecamatan 60 km/jam, lihat pada Tabel 2.3 di atas.

3) Geologi

Geologi dan geomorfologi Kabupaten Kampar pada umumnya tersusun dari endapan gunung api yang berasal dari gunung api kuarter tua dan gunung api kuarter muda (peta geologi lembar Pekanbaru dan Sri Indrapura, Tanjung Pinang). Proses pelapukan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, temperatur dan kelembaban udara. Jenis geologi yang ada sebagian besar adalah aluvium muda dan patahan (sesar) masih berjalan. Aluvium muda ini merupakan formasi geologi yang terbesar di Kabupaten Kampar dan penyebarannya hampir ada pada seluruh Kecamatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Kampar bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan volcanis di daerah Sumatra Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Kabupaten Kampar umumnya datar, kecuali sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

Gambar 2.2

Peta Geologi Kabupaten Kampar

Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung dengan fungsi utama

untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Berdasarkan Peta Satuan Lahan dan Tanah lembar Solok (0815) dan Pekanbaru (0816) (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian Tanah dan *Agroklimat*, 1990), fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup *Kubah Gambut*, *Aluvial*, Dataran, Dataran *Tuf Masam*, Perbukitan, dan Pegunungan.

Grup Kubah Gambut, satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 – 20 meter di atas permukaan laut.

Grup *Alluvial*, satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan *koluviasi*. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan *aluvial*, *koluvial*, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15-475 meter di atas permukaan laut.

Dataran *Tuf Masam*, merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf *volkanik* masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu kedalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup Dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi Dataran dan Perbukitan. Ketinggian tempat 40-250 meter di atas permukaan laut.

Dataran, daerah yang tidak termasuk grup Dataran *Tuf Masam* karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup Dataran.

Umumnya lereng hampir seragam (lereng < 16% dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami

berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain.

Perbukitan, terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10-50 m atau 50-300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan *plutonik* masam.

4) Hidrologi

Hidrologi mempelajari air dalam segala bentuknya pada, dalam atau diatas permukaan tanah termasuk di dalamnya adalah penyebaran daur dan perilakunya, sifat-sifat fisika dan kimia, serta hubungannya dengan unsur-unsur hidup dalam air itu sendiri. Air secara alami mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. air mengalir diatas permukaan tanah namun air juga mengalir di dalam tanah. di dalam lingkungan alam, proses, perubahan wujud, gerakan aliran air (di permukaan tanah, di dalam tanah, dan di udara) mengikuti suatu siklus keseimbangan yang dikenal dengan siklus hidrologi (Kodatie, 2010). Siklus Hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi.

Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk perikanan darat dan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak dan Sungai Tapung) dimanfaatkan untuk jalur perhubungan antar desa. Memiliki dua sungai besar dan beberapa anak sungai, diantaranya:

- 1) Sungai Kampar Tahun mengalir dari punggung Bukit Barisan ke arah timur membelah wilayah Kabupaten Kampar dengan melalui beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Tahun Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Siak Hulu

dan Kecamatan Tambang, yang dilalui oleh Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Sungai Kampar dengan panjang $\pm 413,5$ kilometer dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter.

- 2) Sungai Tapung yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri, kedua hilir sungai ini menyatu ke Sungai Siak. Sungai Siak bagian hulu mempunyai panjang ± 90 kilometer dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter. Berikut Tabel 2.4 Pos Duga, Sungai Induk dan Luas Daerah Pengaliran Sungai di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.4
Pos Duga, Sungai Induk dan Luas Daerah Pengaliran Sungai di Kabupaten Kampar Tahun 2021

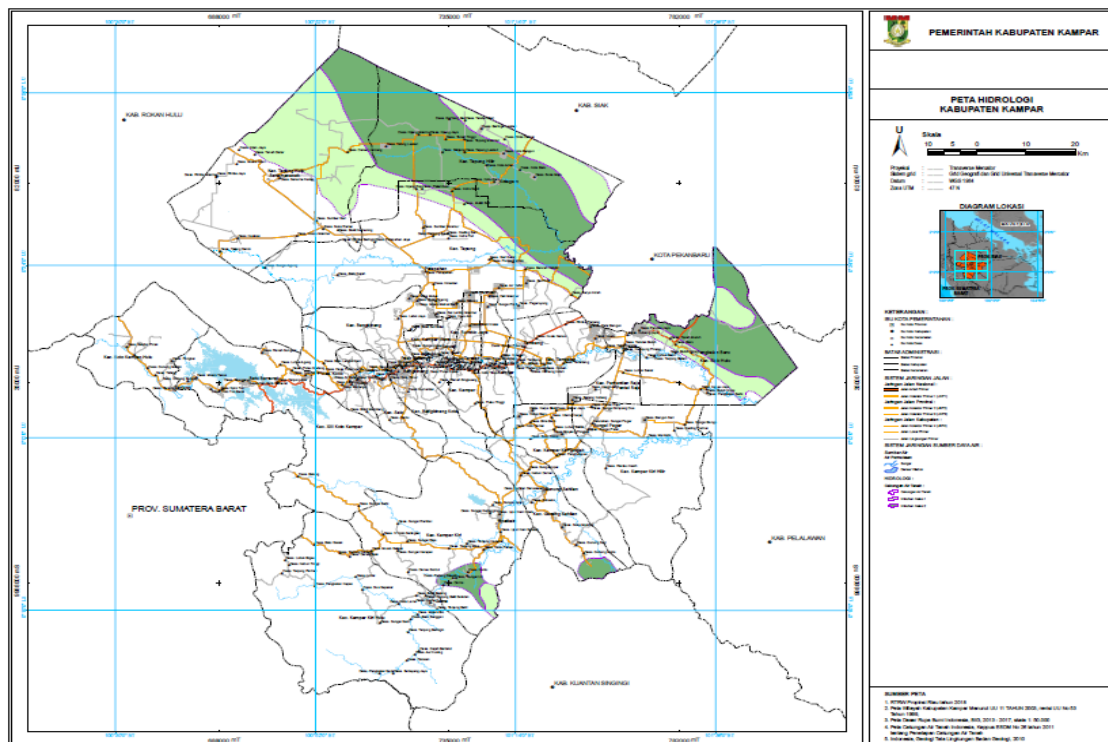
No	Nama Pos Duga Air	Induk Sungai	Data Geografi		Luas Daerah Pengaliran (km ²)
			Lintang	Bujur	
1.	BT. Kampar - D. Bengkuang	BT. Kampar	0°21'00" LU	101°14'00" BT	4.000,00
2.	BT. Kampar-Lipat kain	BT. Rokan	0°00'57" LU	101°11'53" BT	3.431,00
3.	BT KPR Kanan-Mr. Takus	BT. Kampar	0°17'34" LU	101°38'31" BT	1.675,00
4.	BT. Lipai-KB. Durian	BT. Kampar	0°07'50" LU	101°13'55" BT	556,90

Sungai Kampar merupakan salah satu sungai besar di Pulau Sumatera. Secara administrasi, Sungai Kampar berada di dua provinsi, bagian hulu sungai Kampar terletak di Kabupaten Lima Puluh Koto, Pasaman dan Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan bagian tengah wilayah sungai hingga muara terletak di Provinsi Riau. Sungai Kampar memiliki dua anak sungai, yaitu sungai Kampar Kanan dan sungai Kampar Kiri, bertemu di Langgam, Kabupaten Pelalawan. Sungai ini memiliki panjang ± 580 km dengan luas daerah aliran sungai (DAS) ± 24.586 km² (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015).

DAS Kampar telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang alirannya. DAS Kampar tidak saja berarti dalam dimensi fisik, tetapi juga menjadi media interaksi sosial budaya, maka tidak heran jika Asnan (2019) menyebutkan bahwa keberadaan sungai ini sebagai salah satu faktor sejarah pulau Sumatera.

Keragaman komponen ekosistem dan keragaman interaksi yang ada di

dalamnya menyebabkan pengelolaan DAS Kampar harus melibatkan banyak pihak. Proses ini bukanlah sesuatu yang mudah, sebagaimana dinyatakan oleh Lee, et al (2018) bahwa para pihak yang berbeda dapat mempunyai perspektif yang berbeda akan fungsi DAS dan memungkinkan adanya kesenjangan pengetahuan ekologi. Berikut disajikan peta Hidrologi Kabupaten Kampar.



Sumber: *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039*

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Kampar

Kondisi hidrologi Kabupaten Kampar diperlukan adanya upaya menjaga kewujudkan agar terhindar dari pencemaran, banjir, erosi, abrasi, kekeruhan, dan pendangkalan. Menjaga faktor penyebab kerusakan hidrologi di daerah Kabupaten Kampar dengan konsep pembangunan berkelanjutan terutama pada sektor ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam hayati misalnya penggunaan pelet dari keramba jaring apung (KJA), limbah kelapa sawit, dan pembukaan lahan.

5) Klimatologi

Iklim terdiri dari beberapa unsur antara lain: suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tekanan udara, angin, dan lama penyinaran matahari. Berikut ini dijelaskan masing-masing dari unsur-unsur iklim tersebut.

Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif terhadap temperatur, panas dan dingin, diukur dengan termometer. Menurut Tri Cahyonom (2007) suhu adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara tertinggi di muka bumi merupakan daerah tropis dan makin ke kutub akan semakin dingin. Jika dilihat dari dataran, maka dataran terendah cenderung memiliki suhu yang tinggi dan semakin tinggi dataran suhu cenderung semakin turun. Pengukuran suhu dapat digunakan termometer, baik termometer maksimum dan termometer minimum. Kondisi suhu, jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.4 berikut.

Tabel 2.5
Suhu dan Kelembaban Menurut Bulan di Kabupaten Kampar
Tahun 2021

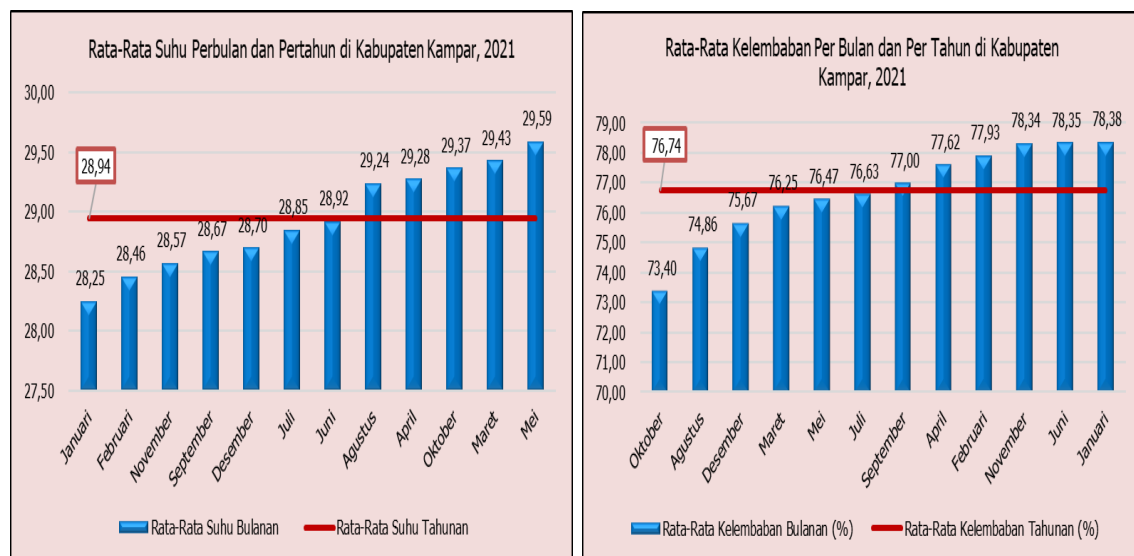
Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	22,20	28,25	33,60	57,00	78,38	99,00
Februari	21,70	28,46	38,00	51,00	77,93	98,00
Maret	22,30	29,43	35,10	54,00	76,25	99,00
April	22,20	29,28	35,20	54,00	77,62	99,00
Mei	22,40	29,59	35,80	51,00	76,47	98,00
Juni	21,40	28,92	33,80	58,00	78,35	100,00
Juli	21,40	28,85	34,00	48,00	76,63	98,00
Agustus	22,00	29,24	36,20	48,00	74,86	98,00
September	22,40	28,67	34,00	54,00	77,00	98,00
Oktober	22,20	29,37	34,20	43,00	73,40	99,00
November	22,40	28,57	33,60	55,00	78,34	98,00
Desember	20,00	28,70	34,00	54,00	75,67	98,00
Rata-Rata	21,88	28,94	34,79	52,25	76,74	98,50

Sumber: BPS, Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Suhu udara sangat berperan dalam penguapan air dan juga kemampuan menahan air di udara serta proses kimia di udara. Semakin tinggi suhu udara, semakin tinggi tingkat penguapan air, semakin tinggi uap air yang ditahan di udara dan semakin cepat reaksi kimia. Wilayah Kabupaten Kampar termasuk

dalam iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 28,94°C, sedangkan suhu rata-rata minimum berkisar 21,88°C dengan suhu terendah terjadi pada bulan Desember yaitu 20,00°C. Sedangkan suhu rata-rata maksimum adalah setinggi 34,79°C dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu 38,00°C.

Kelembaban udara merupakan jumlah kandungan uap air yang terdapat di dalam udara. Kabupaten Kampar berada pada kondisi kelembaban nisbi, rata-rata 76,74% dengan kelembaban rata-rata minimum 43,00% dan terjadi pada bulan Oktober. Kelembaban udara merupakan salah satu keadaan udara yang banyak diperhatikan oleh manusia. Hal ini karena kelembaban udara sendiri dapat mempengaruhi berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan manusia, antara lain: salah satu faktor penentu pertumbuhan tanaman, menjaga kestabilan kesehatan tubuh, menjaga suhu Bumi agar tidak terlalu panas, dan menjaga keawetan dan kualitas barang-barang tertentu. Kelembaban tertinggi yaitu 100,00% dan terjadi bulan Juni. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4
Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Bulanan dan Tahunan
di Kabupaten Kampar Tahun 2021

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan milimeter (mm) di atas

permukaan horizontal. Dalam penjelasan lain curah hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Indonesia merupakan negara yang memiliki angka curah hujan yang bervariasi dikarenakan daerahnya yang berada pada ketinggian yang berbeda-beda. Curah hujan 1 (satu) milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung 5,6 air sebanyak satu liter. Curah hujan, hari hujan dan lama penyinaran tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten
Kampar Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (hari/bulan)	Penyinaran (%)
Januari	154,10	15,00	46,35
Februari	108,20	13,00	46,20
Maret	129,60	12,00	62,05
April	280,90	17,00	61,59
Mei	168,10	11,00	64,65
Juni	189,90	11,00	60,89
Juli	251,60	11,00	69,47
Agustus	223,30	10,00	73,21
September	257,60	19,00	44,69
Oktober	266,70	14,00	51,21
November	308,50	24,00	44,11
Desember	138,30	15,00	52,46
Jumlah	2.476,80	172,00	676,88
Rata-Rata	206,40	14,33	56,41

Sumber: BPS, Kampar Dalam Angka Tahun 2022

Di Kabupaten Kampar pada tahun 2021, rata-rata curah hujan sebanyak 206,40 mm per bulan mulai dari bulan Januari sampai Desember tahun 2021. Bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi di bulan November sebanyak 308,50 mm dan terendah terjadi pada bulan Februari sebanyak 108,20 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November sebanyak 24 hari dan

dan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus hanya 10 hari dengan rata-rata sebesar 14,33 hari dari bulan Januari hingga Desember 2021.

Intensitas curah hujan antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Untuk wilayah yang tergolong luas, jarang terjadi hujan lebat (intensitas tinggi). Biasanya yang turun adalah hujan intensitas rendah dan kurun waktu lama. Hujan dengan intensitas tinggi akan turun di daerah atau wilayah yang sempit dengan waktu tidak lama. Curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Fungsi air hujan yang paling utama adalah menjaga siklus air, selain itu ada berbagai manfaat curah hujan tinggi bagi kehidupan manusia. Curah hujan yang tinggi membuat para petani jadi lebih hemat, cepat, dan mudah mengairi sawah dan lahan pertanian dalam arti luas yang diusahakannya. Curah hujan tertinggi menurut kecamatan terjadi di Kecamatan Kuok sebanyak 310,25 mm/bulan dan terendah terdapat di kecamatan Tapung Hilir sebanyak 141,25 mm/bulan. Selanjutnya berikut ini disajikan data curah dan hari hujan menurut kecamatan tahun 2021.

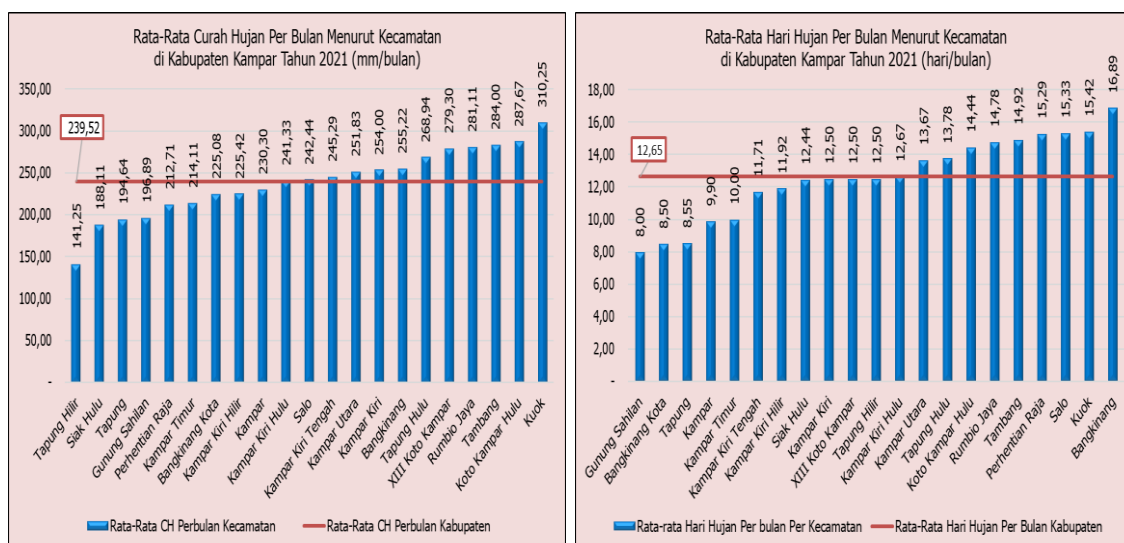
Tabel 2.7
Curah dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten
Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Rata-Rata Curah Hujan/Bulan	Rata-Rata Hari Hujan/Bulan
1	Kampar Kiri	254,00	12,50
2	Kampar Kiri Hulu	241,33	12,67
3	Kampar Kiri Hilir	225,42	11,92
4	Gunung Sahilan	196,89	8,00
5	Kampar Kiri Tengah	245,29	11,71
6	XIII Koto Kampar	279,30	12,50
7	Koto Kampar Hulu	287,67	14,44
8	Kuok	310,25	15,42
9	Salo	242,44	15,33
10	Tapung	194,64	8,55
11	Tapung Hulu	268,94	13,78
12	Tapung Hilir	141,25	12,50
13	Bangkinang Kota	225,08	8,50

No	Kecamatan	Rata-Rata Curah Hujan/Bulan	Rata-Rata Hari Hujan/Bulan
14	Bangkinang	255,22	16,89
15	Kampar	230,30	9,90
16	Kampar Timur	214,11	10,00
17	Rumbio Jaya	281,11	14,78
18	Kampar Utara	251,83	13,67
19	Tambang	284,00	14,92
20	Siak Hulu	188,11	12,44
21	Perhentian Raja	212,71	15,29
Kampar		239,52	12,65

Sumber: BMKG Kabupaten Kampar Tahun 2022

Selanjutnya rata-rata jumlah hari hujan Kabupaten sebanyak 12,65 hari/bulan dan hari hujan tertinggi menurut kecamatan terjadi di Kecamatan Kampar Kiri sebanyak 310,25 mm/bulan dan terendah terdapat di Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 141,25 mm/bulan. Data curah hujan dan hari hujan menurut kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.5.



Gambar 2.5
Rata-Rata Curah dan Hari Hujan Bulanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021

Lama Penyinaran Matahari (LPM) merupakan salah satu indikator yang penting di dalam klimatologi. Sinar matahari akan menggerakkan reaksi-reaksi fotokimia di atmosfer (misalnya reaksi pembentukan ozon), menghasilkan uap air

yang sangat dibutuhkan untuk terjadinya hujan, menjaga agar suhu atmosfer tetap hangat, dan lain sebagainya. Matahari merupakan sumber kehidupan di bumi ini, memancarkan energinya dalam bentuk radiasi yang memiliki rentang panjang gelombang yang sangat lebar. Ilmuwan dunia kemudian bersepakat untuk mengelompokkannya menjadi beberapa pita gelombang, di antaranya adalah pita gelombang ultraviolet, infra merah, dan cahaya tampak.

Cahaya tampak ($\lambda = 340 - 7600 \text{ nm}$) tersusun atas banyak pita warna yang berbeda-beda dari merah hingga ke ungu. Gradasi warna dari merah ke ungu dipengaruhi oleh perbedaan panjang gelombangnya. Radiasi matahari pada tiga pita gelombang tersebut dikenal sebagai radiasi global matahari, dan merupakan radiasi yang langsung datang ke permukaan bumi (*direct*) maupun radiasi yang berasal dari hamburan atmosfer (*diffuse*). Di Kabupaten Kampar penyinaran tertinggi terjadi pada bulan 73,21% dan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 46,20% dengan penyinaran rata-rata 56,41%.

2.2.1.3 Peruntukan Penggunaan Lahan

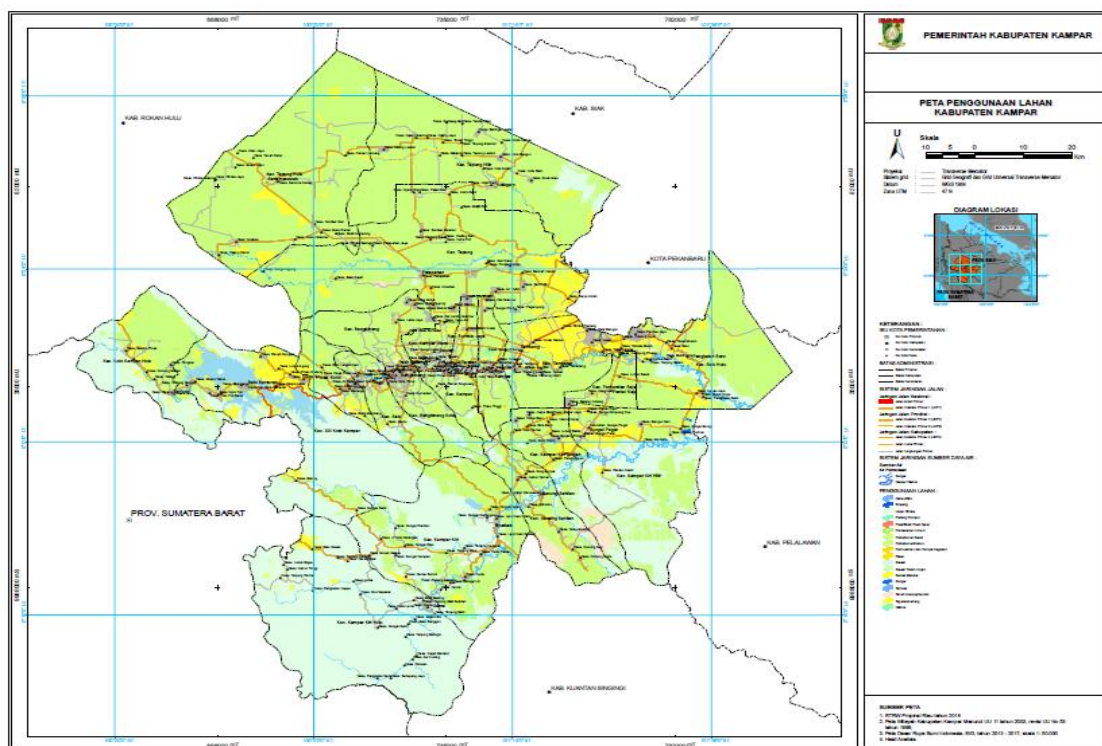
Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Sesuai dengan pendapat Arsyad dalam Setyowati (2016), penggunaan lahan (*land use*) dapat diartikan sebagai campur tangan manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual.

Secara umum peruntukan penggunaan lahan menurut kawasan dibagi dua bagian utama yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. kawasan lindung meliputi kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan konservasi. Sementara kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan industri dan Kawasan pemukiman.

Berdasarkan hasil interpertasi penggunaan lahan di Kabupaten Kampar terdiri dari peruntukan kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya masing-

masing seluas 123.053 hektar atau 11,86% dan Kawasan budidaya seluas 914.063 hektar atau 88,14% dari luas wilayah Kabupaten Kampar seluas 1.128.928 hektar. Penggunaan kawasan yang paling dominan dari peruntukan kawasan budidaya pada sektor pertanian adalah kawasan perkebunan seluas 384.097 hektar atau 91,97%. Kawasan perkebunan tersebut merupakan milik perorangan dan selebihnya adalah lahan negara atau tanah negara yang dikuasakan kepada badan hukum.

Lahan rakyat masyarakat pada umumnya berupa hutan rakyat, perkebunan yang terdiri kebun sawit, kelapa, karet dan kakao. Lahan negara berupa kawasan hutan dan kawasan konservasi. Lahan badan usaha berupa lahan perkebunan sawit dan hutan produksi. Berikut disajikan peta penggunaan lahan di Kabupaten Kampar tahun 2021.



Sumber: *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039*

Gambar 2.6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kampar

Sementara itu kawasan hutan produksi tetap seluas 162.290 hektar atau 38,59%. Sedangkan untuk proporsi kawasan permukiman hanya 69.966 hektar

atau sebesar 7,65% yang terdiri kawasan pemukiman perkotaan seluas 23.392 hektar atau 2,56% dan kawasan pemukiman perdesaan seluas 46.574 hektar atau 5,10%. Rincian peruntukan penggunaan lahan untuk kawasan lindung dan Kawasan budidaya (Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Industri Dan Kawasan Perumahan). Rincian peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Peruntukan Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A.	Kawasan Lindung	123.053	11,86
A.1	Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan	4.382	3,56
1	Kawasan Hutan Lindung	4.231	96,55
2	Kawasan Bergambut	151	3,45
A.2	Kawasan Perlindungan Setempat	10.220	8,31
1	Sempadan danau atau waduk	1.083	10,60
2	Sempadan Sungai	9.137	89,40
A.3	Kawasan Konservasi	108.451	88,13
1	Suaka Alam	100.018	92,22
2	Badan Air	8.433	7,78
B.	Kawasan Peruntukan Budidaya	914.063	88,14
1	Kawasan Hutan Produksi	420.603	46,01
a.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	117.809	28,01
b.	Kawasan hutan Produksi Tetap	162.290	38,59
c.	Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	139.375	33,14
d.	Kawasan Hutan Rakyat	1.129	0,27
2	Kawasan Pertanian	417.644	45,69
a.	Kawasan Tanaman Pangan	6.302	1,51
b.	Kawasan Tanaman Hortikultura	27.245	6,52
c.	Kawasan KP2B		-
d.	Kawasan Perkebunan	384.097	91,97
3	Kawasan Perikanan		-
4	Kawasan Pertambangan dan Energi		-
a.	Kawasan Pertambangan MIGAS		-
5	Kawasan Industri	5.850	0,64
6	Kawasan Pemukiman	69.966	7,65
a.	Kawasan Pemukiman Perkotaan	23.392	2,56
b.	Kawasan Pemukiman Perdesaan	46.574	5,10
Total		1.037.116	100,00
C. Outline		91.812	8,85
1	Pengembalian ke Fungsi Lindung	91.812	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Kampar Tahun 2021

Peruntukan penggunaan lahan tersebut yang telah ditetapkan pada dokumen RTRW 2019-2039 diharapkan dapat menjadi acuan ketaatan dalam

pemanfaatan ruang sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar.

2.2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Komponen analisis risiko bencana terdiri dari analisis ancaman/rawan bencana (*hazard*), analisis kerentanan bencana (*vulnerability*) dan analisis kapasitas bencana (*capacity*). Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, hasil analisis ini diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Risiko bencana di Kabupaten Kampar dikelompokkan menjadi risiko bencana akibat kejadian alam, risiko bencana akibat intervensi kegiatan manusia, dan atau risiko bencana akibat kejadian alam dan intervensi kegiatan manusia. Risiko bencana tentunya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus ditanggung sebagai biaya sosial (*social costs*) serta rusaknya hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kampar menjadi penting untuk dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36, agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

Kapasitas atau kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari sebuah bahaya bencana. Pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Pada kajian ini hanya diukur pada aspek kelembagaan berdasarkan kuesioner HFA untuk masing-masing Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kampar.

Analisis dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang

memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Jenis risiko bencana yang terdapat di Kabupaten Kampar antara lain Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor/Gerakan Tanah, Kekeringan, Epidemik dan Wabah Penyakit, Konflik Sosial. Jenis risiko bencana tersebut termasuk dalam kategori risiko tinggi. Jenis dan tingkat risiko bencana yang terdapat di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jenis dan Tingkat Rawan Bencana Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Banjir	Tinggi
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
3	Tanah Longsor/Gerakan Tanah	Tinggi
4	Kekeringan	Tinggi
5	Epidemik dan Wabah Penyakit	Tinggi
6	Konflik Sosial	Tinggi

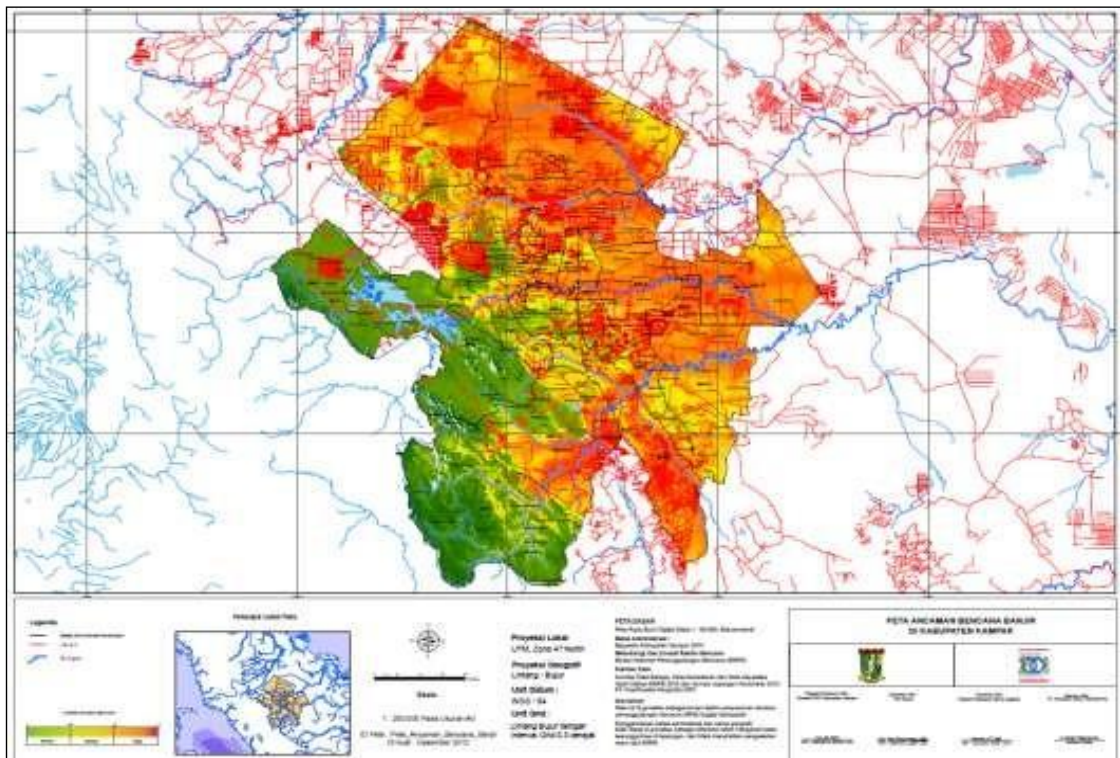
Sumber: BPBD Kabupaten Kampar Tahun 2022

1) Rawan Bencana Banjir

Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kampar salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya air. Dalam konstelasi wilayah, sumberdaya air dapat dikelola dengan konsep penatagunaan lahan yang berkelanjutan dengan pendekatan kewilayahan, sehingga tidak terjadi gangguan keseimbangan lingkungan baik di hulu maupun di hilir. Banjir yang terjadi bermula karena curah hujan yang tinggi dan tidak terserap langsung ke dalam tanah serta tidak terjadi penampungan air dalam situ/embung. Kemiringan tanah yang tidak memiliki tanaman tidak memiliki kekuatan menahan air. Pada kondisi seperti ini, terjadi potensi banjir dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan kerentanan dan gangguan kehidupan kegiatan masyarakat.

Konsep pengelolaan sumber daya air, mengamanatkan pengelolaan potensi cadangan dan pemanfaatan air tanah secara regional/kewilayahan antara hulu dan hilir untuk mengatur kapasitas penyimpanan, pencadangan dan pemanfaatan air. Untuk 20 tahun ke depan, Kabupaten Kampar sangat memerlukan upaya untuk mempertahankan tanaman penyerap air dan hutan,

membangun situ/embung, membangun konstruksi perkuatan tebing dan membangun saluran kanal banjir. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan habit/kebiasaan masyarakat kita untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Kampar mayoritas adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar. Luas kawasan rawan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Kampar adalah 75.451,06 Ha yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan. Berikut disajikan peta rawan bencana banjir di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.7.



Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kampar

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang sedikit untuk rawan bencana. Namun diwilayah ini klasifikasi untuk rawan bencana alam sedikit yaitu seluas 516.289,5 ha, dan Klasifikasi Bencana Alam Tinggi seluas 39.428,7 Ha. Pada bulan Desember Tahun 2021 terjadi bencana banjir di Kabupaten Kampar yang melanda 7 Kecamatan dan 66 Desa yang merendam ribuan rumah dan ribuan hektar lahan pertanian masyarakat serta merendam puluhan sekolah.

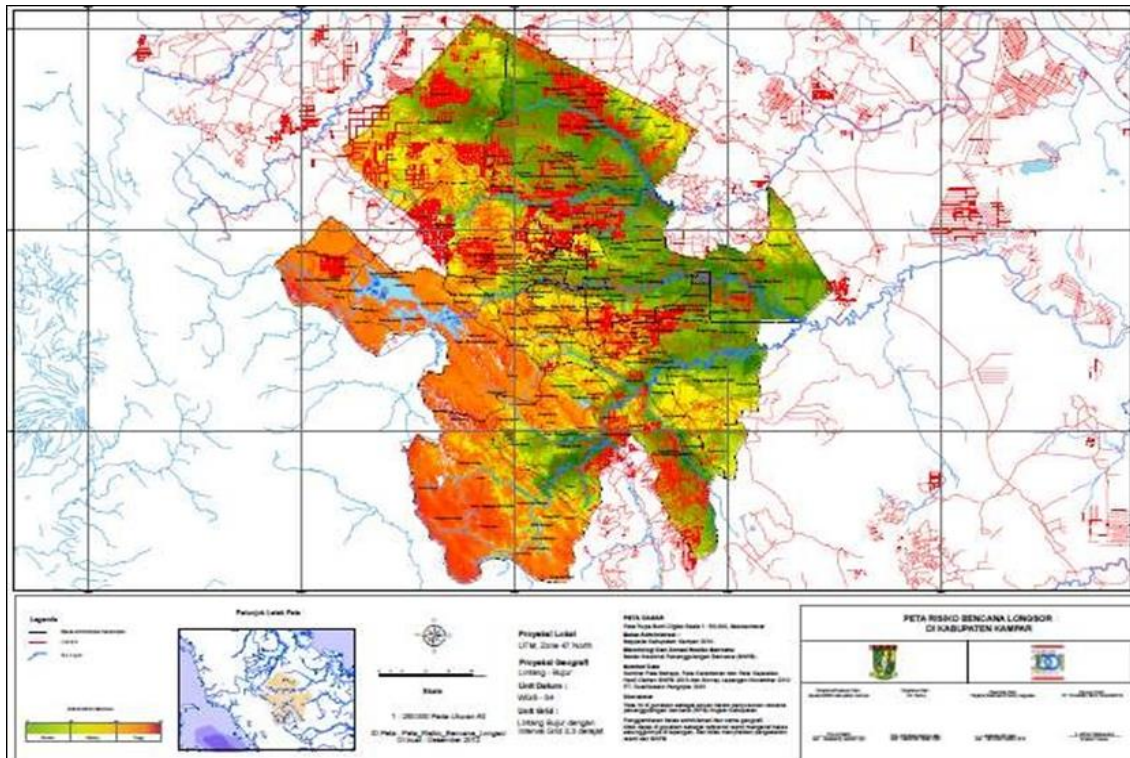
Dan Lahan merujuk kepada komponen dari jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah sehingga menghasilkan skor bahaya. Kelas Indeks Rendah Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dihitung dari jenis hutan, iklim penghujan dan jenis tanah non organik/non gambut. Kelas Indeks Sedang Ancaman Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan dihitung dari jenis lahan perkebunan, iklim penghujan - kemarau dan jenis tanah semi organik. Sedangkan kelas Indeks Tinggi Ancaman Bencana Kebakaran hutan dan lahan dari jenis padang rumput kering dan belukar, lahan pertanian.

3) Rawan Bencana Tanah Longsor

Rawan bencana Tanah Longsor atau Gerakan Tanah Faktor penyebab terjadinya tanah longsor atau gerakan tanah diperkirakan karena: (1) curah hujan yang tinggi sebelum dan pada saat kejadian gerakan tanah; (2) Kermiringan lereng yang terjal, menyebabkan material mudah bergerak; (3) Adanya bidang lemah berupa kontak batuan yang bersifat sarang dengan batuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang gelincir. Kurangnya vegetasi dengan akar yang kuat dan dalam yang berfungsi sebagai pengikat tanah. Rekomendasi teknis penanggulangan:

- a) Pembuatan sengkedan pada tebing jalur jalan dengan kemiringan $< 30^\circ$ dan ketinggian lereng < 2 meter.
- b) Perbaikan drainase untuk memperlancar aliran air permukaan.
- c) Melakukan penanaman pohon besar dengan akar yang kuat dan dalam untuk meningkatkan daya ikat tanah.
- d) Memberikan peringatan kepada pengguna jalan dengan cara memasang rambu-rambu rawan longsor.

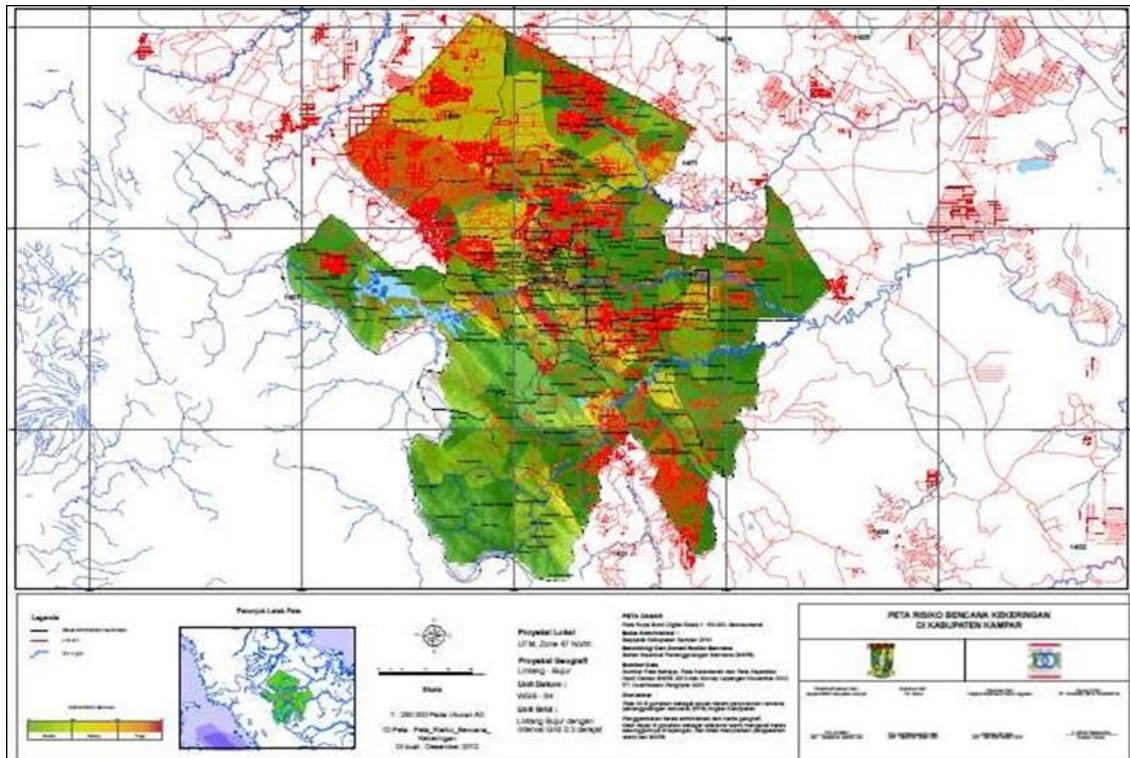
Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Kampar pernah terjadi bencana tanah longsor 3 kali yaitu: (1) Desa Tanjung Rambutan; (2) Pulau Gadang; (3) Desa Tanjung Alai. Berikut disajikan peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.9.



Gambar 2.9
Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kampar

4) Rawan Kekeringan

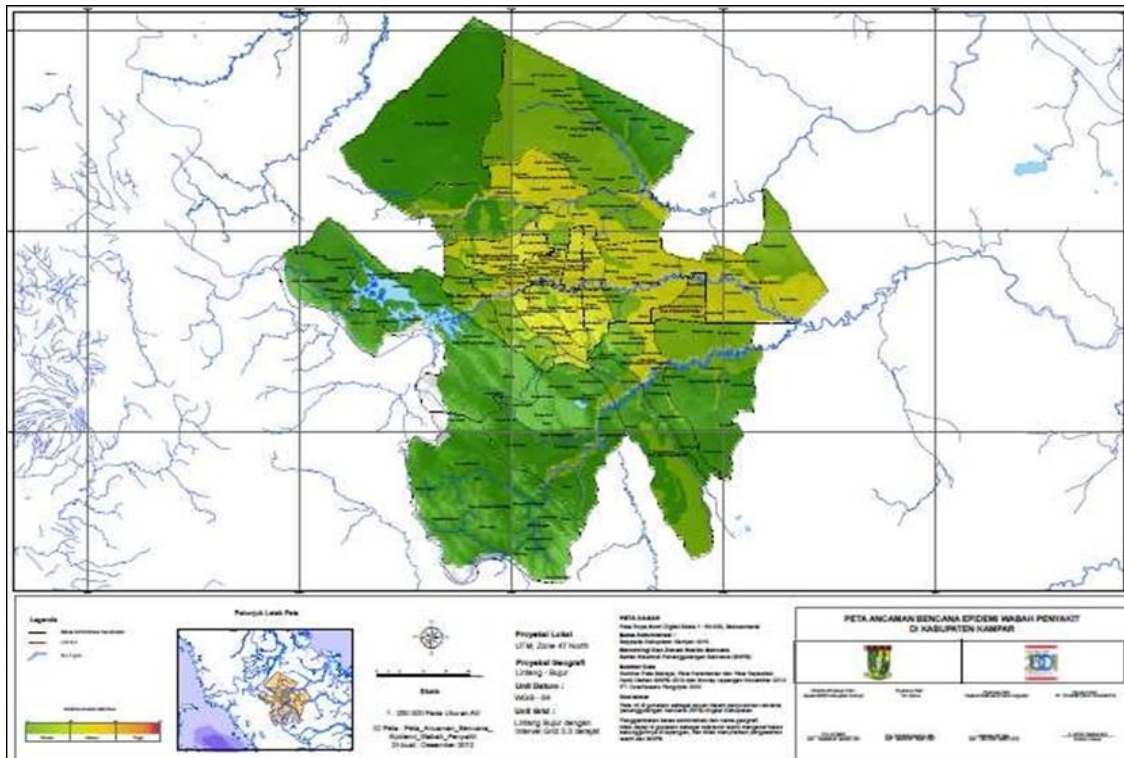
Beberapa tahun lalu sejumlah desa di Kecamatan Tapung dan kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar mengalami kekeringan. Bencana Kekeringan yang melanda beberapa desa di wilayah Kabupaten Kampar pada bulan maret hingga juni lalu menjadi perhatian Pemda Kabupaten Kampar. Masyarakat di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung yang sempat mengalami rawan pangan. Kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan pangan akibat kekeringan yang sempat melanda beberapa desa di Kabupaten Kampar dengan bantuan pangan. Berikut disajikan peta rawan bencana kekeringan di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.10.



Gambar 2.10
Peta Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Kampar

5) Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

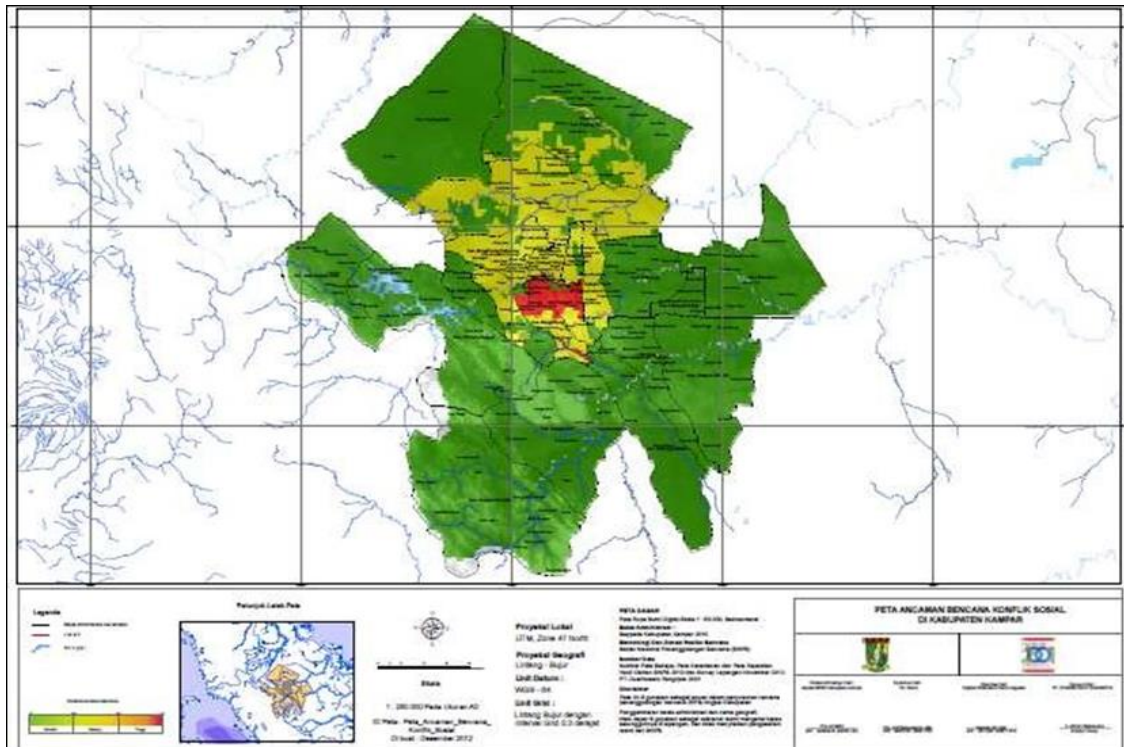
Dilihat dari 10 penyakit terbanyak diderita oleh penduduk yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar penyakit yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Kampar adalah infeksi akut pada saluran pernapasan bagian atas dan kolitis infeksi. Terdapat sepuluh macam penyakit yang terbanyak di Kabupaten Kampar yaitu: (1) infeksi akut pada saluran pernapasan bagian atas; (2) *arthrititis rheumatoid*; (3) Sebab luas lainnya; (4) Diare dan gastroenteritis penyebab infeksi tertentu (colitis infeksi); (5) Hipertensi esensial (primer); (6) infeksi kulit dan jaringan sub kutan; (7) Dermatitis eksim; (8) Gastritis dan Duodenitis; (9) penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas; (10) Penyakit infeksi usus lainnya. Berikut disajikan peta rawan bencana Evidemi di Kabupaten Kampar Tahun jelasnya lihat Gambar 2.11.



Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Evidemi di Kabupaten Kampar

6) Rawan Bencana Konflik Sosial

Bedasarkan observasi dan wawancara di lapangan faktor utama penyebab konflik sosial adalah akibat masalah lahan antara masyarakat dengan sejumlah perusahaan perkebunan sawit. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan lahan baik untuk pemukiman atau lahan pertanian juga tinggi, sementara lahan semakin terbatas karena sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. Secara keseluruhan ancaman bencana konflik sosial secara umum di Kab. Kampar tergolong rendah, kecuali di Kecamatan Tapung, Bangkinang Sebrang, Kampar Utara dan Rumbio Jaya Tergolong sedang, sedangkan di Kecamatan Kampar dan Bangkinang tergolong tinggi. Berikut disajikan peta rawan bencana konflik sosial di Kabupaten Kampar, jelasnya lihat Gambar 2.12.



Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Konflik Sosial di Kabupaten Kampar

Hasil analisis kajian rawan bencana yang berdasarkan pada enam dari delapan risiko bencana yang meliputi risiko bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor/gerakan tanah, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, maka jenis risiko bencana di Kabupaten Kampar yang tergolong tinggi adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor/gerakan tanah, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kegagalan teknologi dan angin puting beliung.

Namun demikian tidak semua kecamatan dan desa risikonya tinggi. Wilayah kecamatan di Kabupaten Kampar yang memiliki potensi risiko bencana tergolong tinggi menurut jenis risiko bencana disajikan secara rinci rawan bencana menurut jenis bencana per kecamatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Bahaya dan Kapasitas Rawan Bencana di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Rawan dan Kapasitas Menurut Jenis Bencana					
		Banjir	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tanah Longsor	Kekeringan	Epidemi dan Penyakit	Konflik Sosial
1	Kampar Kiri	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2	Kampar Kiri Hulu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
3	Kampar Kiri Hilir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
4	Gunung Sahilan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
5	Kampar Kiri Tengah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6	XIII Koto Kampar	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
7	Koto Kampar Hulu	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8	Kuok	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
9	Salo	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
10	Tapung	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
11	Tapung Hulu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
12	Tapung Hilir	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
13	Bangkinang Kota	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
14	Bangkinang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
15	Kampar	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
16	Kampar Timur	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
17	Rumbio Jaya	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
18	Kampar Utara	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
19	Tambang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
20	Siak Hulu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
21	Perhentian Raja	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Kampar		Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.2.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai kewenangan terdapat beberapa wilayah untuk dikembangkan dan didorong pembangunannya dengan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Kampar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan dan hal ini disebut sebagai kawasan strategis Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisa peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis diwilayah Kabupaten Kampar terdiri atas:

1) Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang

Pada tahun 1979 PLN (Perusahaan Listrik Negara) merencanakan pembangunan DAM skala kecil di Tanjung Pauh dalam rangka memanfaatkan Sungai Kampar Kanan. Agar manfaat keberadaan waduk lebih besar dibangunlah PLTA Koto Panjang dalam skala yang lebih besar. PLTA Koto Panjang dibangun atas kerjasama pemerintah Jepang dan Indonesia. PLTA Koto Panjang menjadi penyedia sumber energi listrik di provinsi Riau dan Sumbar.

Penyediaan energi listrik di Kabupaten Kampar masuk ke dalam sistem Interkoneksi B, Wilayah Selatan. Sistem ini merupakan perpanjangan dari Sistem Interkoneksi Sumatera Barat-Riau melalui jalur Sawah Lunto/Kiliran Jao-Taluk Kampar Tahun untuk melayani Wilayah Provinsi Riau bagian Selatan mencakup: Kabupaten Kampar Tahun Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian Kabupaten Pelalawan.

2) Kawasan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan hutan tersebar di Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Salo, Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan KamparKiri, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan luas kurang lebih 53.593 Ha. memegang peranan kunci sebagai pengendali hidrologis wilayah dan sekaligus sebagai daerah tangkapan air DAS Kampar. Sebagaimana telah diketahui bahwa daerah perbatasan Riau dan Sumbar merupakan daerah rawan bencana terutama banjir dan tanah longsor. Perubahan ekosistem daerah tersebut akan langsung berdampak terhadap semakin besarnya peluang terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor.

Kawasan lindung gambut seluas kurang lebih 151 Ha, terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Siak Hulu.

3) Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan sungai; dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai berada di seluruh

Kecamatan dengan luaskurang lebih 9.137 Ha. Kawasan sekitar danau atau waduk, berada di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Kampar Kiri, denganluas kurang lebih 1.083 Ha.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, Kawasan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam; dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam cagar alam Bukit Bungkok, seluas kurang lebih 13.856 Ha yang tersebar di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Kuok; dan suaka margasatwa Bukit Rimbang Baling, seluas kurang lebih 86.162 Ha, terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Kawasan pelestarian alam yang terdapat di taman hutan raya Sultan Syarif Qasim II, seluas kurang lebih 4.231 Ha, terdapat di Kecamatan Tapung Hulu; dan taman wisata alam Buluh Cina, seluas kurang lebih 973 Ha, terdapat di Kecamatan Siak Hulu.

Kawasan Cagar Budaya terdiri dari Candi Muara Takus di Kecamatan XIII Koto Kampar; Masjid Jamik di Kecamatan Kampar; Istana Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan; Situs Makam Raja Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan; Situs Makam Panglima Khatib di Kecamatan Kampar; Situs Makam Syech Burhanuddin di Kecamatan Kampar Kiri; Situs Makam Syech Abdul Gani di Kecamatan XIII Koto Kampar; Rumah Bendang di Kecamatan Kampar; Desa Wisata Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok; Komplek Kesultanan Kampa di Kecamatan Kampa; masjid Qubro di Kecamatan Kampa; makam Datuk Tabano di Kecamatan Bangkinang; lubang kolom di Kecamatan Kuok; dan lokomotif Gerbong Kereta api di Kecamatan Kampar Kiri.

4) Kawasan Pertanian (Kawasan *Agropolitan*, Kawasan *Agrowisata* dan kawasan *Agrotechpark*)

Pengembangan kawasan agrowisata harus dilakukan secara terintegrasi dengan sektor-sektor terkait seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, perhotelan, biro perjalanan, industri, kesenian dan kebudayaan dan sebagainya dalam bingkai kewilayahan dan keterpaduan

pengelolaan kawasan. Agrowisata dapat merupakan pengembangan dari sektor lain yang diharapkan mampu menunjang pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, misalnya pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan agropolitan, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan perkebunan, pengembangan kawasan agrowisata pada tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan peternakan, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan perikanan darat dan lain sebagainya.

Perencanaan pengembangan kawasan agrowisata harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yaitu Pengembangan kawasan agrowisata harus mempertimbangkan penataan dan pengelolaan wilayah dan tata ruang yang berkelanjutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial budaya setempat, Pengembangan fasilitas dan layanan wisata yang mampu memberikan kenyamanan pengunjung sekaligus memberikan benefit bagi masyarakat setempat serta pengembangan kawasan agrowisata harus mampu melindungi sumber daya dan kekayaan alam, nilai-nilai budaya dan sejarah setempat. Pengembangan kawasan agrowisata ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar semata, tetapi harus dalam koridor melindungi dan melestarikan aset-aset yang menjadi komoditas utama pengembangan kawasan. Penggalan terhadap nilai-nilai, lokasi, kegiatan, atraksi wisata yang unik ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kawasan agrowisata secara berkelanjutan.

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW, potensi pengembangan wilayah Kabupaten Kampar antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata. Sebahagian sektor ini merupakan penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan berbagai potensi ekonomi, Kabupaten Kampar menjanjikan banyak peluang pengembangan dimasa depan. Dengan dukungan letak geografis yang strategis, yaitu relatif tidak terlalu jauh dengan Ibu Kota Provinsi dan terletak

pada daerah perbatasan 3 (tiga) provinsi yaitu Riau, Sumatera Barat dan Jambi serta ditunjang tersedianya infrastruktur yang memadai. Selain hal tersebut dengan dukungan kebijakan pemerintah yang positif, maka daerah ini merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era globalisasi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut.

a) Sub Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kampar yang menopang perekonomian masyarakat. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan seperti, kelapa sawit, kelapa, karet dan kakao, dan aneka tanaman lain. Komoditas Kelapa Sawit kelapa merupakan primadona di subsektor ini.

Peruntukan lahan untuk usaha perkebunan pada RTRW Kabupaten Kampar seluas 384.097 hektar. Pada tahun 2021 dari peruntukan lahan tersebut sudah dimanfaatkan seluas 318.411 hektar dengan komoditas tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa, tanaman karet dan tanaman kakao dan komoditas lainnya.

Luas lahan yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan komoditas kelapa sawit seluas 226.169 hektar dan sudah menghasilkan produksi TBS sebanyak 2.868.627 ton tahun 2021. Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq*) merupakan salah satu komoditas perkebunan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Kelapa sawit juga merupakan sumber minyak nabati yang sangat penting. Permintaan kelapa sawit yang meningkat menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dan perluasan areal pertanaman kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar. Berikut disajikan gambar potensi perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar.



Gambar 2.13
Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kampar Tahun 2021

Selain tanaman kelapa sawit, komoditas karet juga sangat berperan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan untuk tanaman karet pada tahun 2021 seluas 90.234 hektar dan telah menghasilkan produksi karet sebanyak 76.245 ton. Peranan perkebunan karet terhadap perekonomian Kabupaten Kampar juga dapat dilihat dari kontribusi komoditas karet terhadap PDRB sektor pertanian pada subsektor perkebunan di Kabupaten Kampar.

Pemerintah Kabupaten Kampar hendaknya lebih memperhatikan dan mengembangkan perkebunan karet yang merupakan sumber keragaman hayati yang bermanfaat sebagai pelestarian lingkungan, yang juga merupakan salah satu komoditas unggulan yang berperan dalam meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja, meningkatkan jumlah produksi karet dan memberikan kontribusi terhadap subsektor perkebunan.

Berikut disajikan gambar potensi pengembangan perkebunan tanaman karet di Kabupaten Kampar.



Gambar 2.14
Perkebunan Karet Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kelapa merupakan komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat Kabupaten Kampar. Selanjutnya pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa seluas 1.674 hektar dengan produksi sebanyak 454 ton kopra pada tahun 2021. Manfaat tanaman kelapa tidak saja terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang besar. Demikian besar manfaat tanaman kelapa sehingga ada yang menamainya sebagai “pohon kehidupan.

Selanjutnya luas tanaman kakao yang dikembangkan sesuai dengan arahan dalam peruntukan lahan dalam RTRW adalah seluas 335 hektar dengan total produksi 44 ton dalam bentuk produksi berupa biji kering. Menurut Safitri (2015) beberapa faktor pembatas yang menentukan kecocokan budidaya tanaman kakao ini disuatu lahan adalah suhu, curah

hujan, temperature dan lainnya. Untuk bisa memaksimalkan penggunaan lahan, menurut (Tjahyana, 2015) bahwa pengembangan komoditas kakao akan jadi lebih ekonomis jika dijadikan tanaman sela. Berikut disajikan gambar potensi perkebunan Kakao di Kabupaten Kampar.



Gambar 2.15
Perkebunan Kakao Kabupaten Kampar Tahun 2021

b) Sub Sektor Perikanan

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar dan beragam. Berdasarkan RTRW tahun 2019-2039 kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan perikanan budidaya terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Siak

Hulu. Perikanan dikembangkan melalui pengembangan kegiatan perikanan budidaya air tawar dengan pendekatan minapolitan dan pengolahan. Selama ini budidaya ikan dalam kolam hanya dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang ekonomi keluarga.

Usaha perikanan merupakan usaha yang cukup menjanjikan. Hal ini karena proses pemeliharaan, pemasaran relatif tidak begitu sulit dan tidak memerlukan lahan yang luas, kemudian konsumsi ikan masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat sehingga usaha perikanan ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya inovasi maka di Kabupaten Kampar proses pengolahan ikan sudah mulai dikembangkan melalui kelompok tani perikanan.



Gambar 2.16
Potensi Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2021

c) Sub Sektor Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan yang memiliki potensi peternakan. Sektor peternakan tidak hanya meningkatkan populasi dan produksi ternak Jenis hewan ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga meningkatkan pendapatan

peternak. Jenis ternak yang banyak diusahakan masyarakat Kabupaten Kampar adalah sapi, kerbau, kambing, itik, dan lainnya. Yang menjadi unggulan disektor ini salah satunya adalah Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA). Hal ini ditunjang oleh luas perkebunan sawit di Kabupaten Kampar yaitu 226.169 hektar. Kotoran ternak dapat dipergunakan sebagai sumber pupuk organik.

Populasi ternak ruminansia tahun 2021 sebanyak 42.881 ekor yang terdiri dari 28.461 ekor sapi dan 14.420 ekor kerbau serta kambing sebanyak 21.069 ekor (Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar).



Gambar 2.17
Potensi Peternakan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Upaya Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan populasi dan produksi ternak adalah dengan program peningkatan produksi hasil peternakan dengan meningkatkan angka kelahiran ternak melalui inseminasi buatan (kawin suntik), intensifikasi kawin alam, pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular ternak dan lain-lain serta Gerakan Penyerentakan Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB).

d) Sub Sektor Tanaman Pangan

Sektor Tanaman Pangan merupakan potensi Sumber Daya Alam yang terbarukan (*renewable resources*). Adapun hasil dari sektor ini merupakan kebutuhan dasar dalam pemenuhan kecukupan gizi masyarakat sehingga dapat mengetahui tingkat Ketahanan Pangan suatu Daerah. Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap beberapa komoditas Pertanian khususnya tanaman pangan beberapa program telah dilaksanakan dan terjadi peningkatan produksi yang menguntungkan petani, namun secara keseluruhan peningkatan produksi tersebut belum terpenuhinya ketersediaan terhadap komoditas tertentu seperti padi atau beras.

Kawasan tanaman Pangan seluas kurang lebih 6.302 Ha yang tersebar di Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampa, Kecamatan Tambang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar dan Kecamatan Rumbio Jaya.

Kawasan hortikultura seluas kurang lebih 27.245 Ha, tersebar di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tambang dan Kecamatan Kampar. Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap beberapa komoditas Pertanian khususnya tanaman pangan beberapa program telah dilaksanakan dan terjadi peningkatan produksi yang menguntungkan petani, namun secara keseluruhan peningkatan produksi tersebut belum terpenuhinya ketersediaan terhadap komoditas. Untuk tanaman Palawija yang dikembangkan di Kabupaten Kampar antara lain seperti komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Capaian produksi pada bidang tanaman pangan khususnya padi tahun 2021 dengan luas panen tanam padi sawah adalah 3.437,20 ha dengan

produksi sebanyak 11.845 Ton dengan produktifitas rata-rata sebanyak 3,446 ton/ha.



Gambar 2.18
Potensi Pertanian Pangan padi Kabupaten Kampar Tahun 2021

e) Sektor Lahan dan Hutan

Pemanfaatan lahan dan hutan secara tradisional telah sejak lama diusahakan oleh masyarakat. Pemanfaatan lahan dan hutan secara tradisional umumnya berupa eksploitasi dari alam dan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada beberapa dekade terakhir, selain mengharapkan produksi alami, pemanfaatannya mengarah kepada pembudidayaan dan diusahakan dalam skala besar. Seperti di daerah tropis lainnya, hutan di Kabupaten Kampar memiliki nilai ekonomis, sosial, lingkungan dan budaya bagi daerah dan masyarakat setempat. Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan, maka kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Kampar seluas HPT 117.511 Ha, HP 163.116 Ha, dan HPK 139.376 Ha. Berikut disajikan Gambar Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Kampar.



Gambar 2.19
Potensi Hutan Tanaman Industri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Namun seringkali pemanfaatan hutan dan lahan untuk berbagai kepentingan tersebut di atas menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Pemanfaatan hutan yang tidak bijaksana menyebabkan erosi, banjir rusaknya ekosistem hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati dan meninggalkan lahan kritis.

5) Kawasan Pertambangan dan Penggalian

a) Sektor Sumber Daya Mineral

Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.

Pengelolaan potensi pertambangan dengan pendekatan pertambangan ramah lingkungan (green minning) di Kabupaten Kampar

Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampa, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar kiri Tengah, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tapung.

b) Sektor Energi

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi tersebar di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Tambang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Hilir. Kawasan pembangkit tenaga listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air yang terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar.

6) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Dalam rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa wilayah ini sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan pariwisata dan juga sebagai ikon daerah, terutama pariwisata alam dan pariwisata budaya.

Pada sektor Pariwisata, Kabupaten Kampar mempunyai potensi yang sangat besar. Potensi wisata tersebut berupakeragaman budaya ataupun keindahan alam, potensi wisata ini sangat prospektif untuk dikembangkan adalah jenis obyek wisata alam dan wisata budaya dengan atraksi-atraksi budaya lainnya yang dapat dikembangkan.

Kawasan pariwisata terdiri atas kawasan pengembangan pariwisata perkotaan. Kawasan Pengembangan Pariwisata Perkotaan tersebar di Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kampar, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir dan Tapung Hulu.

Kawasan pengembangan pariwisata alam buatan tersebar di Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampa, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Kawasan pengembangan pariwisata pusaka dan alam tersebar di Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Gunung Sahilan, Kecamatan Kuok, Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Secara umum potensi pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Kampar secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Sub Sektor	Komoditas
1	Tanaman Pangan	Padi
2	Perkebunan	Karet, Kelapa Sawit dan Kakao
3	Kehutanan	Hutan Tanaman Industri
4	Peternakan	Siska (Sapi Kelapa Sawit)
5	Perikanan	Perairan Umum
6	Pertambangan	Emas/Tanah Emas Aluvial dan Barubara
7	Energi	Kelistrikan (PLTA)
8	Pariwisata	Alam, Event dan Sejarah

Sumber: Berbagai Dokumen Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.2.2 Demografi

2.2.2.1 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, meskipun dapat ditutupi perubahan teknologi dan ekonomi. Berikut data

perkembangan jumlah dan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kampar Kiri	28.056	29.946	29.941	33.470	33.720	4,81
2	Kampar Kiri Hulu	10.154	10.905	10.722	10.998	11.090	2,28
3	Kampar Kiri Hilir	10.992	11.910	11.889	13.346	13.429	5,26
4	Gunung Sahilan	22.302	19.155	18.753	20.335	20.502	-1,74
5	Kampar Kiri Tengah	28.328	26.997	26.558	27.904	28.137	-0,11
6	XIII Koto Kampar	22.147	23.119	22.980	23.847	23.985	2,03
7	Koto Kampar Hulu	20.513	19.978	19.311	20.367	20.503	0,05
8	Kuok	22.925	24.273	24.365	25.415	25.568	2,79
9	Salo	24.156	24.908	25.071	26.162	26.372	2,23
10	Tapung	84.046	88.031	90.049	98.422	99.291	4,30
11	Tapung Hulu	83.165	75.869	77.432	80.661	81.175	-0,48
12	Tapung Hilir	53.157	54.972	55.261	57.509	57.996	2,21
13	Bangkinang Kota	34.378	36.477	36.505	37.855	38.182	2,69
14	Bangkinang	33.251	32.968	32.853	34.441	34.732	1,12
15	Kampar	45.575	49.169	48.704	51.637	52.058	3,44
16	Kampar Timur	23.960	22.765	22.491	23.890	24.057	0,18
17	Rumbio Jaya	17.031	17.690	17.505	18.367	18.536	2,17
18	Kampar Utara	18.181	18.025	17.617	18.780	18.953	1,10
19	Tambang	63.370	65.884	68.974	79.277	79.892	6,09
20	Siak Hulu	76.654	77.937	79.635	88.187	88.775	3,81
21	Perhentian Raja	19.708	17.978	18.013	19.429	19.613	0,06
Kabupaten Kampar		742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kampar, 2017-2021

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 naik dari 742.049 jiwa tahun 2017 menjadi 816.566 jiwa pada tahun 2021 atau bertambah sebanyak 74.517 jiwa atau 9,13% selama periode tersebut. Sementara pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 sebesar 2,46% per tahun.

Sedangkan pertumbuhan penduduk tertinggi per kecamatan terdapat di Kecamatan Tambang sebesar 6,09% per tahun dan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Gunung Sahilan sebesar -1,74% per tahun.

Peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kampar sangat dipengaruhi peningkatan angka kelahiran atau tingkat fertilitas dan migrasi penduduk dari wilayah lain dan luar provinsi Riau.

2.2.2.2 Perkembangan Sebaran Penduduk

Perkembangan sebaran dan kepadatan penduduk di setiap daerah dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Sebaran penduduk yang tidak merata akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Daerah-daerah yang padat penduduk terjadi eksploitasi sumber alam secara berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan alam.

Persebaran penduduk yang tidak merata, di antaranya disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah suatu wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Wilayah yang beriklim terlalu dingin atau panas biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Pada umumnya banyak masyarakat yang memilih tempat tinggal di daerah datar, sehingga memilih bentuk permukaan tanah yang baik. Sumber air yang berlimpah dan tidak tercemar oleh limbah pabrik atau lainnya. Namun demikian kondisi tersebut menyebabkan persebaran tidak merata dan akan menyebabkan munculnya permukiman liar, pencemaran sungai karena dijadikan tempat pembuangan sampah, baik dari masyarakat maupun pabrik industri. Selain itu persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya pencemaran udara karena banyaknya kendaraan dan pabrik serta muncul berbagai masalah sosial, seperti kriminalitas.

Secara umum persebaran penduduk selama Tahun 2021 mengalami sebaran yang tidak merata berkisar antara 1,36% hingga 12,16%. Sebaran paling sedikit terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jumlah penduduk sebanyak 11.090 jiwa dan sebaran paling banyak terdapat di Kecamatan Tambang dengan jumlah penduduk sebanyak 79.892 jiwa. Sebaran yang tidak merata tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut cukup rendah dan atau tinggi serta perpindahan penduduk ke wilayah lainnya.

Sementara delapan kecamatan lainnya memiliki pertumbuhan persebaran penduduk yang lebih tinggi dari rata-rata 4,70%, jelasnya disajikan pada Tabel 2.13 terkait sebaran penduduk menurut kecamatan tahun 2017-2021.

Tabel 2.13
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Tahun					Distribusi (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kampar Kiri	28.056	29.946	29.941	33.470	33.720	4,13
2	Kampar Kiri Hulu	10.154	10.905	10.722	10.998	11.090	1,36
3	Kampar Kiri Hilir	10.992	11.910	11.889	13.346	13.429	1,64
4	Gunung Sahilan	22.302	19.155	18.753	20.335	20.502	2,51
5	Kampar Kiri Tengah	28.328	26.997	26.558	27.904	28.137	3,45
6	XIII Koto Kampar	22.147	23.119	22.980	23.847	23.985	2,94
7	Koto Kampar Hulu	20.513	19.978	19.311	20.367	20.503	2,51
8	Kuok	22.925	24.273	24.365	25.415	25.568	3,13
9	Salo	24.156	24.908	25.071	26.162	26.372	3,23
10	Tapung	84.046	88.031	90.049	98.422	99.291	12,16
11	Tapung Hulu	83.165	75.869	77.432	80.661	81.175	9,94
12	Tapung Hilir	53.157	54.972	55.261	57.509	57.996	7,10
13	Bangkinang Kota	34.378	36.477	36.505	37.855	38.182	4,68
14	Bangkinang	33.251	32.968	32.853	34.441	34.732	4,25
15	Kampar	45.575	49.169	48.704	51.637	52.058	6,38
16	Kampar Timur	23.960	22.765	22.491	23.890	24.057	2,95
17	Rumbio Jaya	17.031	17.690	17.505	18.367	18.536	2,27
18	Kampar Utara	18.181	18.025	17.617	18.780	18.953	2,32
19	Tambang	63.370	65.884	68.974	79.277	79.892	9,78
20	Siak Hulu	76.654	77.937	79.635	88.187	88.775	10,87
21	Perhentian Raja	19.708	17.978	18.013	19.429	19.613	2,40
Kabupaten Kampar		742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	100,00

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kampar, 2017-2021

2.2.2.3 Perkembangan Kepadatan Penduduk

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbulkan dari kepadatan penduduk. Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan.

Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Data kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.14
Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah km ²	Jiwa/km ²
1	Kampar Kiri	33.720	915,33	36,84
2	Kampar Kiri Hulu	11.090	1.301,25	8,52
3	Kampar Kiri Hilir	13.429	759,74	17,68
4	Gunung Sahilan	20.502	597,97	34,29
5	Kampar Kiri Tengah	28.137	330,59	85,11
6	XIII Koto Kampar	23.985	732,40	32,75
7	Koto Kampar Hulu	20.503	674,00	30,42
8	Kuok	25.568	151,41	168,87
9	Salo	26.372	207,83	126,89
10	Tapung	99.291	1.365,97	72,69
11	Tapung Hulu	81.175	1.169,15	69,43
12	Tapung Hilir	57.996	1.013,56	57,22
13	Bangkinang Kota	38.182	177,18	215,50
14	Bangkinang	34.732	253,50	137,01
15	Kampar	52.058	136,28	381,99
16	Kampar Timur	24.057	173,08	138,99
17	Rumbio Jaya	18.536	76,92	240,98
18	Kampar Utara	18.953	79,84	237,39
19	Tambang	79.892	371,94	214,80
20	Siak Hulu	88.775	689,80	128,70
21	Perhentian Raja	19.613	111,54	175,84
Kabupaten Kampar		857.752	11.289,28	72,33

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 2.14, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar sebanyak 72,33 atau 72 jiwa/km² dengan wilayah kecamatan terpadat adalah Kecamatan Kampar sebanyak 382 jiwa/km² dan paling sedikit adalah kecamatan Kampar Kiri Hulu sebanyak 8 jiwa/km². Perbedaan kepadatan penduduk dapat menimbulkan permasalahan kependudukan antara lain terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar dan sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan pembangunan. Informasi kepadatan

penduduk wilayah ini perlukan untuk mengetahui gejala kelebihan penduduk (*overpopulation*), untuk mengetahui pusat-pusat aglomerasi penduduk, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun budaya. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan). Sementara wilayah kecamatan yang kurang padat menunjukkan lambatnya percepatan pemerataan pembangunan antara wilayah.

2.2.2.4 Perkembangan Sex Rasio Penduduk

Perkembangan sex rasio Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 mengalami penurunan sebesar -1,99%. Pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 382.756 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 359.293 jiwa dengan sex ratio sebesar 106,53. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sex rasio. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 417.094 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 399.472 jiwa dengan sex ratio sebesar 104. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki. Penurunan sex rasio tersebut dapat disebabkan oleh tingkat angka kelahiran, meninggal, imigrasi dan emigrasi. Pola seleksi alam pada rasio jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh kualitas dan stabilitas habitat langsung, serta oleh sifat-sifat sejarah kehidupan, kompetisi dan penyebaran, yang mempengaruhi persaingan lokal pada pasangan atau sumber daya.

Sementara itu jika dilihat angka sex rasio per kecamatan tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat kecamatan yang memiliki angka sex rasio tertinggi yaitu kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan angka sebanyak 107, artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 107 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex rasio paling sedikit terdapat di Kecamatan Kampar Utara sebanyak 101. Artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Angka sex rasio penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan Sex Rasio Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah		Sex Ratio
		Laki-Laki		Perempuan				
		(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	
1	Kampar Kiri	17.322	2,12	16.398	2,01	33.720	4,13	105,63
2	Kampar Kiri Hulu	5.738	0,7	5.352	0,66	11.090	1,36	107,21
3	Kampar Kiri Hilir	6.916	0,85	6.513	0,8	13.429	1,64	106,19
4	Gunung Sahilan	10.538	1,29	9.964	1,22	20.502	2,51	105,76
5	Kampar Kiri Tengah	14.444	1,77	13.693	1,68	28.137	3,45	105,48
6	XIII Koto Kampar	12.261	1,5	11.724	1,44	23.985	2,94	104,58
7	Koto Kampar Hulu	10.502	1,29	10.001	1,22	20.503	2,51	105,01
8	Kuok	12.979	1,59	12.589	1,54	25.568	3,13	103,10
9	Salo	13.472	1,65	12.900	1,58	26.372	3,23	104,43
10	Tapung	51.101	6,26	48.190	5,9	99.291	12,16	106,04
11	Tapung Hulu	41.866	5,13	39.309	4,81	81.175	9,94	106,50
12	Tapung Hilir	29.821	3,65	28.175	3,45	57.996	7,1	105,84
13	Bangkinang Kota	19.103	2,34	19.079	2,34	38.182	4,68	100,13
14	Bangkinang	17.610	2,16	17.122	2,1	34.732	4,25	102,85
15	Kampar	26.327	3,22	25.731	3,15	52.058	6,38	102,32
16	Kampar Timur	12.185	1,49	11.872	1,45	24.057	2,95	102,64
17	Rumbio Jaya	9.427	1,15	9.109	1,12	18.536	2,27	103,49
18	Kampar Utara	9.567	1,17	9.386	1,15	18.953	2,32	101,93
19	Tambang	40.478	4,96	39.414	4,83	79.892	9,78	102,70
20	Siak Hulu	45.320	5,55	43.455	5,32	88.775	10,87	104,29
21	Perhentian Raja	10.117	1,24	9.496	1,16	19.613	2,4	106,54
Kabupaten Kampar		417.094	51,08	399.472	48,92	816.566	100	104,41

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kampar Tahun 2022

2.2.2.5 Perkembangan Struktur Usia Penduduk

Perkembangan kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,06% per tahun dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 usia penduduk produktif berjumlah 529.396 jiwa kemudian bertambah menjadi 571.089 jiwa pada tahun 2021. Banyak usia produktif tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Kampar memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut berperan dalam meningkatkan kualitas SDM agar potensi

ekonomi daerah dapat dikembangkan masyarakat sehingga dapat membuka lapangan usaha seluas luasnya bagi penduduk usia produktif dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka pengangguran terbuka dan menurunkan angka kemiskinan.

Pada periode yang sama usia non produktif yang belum produktif (usia 0-14 tahun) tumbuh sebesar 0,88% per tahun atau bertambah dari 203.543 jiwa pada tahun 2017 menjadi 231.725 jiwa pada tahun 2021. Penduduk usia muda (belum produktif) yaitu kelompok usia antara 5-9 Tahun dengan komposisi terbanyak pada tahun 2017 kemudian berubah menjadi kelompok umur 10-14 tahun pada tahun 2021. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda sebagai asset daerah sejak dini baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan maupun pendidikan sehingga diharapkan nantinya generasi muda Kabupaten Kampar mempunyai daya saing yang tinggi sehingga tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing dalam menghadapi persaingan globalisasi dalam dunia kerja, salah satunya saat ini telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berarti telah dibukanya gerbang perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dimana salah satu point terpentingnya yaitu telah dibebaskannya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Namun usia tidak produktif (usia 65->75 tahun) tumbuh sebesar 9,45% per tahun selama tahun 2017-2021 atau bertambah dari 17.768 jiwa pada tahun 2017 menjadi 27.172 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan pertambahan penduduk usia tua (tidak produktif) tersebut dimana kelompok usia dengan komposisi terbanyak berada pada penduduk berusia 65-69 tahun sebesar 48,73% tahun 2017 dan meningkat menjadi 49,39% tahun 2021. Jelasnya lihat Tabel 2.16 di bawah.

Oleh karena itu perlu disiapkan pelayanan khusus bagi penduduk usia tua baik pelayanan kesehatan, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta membangun sarana sosial lainnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara para orang tua yang sudah sepuh serta yang paling penting perhatian anak terhadap

kesehatan orang mereka. Pertambahan usia tidak produktif ini juga disebabkan oleh adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat sehingga menambah angka usia harapan hidup masyarakat.

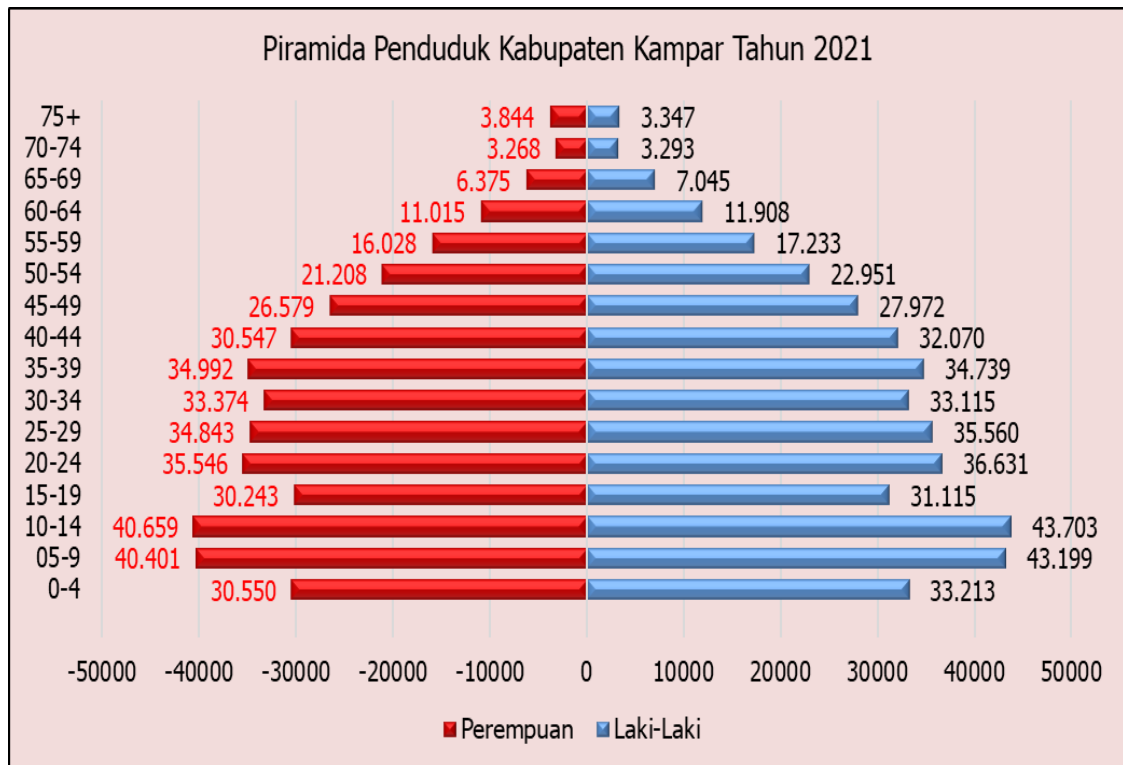
Tabel 2.16
Perkembangan Struktur Usia Penduduk Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	0-4	47.156	52.570	55.205	63.274	63.763	7,97
2	5-9	78.464	74.128	76.575	82.958	83.600	1,72
3	10-14	77.923	72.984	76.501	83.715	84.362	2,17
4	15-19	69.209	71.600	57.527	60.887	61.358	-2,40
5	20-24	68.150	69.047	66.317	71.623	72.177	1,53
6	25-29	66.973	63.768	64.993	69.863	70.403	1,35
7	30-34	67.553	64.714	65.187	65.979	66.489	-0,37
8	35-39	66.042	64.755	66.308	69.196	69.731	1,39
9	40-44	55.799	55.556	58.601	62.136	62.617	2,96
10	45-49	49.196	49.366	50.615	54.132	54.551	2,65
11	50-54	35.656	38.777	41.175	43.820	44.159	5,53
12	55-59	26.803	28.578	30.412	33.006	33.261	5,59
13	60-64	15.357	18.997	20.203	22.747	22.923	10,85
14	65-69	8.658	10.880	12.157	13.317	13.420	11,93
15	70-74	4.449	5.800	5.962	6.511	6.561	10,78
16	75+	4.661	7.436	6.891	7.136	7.191	14,13
17	Jumlah Penduduk <15 tahun	203.543	199.682	208.281	229.947	231.725	3,40
18	Jumlah Penduduk 15 thn Keatas	538.506	549.274	546.348	580.352	584.841	2,12
19	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	529.396	536.038	533.495	566.706	571.089	1,94
20	Jumlah Penduduk	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
21	Jumlah Penduduk <15 tahun	27,43	26,66	27,60	28,38	28,38	0,88
22	Persen Kelompok Usia 0-4 dari <15 tahun	23,17	26,33	26,51	27,52	27,52	4,53
23	Persen Kelompok Usia 5-9 dari < 15 tahun	38,55	37,12	36,77	36,08	36,08	-1,63
24	Persen Kelompok Usia 10-14 dari < 15 tahun	38,28	36,55	36,73	36,41	36,41	-1,23
25	Jumlah Penduduk Usia 65->75 tahun	17.768	24.116	25.010	26.963	27.172	12,00

Sumber: Disduk Capil Kabupaten Kampar 2017-2021 dan Olahan Tahun 2022

2.2.2.6 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Disisi lain rasio ketergantungan penduduk (*defendency ratio*) yang menggambarkan seberapa banyak penduduk usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif yang terdiri dari usia belum produktif (0-14 Tahun) dan uisa tidak produktif lagi yaitu usia >65 Tahun).



Gambar 2.20
Piramida Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2021

Komposisi umur penduduk Kabupaten Kampar dapat digambarkan dalam piramida penduduk pada Gambar 2.20. Model piramida penduduk Kabupaten Kampar mempunyai dasar lebar dan puncak yang mengerucut. Bentuk semacam ini terdapat pada daerah-daerah dengan tingkat kelahiran yang masih tinggi dan angka kematian sudah mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi. Karakteristik yang dimiliki piramida penduduk semacam ini yaitu umur median rendah dan angka beban tanggungan pada usia muda tinggi. Piramida penduduk Provinsi Riau mempunyai ciri di mana jumlah usia produktif, khususnya dewasa memiliki tanggungan besar terhadap jumlah manula dan usia muda yang cukup banyak. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif.

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara

kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

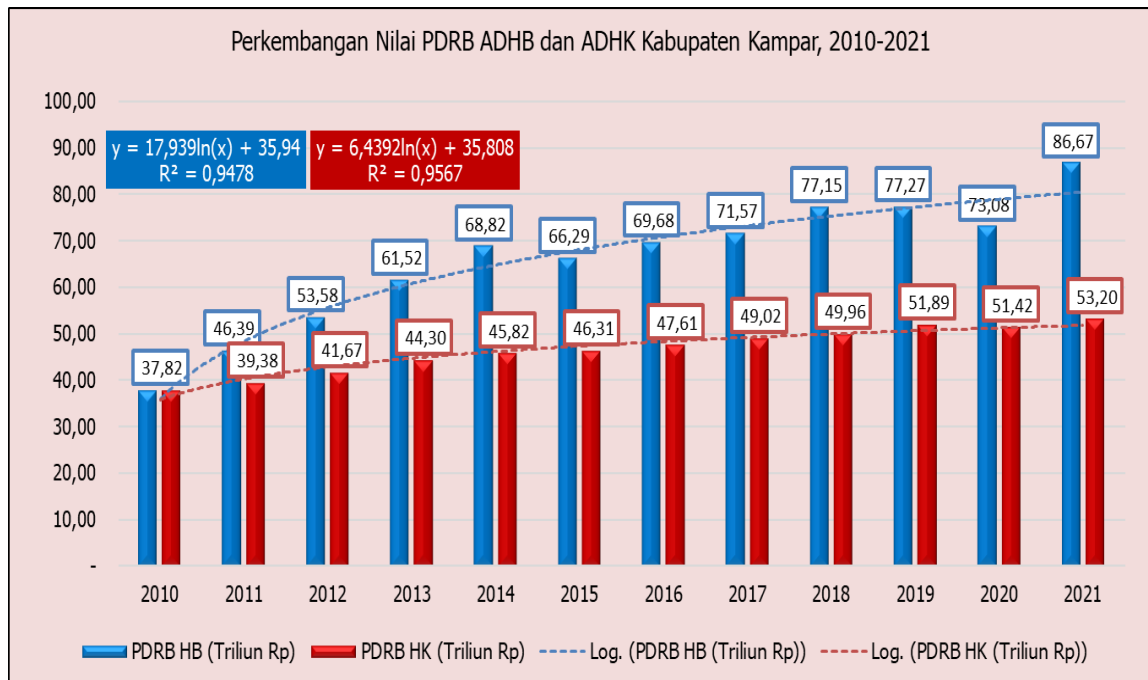
Analisis kinerja atas fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita indeks gini, pemerataan pendapatan, indeks ketimpangan Williamson, angka penduduk miskin.

2.3.1.1 Perkembangan PDRB

PDRB sektor ekonomi menunjukkan kemampuan faktor-faktor produksi pada suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu, selanjutnya barang dan jasa akhir tersebut digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi dan ekspor-impor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Kampar dalam satu tahun, unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 lapangan usaha (sektor ekonomi) yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14)

Perkembangan Nilai PDRB atas dasar harga berlaku terhadap 17 sektor ekonomi tersebut pada selama periode 2010-2021 tumbuh sebesar 8,57% per tahun atau naik dari Rp. 37,82 triliun tahun 2010 naik menjadi Rp. 86,67 triliun tahun 2021. Sedangkan nilai PDRB harga konstan 17 sektor ekonomi tersebut selama periode 2010-2021 tumbuh sebesar 3,94% per tahun dengan nilai Rp. 37,82 triliun pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 53,19 triliun tahun 2021. Berdasarkan Gambar 2.21 nilai PDRB ADHB terjadi dua kali penurunan nilai yaitu pada tahun 2015 (Rp. 66,29 triliun) dan tahun 2020 (Rp. 73,08 triliun). Sementara nilai PDRB ADHK hanya turun pada tahun 2020 (Rp. 51,42 triliun). Perkembangan nilai PDRB ADHB dan ADHK selama tahun 2010-2021 jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.21



Gambar 2.21
Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kampar
Tahun 2010-2021

Sementara itu perkembangan nilai PDRB menurut sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.17. Perkembangan nilai PDRB sektor ekonomi tertinggi atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2010-2021 terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan naik dari Rp. 11,35 triliun tahun 2010 naik menjadi Rp. 28,52 tahun 2021 atau tumbuh sebesar 8,80% per tahun. Sektor ekonomi dengan nilai PDRB terendah atas dasar harga berlaku selama periode tersebut adalah jasa perusahaan dari Rp. 1,2 milyar tahun 2010 hanya naik menjadi Rp. 2,45 milyar tahun 2021.

Namun sektor ekonomi dengan pertumbuhan nilai PDRB tertinggi atas dasar harga berlaku adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 14,65% per tahun atau naik dari Rp. 13,65 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 55,53 milyar pada tahun 2021. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan nilai PDRB terendah atas dasar harga berlaku adalah jasa perusahaan hanya sebesar 5,27% atau hanya naik dari Rp. 1,20 milyar pada tahun 2010 kemudian hanya naik menjadi Rp. 2,45 milyar pada tahun 2021.

Sektor ekonomi yang memberikan rata-rata kontribusi tertinggi selama periode 2010-2021 pada PDRB atas dasar harga berlaku adalah pertambangan dan penggalan sebesar 38,66% per tahun, namun kontribusinya menurun dari 32,47% tahun 2010 menjadi 26,52% tahun 2021, atau dengan penurunan pertumbuhan kontribusi sebesar -1,00% pertahun. Penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalan disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi barang dan jasa pada usaha penggalan, pengeboran, pencucian, pengambilan dan pemanfaatan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di dalam tanah, baik yang berupa benda padat, benda cair maupun gas dan harga komoditas tersebut selama rentang waktu 2016-2021.

Sementara itu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terendah atas dasar harga berlaku selama tahun 2010-2021 adalah sektor jasa perusahaan dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,0032% per tahun, dan kontribusinya juga mengalami penurunan dari 0,0032% tahun 2010 turun menjadi 0,0028% tahun 2021 dengan rata-rata penurunan kontribusi sebesar -0,61% per tahun. Penurunan kontribusi sektor jasa perusahaan disebabkan oleh terjadinya penurunan penggunaan jasa dari sektor jasa perusahaan seperti kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa priklanan dan jasa persewaan mesin dan peralatan selama rentang waktu 2010-2021. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusinya menurut sektor ekonomi di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan 2.18 berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha PDRB	PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)												Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.355,38	12.049,95	12.888,94	13.636,65	15.347,66	16.483,57	18.200,03	19.589,82	20.289,02	21.508,32	24.141,40	28.522,17	8,80
B	Pertambangan dan Penggalian	12.281,94	18.698,54	22.889,08	28.026,21	31.556,99	25.993,64	25.737,54	24.678,05	28.297,52	25.027,29	17.914,02	22.983,91	8,18
C	Industri Pengolahan	9.246,06	10.104,96	11.269,94	12.524,99	13.519,61	14.565,37	15.572,00	16.474,47	17.000,87	18.155,69	18.951,56	22.053,03	8,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,65	17,24	20,76	16,31	20,84	28,33	34,42	40,84	44,16	47,81	52,80	55,53	14,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,71	2,89	3,06	3,08	3,19	3,55	3,63	3,87	3,91	4,01	4,05	4,26	4,24
F	Konstruksi	2.025,44	2.311,71	2.910,00	3.371,88	3.837,04	4.305,28	4.795,22	5.091,36	5.439,62	5.907,26	5.734,65	6.183,68	10,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.079,49	1.215,96	1.397,27	1.547,85	1.921,93	2.067,90	2.277,15	2.433,99	2.605,67	2.871,41	2.548,58	2.960,36	9,93
H	Transportasi dan Pergudangan	114,63	120,37	131,41	142,29	156,83	183,86	202,87	218,38	237,61	262,55	255,69	277,10	8,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,30	34,89	39,94	43,22	47,05	52,19	58,92	62,24	65,70	70,89	60,57	68,82	7,41
J	Informasi dan Komunikasi	166,77	175,11	194,38	209,93	226,22	246,01	253,60	272,57	287,47	311,15	336,51	361,25	7,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,09	175,29	188,63	221,94	257,66	260,47	283,09	298,83	322,67	328,94	340,28	376,53	7,73
L	Real Estate	348,89	387,33	439,94	475,33	539,26	594,53	645,80	675,30	708,73	761,45	779,21	812,03	8,04
M,N	Jasa Perusahaan	1,20	1,28	1,49	1,68	1,98	2,16	2,37	2,51	2,67	2,97	2,43	2,45	7,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	640,10	714,10	798,65	847,07	870,97	907,46	961,78	1.030,10	1.089,34	1.160,87	1.112,76	1.115,60	5,27
P	Jasa Pendidikan	192,27	214,38	224,06	236,78	261,17	299,40	330,23	356,47	385,86	425,17	447,55	465,74	8,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,86	63,01	70,27	78,13	91,50	115,99	124,71	129,92	135,77	157,02	182,09	204,83	12,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	95,41	105,68	115,20	132,18	157,01	175,46	192,90	212,29	236,32	264,37	212,15	223,07	8,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		37.822,02	46.392,70	53.584,01	61.515,51	68.816,91	66.285,16	69.676,25	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	8,57

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022

Tabel 2.18
Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun												Rata-Rata Kontribusi 2010-2021 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi (%) / Tahun
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,02	25,97	24,05	22,17	22,30	24,87	26,12	27,37	26,30	27,84	33,04	32,91	25,70	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian	32,47	40,30	42,72	45,56	45,86	39,21	36,94	34,48	36,68	32,39	24,51	26,52	38,66	-1,00
C	Industri Pengolahan	24,45	21,78	21,03	20,36	19,65	21,97	22,35	23,02	22,04	23,50	25,93	25,44	22,01	0,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,04	6,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	-2,99
F	Konstruksi	5,36	4,98	5,43	5,48	5,58	6,50	6,88	7,11	7,05	7,65	7,85	7,13	6,20	2,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,85	2,62	2,61	2,52	2,79	3,12	3,27	3,40	3,38	3,72	3,49	3,42	3,03	1,86
H	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,26	0,25	0,23	0,23	0,28	0,29	0,31	0,31	0,34	0,35	0,32	0,28	0,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	-0,37
J	Informasi dan Komunikasi	0,44	0,38	0,36	0,34	0,33	0,37	0,36	0,38	0,37	0,40	0,46	0,42	0,37	-0,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	0,38	0,35	0,36	0,37	0,39	0,41	0,42	0,42	0,43	0,47	0,43	0,40	0,02
L	Real Estate	0,92	0,83	0,82	0,77	0,78	0,90	0,93	0,94	0,92	0,99	1,07	0,94	0,88	0,43
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,69	1,54	1,49	1,38	1,27	1,37	1,38	1,44	1,41	1,50	1,52	1,29	1,45	-2,21
P	Jasa Pendidikan	0,51	0,46	0,42	0,38	0,38	0,45	0,47	0,50	0,50	0,55	0,61	0,54	0,46	0,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,17	0,18	0,18	0,18	0,20	0,25	0,24	0,16	4,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,25	0,23	0,21	0,21	0,23	0,26	0,28	0,30	0,31	0,34	0,29	0,26	0,26	0,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,81

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022 dan Olahan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa pertumbuhan nilai PDRB harga konstan selama periode 2010-2021 sebesar 3,94% per tahun dengan nilai PDRB sebesar Rp. 37,82 triliun pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 53,19 triliun. Selama periode yang sama sektor ekonomi dengan nilai PDRB tertinggi atas dasar harga konstan adalah sektor pertanian dengan nilai Rp. 11,35 triliun pada tahun 2010 kemudian naik menjadi Rp. 18,16 triliun tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,38% per tahun. Sedangkan sektor ekonomi dengan nilai PDRB terendah atas dasar harga konstan adalah sektor jasa perusahaan hanya Rp. 1,20 milyar tahun 2010 kemudian naik menjadi Rp. 1,61 milyar tahun 2021 atau dengan pertumbuhan sebesar 3,04% per tahun.

Sektor ekonomi yang memberikan rata-rata kontribusi tertinggi pada PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2010-2021 adalah pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 30,09% per tahun, dengan kontribusi naik dari 30,027% tahun 2010 menjadi 34,15% tahun 2021 dengan pertumbuhan kontribusi sebesar 1,21% pertahun. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada sektor pertanian baik sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil hasilnya, kehutanan dan perikanan komoditas tersebut selama rentang waktu 2016-2021.

Sementara itu sektor yang memberikan kontribusi terendah atas dasar harga konstan selama tahun 2010-2021 adalah jasa perusahaan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,0032% per tahun, dan kontribusinya turun dari 0,0032% tahun 2010 turun menjadi 0,0028% tahun 2021 dengan penurunan kontribusi sebesar -0,20% per tahun. Penurunan kontribusi sektor jasa perusahaan disebabkan oleh terjadinya penurunan penggunaan jasa dari sektor jasa perusahaan seperti kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa iklan dan jasa persewaan mesin dan peralatan selama rentang waktu 2016-2021. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusinya menurut sektor ekonomi di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.19 dan 2.20 berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha PDRB	PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)												Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.355,38	11.602,69	12.004,56	12.380,41	12.984,99	13.031,87	13.672,51	14.596,72	15.433,67	16.318,62	17.165,39	18.166,83	4,38
B	Pertambangan dan Penggalian	12.281,94	12.756,58	13.221,18	13.819,94	13.880,14	13.921,70	13.820,70	13.083,38	12.362,26	11.628,28	10.889,94	10.566,70	-1,28
C	Industri Pengolahan	9.246,06	9.741,79	10.693,18	11.966,08	12.476,39	12.668,78	13.205,27	14.151,23	14.668,08	16.051,38	15.900,07	16.568,64	5,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,65	14,43	15,06	15,70	18,99	20,68	23,27	24,39	26,01	26,89	29,18	30,70	7,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,71	2,79	2,81	2,81	2,84	2,90	2,88	2,96	2,96	2,97	2,99	3,14	1,36
F	Konstruksi	2.025,44	2.209,95	2.482,75	2.670,88	2.857,49	3.004,10	3.126,37	3.236,10	3.348,10	3.522,45	3.406,73	3.527,06	5,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.079,49	1.142,08	1.217,06	1.318,28	1.390,11	1.399,61	1.453,32	1.536,74	1.631,83	1.716,90	1.466,20	1.690,37	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan	114,63	117,23	121,73	125,24	128,87	139,48	147,15	155,44	162,60	170,63	156,80	165,80	3,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,13	33,33	34,51	35,48	36,32	37,73	39,33	40,94	42,64	45,45	38,04	42,80	2,87
J	Informasi dan Komunikasi	166,77	172,11	182,71	190,97	197,51	202,26	206,36	210,45	214,85	227,22	245,93	262,93	4,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,09	174,08	182,48	203,66	221,80	213,96	221,56	228,16	238,84	239,42	248,66	261,12	4,15
L	Real Estate	348,89	359,26	397,55	412,43	431,26	450,36	456,80	470,37	487,88	514,51	524,58	540,93	4,09
M,N	Jasa Perusahaan	1,20	1,25	1,36	1,46	1,61	1,66	1,71	1,78	1,87	1,99	1,59	1,61	3,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	640,10	687,97	734,51	756,66	766,09	781,54	781,99	806,55	830,10	870,31	810,96	806,24	2,19
P	Jasa Pendidikan	192,27	199,72	204,52	208,85	215,57	220,12	226,42	238,78	252,82	272,27	280,36	289,77	3,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,86	61,22	65,34	69,81	75,14	82,16	83,10	85,59	87,62	97,35	110,36	122,84	7,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	95,41	101,82	107,23	118,94	131,36	135,15	141,46	152,43	166,71	182,20	142,70	148,88	4,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		37.822,02	39.378,31	41.668,55	44.297,58	45.816,47	46.314,07	47.610,21	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	3,94

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022

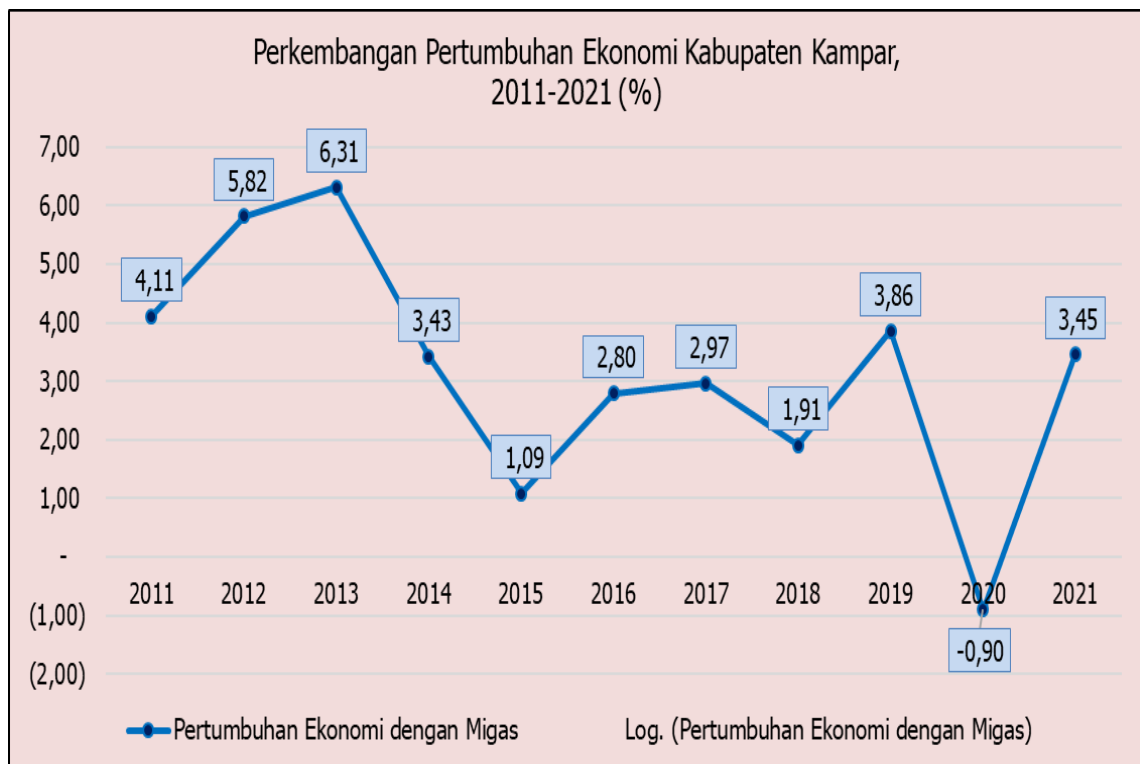
Tabel 2.20
Perkembangan Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun												Rata-Rata Kontribusi 2010-2021 (%)	Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi (%) / Tahun
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,02	29,46	28,81	27,95	28,34	28,14	28,72	29,78	30,89	31,45	33,38	34,15	30,09	1,21
B	Pertambangan dan Penggalian	32,47	32,39	31,73	31,20	30,30	30,06	29,03	26,69	24,74	22,41	21,18	19,86	27,67	-4,32
C	Industri Pengolahan	24,45	24,74	25,66	27,01	27,23	27,35	27,74	28,87	29,36	30,93	30,92	31,15	27,95	2,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,05	4,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-1,72
F	Konstruksi	5,36	5,61	5,96	6,03	6,24	6,49	6,57	6,60	6,70	6,79	6,63	6,63	6,30	1,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,85	2,90	2,92	2,98	3,03	3,02	3,05	3,13	3,27	3,31	2,85	3,18	3,04	1,14
H	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,30	0,31	0,30	0,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,07	0,08	0,08	-0,32
J	Informasi dan Komunikasi	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,43	0,43	0,44	0,48	0,49	0,44	1,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	0,44	0,44	0,46	0,48	0,46	0,47	0,47	0,48	0,46	0,48	0,49	0,46	0,96
L	Real Estate	0,92	0,91	0,95	0,93	0,94	0,97	0,96	0,96	0,98	0,99	1,02	1,02	0,96	0,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,0032	0,0032	0,0033	0,0033	0,0035	0,0036	0,0036	0,0036	0,0037	0,0038	0,0031	0,0030	0,0034	-0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,69	1,75	1,76	1,71	1,67	1,69	1,64	1,65	1,66	1,68	1,58	1,52	1,67	-0,96
P	Jasa Pendidikan	0,51	0,51	0,49	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,51	0,52	0,55	0,54	0,50	0,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,18	3,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,25	0,26	0,26	0,27	0,29	0,29	0,30	0,31	0,33	0,35	0,28	0,28	0,29	1,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,75

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2011-2022 dan Olahan Tahun 2022

2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB HK)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dengan migas selama 2011-2021 rata-rata sebesar 3,17% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi dicapai pada Tahun 2013 yaitu sebesar 6,31% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar -0,90%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar sejak Tahun 2011-2021 sudah mampu melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau kecuali pada tahun 2018 yang hanya mencapai 1,91% sementara pertumbuhan ekonomi provinsi Riau sebesar 2,35%. Berikut Gambar 2.22 disajikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar selama tahun 2011-2021.



Gambar 2.22
Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas
Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Tahun 2011-2021

Sementara itu pertumbuhan ekonomi sektoral selama periode 2011-2021 menunjukkan bahwa sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dari 17 sektor ekonomi selama periode tersebut yaitu sebesar 10,09%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,15% per tahun dan terendah terjadi pada tahun 2016 hanya

1,14%. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terendah bahkan mengalami kontraksi selama periode 2011-2021 adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar -1,28% per tahun. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,35%. Namun penurunan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian (industri migas) di wilayah ini tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena proses produksi barang dan jasa sektor ini rata-rata dilaksanakan oleh perusahaan, tetapi mempengaruhi aktifitas ekonomi lainnya dan penerimaan daerah sehingga secara tidak langsung juga akan mengurangi kondisi ekonomi terutama pendapatan masyarakat dan juga terdampak pada penurunan dana DBH pemerintah daerah. Oleh karena itu tentu dapat dirasakan dampak negative oleh masyarakat dan pemerintah di daerah walaupun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sektor ekonomi lokal, seperti yang terjadi pada kegiatan yang padat modal seperti tambang minyak.

Sementara sektor pertanian yang banyak digeluti masyarakat sebagai lapangan kerja utama hanya mengalami rata-rata pertumbuhan selama periode 2011-2021 tersebut sebesar 4,38% per tahun. Selama periode tersebut pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2017 sebesar 6,76%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha cocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, pennebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar serta kegiatan jasa pertanian. Sektor pertanian meliputi beberapa sub sektor yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil hasilnya, kehutanan dan perikanan akibat adanya peningkatan investasi beberapa tahun sebelumnya sehingga berakibat pada peningkatan jumlah produksi komoditas pertanian pada tahun 2017.

Namun pertumbuhan ekonomi terendah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kampar selama 2011-2021 terjadi pada tahun 2015 hanya sebesar 0,36% disebabkan terjadinya penurunan volume produksi barang dan jasa pada sektor tersebut. Sementara komoditas tersebut mendominasi lapangan usaha dan kerja masyarakat di wilayah ini. Penurunan produksi tersebut

akibat terjadinya penurunan harga komoditas yang dihasilkan di wilayah tersebut yaitu kelapa sawit dan karet sehingga mengurangi minat masyarakat untuk mengelola usahanya secara maksimal. Selain itu rendahnya harga komoditas kelapa sawit dan karet berdampak pada menurunnya gairah masyarakat yang bergerak dalam sektor tersebut untuk meningkatkan produksinya sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian terutama pada masyarakat adalah melalui peningkatan kapasitas investasi, invensi dan inovasi serta penerapan teknologi dengan manajemen terbaik atau *good agricultural practices*.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan melalui penyediaan, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Pemerintah perlu mendorong perkembangan sektor ekonomi yang lain sebagai pemanfaat terhadap hasil sektor pertanian seperti sektor industri. Sektor industri yang tangguh dapat menyerap komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat secara umum untuk diolah di dalam di wilayah ini agar menjadi produk industri yang dihasilkan secara relatif tidak berkorelasi secara langsung dengan harga pasar internasional sebagai komoditas utama.

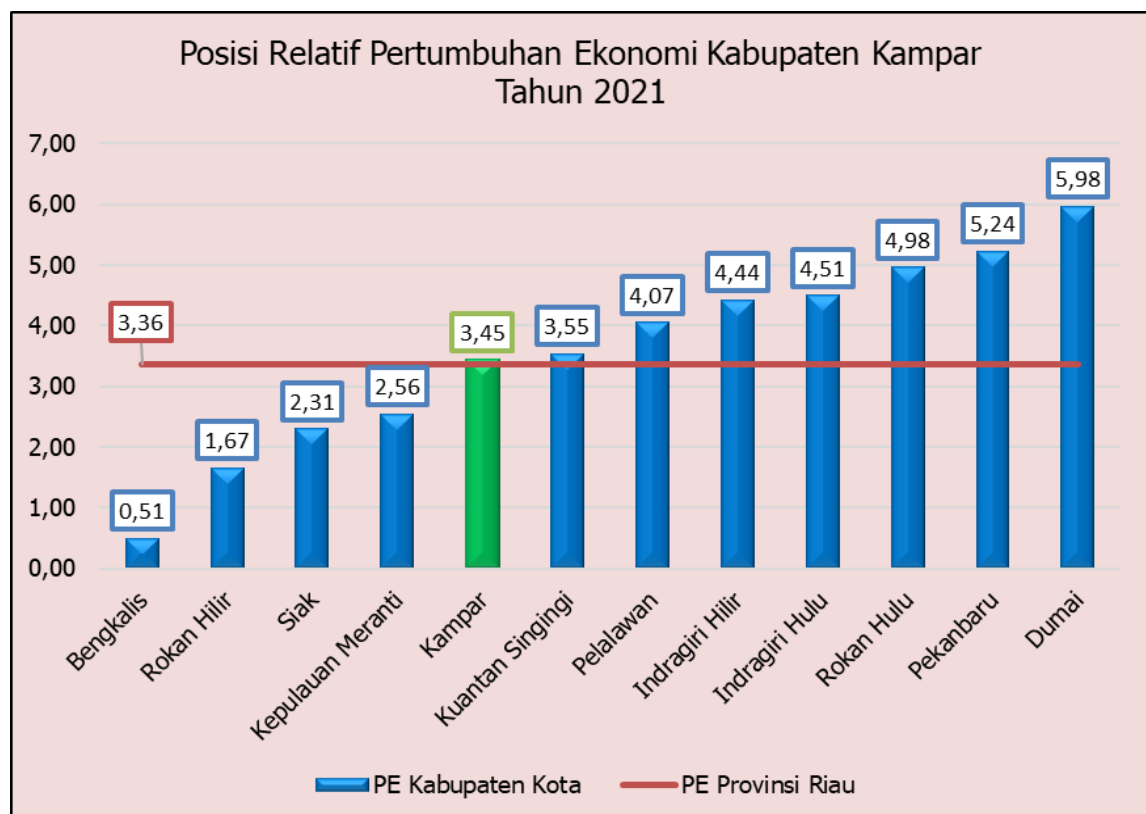
Selain itu secara makro ekonomi upaya lain yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong pengambil kebijakan pada sektor moneter melalui penurunan biaya modal atau tingkat bunga bank. Penurunan tingkat bunga bank akan memotivasi masyarakat untuk melakukan pinjaman modal baik untuk belanja modal (investasi) maupun belanja konsumsi dan selain itu melalui peningkatan gaji pekerja yang pertumbuhannya melebihi tingkat inflasi. Hal ini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga belanja konsumsi RT terhadap barang dan jasa akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi sektoral selama periode tahun 2011-2021 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dengan Migas Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021 (%)

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	3,46	3,13	4,88	0,36	4,92	6,76	5,73	5,73	5,19	5,83	4,38
B	Pertambangan dan Penggalian	3,86	3,64	4,53	0,44	0,30	-0,73	-5,33	-5,51	-5,94	-6,35	-2,97	-1,28
C	Industri Pengolahan	5,36	9,77	11,90	4,26	1,54	4,23	7,16	3,65	9,43	-0,94	4,20	5,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,71	4,37	4,25	20,96	8,90	12,52	4,81	6,64	3,38	8,52	5,21	7,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	0,72	0,00	1,07	2,11	-0,69	2,78	0,00	0,34	0,67	5,02	1,36
F	Konstruksi	9,11	12,34	7,58	6,99	5,13	4,07	3,51	3,46	5,21	-3,29	3,53	5,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,80	6,57	8,32	5,45	0,68	3,84	5,74	6,19	5,21	-14,60	15,29	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan	2,27	3,84	2,88	2,90	8,23	5,50	5,63	4,61	4,94	-8,11	5,74	3,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,73	3,54	2,81	2,37	3,88	4,24	4,09	4,15	6,59	-16,30	12,51	2,87
J	Informasi dan Komunikasi	3,20	6,16	4,52	3,42	2,40	2,03	1,98	2,09	5,76	8,23	6,91	4,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,56	4,83	11,61	8,91	-3,53	3,55	2,98	4,68	0,24	3,86	5,01	4,15
L	Real Estate	2,97	10,66	3,74	4,57	4,43	1,43	2,97	3,72	5,46	1,96	3,12	4,09
M,N	Jasa Perusahaan	4,17	8,80	7,35	10,27	3,11	3,01	4,09	5,06	6,42	-20,10	1,26	3,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	6,76	3,02	1,25	2,02	0,06	3,14	2,92	4,84	-6,82	-0,58	2,19
P	Jasa Pendidikan	3,87	2,40	2,12	3,22	2,11	2,86	5,46	5,88	7,69	2,97	3,36	3,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,81	6,73	6,84	7,64	9,34	1,14	3,00	2,37	11,10	13,36	11,31	7,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,72	5,31	10,92	10,44	2,89	4,67	7,75	9,37	9,29	-21,68	4,33	4,55
PDRB Dengan Migas		4,11	5,82	6,31	3,43	1,09	2,80	2,97	1,91	3,86	-0,90	3,45	3,17

Sumber: BPS Kabupaten Kampar, 2010-2021 dan Olahan Tahun 2022

Sementara itu jika diamati posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 8 terendah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,45% dan hanya ada Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Rokan Hilir, dan Bengkalis yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari Kabupaten Kampar, namun pertumbuhan ekonomi kabupaten Kampar berada lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Riau sebesar 3,36%. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



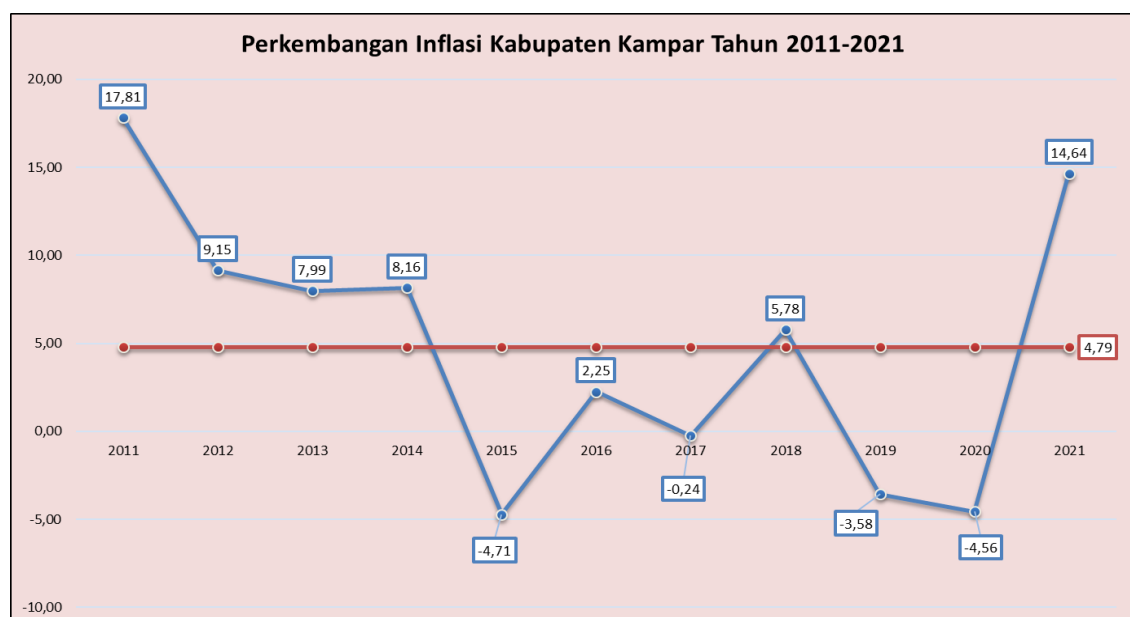
Gambar 2.23
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau
Tahun 2021

2.3.1.3 Pertumbuhan Laju Inflasi

Inflasi adalah sesuatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, dengan kata lain inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi sebagai suatu peristiwa dan yang menjadi persoalan bukan tingginya harga, tetapi proses kenaikan harga yang terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, juga termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi terjadi karena keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan pada umumnya berlangsung dalam kurun waktu tertentu selama 1 Tahun. Inflasi berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan di bawah 10% setahun; (ii) inflasi sedang antara 10 – 30% setahun, (iii) inflasi berat antara 30 – 100% setahun, dan (iv) hiperinflasi di atas 100% setahun.



Gambar 2.24
Perkembangan Inflasi Kabupaten Kampar Tahun 2011-2021

Perkembangan inflasi Kabupaten Kampar dengan migas selama tahun 2011-2021 menunjukkan dalam kategori inflasi ringan karena rata-rata inflasinya sebesar 4,79% per tahun dan mengalami penurunan dari 17,81% pada tahun 2011 menjadi -4,56% pada tahun 2020 kemudian meningkat kembali menjadi 14,64% tahun 2021. Perkembangan inflasi di Kabupaten Kampar tahun 2011-2021 ditunjukkan pada Gambar 2.24 di atas.

Sementara itu perkembangan inflasi sektor ekonomi menunjukkan bahwa selama sebelas tahun sektor ekonomi yang mengalami rata-rata inflasi tertinggi adalah pertambangan dan penggalan sebesar 9,19% sementara sektor yang

mengalami rata-rata inflasi terendah adalah sektor industri pengolahan hanya sebesar 2,71%.

Namun jika dilihat inflasi tahunan menunjukkan bahwa rendahnya inflasi pada tahun 2020 merupakan dinamika kebijakan PPKM serta produksi bahan pangan di daerah pemasok memengaruhi inflasi. Selanjutnya peningkatan inflasi tahun 2021 akibat permintaan seiring dengan kebijakan pelonggaran PPKM ditambah dengan ketidakstabilan pasokan komoditas pangan disinyalir menjadi penyebab tingginya tekanan harga komoditas pada hampir seluruh kelompok komoditas. Komoditas bahan pangan seperti cabai merah, ayam hidup, dan daging ayam ras memiliki andil besar dalam mendorong tekanan inflasi.

Berbagai perkembangan tersebut, ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan mampu tumbuh positif dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya sehingga dapat menurun angka inflasi kembali. Kondisi tersebut mendorong peningkatan permintaan komoditas utama yang berakibat peningkatan supply di Kabupaten Kampar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dan diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan tingkat inflasi. Disisi lain potensi peningkatan inflasi juga dapat terjadi akibat permintaan yang meningkat jika tidak dibarengi dengan peningkatan supply, sementara tingginya harga komoditas ekspor mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat yang juga dapat mendorong peningkatan inflasi. Selain itu, peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi produktif diperkirakan turut meningkatkan inflasi. Jika dilihat dari 17 sektor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua sektor ekonomi masuk dalam kategori inflasi ringan karena dibawah 10% per tahun. Jelasnya perkembangan inflasi sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Inflasi Sektor Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2011–2021 (%)

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,85	3,38	2,59	7,31	7,01	5,24	0,82	-2,05	0,26	6,71	11,63	4,25
B	Pertambangan dan Penggalian	46,58	18,11	17,14	12,11	-17,88	-0,26	1,29	21,36	-5,97	-23,57	32,23	9,19
C	Industri Pengolahan	3,73	1,61	-0,69	3,53	6,10	2,57	-1,28	-0,44	-2,41	5,38	11,67	2,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,47	15,38	-24,64	5,64	24,83	7,97	13,20	1,39	4,72	1,77	-0,04	6,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,58	5,13	0,65	2,48	8,98	2,96	3,73	1,03	2,21	0,32	0,16	2,84
F	Konstruksi	4,60	12,05	7,71	6,36	6,73	7,02	2,58	3,27	3,22	0,38	4,15	5,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,47	7,83	2,27	17,75	6,86	6,05	1,09	0,82	4,74	3,93	0,75	5,32
H	Transportasi dan Pergudangan	2,68	5,14	5,24	7,11	8,32	4,59	1,90	4,01	5,30	5,98	2,49	4,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	10,56	5,25	6,34	6,78	8,30	1,48	1,35	1,23	2,09	0,98	4,41
J	Informasi dan Komunikasi	1,74	4,56	3,33	4,19	6,19	1,04	5,39	3,31	2,34	-0,08	0,41	2,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	2,66	5,42	6,60	4,79	4,96	2,51	3,15	1,70	-0,40	5,37	3,40
L	Real Estate	7,81	2,64	4,15	8,50	5,57	7,09	1,55	1,18	1,88	0,37	1,06	3,80
M,N	Jasa Perusahaan	2,40	6,99	5,03	6,88	5,81	6,51	1,74	1,25	4,53	2,40	-0,43	3,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,80	4,75	2,96	1,56	2,13	5,92	3,84	2,75	1,64	2,87	0,84	3,01
P	Jasa Pendidikan	7,34	2,06	3,49	6,86	12,27	7,23	2,36	2,23	2,32	2,23	0,68	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,92	4,49	4,07	8,81	15,93	6,30	1,15	2,08	4,09	2,30	1,06	4,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,79	3,51	3,44	7,55	8,62	5,04	2,13	1,78	2,36	2,46	0,78	3,77
PDRB Dengan Migas		17,81	9,15	7,99	8,16	-4,71	2,25	-0,24	5,78	-3,58	-4,56	14,64	4,79

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2011-2022 dan Olahan Tahun 2022

Walaupun inflasi dalam kategori rendah namun inflasi yang terjadi juga disebabkan oleh harga komoditas-komoditas bahan pangan akibat faktor fundamental, yaitu masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar daerah. Komoditas-komoditas dimaksud antara lain: (i) beras pera/bederai, (ii) telur ayam ras, (iii) daging ayam ras, (iv) cabai merah, (v) bawang merah, (vi) daging sapi, dan (vii) bawang putih. Upaya untuk menekan angka inflasi maka struktur produksi dan distribusi serta pendapatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kampar kedepan.

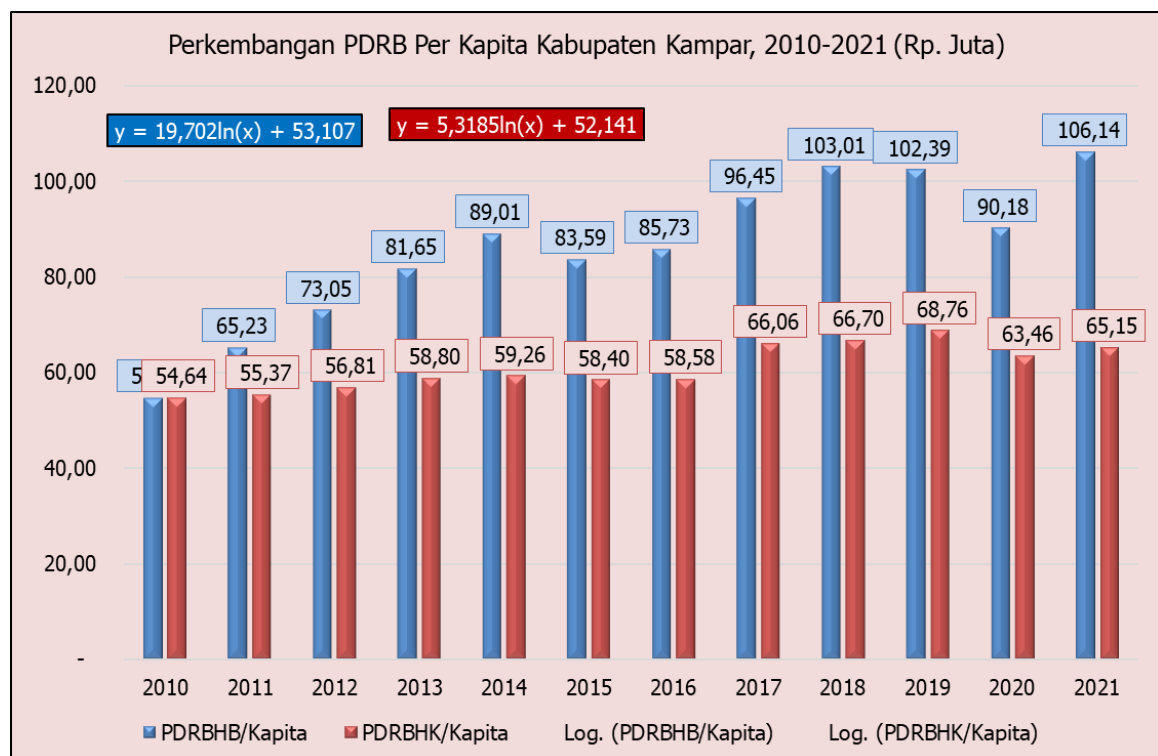
2.3.1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat peningkatan produksi barang dan jasa, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. Dengan demikian PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Hal ini dapat juga digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi

agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 ditunjukkan pada Gambar 2.25, selama periode tersebut PDRB per kapita Harga Berlaku dengan migas menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 54,64 Juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 106,14 juta per kapita pada tahun 2021 atau naik dengan pertumbuhan 6,65% per tahun. Demikian halnya dengan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan dari Rp. 54,64 juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 65,15 juta per kapita pada tahun 2021 atau dengan pertumbuhan 1,71% per tahun.



Gambar 2.25
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar
Tahun 2010-2021

Berdasarkan Tabel 2.23 pertumbuhan pendapatan per kapita atas harga dasar berlaku tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 17,69%, dan atas dasar harga konstan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 12,77%. Kontraksi pertumbuhan PDRB ADHB per kapita terjadi pada tahun 2015 dan 2020. Hal ini terjadi karena musibah asap yang berekpanjangan pada tahun 2015, dan Covid 19 tahun 2020 sehingga menyebabkan terjadinya gangguan aktifitas proses produksi barang dan jasa dan mengakibatkan turunnya produksi barang dan jasa. Terhadap PDRB ADHK kontraksi pertumbuhan terjadi juga pada tahun 2015 dan 2020. Berikut Tabel 2.23 menyajikan perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Kampar selama tahun 2010-2021.

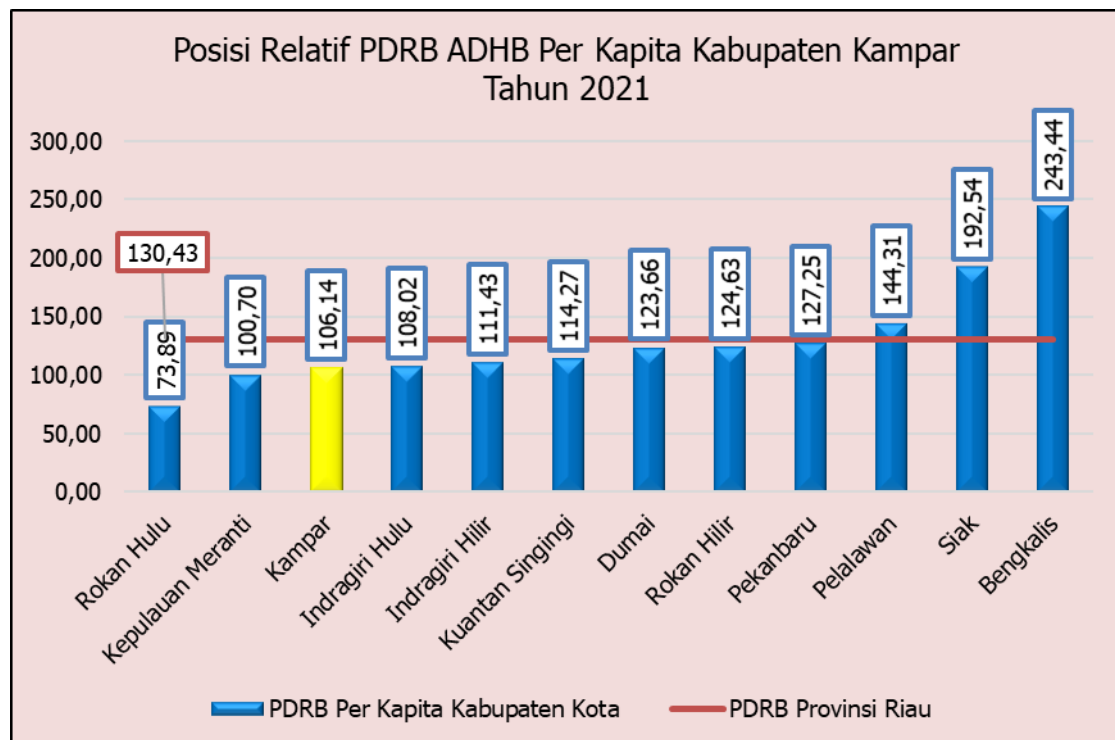
Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021

Tahun	ADHB Dengan Migas (Rp. Juta)	ADHK Dengan Migas (Rp. Juta)	ADHB Perkapita (Rp. Juta)	Pertumbuhan /Tahun (%)	ADHK Perkapita (Rp. Juta)	Pertumbuhan /Tahun (%)
2010	37.822	37.822	54,64	0,00	54,64	0,00
2011	46.393	39.378	65,23	19,37	55,37	1,33
2012	53.584	41.669	73,05	11,99	56,81	2,60
2013	61.516	44.298	81,65	11,77	58,80	3,51
2014	68.817	45.816	89,01	9,01	59,26	0,78
2015	66.285	46.314	83,59	-6,09	58,40	-1,44
2016	69.676	47.610	85,73	2,57	58,58	0,31
2017	71.571	49.022	96,45	12,50	66,06	12,77
2018	77.153	49.959	103,01	6,80	66,70	0,97
2019	77.267	51.889	102,39	-0,60	68,76	3,08
2020	73.076	51.420	90,18	-11,92	63,46	-7,71
2021	86.670	53.196	106,14	17,69	65,15	2,66

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, Olahan Tim Tahun 2021

Sementara itu jika diamati posisi pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 10 terendah dengan PDRB ADHB Perkapita senilai Rp. 106,14 juta dan hanya ada Kabupaten yaitu Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hulu yang nilai pendapatan per kapitanya yang lebih rendah Kabupaten Kampar

dan berada lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB ADHB per kapita Provinsi Riau senilai Rp. 130,43 juta. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.26
Posisi Relatif PDRB Per Kapita Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

2.3.1.5 Perkembangan Indeks Gini

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Lebih lanjut Todaro (2020) menyatakan bahwa untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan *sangat tidak merata* jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan

ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49 dan kurang 0,30 maka pada kategori ketimpangan rendah.

Selama periode 2018-2021, angka indeks gini Kabupaten Kampar berkisar antara 0,293-0,281 dengan trend berfluktuatif menurun (terjadi perbaikan) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.24 dan Gambar 2.27. Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan antara penduduk di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata selama 2018-2021. Pergerakan kategori relatif merata ini perlu menjadi perhatian untuk dipertahankan bahkan dapat diturunkan dengan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau ke depan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut masih perlu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan ke depan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut. Selama periode 2018-2021 terjadi perbaikan pemerataan dengan penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 1,26% per tahun untuk Kabupaten Kampar dan 0,09% per tahun untuk Provinsi Riau.

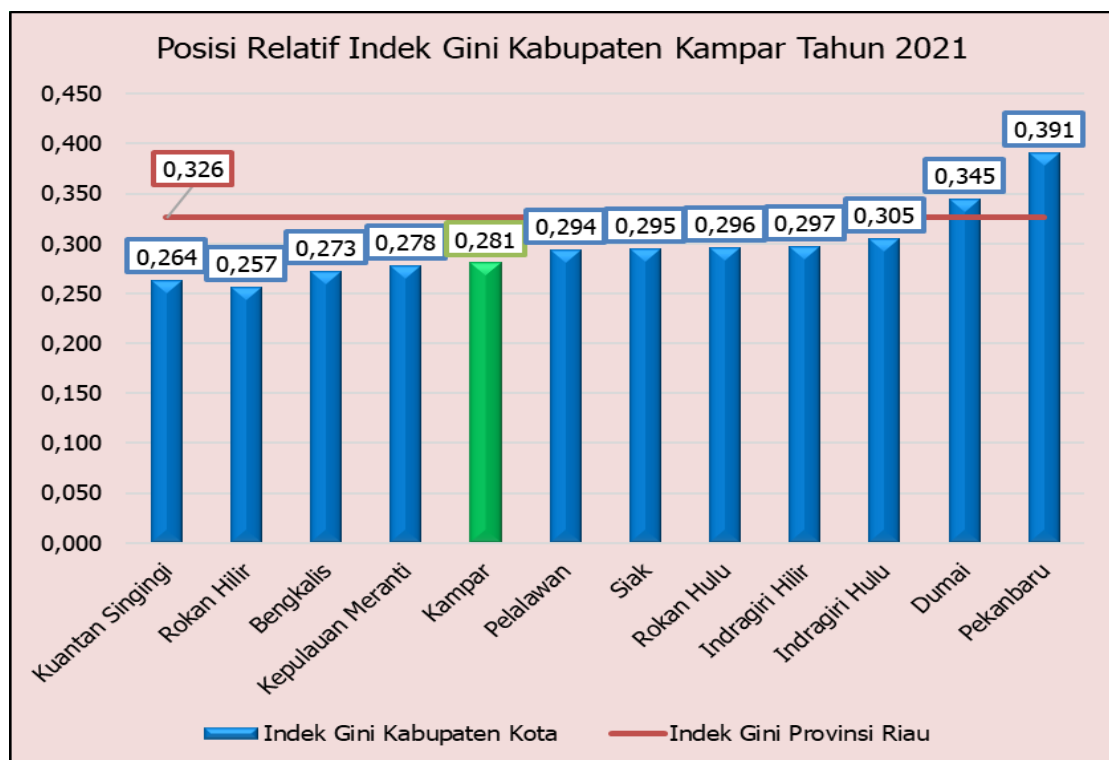
Tabel 2.24
Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kampar
Tahun 2018-2021

Wilayah	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)/Tahun
	2018	2019	2020	2021	
Indek Gini Kabupaten Kampar	0,293	0,300	0,306	0,281	-1,26
Indek Gini Provinsi Riau	0,327	0,334	0,329	0,326	-0,09

Sumber: BPS Provinsi Riau, BRS 2020

Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 0,281 dan 0,326 sudah termasuk kategori relatif merata. Namun jika dilihat indeks gini rasio

antara perkotaan dan pedesaan maka tingkat pemerataan pendapatan penduduk kota dan desa di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau pada tahun 2021 menunjukkan kondisi yang berbeda dimana IGR perkotaan lebih tinggi sedangkan pedesaan kategori relatif merata. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah Kabuapten Kampar, Provinsi Riau dan Pusat dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (*self services development*).



Gambar 2.27
Posisi Relatif Indeks Gini Pemerataan Pendapatan
Kabupaten Kampar Tahun 2021

IGR Kabupaten Kampar pada tahun 2021 masih lebih baik dibandingkan indeks gini Indonesia (0,381) meski berada dalam kelompok yang berbeda yaitu ketidakmerataan sedang dan merata. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Kota di provinsi Riau, pencapaian indeks gini Kabupaten Kampar berada pada posisi terbaik kelima di Provinsi Riau lebih rendah dibanding Kabupaten Siak, Rokan

Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Jelasnya lihat Gambar 2.27 di atas.

2.3.1.6 Pemerataan Pendapatan

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang di golongkan sebagai berikut:

1. Memperoleh < 12%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi
2. Memperoleh 12 – 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang
3. Memperoleh 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

2.3.1.7 Indek Ketimpangan Williamson (Ketimpangan Regional)

Indeks Williamson merupakan koefisien variasi tertimbang yang dibuat oleh Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang terjadi (Williamson dalam Akita and Kataoka, 2003): Indeks Williamson

digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar Kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per Kabupaten dan kota. Indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

Jika indeks Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata. Jika mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata, sehingga dapat dikelompokkan pada: a) Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$; b) Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$; dan c) Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$.

Indeks Williamson Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 0,44. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,48. Artinya, ketimpangan distribusi pendapatan masih cukup tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah masih belum merata. Selama periode 2011-2021 dapat dilihat pemerataan pembangunan terus mengalami perbaikan. Hal ini juga dapat diartikan suatu keberhasilan dalam upaya pemerataan pembangunan di Riau.

2.3.1.8 Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan Kesehatan dengan kata lain Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Ada beberapa tinjauan kategori kemiskinan terutama terkait dengan:

- a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari orang miskin.
- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.

- c. Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga.
- d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
- e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

1) Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kampar selama periode 2010-2021 berkurang sebesar -0,22% per tahun. Perkembangan indikator kemiskinan Kabupaten Kampar seperti yang disajikan pada Tabel 2.25 di bawah ini:

Tabel 2.25
Perkembangan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Kampar
Tahun 2010-2021

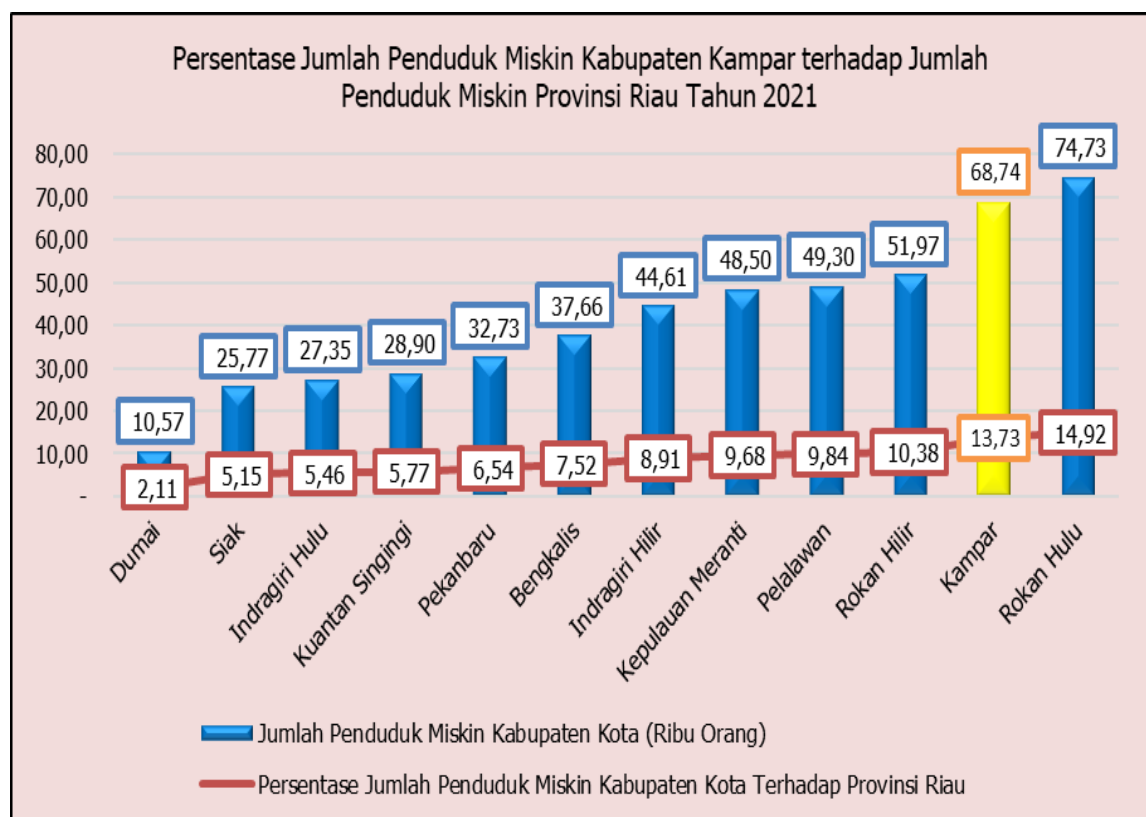
Tahun	Indikator Kemiskinan				
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indek Kedalaman Kemiskinan	Indek Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan Rp/ Kapita/ Bulan
2010	72,30	10,47	1,37	0,29	279.606
2011	61,20	8,52	1,38	0,36	308.446
2012	61,75	8,36	0,97	0,21	320.907
2013	68,58	9,04	0,86	0,15	336.681
2014	67,61	8,68	1,22	0,30	348.373
2015	72,22	9,17	1,41	0,32	360.324
2016	67,68	8,38	1,24	0,29	375.716
2017	66,33	8,02	1,01	0,20	398.138
2018	69,32	8,18	1,10	0,21	419.306
2019	66,81	7,71	0,93	0,18	434.601
2020	65,30	7,38	0,77	0,13	460.991
2021	68,74	7,82	0,99	0,21	477.603

Sumber: BPS, Statistik Dasar Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2011-2022

Jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 72,30 ribu jiwa kemudian berkurang menjadi 68,74 ribu jiwa tahun 2021 atau berkurang sebanyak 3.560 jiwa. Rendahnya kemampuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

tersebut disebabkan oleh kecepatan dalam strategi penurunan jumlah penduduk miskin secara relatif berpacu dengan pertambahan jumlah penduduk yang tumbuh sebesar 1,07% per tahun selama tahun 2017-2021.

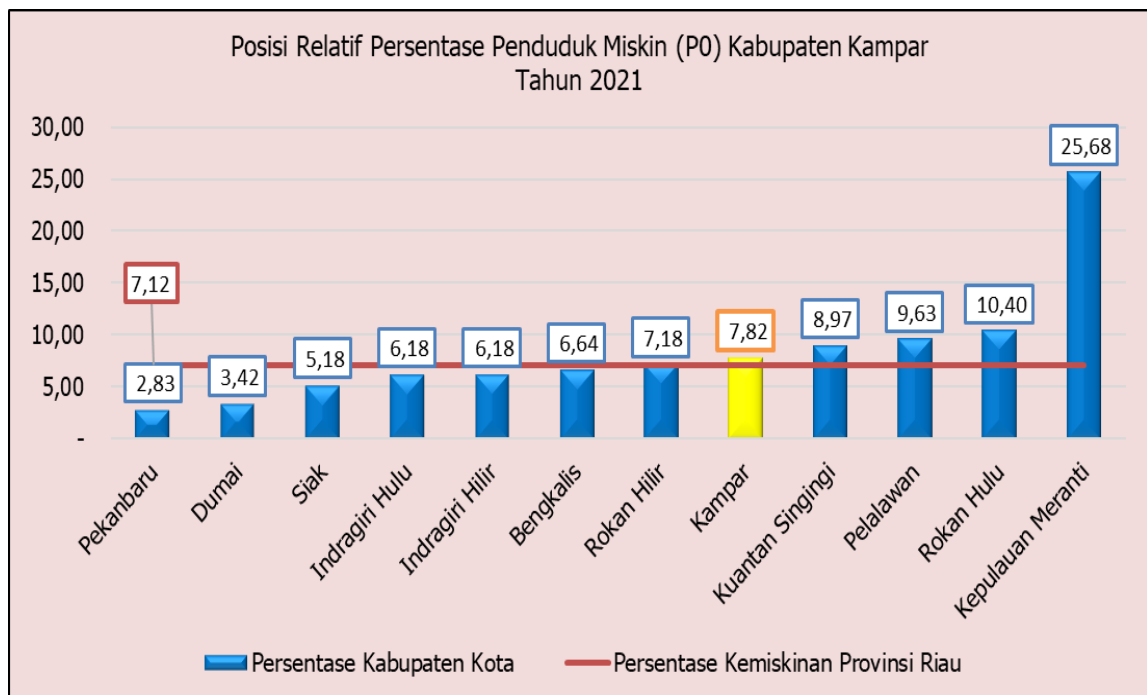
Sementara itu jika diamati posisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 2 paling banyak dengan jumlah penduduk miskin 68.740 jiwa. Jika dilihat kontribusi jumlah penduduk miskin Kabupaten Kampar terhadap jumlah penduduk miskin provinsi Riau sebanyak 500.830 jiwa adalah 13,37%. Posisi relatif jumlah dan kontribusi penduduk miskin Kabupaten Kampar terhadap penduduk miskin Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 2.28.



Gambar 2.28
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kampar terhadap Penduduk Miskin Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021
2) Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin-P0)

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin

sebesar 10,47%, menurun menjadi 7,82% pada tahun 2021. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama periode 2010–2021 sebesar - 2,34% per tahun. Namun demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin Provinsi Riau yang hanya sebesar 7,12% tahun 2021. Artinya jika dilihat secara relatif persentase penduduk miskin menurun namun secara riil hanya berkurang sedikit tetapi tidak signifikan karena pertambahan jumlah penduduk lebih cepat ketimbang kecepatan penurunan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu upaya pengurangan jumlah penduduk miskin memerlukan rencana yang tepat dan akurat terutama terkait dengan data kependudukan dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.



Gambar 2.29
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P0 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

Sementara itu jika diamati posisi relatif persentase jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 8 dengan indeks P0 sebesar 7,82% artinya terdapat 7,82% penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan di atas garis kemiskinan

atau proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Kampar lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti. Posisi relatif jumlah persentase penduduk miskin Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.29.

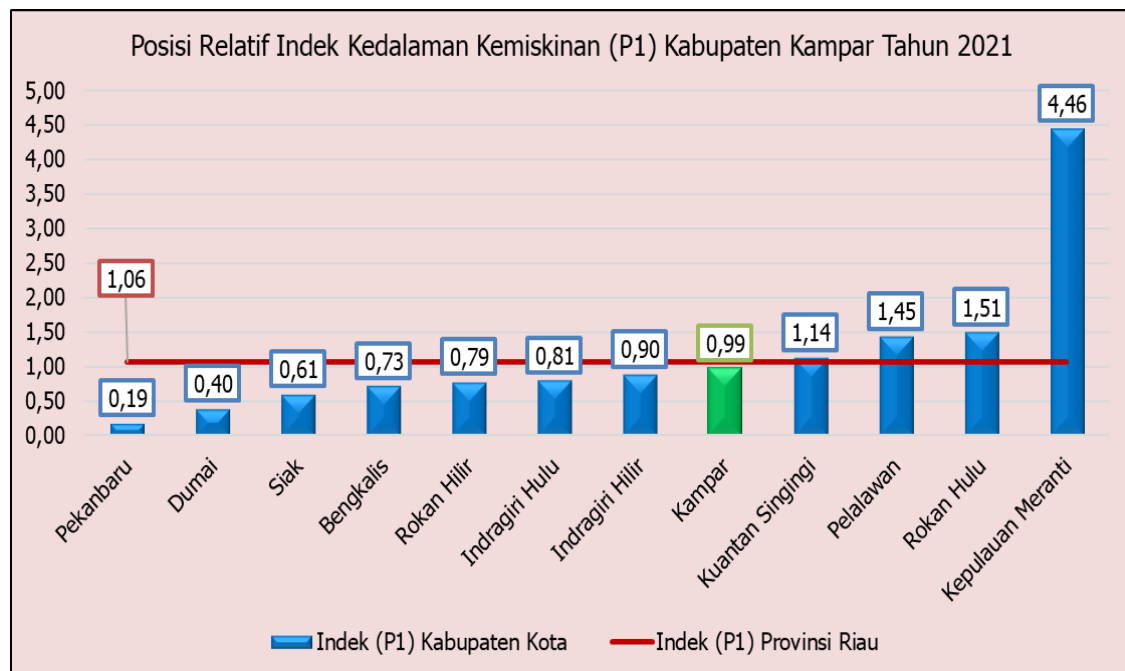
3) Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)

Selanjutnya jika diamati Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin kecil P1 maka semakin besar potensi dapat dikeluarkannya dana untuk pengentasan kemiskinan, pencapaian target, sasaran, dan jalannya program bantuan.

Perkembangan P1 di Kabupaten Kampar selama periode 2010-2021 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,79 per tahun. Artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menurun sebesar 79,00%. Jika dilihat indeks P1 pada tahun 2010 sebesar 1,375 kemudian menurun menjadi 0,99 pada tahun 2021 atau terjadi penurunan sebesar 0,38. Oleh karena itu upaya untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin harus terus dilakukan yang didasari dengan pendataan secara detail profil penduduk miskin yang bersangkutan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Sementara itu jika diamati posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di Provinsi Riau berada pada posisi 8 dengan indeks P1 sebesar 0,99 artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Kampar lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti dan bahkan Provinsi Riau. Posisi

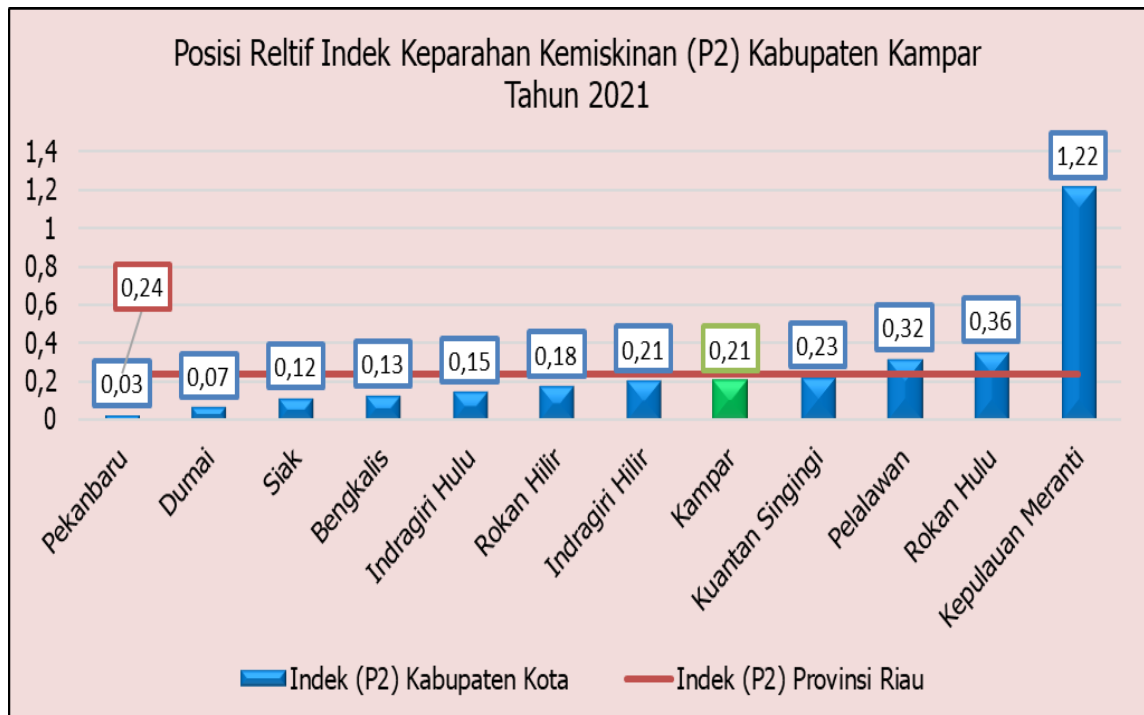
relatif jumlah indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.30.



Gambar 2.30
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kampar terhadap Indeks P1 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin atau semakin timpang pengeluaran penduduk miskin. Perkembangan P2 di Kabupaten Kampar mengalami fluktuasi selama periode 2010-2021. Secara relatif kondisi P2 mengalami perkembangan yang signifikan karena nilai indeks P2 tahun 2010 sebesar 0,29 kemudian berkurang menjadi 0,21 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kampar memiliki ketimpangan yang lebih sempit dari pada Provinsi Riau dengan nilai indeks P2 sebesar 0,24. Perkembangan indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kampar Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.25



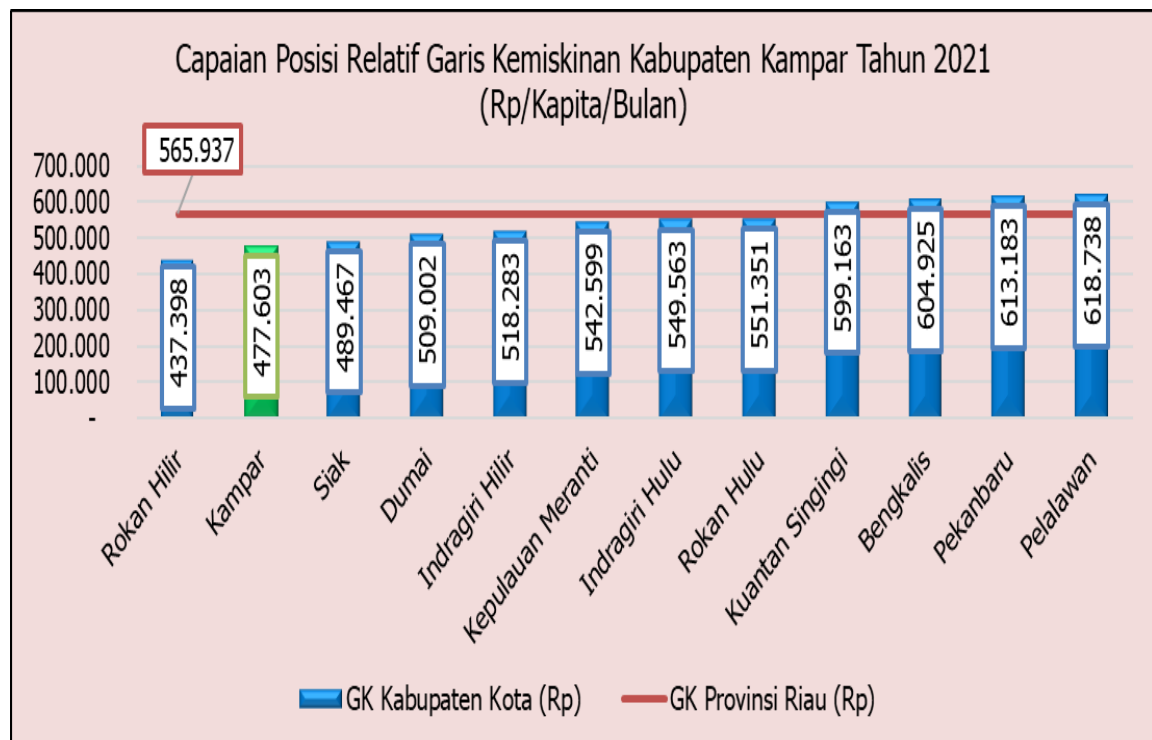
Gambar 2.31
Posisi Relatif Index Keparahan Kemiskinan (P1) Kabupaten Kampar terhadap Index P1 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

Sementara itu jika diamati posisi relatif index keparahan kemiskinan Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di Provinsi Riau berada pada posisi 8 dengan index P1 sebesar 0,21 artinya penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Kampar lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti dan bahkan Provinsi Riau. Posisi relatif index kedalaman kemiskinan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.31.

5) Garis Kemiskinan (Poverty Line)

Sementara itu perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kampar memiliki kecenderungan yang sama. GK adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah dan digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan

mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi, seperti program peningkatan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.



Gambar 2.32
Posisi Relatif Garis Kemiskinan (P3) Kabupaten Kampar terhadap
Indek P3 Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

Perkembangan GK Kabupaten Kampar mengalami pertumbuhan 5,00%, dimana GK pada tahun 2010 senilai Rp. 279.606 /Kapita/Bulan kemudian meningkat menjadi Rp. 477.603/Kapita/Bulan atau naik senilai Rp. 197.997 /Kapita/Bulan selama tahun 2010-2021. Namun pada tahun 2021, GK Kabupaten Kampar Rp.477.603/kapita/bulan masih lebih rendah dibandingkan dengan GK provinsi Riau yaitu senilai Rp. 565.937/kapita/bulan. Artinya kebutuhan minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup per bulan di Kabupaten Kampar lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau. Namun apabila penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan individu penduduk sebanyak itu maka penduduk tersebut masuk kategori miskin.

Sementara itu posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Kampar tahun 2021 terhadap 12 kabupaten Kota di provinsi Riau berada pada posisi 2 terendah

dengan indek GK senilai Rp.477.603/kapita/bulan. GK Kabupaten Kampar hanya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan GK Kabupaten Rokan Hilir. Posisi relatif GK Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.32.

6) Penduduk Miskin Kecamatan

Selanjutnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan distribusi menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.26. Berdasarkan basis data terpadu sebagaimana yang dikelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berbasis *By Name By Address (BNBA)* Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tingginya tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin dapat disebabkan oleh belum terkendalikannya tingkat inflasi terhadap komoditas untuk nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Komoditas untuk kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara komoditas Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan terdiri dari 51 jenis komoditas untuk perkotaan dan 47 jenis komoditas untuk perdesaan

Selanjutnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan distribusi menurut kecamatan. Garis kemiskinan Kabupaten Kampar terendah kedua di Provinsi Riau tahun 2021 hanya mencapai Rp.477.603/kapita/bulan. Artinya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin tersebut maka diperlukan adanya program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat agar seluruh pendapatan kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan individu yang terdapat dalam keluarga tersebut. Berikut kondisi kemiskinan berdasarkan kecamatan tahun 2021.

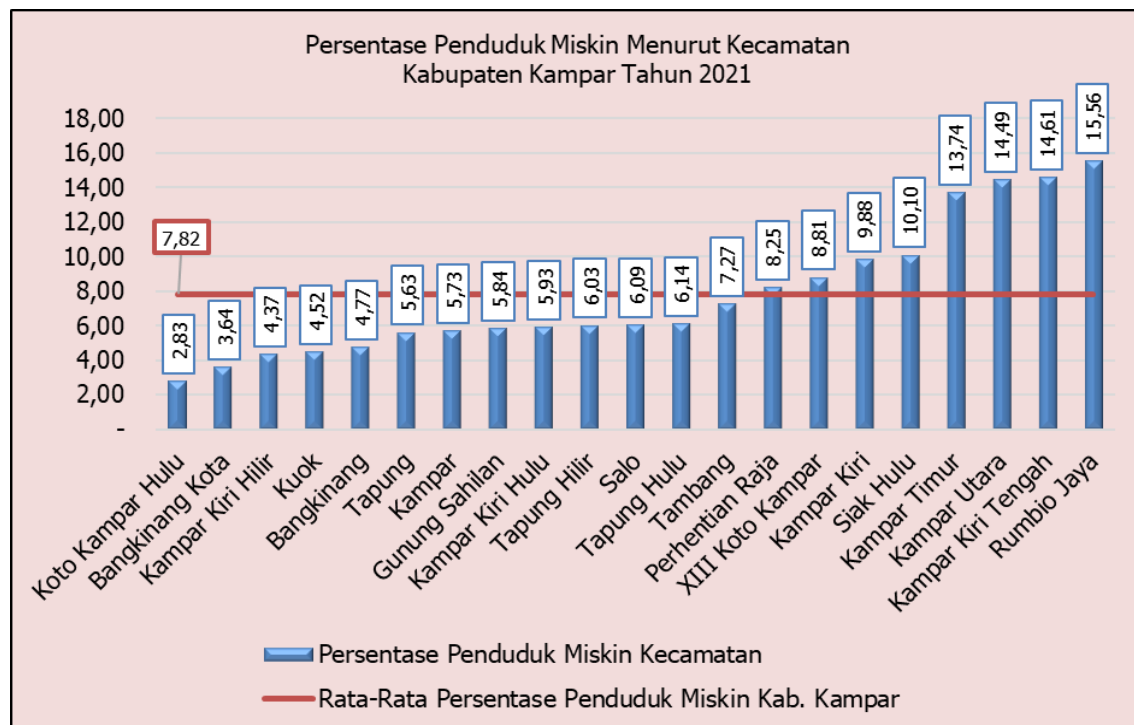
Tabel 2.26
Penduduk Miskin Per Kecamatan Berdasarkan Basis Data Terpadu (BNBA) di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Distribusi Penduduk Miskin (%)
1	Kampar Kiri	6.225	9,88	6,00
2	Kampar Kiri Hulu	3.735	5,93	3,60
3	Kampar Kiri Hilir	2.753	4,37	2,66
4	Gunung Sahilan	3.684	5,84	3,55
5	Kampar Kiri Tengah	9.207	14,61	8,88
6	XIII Koto Kampar	5.556	8,81	5,36
7	Koto Kampar Hulu	1.782	2,83	1,72
8	Kuok	2.847	4,52	2,75
9	Salo	3.836	6,09	3,70
10	Tapung	3.547	5,63	3,42
11	Tapung Hulu	3.872	6,14	3,73
12	Tapung Hilir	3.801	6,03	3,67
13	Bangkinang Kota	2.294	3,64	2,21
14	Bangkinang	3.006	4,77	2,90
15	Kampar	3.611	5,73	3,48
16	Kampar Timur	8.658	13,74	8,35
17	Rumbio Jaya	9.808	15,56	9,46
18	Kampar Utara	9.134	14,49	8,81
19	Tambang	4.584	7,27	4,42
20	Siak Hulu	6.369	10,10	6,14
21	Perhentian Raja	5.198	8,25	5,01
Kabupaten Kampar		68.740	7,82	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2.26 dan Gambar 2.33 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terbanyak menurut kecamatan terdapat di Kecamatan Rumbio Jaya sebesar 15,56% dan paling sedikit di Kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 2,83%. Hal tersebut juga memperlihatkan terdapat delapan kecamatan yang tingkat penduduk miskinnya di atas rata-rata Kabupaten tahun 2021. Oleh karena wilayah-wilayah tersebut harus menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan dan diperlukan kebijakan dan program yang memiliki sasaran yang tepat sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin wilayah tersebut. Program dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan mengembangkan segala potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut terutama yang dikelola oleh penduduk miskin sehingga akan meningkatkan pendapatan

masyarakat miskin yang dapat melebihi angka garis kemiskinan di setiap kecamatan.



Sumber: BPS Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2022 dan Data Olahan Tim Tahun 2022

Gambar 2.33
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kecamatan
Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator IPM (Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Rill Per Kapita), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Penduduk Bekerja, Indek kepuasan Masyarakat, PAD terhadap total pendapatan, Skor PPH dan Opini BPK dan Kontribusi sektor pertanian, Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan dan perdagangan dalam struktur perekonomian daerah.

2.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat menurut perkembangan IPM. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Index*) adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (*purchasing power parity/PPP*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

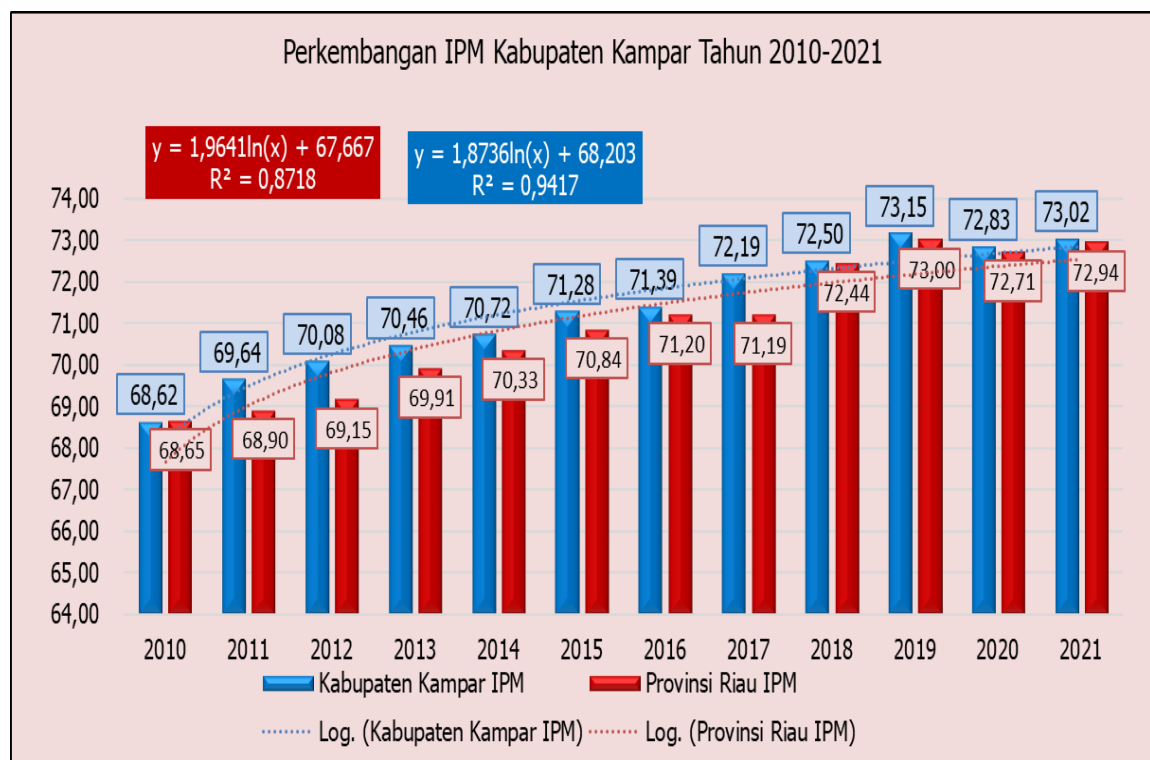
UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995 dalam Shinegi, 2013)

Tabel 2.27
Perkembangan IPM dan Indikatornya di Kabupaten Kampar
Tahun 2010-2021

Indikator IPM	Satuan	Tahun												Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02	0,57
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,58	69,65	69,72	69,77	69,80	70,00	70,08	70,16	70,35	70,64	70,76	70,83	0,16
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,65	11,93	12,22	12,51	12,72	12,86	12,87	13,20	13,21	13,45	13,46	13,55	1,39
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,08	8,56	8,59	8,62	8,62	8,84	8,85	9,09	9,10	9,25	9,26	9,27	1,27
Pengeluaran Per Kapita	(Rp Juta/kapita)	10.433	10.513	10.593	10.624	10.651	10.710	10.765	10.912	11.128	11.232	10.796	10.858	0,37
Pertumbuhan IPM	Indek		1,49	0,63	0,54	0,37	0,79	0,15	1,12	0,43	0,90	(0,44)	0,26	0,57
Pertumbuhan AHH	Tahun		0,10	0,10	0,07	0,04	0,29	0,11	0,11	0,27	0,41	0,17	0,10	0,16
Pertumbuhan HLS	Tahun		2,40	2,43	2,37	1,68	1,10	0,08	2,56	0,08	1,82	0,07	0,67	1,39
Pertumbuhan RLS	Tahun		5,94	0,35	0,35	-	2,55	0,11	2,71	0,11	1,65	0,11	0,11	1,27
Pertumbuhan PPP	(Rp Juta/kapita)		0,77	0,76	0,29	0,25	0,55	0,51	1,37	1,98	0,93	(3,88)	0,57	0,37

IPM Kabupaten Kampar mengalami peningkatan dari tahun 2010-2021 dengan rata-rata pertumbuhan 0,57% per tahun. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Kampar sebesar 68,62 (kategori Sedang) kemudian meningkat menjadi 73,02 (Kategori Tinggi) pada tahun 2021 atau naik sebesar 5,71 Point. Jika IPM Kabupaten Kampar pada tahun 2021 dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional maka IPM Kabupaten Kampar (73,02) lebih tinggi dari IPM Provinsi Riau (72,94) dan IPM Nasional (72,30). Perkembangan IPM dan Indikator pembentuknya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Trend perkembangan IPM Kabupaten Kampar dari tahun 2010-2021 menunjukkan kecepatan yang lebih baik dengan koefisien regresi sebesar 1,873% dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau dengan koefisien regresi sebesar 1,9641. Tren perkembangan IPM Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut.



Gambar 2.34
Perkembangan IPM Kabupaten Kampar Tahun 2010-2021

Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan kesehatan agar pengembangan sumber daya manusia terus membaik. Hasil kajian yang dilakukan oleh Yale University (2019), pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu masalah besar bangsa ini adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menjadikan masyarakat berkualitas harus melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, masyarakat harus berpendidikan tinggi agar dapat memainkan peran dalam perbaikan kehidupan masyarakat. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas masih terbatas. Masyarakat harus memiliki kemampuan literasi, yaitu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu dengan cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara (Wiedarti, 2015), agar mereka dapat berperan lebih jauh dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi diatas adalah AMH. AMH di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 2,15% atau naik dari 537.106 jiwa tahun 2017 bertambah menjadi 581.215 jiwa tahun 2021. Walaupun secara nominal bertambah namun secara relatif berkurang dari 99,74% tahun 2017 menjadi 99,38% tahun 2021. AMH melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Jika diamati dari Tabel 2.28 masih terdapat masyarakat Kabupaten Kampar yang belum melek huruf. Hal tersebut dapat dilihat angka melek huruf dari tahun 2017-2021 hanya tumbuh AMH Kabupaten Kampar lebih tinggi dibandingkan

dengan Provinsi Riau yaitu sebesar 98,93% atau persentase penduduk Provinsi Riau buta huruf sebesar 1,07% pada tahun 2021. Angka melek huruf di Kabupaten Kampar selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Angka ini target akhirnya adalah 100% di Kabupaten Kampar sehingga Kabupaten ini bebas buta huruf. Walaupun dalam pengukuran IPM angka melek huruf sudah menggunakan angka harapan lama sekolah, namun kondisi ini dapat digunakan untuk melihat kondisi perkembangan pengetahuan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Penduduk Melek Huruf	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	538.506	549.274	546.348	580.352	584.841	2,12
3	Persentase Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	72,57	73,34	72,40	71,62	71,62	-0,32
4	Persentase Melek Huruf	99,74	98,78	98,91	99,49	99,38	-0,09
5	Jumlah Penduduk Melek Huruf	537.106	542.573	540.393	577.393	581.215	2,03
6	Persentase Buta Huruf	0,24	0,41	0,83	0,32	0,62	51,39
7	Jumlah Penduduk Buta Huruf	1.400	6.701	5.955	2.960	3.626	84,92

Sumber: Disdukcapil dan BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2021

2.3.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) selama tahun 2017-2021 di Kabupaten Kampar memiliki tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,94% per tahun. Pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kampar dari tahun 2017 yaitu sebesar 9,09 tahun meningkat menjadi 9,27 tahun pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 0,18 tahun. RLS Kabupaten Kampar tahun 2021 sudah lebih tinggi dari RLS Provinsi Riau sebesar 9,19 tahun dan lebih tinggi dari RLS Nasional 8,54 tahun.

Jika dilihat angka tersebut RLS Kabupaten Kampar sudah mencapai standart wajib belajar 9 Tahun, oleh karena itu upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun harus menjadi prioritas pembangunan

dibidang sumber daya manusia kedepannya, karena itu melalui program dan kegiatan peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dan didukung pendidikan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dukungan Pemrov Riau. Perkembangan RLS Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.29
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kampar	Tahun	9,09	9,10	9,25	9,26	9,27	0,94
Provinsi Riau	Tahun	8,76	8,92	9,03	9,14	9,19	1,36

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2021 penduduk Kabupaten Kampar baru 9,27 tahun menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun jika Pendidikan berjalan sesuai harapan bangsa. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun.

ke atas

2.3.2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (RLS) selama tahun 2017-2021 di Kabupaten Kampar memiliki tren peningkatan dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 1,04% per tahun. Pencapaian angka HLS Kabupaten Kampar dari tahun 2017 yaitu sebesar 13,20 tahun meningkat menjadi 13,55 tahun pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 0,35 tahun. Pada tahun 2021 angka HLS Kabupaten Kampar lebih tinggi dari HLS Provinsi Riau sebesar 13,28 tahun dan HLS Nasional 13,08 tahun.

Jika dilihat angka tersebut HLS Kabupaten Kampar telah menggambarkan pencapaian untuk wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh *income* per kapita RT dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang merupakan harapan untuk memperbaiki kehidupan masa depan. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang memprioritas pendidikan sejak lama terutama pendidikan agama.

Oleh karena itu melalui program dan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan sosialisasi penting pendidikan tinggi dan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wilayah serta peningkatan martabat daerah melalui peningkatan daya saing daerah dengan peningkatan kapasitas SDM. Perkembangan HLS Kabupaten Kampar 2017-2021, lihat Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kampar	Tahun	13,20	13,21	13,45	13,46	13,55	1,04
Provinsi Riau	Tahun	13,03	13,11	13,14	13,20	13,28	0,65

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Tahun 2021

2.3.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup yang diharapkan sejak sejak saat Lahir sebagai rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan ukuran

terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan pada khususnya.

Perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Kampar selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.31. Selama periode tersebut, usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kampar terus meningkat dari 70,16 tahun 2017 bertambah menjadi 70,83 tahun 2021 atau bertambah sebanyak 0,67 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,21% per tahun. Pada Tahun 2021, pencapaian AHH di Kabupaten Kampar masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Riau sebesar 71,67 tahun dan nasional sebesar 73,50 tahun. Artinya kebijakan terhadap program peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kampar harus menjadi prioritas mengingat masih dibawah AHH Provinsi Riau dan Nasional.

Salah satu diantara program dan kegiatan adalah perlunya peningkatan konsumsi kalori pangan yang saat ini (tahun 2021) baru mencapai 2.062,09 kilokalori sementara standart kebutuhan yang harus dipenuhi sebanyak 2.100 kilokalori per hari. Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kampar. Perkembangan AHH Kabupaten Kampar 2017-2021, lihat Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

Wilayah	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kampar	Tahun	70,16	70,35	70,64	70,76	70,83	0,21
Provinsi Riau	Tahun	70,99	71,19	71,48	71,60	71,67	0,20

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial Tahun 2021

2.3.2.6 Pengeluaran Ril Perkapita (PPP)

Pengeluaran ril per kapita penduduk Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2021 dengan pertumbuhan 0,37% per tahun

atau meningkat dari Rp10.433 juta pada tahun 2010 menjadi Rp10.858 juta pada tahun 2021. Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kampar karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran per kapita rill.

Peningkatan pengeluaran per kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita di samping berkontribusi pada peningkatan PDRB Kabupaten Kampar.

2.3.2.7 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dibagi dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas. Jumlah penduduk 15 tahun keatas mengalami pertumbuhan 2,12% per tahun dengan pertumbuhan jumlah Angkatan kerja sebesar 3,12% dengan angka partisipasi angkatan kerja tumbuh sebesar 0,98% per tahun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017-2021 jumlah angkatan kerja cenderung mengalami kenaikan seperti Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Wilayah	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	538.506	549.274	546.348	580.352	584.841	2,12
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	3,12
4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,78	67,87	67,20	66,96	67,29	0,98

Sumber: Disdukcapil dan BPS, Provinsi Riau, 2017-2021 dan Data Olahan Tim

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah Angkatan kerja memiliki pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan partisipasi Angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan penawaran jumlah penduduk

usia kerja semakin tinggi, tetapi tanpa dibarengi dengan penyiapan lapangan akan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran terbuka. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif (15-64) tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.

2.3.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam lapangan usaha atau sektor perekonomian.

Upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat dilakukan dengan peningkatan investasi pada Industri padat karya dan industri padat modal. Pada kondisi padat karya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang bersifat untuk mengkreasikan pengembangan diri melalui penyerapan tenaga kerja yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja.

Peningkatan produktivitas yang bergerak cepat, efisien, penggunaan teknologi tersedia dan dikuasai oleh tenaga kerja pada industri padat karya. Perkembangan TPAK selama tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan 0,83% per tahun yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah angkatan kerja lebih tinggi yaitu sebesar 3,12% dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja 1,76% per tahun. Berdasarkan Tabel 2.33 menunjukkan bahwa TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,90% atau naik dari 61,16% pada tahun 2017 menjadi 63,06% pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja lebih rendah dibandingkan dengan angkatan kerja. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan angka penyerapan tenaga. Perkembangan TPAK selama periode 2017-2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.33
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	520.738	525.158	521.338	553.389	557.669	1,76
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	3,12
4	Persentase TPAK	%	61,16	63,38	60,78	63,78	63,06	0,83

Sumber: Disdukcapil dan BPS, Provinsi Riau, 2017-2021 dan Data Olahan Tim

Tingkat partisipasi angkatan kerja juga sangat dipengaruhi tingkat pendidikan yang tertinggi pada tahun 2021. Faktor tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2.3.2.9 Rasio Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk bekerja adalah jumlah penduduk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha ekonomi. Jumlah penduduk bekerja dari Angkatan kerja mengalami pertumbuhan 1,70% per tahun atau naik dari 328.159 orang pada tahun 2017 menjadi 376.764 orang pada tahun 2021 dengan persentase penduduk bekerja naik sebesar 3,99% per tahun.

Untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja dari Angkatan kerja yang ada maka kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang harus dilakukan meliputi: (a) pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan produktivitas, penciptaan iklim produktivitas di masyarakat melalui peningkatan fungsi kelembagaan produktivitas; (b) pendayagunaan

tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja muda terdidik, penganggur dan setengah penganggur; (c) peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan keterampilan dengan mengupayakan adanya kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja, pengembangan kelembagaan pelatihan; dan (d) pengembangan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan hubungan industrial yang serasi dan didukung oleh perbaikan syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya tenaga kerja wanita bekerja. Penduduk yang bekerja adalah yang sekurang-kurangnya bekerja satu jam salam seminggu secara terus-menerus sebelum pencacahan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan. Berikut disajikan data Tabel 2.34 mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dari Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.34
Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	520.738	525.158	521.338	553.389	557.669	1,76
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	3,12
4	Jumlah Bekerja	Orang	328.159	353.428	345.195	364.698	376.764	3,58
5	Persentase Penduduk Bekerja	%	63,02	67,30	66,21	65,90	67,56	1,81

Sumber: Disdukcapil dan BPS, Provinsi Riau, 2017-2021 dan Data Olahan Tim

Rasio penduduk yang bekerja menurut jam kerjanya paling lama bekerja antara 15-24 dan 35-44 jam dalam seminggu, tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja menurut jam hanya tumbuh sebesar 3,58%.

2.3.2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kampar mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 5,93% pada tahun 2017 turun menjadi 4,27% pada tahun 2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar 6,54% per tahun atau jumlah penganggur terbuka berkurang dari sebanyak 3.882 orang atau dari 20.687 orang tahun 2017 berkurang menjadi 16.805 orang tahun 2021, jelasnya lihat Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	520.738	525.158	521.338	553.389	557.669	1,76
3	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	348.846	372.775	367.149	388.609	393.561	3,12
4	Jumlah Menganggur	Orang	20.687	20.316	20.744	23.899	16.805	-3,54
5	TPT	%	5,93	5,45	5,65	6,15	4,27	-6,54

Sumber: Disdukcapil dan BPS, Provinsi Riau, 2017-2021 dan Data Olahan Tim

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangi tingkat pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, melatih para

pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri agar lebih mandiri.

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum bekerja dikarenakan belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat hal paradoks di Kabupaten Kampar bahwa pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi, agar kedepan arah kebijakan fokus menangani tingkat pengangguran terbuka ini dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas luasnya terutama pada sektor pertanian dan industri.

Jika dilihat tingkat pengangguran berdasarkan golongan umur menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terbesar pada usia 20-24 dan 15-19 tahun, pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2017. Tingkat pengangguran tersebut sudah berada pada angka yang relatif rendah, hal ini terjadi karena ketersediaan lahan usaha terutama lapangan usaha yang bekerja secara mandiri di Kabupaten Kampar. Namun demikian ke depan agar Pemerintah Daerah membuat kebijakan dalam mengatasi tingkat pengangguran terbuka dengan peningkatan jumlah usaha yang padat karya.

2.3.2.11 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan penurunan peningkatan selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 PDRB menurut harga berlaku per tenaga kerja sebesar Rp. 218,10 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 230,04 juta pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,74% per tahun atau mengalami peningkatan senilai Rp. 11,94 juta selama lima tahun. Terjadinya peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menurut harga berlaku tidak terlepas dari terjadinya peningkatan harga dari produksi barang dan jasa selama periode 2017-2021

Namun sebaliknya laju pertumbuhan PDRB harga konstan per tenaga kerja mengalami penurunan dari Rp. 149,38 juta tahun 2017 kemudian turun menjadi

Rp. 141,19 juta pada tahun 2021 dengan pertumbuhan penurunan sebesar -1,27% per tahun atau berkurang senilai Rp. 8,19 juta. Artinya penurunan laju pertumbuhan PDRB harga konstan per tenaga kerja menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan nilai PDRB harga konstan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang lebih tinggi dengan pertumbuhan sebesar 3,58% per tahun sementara laju pertumbuhan nilai PDRB harga konstan hanya 2,08%.

Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan nilai tambah produksi barang dan jasa agar laju Laju Pertumbuhan produksi barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan tenaga kerja yang bekerja. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan produktifitas tenaga kerja pada laju PDRB harga konstan dengan penduduk yang bekerja. Laju pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 lihat Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB HB Kabupaten Kampar	RP. Milyar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,31	86.670,33	5,28
2	PDRB HK Kabupaten Kampar	RP. Milyar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	328.159	353.428	345.195	364.698	376.764	3,58
4	Rasio PDRB HB/TK	Rp. Juta/TK	218,10	218,30	223,84	200,37	230,04	1,74
5	Rasio PDRB HK/TK	Rp. Juta/TK	149,38	141,36	150,32	140,99	141,19	-1,27

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

2.3.2.12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang

telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga yang diharapkan adalah keluarga sejahtera, dimana keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungan.

Untuk menaikkan tahapan Keluarga Sejahtera dari Pra Sejahtera ke Sejahtera I dan Ke Sejahtera II dibutuhkan intervensi Pemerintah Daerah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Kepala Keluarga ini agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga, Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan II di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021, lihat table berikut.

Tabel 2.37
Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pra Sejahtera	KK	na	na	31.952	31.952	14.959	na
2	Sejahtera I	KK	na	na	76.267	76.267	na	na
3	Sejahtera II	KK	na	na	55.312	55.312	na	na
4	Jumlah	KK	203.176	212.959	187.702	210.333	218.328	1,07

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

2.3.2.13 Index Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 Index kepuasan layanan masyarakat telah menjadi survey kepuasan masyarakat oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pengukuran secara

komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan layanan publik.

Dalam mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. IKM Kabupaten Kampar sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Index Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	80,65	86,78	7,60
	Kategori	-	-	-	Baik	Baik	Baik

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan data dari tahun 2017-2021 dapat dilihat bahwa index kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2021 dengan memperoleh nilai 86,78

dengan kategori Baik dan naik dari 80,65 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam kategori baik.

2.3.2.14 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

PAD meliputi beberapa sumber bukan hanya dari pendapatan asli daerah di antaranya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah. Dalam konteks Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 dapat rasio yang terkait dengan kemandirian fiskal terutama yang berhubungan dengan PAD terhadap total pendapatan mengalami penurunan sebesar -1,64% per tahun selama periode 2017-2021.

Berdasarkan hasil persentase pendapatan asli daerah yang di konversikan kepada jumlah pendapatan daerah dari tahun 2017 sebesar 14,25% kemudian turun menjadi 11,38% pada tahun 2021. Namun secara umum rasio tersebut mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dengan rasio tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 2017 sebesar 14,25%. Berikut disajikan perkembangan Rasio PAD terhadap pendatan Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.39
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Total Pendapatan	Rp. Milyar	2.220,57	2.327,55	2.740,39	2.364,68	2.437,86	2,98
2	Pendapatan Asli Daerah	Rp. Milyar	316,43	229,38	262,88	246,05	277,42	-1,64
3	Rasio PAD/Pendapatan	%	14,25	9,86	9,59	10,41	11,38	-3,92

Sumber: *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021*

2.3.2.15 Opini BPK

Opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Pemerintah daerah setiap tahun menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) berdasarkan data tahun 2017-2021 pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan prestasi yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP). Berikut disajikan perkembangan Opini BPK Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.40
Perkembangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai

Sumber: *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan pemerintah daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor

meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.3.2.16 Pangan (PPH dan Rawan Pangan)

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Berdasarkan data 2017-2021 dapat dilihat bahwa rata-rata skor PPH Kabupaten Kampar terjadinya perbaikan dari tahun 2017 yang hanya 83,69 dan kemudian meningkat menjadi 89,86 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 1,82% atau naik sebanyak 6,17 point. Dalam rangka mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi Kabupaten Kampar yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui peningkatan ketersediaan, peningkatan akses pangan dan pemanfaatan pangan. Berikut disajikan skor PPH Kabupaten Kampar 2017-2021.

Tabel 2.41
Perkembangan Skor PPH Pangan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Skor PPH	83,69	87,77*	88,87	91,09*	89,86	1,82

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Salah satu penyebab permasalahan kerawanan pangan dan gizi karena lokasi geografis di wilayah tertentu yang berpotensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan.

2.3.2.17 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pertanian menjadi sektor tertinggi ketiga dari tiga sektor utama yang mendominasi struktur produk domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku sektor pertanian terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,06% atau naik dari 27,39% pada tahun 2017 menjadi 32,91% pada tahun 2021 atau naik sebesar 5,54%.

Sementara perkembangan pertumbuhan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan sektor pertanian terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh positif sebesar 3,50% atau naik dari 29,78% pada tahun 2017 menjadi 34,15% tahun 2021 atau naik sebesar 4,37%. Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi regional tetap penting dan strategis karena kontribusinya yang sangat tinggi, sehingga telah merubah struktur ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor pertanian yang dominan tahun 2021.

Namun upaya peningkatan kontribusi sektor pertanian harus terus dilakukan dengan penerapan berbagai jenis teknologi secara optimal, peningkatan ketersediaan SDM pertanian berkualitas yang bisa berperan sebagai transformator agar memacu minat investor untuk mengembangkan sektor yang lebih terintegrasi dan modern melalui penerapan *Good Agricultural Practices*. Berikut disajikan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.42
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB ADHB Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
2	PDRB ADHK Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	PDRB ADHB Sektor Pertanian	Rp. Milyar	19.589,82	20.289,02	21.508,32	24.141,40	28.522,17	9,99
4	PDRB ADHK Sektor Pertanian	Rp. Milyar	14.596,72	15.433,67	16.318,62	17.165,39	18.166,83	5,62
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian	%	27,37	26,30	27,84	33,04	32,91	5,06
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Pertanian	%	29,78	30,89	31,45	33,38	34,15	3,50

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

2.3.2.18 Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB

Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor tertinggi kedua dari tiga sektor yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan negative sebesar -5,36% atau turun dari 34,48% pada tahun 2017 menjadi 26,52% pada tahun 2021. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh negative sebesar -7,11% atau turun dari 26,69% pada tahun 2017 menjadi 19,86% tahun 2021.

Selain tumbuh negatif, peran sektor Pertambangan dan Penggalian dalam pertumbuhan ekonomi regional juga telah berpengaruh terhadap kontribusi secara keseluruhan dalam struktur ekonomi. Ini terlihat dari kontribusinya yang semakin menurun dimana sehingga semakin berkurang peranannya terhadap dana bagi hasil tambah untuk sumber pendapatan daerah dari dana transfer daerah. Selain itu struktur sektor ini berubah dari posisi pertama tahun 2017 ke posisi kedua tahun 2021.

Tabel 2.43
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB ADHB Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
2	PDRB ADHK Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	PDRB ADHB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Rp. Milyar	24.678,05	28.297,52	25.027,29	17.914,02	22.983,91	0,75
4	PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian	Rp. Milyar	13.083,38	12.362,26	11.628,28	10.889,94	10.566,70	-5,19
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	34,48	36,68	32,39	24,51	26,52	-5,36
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	26,69	24,74	22,41	21,18	19,86	-7,11

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

2.3.2.19 Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB

Menguat dan melemahnya posisi ekonomi akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa termasuk sektor perdagangan. Perdagangan menjadi sektor tertinggi pertama dari sektor jasa yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Perdagangan terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,28% atau naik dari 3,40% pada tahun 2017 menjadi 3,42% pada tahun 2021. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Perdagangan terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 0,78% atau naik dari 3,13% pada tahun 2017 menjadi 3,18% tahun 2021 atau naik sebesar 0,04%.

Dalam konteks itu, tantangan terbesar perekonomian Kabupaten Kampar ke depan adalah perdagangan dan investasi. Pelemahan ekonomi ke negara-negara tujuan ekspor akan memperburuk kondisi ekonomi Kabupaten Kampar. Namun demikian satu hal yang disyukuri adalah bahwa wilayah ini merupakan produsen hasil non migas terutama dari hasil pertanian perkebunan dan kehutanan dan sektor perdagangan hasil olahan produk perikanan budidaya.

Tabel 2.44
Pekembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB ADHB Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
2	PDRB ADHK Kabupaten Kampar	Rp. Milyar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Rp. Milyar	2.433,99	2.605,67	2.871,41	2.548,58	2.960,36	5,54
4	PDRB ADHK Sektor Perdagangan	Rp. Milyar	1.536,74	1.631,83	1.716,90	1.466,20	1.690,37	3,02
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	3,40	3,38	3,72	3,49	3,42	0,28
6	Kontribusi PDRB ADHK SektorPerdagangan	%	3,13	3,27	3,31	2,85	3,18	0,78

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

2.3.2.20 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Industri pengolahan menjadi sektor tertinggi pertama dari tiga sektor yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Industri pengolahan terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,71% atau naik dari 23,02% pada tahun 2017 menjadi 25,44% pada tahun 2021. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor Industri pengolahan terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 1,94% atau naik dari 28,87% pada tahun 2017 menjadi 31,15% tahun 2021. Peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah sangat besar terutama berdasarkan harga konstan melebihi 25% pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada sektor industri. Peningkatan produksi barang dan jasa juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Selain tumbuh positif, peran sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi regional juga semakin penting dan strategis. Ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat dimana sektor industri pengolahan

menjadi semakin penting karena turut berperan pada terkendalinya peningkatan nilai tambah terhadap komoditas utama terutama dari sub sektor perkebunan dan kehutanan serta sektor perikanan.

Tabel 2.45
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB ADHB Kabupaten Kampar	Rp. Miliar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
2	PDRB ADHK Kabupaten Kampar	Rp. Miliar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
3	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	16.474,47	17.000,87	18.155,69	18.951,56	22.053,03	7,68
4	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	14.151,23	14.668,08	16.051,38	15.900,07	16.568,64	4,09
5	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	%	23,02	22,04	23,50	25,93	25,44	2,71
6	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	%	28,87	29,36	30,93	30,92	31,15	1,94

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

2.3.3.1 Perkembangan Seni Budaya

Perkembangan Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari 45 grup tahun 2017 bertambah menjadi 80 grup tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 9,17% per tahun. Sementara itu jumlah Gedung Kesenian juga merupakan salah satu indikator adanya alokasi ruang untuk kegiatan kesenian. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Kampar tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2017-2021 sebanyak 1 gedung.

Jumlah gedung tidak berkembang seiring banyaknya jumlah grup kesenian dan dapat diartikan sebagai tidak adanya usaha dalam menyediakan sarana untuk mengekspresikan kesenian yang dikembangkan di Kabupaten Kampar. Jika

membandingkan dengan jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Kampar dengan gedung kesenian yang ada terlihat belum ideal sehingga kurang mendukung perkembangan seni dan budaya Kampar. Kedepan agar ada program Pemerintah Daerah membangun gedung kesenian dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.46
Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah grup kesenian 10.00 per penduduk.	Unit	45	54	63	73	80	9,17
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	Unit	0	0	0	1	1	0,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Capaian grup kesenian untuk mendukung kesenian di Kabupaten Kampar di bawah binaan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga bersama Dewan Kesenian Kabupaten Kampar (DKKS) yang membina seluruh kecamatan. Grup kesenian yang paling menonjol adalah kesenian tradisional karena sarana dan prasarana tidak sesulit peralatan kesenian modern, sedangkan pola pembinaan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melakukan promosi dan mengadakan serta mengikuti even kesenian berupa penampilan karya-karya seni baik tari maupun musik serta seni rupa.

2.3.3.2 Perkembangan Olah Raga

Perkembangan jumlah klub olahraga menunjukkan minat masyarakat dalam kegiatan olahraga. Klub olahraga adalah wujud antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang dapat ditampung dalam sebuah klub. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Kampar meningkat dari 70 klub olahraga menjadi 135 klub olahraga dengan pertumbuhan sebesar 18,87% per tahun yang tersebar

disetiap Kecamatan di Kabupaten Kampar. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan minat warga terhadap kegiatan olahraga. Berikut disajikan perkembangan capaian bidang olahraga Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.47
Perkembangan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	Unit	70	85	120	120	135	18,78
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	Unit	2	1	2	1	1	0,00

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif dan merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kampar. Sejak tahun 2017-2021 terdapat 2 gedung olahraga di Kabupaten Kampar tahun 2017 kemudian berkurang hanya menjadi 1 gedung olahraga tahun 2021. Minimnya jumlah gedung olah raga ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Kampar untuk dilakukan penambahan agar dapat menunjang peningkatan prestasi olahraga dan perbaikan kondisi kebugaran dan kesehatan masyarakat terutama generasi muda Kabupaten Kampar. Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah, pembangunan sarana dan prasarana olahraga mesti dilakukan, berupa pembangunan gedung olahraga dan pembinaan klub olahraga yang ada wilayah ini terutama di setiap Kecamatan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek

pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib berkaitan pelayanan dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar daerah Kabupaten Kampar, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang pendidikan menurut UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan Kabupaten dalam menangani bidang pendidikan yaitu pada jenjang pendidikan dini dan dasar menengah pertama (PAUD, TK, SD/MI dan SMP/MTs). Berikut diuraikan kinerja indikator Urusan Pemerintahan Wajib Bidang pendidikan.

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perhitungan indikator anak usia dini diperoleh dari jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun yang menjadi peserta PAUD. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar (SD). Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter anak. Berdasarkan Tabel 2.48 jumlah siswa PAUD/TK di Kabupaten Kampar mengalami penurunan setiap tahun selama periode 2017-2021. Berikut gambaran perkembangan indikator pendidikan usia dini di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.48
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Peserta PAUD/Tk	Siswa	15.761	12.359	12.949	11.986	12.535	-4,92
2	Jumlah Lembaga PAUD/TK	Unit	779	351	361	350	354	-13,50
3	Jumlah Tenaga Pendidikan PAUD/TK	Orang	2.422	1.373	1.442	1.469	1.443	-9,55
4	Jumlah Penduduk Usia 0-4 Tahun	Orang	47.156	52.570	55.205	63.274	63.763	7,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

Sejak tahun 2017 tercatat jumlah peserta PAUD/TK sebanyak 15.761 siswa, namun tahun 2021 berkurang menjadi sebanyak 12.535 siswa, dengan pertumbuhan sebesar -4,92% per tahun. Penurunan tersebut dibarengi penurunan jumlah lembaga PAUD/Tk dengan pertumbuhan sebesar -13,50% demikian halnya dengan jumlah tenaga kependidikan di lembaga PAUD/TK yang mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar -9,55% per tahun. Akan tetapi terjadinya sebaliknya jumlah penduduk usia 0-4 tahun meningkat secara drastis dengan pertumbuhan 7,97% per tahun selama periode 2017-2021. Oleh karena itu diperlukan upaya penambahan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan untuk anak usia dini agar dapat menampung pertambahan jumlah anak usia dini di Kabupaten Kampar kedepan.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, perhitungan APK memperhitungkan jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Nilai APK dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu daerah dan tingkat pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs terhadap pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, APK PAUD tahun 2017-2021 mengalami

peningkatan dari 48,07% pada tahun 2017 meningkat menjadi 117,98% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa adanya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sejak usia dini, namun disisi lain hal juga dapat menunjukkan masih rendahnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat untuk mendorong partisipasi penduduk untuk memasukkan anaknya ke pendidikan PAUD sesuai dengan uisa dini ke sekolah serta kondisi juga dapat disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap sekolah PAUD khususnya di pedesaan karena jumlah terbatas pada wilayah tertentu.

APK SD/MI tahun 2017-2021 meningkat dari 94,70% pada tahun 2017 menjadi 102,18% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,24% per tahun. Peningkatan nilai APK tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat terhadap akses pendidikan, namun demikian dari aspek manajemen pendidikan masih menghadapi masalah terkait kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap orang tua murid untuk meningkatkan kesadaran penduduk untuk berpartisipasi memasukkan anaknya ke jenjang Pendidikan SD/MI sesuai umur sekolah SD/MI. Disisi lain tingginya APK juga disebabkan belum akuratnya data kependudukan sehingga berpengaruh pada belum optimalnya manajemen pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan SD/MI.

APK SMP/MTS juga mengalami peningkatan sebesar 0,55% per tahun selama tahun 2017-2021 atau naik dari 98,19% pada tahun 2017 menjadi 100,30% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan partisipasi penduduk untuk bersekolah di Kabupaten Kampar selain dari jumlah penduduk usia wajib sekolah SMP di Kabupaten Kampar. Namun data tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa rendahnya APK dari jenjang Pendidikan SD/MI dapat disebabkan oleh adanya lulusan SD/MI yang tidak atau menunda melanjutkan pendidikan di wilayah tersebut atau juga karena putus sekolah. Berikut gambaran perkembangan APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.49
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	APK PAUD	%	48,07	52,17	72,71	73,80	117,98	27,32
2	APK SD/MI	%	94,70	102,20	114,10	111,98	102,18	2,24
3	APK SMP/MTs	%	98,19	100,89	100,10	98,34	100,30	0,55

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut (usia sekolah). Nilai APM dapat menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada suatu daerah dan tingkat pendidikan tertentu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, APM setiap jenjang pendidikan selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Nilai APM SD/MI meningkat dari 97,27% pada tahun 2017 menjadi 97,80% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 0,14% per tahun. APM dijelaskan bahwa penghitungan angka APM SD/MI adalah membandingkan jumlah peserta didik tingkat SD/MI usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia sekolah (untuk SD/MI usia 7-12 tahun) pada suatu wilayah.

Sedangkan APM SMP/MTS meningkat dari 84,03% pada tahun 2017 menjadi 84,64% pada tahun 2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa terdapat penduduk di Kabupaten Kampar yang bersekolah di luar usia sekolah dan masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang SMP. APM SMP/MTs masih tergolong rendah berada di bawah 90%, namun sudah diatas target daerah. Angka ini masih dapat ditingkatkan dengan memprioritaskan kegiatan yang berkaitan langsung untuk meningkatkan APM SMP/MTs/Paket B. Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian Wajar Dikdas di Kabupaten Kampar terutama lebih banyak terjadi pada tingkat SMP/setara, sedangkan untuk akses menuju

SMP/setara pada umumnya relatif perlu mendapat perhatian. Berikut data nilai APM pendidikan dasar di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 seperti yang disajikan dalam Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,27	97,60	97,47	98,26	97,80	0,14
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84,03	83,74	84,99	84,49	84,64	0,18

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

4) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin banyak jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Selain itu APS tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS selama periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan baik pada SD/MI/Paket A maupun SMP/MTs/Paket B. APS SD/MI/Paket A semula sebesar 86,31% pada tahun 2017 naik menjadi 100,98% pada tahun 2021. Demikian dengan APS SMP/MTs/Paket B, semula 65,83% pada tahun 2017 naik menjadi 91,79% pada tahun 2021 atau dengan pertumbuhan sebesar 9,26% per tahun. Berikut data APS Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Per 1000 Penduduk	86,31	110,36	103,61	106,46	100,98	4,84
2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Per 000 Penduduk	65,83	70,97	89,65	97,52	91,79	9,26

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

5) Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Partisipasi Sekolah (APST) merupakan proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan satu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berdasarkan data angka putus sekolah Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa APTS tingkat SD/MI meningkat dari 0,05% tahun 2017 menjadi 0,44% pada tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 1.838,19% per tahun.

Sedangkan APTS SMP/MTS meningkat dari 0,10% pada tahun 2017 menjadi 1,26% pada tahun 2021 atau naik sebesar 711,24% per tahun. Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya APTS tersebut (1) faktor ekonomi, (2) faktor perhatian orang tua, (3) fasilitas pembelajaran, (4) minat anak untuk

sekolah, (5) budaya dan (6) faktor lokasi sekolah. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perhatian orang tua menjadi faktor yang paling dominan karena memiliki *nilai variance explained* tertinggi yaitu sebesar 39,95%, artinya bahwa perhatian orang tua mampu menjelaskan penyebab anak putus sekolah usia pendidikan dasar di suatu wilayah. Faktor lokasi sekolah merupakan faktor yang memiliki *variance explained* terendah yaitu sebesar 17,014%. Berikut data Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 seperti yang disajikan dalam Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	0,00	0,30	0,42	0,44	1.838,19
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,10	0,04	1,20	1,25	1,26	711,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

6) Angka Kelulusan (AK)

Angka Kelulusan (AK) merupakan persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan disekolah dan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka kelulusan ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang terakhir.

Berdasarkan data angka kelulusan sekolah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021, menunjukkan AK tahun 2017 untuk tingkat SD/MI mampu ditingkatkan kembali di 100,00% tahun 2021 sebagaimana tahun 2017, karena tahun 2018-2020 kurang dari 100,00%, sehingga terjadi rata-rata peningkatan sebesar 0,005% per tahun. Sementara AK jenjang Pendidikan SMP/MTs secara optimal baru tercapai tahun 2021 sebesar 100,00%, karena dimana tahun 2017-2020 masih kurang dari 100,00%. Berikut data angka kelulusan jenjang

pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Angka Kelulusan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	99,65	98,27	99,69	100,00	0,005
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,45	99,37	98,29	99,37	100,00	0,141

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

Angka kelulusan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis seperti tempat tinggal yang meliputi jarak rumah ke sekolah, sarana jalan, dan sarana alat transportasi, maupun sosial ekonomi yang meliputi pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan pendapatan orang tua.

Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan kualitas pembelajaran (yang didukung oleh sarana dan prasarana, kualifikasi guru, proses pembelajaran) di setiap jenjang Pendidikan baik SD/MI dan SMP/MTs.

7) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) merupakan persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan data angka melanjutkan pendidikan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021, AM tingkat dari SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari 97,96% pada tahun 2017 menjadi 103,62% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,87% per tahun. Pada saat orang-orang berlomba untuk mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tinggi baik dari tingkat dasar maupun sampai kejenjang yang lebih tinggi. Namun dari data tersebut menunjukkan tahun 2017-2021 bahwa

masih terdapat lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan dana pendidikan karena kesulitan ekonomi, letak geografis yang kurang mendukung, lemahnya kemampuan murid untuk meneruskan belajar dari satu kelas ke kelas selanjutnya.

Tabel 2.54
Angka Melanjutkan Pendidikan di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,96	106,71	94,61	106,71	103,62	1,87
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	59,52	73,64	68,61	90,98	110,43	17,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

Sedangkan AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA meningkat dari 59,52% pada tahun 2017 menjadi 110,43% pada tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 17,72%. Peningkatan AM untuk tamatan SMP/MTs ke jenjang Pendidikan menengah atas baik SMA/SMK/dan MA sangat signifikan hal ini didukung oleh kesadaran orang tua dan adanya dukungan pendanaan bagi siswa miskin oleh pemerintah provinsi Riau sejak tahun 2021, selain itu menunjukkan bahwa terdapat tamatan SD dan SMP yang tidak melanjutkan langsung tetapi melanjutkan tahun berikutnya atau adanya sejumlah siswa yang berasal dari wilayah lainnya yang melanjutkan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021. Berikut data Angka Melanjutakn Sekolah Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 seperti yang disajikan dalam Tabel 2.54 di atas.

8) Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik

Fasilitas pendidikan, khususnya bangunan sekolah merupakan sarana utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah, jika bangunan

sekolah dalam kondisi layak, aman dan nyaman membuat siswa akan belajar dengan baik, sehingga kualitas penyelenggaraan pendidikan akan semakin baik dari tahun ke tahun.

Sarana sangat penting bagi kegiatan proses belajar mengajar agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Kriteria minimum sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta kelengkapan lainnya yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. Sedangkan prasarana secara tidak langsung akan menunjang jalannya proses pendidikan. Adapun kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Berikut data jumlah bangunan SD dan SMP dan kondisi baik dan jumlah sekolah per satuan penduduk di Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Bangunan Sekolah dengan Kondisi Baik Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Usulan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Bangunan Sekolah SD	Unit	487	491	500	502	512	1,26
2	Jumlah Bangunan Sekolah SMP	Unit	129	129	135	134	137	1,54
3	Persen Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	57,80	56,66	55,14	55,05	55,03	-1,21
4	Persen Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	64,65	76,50	72,21	67,45	63,94	-5,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan data bangunan sekolah dalam kondisi bangunan baik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah sekolah dengan kondisi bangunan baik. Tingkat SD turun dari 57,80% tahun 2017

turun menjadi 55,03% tahun 2021 atau turun dengan pertumbuhan sebesar -1,21% per tahun. Bangunan SMP yang dalam kondisi baik juga berkurang sebesar -5,80% per tahun dari 64,65% tahun 2017 menjadi 63,94% tahun 2021.

Sedangkan Bangunan sekolah SD yang rusak berat mengalami peningkatan sebesar 12,58% per tahun atau 7,77% tahun 2017 bertambah menjadi 11,46% tahun 2021. Demikian halnya dengan bangunan SMP yang mengalami peningkatan jumlah yang rusak berat sebesar 54,81% per tahun atau bertambah dari 7,35% tahun 2017 menjadi 18,11% tahun 2021. Kondisi ruang kelas yang rusak baik sedang maupun berat akan mempengaruhi kualitas pendidikan peserta didiknya karena secara psikologis anak tidak nyaman belajar pada bangunan yang rusak.

9) Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Ketersediaan sekolah ditunjukkan dengan banyaknya ruang kelas yang tersedia untuk menampung penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI menurun dari sebanyak 200 penduduk usia sekolah SD/MI untuk 1 sekolah tahun 2017 menjadi 192 penduduk pada untuk 1 sekolah tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -1,02% per tahun. Data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kapasitas sekolah dasar, hal tersebut dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ketersediaan sekolah atau sebaliknya yaitu penurunan jumlah angka partisipasi sesuai sekolah dengan umur sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 400 penduduk untuk 1 sekolah

menjadi 275 penduduk untuk 1 sekolah pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -8,37% per tahun. Data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kapasitas sekolah menengah, hal tersebut dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ketersediaan sekolah atau sebaliknya yaitu penurunan jumlah angka partisipasi sesuai sekolah dengan umur sekolah. Berikut data Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah di Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
A	Rasio SD/MI	Indek						
1	Jumlah Penduduk Usia SD (7-12 Tahun)	Jiwa	na	na	na	na	na	na
2	Jumlah sekolah SD	Unit	487	491	500	502	512	1,26
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap usia sekolah		200	198	196	194	192	-1,02
B	Rasio SMP/MTs	Indek						
1	Jumlah Penduduk Usia SMP (13-15 Tahun)	Jiwa	na	na	na	na	na	na
2	Jumlah sekolah SMP	Unit	129	129	135	134	137	1,54
3	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap usia sekolah		400	300	299	280	275	-8,37

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/kota pasal 2 ayat (2) huruf a poin 1-2:

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/mts tidak melebihi 36 orang.

3. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

10) Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar

Salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru yang cukup untuk melayani siswa pada berbagai tingkatan pendidikan. Oleh sebab itu rasio antara guru dan murid haruslah berada dalam jumlah yang ideal. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/kota pasal 2 ayat (2) huruf a point 5-6.

Rasio antara jumlah murid terhadap jumlah guru tingkat SD/MI mengalami penurunan dari 16 murid per guru pada tahun 2017 berkurang menjadi 15 murid per guru pada tahun 2021 atau pertumbuhan sebesar -1,56% per tahun. Kondisi ini masih dibawah rasio SPM yaitu sebanyak 32 murid untuk 1 guru. Penurunan rasio guru terhadap murid ini disebabkan oleh kecepatan penurunan pertumbuhan jumlah murid sebesar -0,27% per tahun dibandingkan dengan pertumbuhan guru yang lebih cepat guru sebesar 1,45% per tahun dan lebih cepat dibandingkan dengan percepatan penurunan pertumbuhan jumlah murid.

Kondisi yang relatif sama terjadi pada SMP/MTs, dimana rasio antara murid terhadap guru pada tahun 2017 yaitu sebanyak 11 murid per guru dan mengalami peningkatan rasio menjadi 12 murid per guru pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,83% murid per guru. Kondisi ini terjadi karena persentase pertambahan jumlah guru lebih kecil hanya sebesar 1,52% per tahun dibandingkan persentase pertambahan jumlah murid 2,11% per tahun.

Kondisi ini masih baik karena belum melebihi SPM dimana rasio standar sebanyak 36 Murid untuk 1 guru. Berdasarkan pada Tabel 2.57 menunjukkan bahwa secara umum untuk setiap jenjang pendidikan dimana rasio guru terhadap murid masih memenuhi SPM sebagaimana yang di atur dalam Permendiknas RI

No.15 Tahun 2010 tentang indikator SPM, bahwa tersedia satu orang guru untuk 32 peserta didik SD/MI dan bagi SMP/MTs tersedia guru setiap 36 siswa.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kampar harus memperhatikan indikator SPM untuk jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun untuk meningkatkan kualitas lulusan maka diperlukan peningkatan kompetensi guru dan kualitas proses belajar dan mengajar SD/MI dan SMP/MTs. Berikut data Rasio guru dan murid Kabupaten Kampar seperti yang disajikan dalam Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
A	SD/MI							
1	Jumlah Guru	Orang	6.329	6.300	6.579	6.995	6.681	1,45
2	Jumlah Murid	Siswa	101.927	101.912	104.414	103.033	100.767	-0,27
3	Rasio guru/murid	Siswa/Guru	16,10	16,18	15,87	14,73	15,08	-1,56
B								
1	Jumlah Guru	Orang	2.546	2.449	2.637	2.736	2.694	1,52
2	Jumlah Murid	Siswa	28.660	30.696	31.696	31.367	31.095	2,11
	Rasio guru/murid	Siswa/Guru	11,26	12,53	12,02	11,46	11,54	0,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

11) Guru Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikat

Tingkat pendidikan guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh sebab itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah mensyaratkan kualifikasi akademik minimal pendidikan guru pada masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten/kota: Setiap SD/MI tersedia 2 orang guru kualifikasi akademik S1-D4 dan 2 orang yang telah memiliki sertifikat pendidik. Setiap SMP/MTs tersedia guru

kualifikasi akademik S1/D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut persyaratan minimal ini wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan untuk menjamin kualitas pendidikan.

Tabel 2.58
Guru SD/MI - SMP/MTS yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikat di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	SD/MI							
	Jumlah sekolah	Unit	487	491	500	502	512	1,26
	Jumlah guru	Orang	6.329	6.300	6.579	6.995	6.681	1,45
	Jumlah guru S1-D4	Orang	4.444	4.848	4.890	5.844	6.106	8,49
	Persentase Guru Kualifikasi S1-D4	%	70,22	76,95	74,32	83,55	91,40	7,00
	Jumlah guru bersertifikat	Orang	3.351	2.577	2.962	3.085	2.682	-4,27
2	SMP/MTs							
	Jumlah sekolah	Unit	129	129	135	134	137	1,54
	Jumlah guru	Orang	2.546	2.449	2.637	2.736	2.694	1,52
	Jumlah guru S1-D4	Orang	2.284	2.248	2.429	2.594	2.586	3,24
	Persentase Guru Kualifikasi S1-D4	%	89,70	91,80	92,10	94,80	96,00	1,72
	Jumlah guru bersertifikat	Orang	1.422	1.085	1.234	1.182	1.042	-6,52
	Persentase Guru Bersertifikasi	%	55,87	44,30	46,80	43,20	38,67	-8,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

Persentase guru SD/MI yang berkualifikasi S1/D-IV pada tahun 2017 sebesar 70,22% dan meningkat menjadi 91,40% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 7,00% per tahun. Sedangkan persentase guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D-IV pada tahun 2017 sebesar 89,70% kemudian meningkat menjadi 96,00% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,72% per tahun. Persentase guru SD/MI yang bersertifikasi pada tahun 2017 sebesar 52,94% dan menurun menjadi 40,14% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -5,92% per tahun.

Sedangkan persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pada tahun 2017 sebesar 55,87% kemudian menurun menjadi 38,67% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan -8,31% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi guru. Penurunan persentase jumlah guru yang bersertifikasi untuk jenjang Pendidikan SD demikian

halnya jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih cepat dalam rangka peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi. Jumlah guru dengan kualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.58 di atas.

2.4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dari aspek kesehatan. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia (SDM), teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan dan kebijakan terkait kesehatan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum program pembangunan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan di Kabupaten Kampar mengalami perbaikan, walaupun beberapa diantaranya masih harus mendapatkan prioritas terutama terkait dengan rasio pertumbuhan yang semakin meningkat.

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi.

Oleh karena itu kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan.

Dampak positif pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Kampar dari Tahun ke Tahun sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai program atau kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian belum semua indikator pembangunan kesehatan mencapai target yang diinginkan. Gambaran situasi AKB di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 dapat dilihat Tabel berikut.

Tabel 2.59
Angka Kematian Bayi Tahun Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelahiran Bayi	Bayi	16.476	17.148	17.108	16.612	15.966	-0,74
2	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	1.368	1.063	582	764	495	-17,85
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	AKB	83,00	62,00	34,00	46,00	31,00	-16,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

AKB Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017, AKB sebesar 83/1.000 kelahiran hidup kemudian berkurang menjadi 31/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -16,94%. Penyebab langsung kematian bayi sebenarnya relatif dapat ditangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penanganan penyakit bayi, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup bagi ibu hamil dan menyusui.

2) Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun. Kematian yang terjadi pada balita

sendiri sebenarnya memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya: kurangnya gizi; sanitasi yang tidak sehat; penyakit menular; kecelakaan; dan lain-lain.

Kurangnya gizi yang terjadi pada balita dapat disebabkan oleh kemiskinan orang tua. Mengingat pentingnya peranan gizi terhadap tumbuh kembang balita itu sendiri, orang tua dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi banyak diantara para orang tua yang masih belum mengenal dengan betul seperti apa gizi yang seharusnya diberikan kepada anak mereka. Balita yang kurang gizi akan mengalami keterbelakangan serta gangguan-gangguan fisik serta psikologisnya. Hal tersebut dapat dilihat pada segi postur dan berat badan pada balita. Balita yang mengalami kurang gizi akan terlihat kurus dan memiliki berat badan yang kurang normal.

Balita yang bermasalah pada gizinya akan mengalami keterlambatan menaikkan berat badan selama 3 bulan terakhir. Ukuran tinggi badan serta lingkaran badan pada balita akan menjadi indikator pelengkap dari status balita kurang gizi. Angka Kematian Balita (AKBA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun (0-4 tahun) yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKBA merepresentasikan resiko terjadi kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKBA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Dari Tabel 2.60 dapat dilihat AKBA di Kabupaten Kampar terjadi penurunan dari 83/1.000 KLH tahun 2017 menjadi 32/1.000 KLH tahun 2021, dengan penurunan pertumbuhan sebesar -16,98% per tahun.

Penyebab langsung kematian balita sebenarnya relatif dapat ditangani secara mudah, dibandingkan upaya untuk meningkatkan perilaku masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan perawatan balita yang lebih sehat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit balita, memperbaiki kesehatan

lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup bagi ibu hamil dan menyusui. Berikut disajikan AKBA di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.60
Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelahiran Bayi	Orang	16.476	17.148	17.108	16.612	15.966	-0,74
2	Jumlah Kematian Balita	Orang	1.368	1.063	684	880	511	-17,80
3	AKBA/1.000 kelahiran	Orang	83,00	62,00	40,00	53,00	32,00	-16,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

3) Angka Kematian Neo-Natal per 1000 Kelahiran

Kematian neonatal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neonatal dini/perinatal, dan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang 29 hari dikenal dengan kematian neonatal lanjut. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi, sedangkan kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Keberhasilan Kabupaten Kampar mengurangi Angka Kematian Neonatal karena adanya program alarm persalinan.

AKN Kabupaten Kampar pada tahun 2017-2021 mengalami perkembangan fluktuatif sejak tahun 2017 sebanyak 7,70% per 1.000 kelahiran kemudian berkurang menjadi 2,50% bayi per 1.000 kelahiran pada tahun 2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -16,69% per tahun. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka menghindari kematian neo-natal adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dan setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Berikut data Angka Kematian Neonatal dalam Tabel 2.61.

Tabel 2.61

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Orang	77,00	36,00	33,00	46,00	25,00	-16,69
2	Angka Relatif Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	7,70	3,60	3,30	4,60	2,50	-16,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

4) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam *Goal* 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Berikut data Angka Kematian Ibu dalam Tabel 2.62

Tabel 2.62
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Kelahiran Bayi	Bayi	16.476	17.148	17.108	16.612	15.966	-0,74
2	Jumlah Kematian Ibu	Orang	198	189	188	183	112	-11,64
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	12,00	11,00	11,00	11,00	7,00	-11,17

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Kampar Tahun 2021

Di Kabupaten Kampar jumlah AKI terjadi penurunan dari 12 orang per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2017 menjadi 7 orang per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -11,17% per tahun. Kondisi ini menunjukkan perbaikan penanganan kesehatan bagi ibu hamil dengan pengobatan terhadap berbagai faktor yang memungkinkan dapat mengakibatkan kematian ibu seperti perdarahan/*hypertensi* sistem peredaran darah, infeksi gangguan metabolisme dan lain-lain.

Tindakan yang telah dilakukan meliputi Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan Tindakan antara lain: Seksio sesaria, Histerektomi, Reparasi Ruptura Uteri, Cedera Kandung/saluran Kemih, Perawatan Intensif Ibu dan Neonatal dan Transfusi Darah.

5) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian ibu (Ibu Hamil, melahirkan dan nifas);
2. Membudayakan NKKBS;
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersumber daya Masyarakat. Penimbangan secara rutin di Posyandu dapat untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan bayi dan balita. Peningkatan gizi bayi dan balita di posyandu yang dilakukan oleh kader dapat berupa Penyuluhan tentang ASI, Status Gizi, MPASI, Imunisasi, pemberian Vit.A, serta stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita. Selain itu diharapkan ada strategi operasional yang dapat dilakukan di setiap Posyandu dengan melakukan analisa rasio jumlah posyandu terhadap jumlah bayi dan balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tumbuh kembang sejak dalam kandungan umur 2 tahun (*Golden Period*).

Jumlah posyandu dari tahun 2017-2021 mengalami pengurangan sebesar -0,02% per tahun. Sementara jumlah balita mengalami hal yang sama dengan

pertumbuhan sebesar -7,56% per tahun. Kondisi ini telah menyebabkan penurunan rasio pelayanan posyandu di dengan peningkatan cakupan pelayanan dari 1:125 pada tahun 2017 menjadi 1:88 pada tahun 2021. Walaupun demikian namun rasio tersebut masih melebihi dari standar yang ada yaitu 1:50 atau 1 posyandu dengan 50 balita. Dengan demikian mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan posyandu sejak tahun 2017-2021. Berikut disajikan data rasio posyandu per satuan balita pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Rasio Posyandu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

N o	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Posyandu	Unit	669	648	647	658	668	-0,02
2	Jumlah Balita	Orang	87.082	87.365	80.875	82.250	58.700	-7,56
3	Rasio posyandu per satuan balita	Indek	125,00	125,00	125,00	125,00	100,00	-5,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Hal ini terjadi karena kemampuan penyediaan fasilitas posyandu yang terbatas walaupun jumlah balita berkurang setiap tahunnya. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh dan untuk bersama memberdayakan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Rasio posyandu dapat dihitung dengan membagi jumlah posyandu dengan jumlah balita dikali 1.000.

6) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas merupakan pelayanan tingkat dasar yang merupakan rujukan antara sebelum dibawah kerumah Sakit Daerah, oleh karena itu pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu mendekati tempat tinggal masyarakat di suatu daerah, di Kabupaten Kampar sejak tahun 2017-2021 jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu mengalami peningkatan, dan tersebar di seluruh

kecamatan di Kabupaten Kampar, dari sejumlah puskesmas yang ada terdapat beberapa puskesmas yang merupakan puskesmas rawat inap yang menjadi rujukan antara.

Tabel 2.64
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Puskesmas	Unit	40	31	31	22	25	-9,47
2	Jumlah Poliklinik	Unit	31	53	48	53	48	15,63
3	Jumlah Pustu	Unit	184	187	181	179	177	-0,95
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	Indek	0,054	0,041	0,041	0,027	0,031	-11,28
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	Indek	0,004	0,007	0,006	0,007	0,006	12,99
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	Indek	0,025	0,025	0,024	0,022	0,022	-3,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Dari jumlah puskesmas yang ada, maka rasio pelayanan puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Kampar stabil sejak tahun 2017-2021 dengan pertumbuhan -11,28 per tahun. Sementara itu rasio poliklinik naik dari 0,014 pada tahun 2017 menjadi 0,006 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 12,99%. Sedangkan rasio pustu naik dari 0,004 pada tahun 2017 menjadi 0,006 tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -3,25% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan selama tahun 2017-2021 menunjukkan adanya upaya perbaikan pelayanan kesehatan, namun demikian harus dibarengi dengan kualitas pelayanan dengan sistem IT untuk memastikan pasien datang sesuai dengan keberadaan tenaga kesehatan sehingga memudahkan dalam mobilisasi pasien dari rumah ke pusat kesehatan dan sebaliknya.

7) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, pada tahun sejak tahun 2017-2021 terjadi penambahan jumlah penduduk dengan pertumbuhan 1,02% per tahun.

Tabel 2.65
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	6,00	4,00	4,00	3,00	4,00	-6,25
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Indek (1.000)	0,008	0,005	0,005	0,004	0,005	-8,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Pertambahan penduduk menyebabkan angka ketersediaan rumah sakit terhadap cakupan pelayanan Kesehatan terhadap penduduk semakin bertambah per satuan penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017 sebesar 0,007 menurun pada menjadi 0,005 tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -1,01%. Menurut WHO rasio ideal rumah sakit adalah setiap 1 tempat tidur dirumah sakit menampung 1.000 penduduk. Berikut rasio ketersediaan rumah sakit per jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada Tabel 2.65.

8) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu,

idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Kampar belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk, selain itu distribusi dokter tidak merata dan dokter spesialis di Kabupaten Kampar hanya terkonsentrasi di Ibu Kota Kabupaten selain itu kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Berikut rasio dokter per jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada Tabel 2.66

Tabel 2.66
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Dokter	Orang	102	102	102	106	173	16,78
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Rasio Dokter per satuan penduduk	Indek (1.000)	0,14	0,14	0,14	0,13	0,21	14,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Rasio dokter per satuan jumlah penduduk Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.66. Dari tahun 2017 jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Kampar sebanyak 102 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 173 orang sehingga rasio dokter persatuan penduduk sedikit mengalami peningkatan dari 0,14 artinya terdapat 1,4 dokter per 10.000 penduduk pada tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 0,21 atau terdapat 2,1 dokter per 10.000 penduduk tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 14,27% per tahun artinya pada tahun 2021 masih kekurangan dokter sebanyak 154 orang.

9) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi dan spesialis memberikan pelayanan kepada penduduk. Ketersediaan jumlah tenaga medis perjumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 adalah 1,85 sedangkan pada tahun 2021 rasio tenaga medis perjumlah penduduk adalah 1,79

dengan pertumbuhan sebesar 0,92% per tahun. Artinya terjadinya perbaikan rasio tenaga medis hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk yang harus dilayani oleh tenaga medis sebanyak 606 orang sementara tahun 2021 berkurang menjadi 560 orang. Rasio ini sudah sangat baik karena secara ideal 1:2.500 atau setiap seorang tenaga medis hanya melayani 2.500 orang. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas layanan dari tenaga medis harus terus dilakukan sehingga mencapai kondisi pelanan prima. Berikut rasio tenaga medis per jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tenaga Medis	Orang	1.374	1.347	1.345	1.887	1.460	3,89
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Indek (1.000)	1,85	1,80	1,78	2,33	1,79	0,92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

10) Cakupan Komplikasi Kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani daerah Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 27,31% orang tahun 2017 dan meningkat menjadi 90,00% orang tahun 2021 dengan pertumbuhan 43,90% per tahun, jelasnya lihat pada Tabel 2.68 berikut.

Motivasi dengan kinerja bidan desa serta terdapat pengaruh yang signifikan antara motif berprestasi dengan kinerja bidan desa dalam menangani komplikasi kebidanan. Beberapa hasil kajian menunjukkan kategori pengetahuan bidan desa adalah baik (86,84%), kategori sikap bidan desa adalah baik

(94,74%), kategori pembelajaran bidan desa adalah cukup baik (52,63%), kategori motivasi bidan desa adalah sedang (57,89%) serta kategori motif berprestasi bidan desa adalah sedang (52,63%).

Tabel 2.68
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	27,31	36,40	36,30	37,70	90,00	43,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Untuk meningkatkan motivasi bidan dengan cara memberikan penghargaan (reward) bagi bidan yang memiliki kinerja bagus, baik penghargaan berupa materi maupun peningkatan karir dan peningkatan pengetahuan sesuai dengan prestasi yang dicapai serta melakukan pembinaan secara terus menerus bagi bidan yang memiliki kinerja kurang baik. Selain itu mengadakan pelatihan, seminar, simposium dan magang di bagian kebidanan secara bergilir bagi bidan desa untuk meningkatkan keterampilan guna menunjang pelaksanaan tugas bidan.

11) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Target UCI merupakan tujuan antara (*intermediate goal*) yang berarti cakupan imunisasi untuk BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B harus mencapai 80% baik di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten bahkan di setiap desa. Cakupan desa/kelurahan UCI selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar -13,86% per tahun, turun dari 193 pada tahun 2017 menjadi 96,00 pada tahun 2021 atau terjadinya penurunan cakupan pelayanan sebesar -13,86%. Capaian pelaksanaan UCI di Kabupaten Kampar masih dibawah target nasional sebesar 80%. Berikut data perkembangan data UCI Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tujuan pelaksanaan UCI adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit terutama BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif.

Tabel 2.69
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Desa/ Kelurahan	193,00	212,00	178,00	104,00	96,00	-13,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

12) Prevalensi Balita Gizi Kurang, Stunting dan Kurus

Fenomena gizi kurang dan kurang seringkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang kurang jika merujuk pada fakta keterbatasan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Menurut Depkes RI (2008), Gizi kurang adalah keadaan kurang gizi yang dilihat dari tingkat berat pada anak, berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) <-3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor.

Gizi kurang atau kwashiorkor merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Kekurangan gizi, terutama pada anak usia dini akan berdampak pada tumbuh kembang anak, rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak. Keadaan gizi yang kurang akan menurunkan daya tahan anak sehingga anak mudah sakit hingga berakibat pada kematian. Kondisi gizi kurang kebanyakan disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat atau orang tua yang kurang mampu dan pengetahuan orangtua akan nutrisi yang diperlukan tubuh anak yang kurang

dipahami oleh orang tua. Berikut disajikan data Tabel 2.70 mengenai perkembangan balita Gizi Kurang di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.70
Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Balita	Orang	87.082	87.365	80.875	82.250	58.700	-7,56
2	Jumlah Balita Gizi Kurang	Orang	0,00	0,00	2.336	2.576	2.413	1,97
3	Persentase Balita Gizi Kurang	%	0,00	0,00	2,62	4,00	3,20	16,27
4	Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Perkembangan jumlah balita gizi kurang di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 16,27% dengan persentase gizi kurang dari jumlah balita sebesar 0,00% dari jumlah balita 87.082 balita tahun 2017 bertambah menjadi 3,20% dari jumlah balita sebanyak 58.700 balita tahun 2021. Dalam rangka mengatasi gizi kurang atau kwashiorkor dibutuhkan asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencukupi. Pemberian nutrisi tersebut harus dilakukan secara bertahap dan seimbang yang cukup kebutuhan karbohidrat, lemak dan proteinnya. Oleh sebab itu upaya-upaya yang bersifat preventif dan kuratif harus senantiasa dilakukan baik terhadap balita gizi kurang, demikian halnya dengan stunting dan balita kurus.

Berikut Tabel 2.71 disajikan perkembangan jumlah balita gizi kurang, balita pendek (stunting) dan balita kurus menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2021.

Tabel 2.71
Perkembangan Angka Balita Gizi Kurang, Stunting dan Balita Kurus
Menurut Kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita	Jumlah Balita			Persentase Balita		
				Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus	Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus
1	Bangkinang Kota	Bangkinang	1.385	7	101	16	0,51	7,29	1,16
2	Kampar	Air Tiris	3.163	55	179	148	1,74	5,66	4,68
3	Tambang	Tambang	6.554	256	152	194	3,91	2,32	2,96
4	XIII Koto Kampar	Batu Besurat, Gunung Bungsu dan Pulau Gadang	1.770	299	461	165	16,91	26,04	9,32
5	Kuok	Kuok	1.428	58	10	48	4,06	0,70	3,36
6	Siak Hulu	Pandau Jaya, Kubang Jaya dan Pangkalan Baru	6.931	360	409	264	5,19	5,89	3,82
7	Kampar Kiri	Lipat Kain	2.373	120	222	92	5,06	9,36	3,88
8	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	929	4	111	123	0,43	11,95	13,24
9	Kampar Kiri Hulu	Gema dan Batu Sasak	781	212	138	71	27,13	17,62	9,11
10	Tapung	Petapahan, Pantai Cermin dan Tapung	6.309	969	1275	754	15,36	20,21	11,95
11	Tapung Hilir	Kota Garo dan Tanah Tinggi	4.043	94	131	116	2,31	3,24	2,88
12	Tapung Hulu	Suka Ramai dan Sinama Nenek	3.492	152	38	528	4,37	1,08	15,12
13	Salo	Salo	1.684	7	8	3	0,42	0,48	0,18
14	Rumbio Jaya	Rumbio	1.267	9	74	18	0,71	5,84	1,42
15	Bangkinang	Laboy Jaya	1.904	48	111	16	2,52	5,83	0,84
16	Perhentian Raja	Pantai Raja	1.389	170	177	32	12,24	12,74	2,30
17	Kampa	Kampa	1.844	44	52	49	2,39	2,82	2,66
18	Kampar Utara	Sawah	1.106	29	49	35	2,62	4,43	3,16
19	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	1.755	71	121	69	4,05	6,89	3,93
20	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan dan Gunung Sari	1.261	121	151	108	9,59	11,98	8,58
21	Koto Kampar Hulu	Siberuang	1.171	28	47	30	2,39	4,01	2,56
Kabupaten			52.539	1690	2321	1653	3,22	4,42	3,15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah balita gizi kurang yang banyak terdapat di Kecamatan tapung yaitu 969 balita dari 6.309 balita atau sebesar 15,36%. Secara relatif balita gizi kurang yang paling tinggi diatas 10% terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 27,13%, Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar 16,91%, Kecamatan Tapung sebesar 15,36%, Kecamatan Perhentian Raja sebesar 12,24% dari jumlah balita yang terdapat diwilayah tersebut. Sementara kecamatan dengan persentase balita gizi kurang dari 1% adalah Kecamatan Rumbio sebesar 0,71%, Kecamatan Salo sebesar 0,42%, Kecamatan Bangkinang Kota sebesar 0,51%. Kondisi balita harus mendapatkan prioritas penanganan karena kekurangan gizi pada balita dapat menyebabkan kematian hal ini dikarenakan balita lebih rentan terinfeksi penyakit. Penyakit infeksi yang diderita balita dapat mempengaruhi nafsu makan balita sehingga

kebutuhan gizi dan makanan dalam tubuh balita tidak terpenuhi akibatnya balita dapat mengalami penurunan berat badan.

Sementara terkait dengan balita stunting dapat dilihat bahwa jumlah balita stunting yang banyak terdapat di Kecamatan tapung yaitu 1.275 balita dari 6.309 balita atau sebesar 20,21%. Secara relatif balita stunting yang paling tinggi di atas 10% terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar 26,04%, Kecamatan Tapung sebesar 20,21%, Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 17,62%, Perhentian Raja sebesar 12,74% dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebesar 11,95%, dari jumlah balita yang terdapat diwilayah tersebut. Sementara kecamatan dengan persentase balita stunting kurang dari 1% adalah Kecamatan Salo sebesar 0,48% dan Kecamatan Kuok sebesar 0,70%.

Kondisi balita stunting harus mendapatkan prioritas penanganan karena masalah stunting atau anak yang kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak dan perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan. Maka program upaya penanganan yang harus dilakukan antara lain: 1. Penuhi nutrisi selama kehamilan, ibu hamil harus mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Ini untuk memastikan bahwa janin akan mendapat nutrisi yang optimal di dalam rahim, lahir sehat, dan juga mendapat bekal nutrisi yang baik setelah lahir. 2. Penuhi Nutrisi Si Kecil dengan Optimal dengan memberikan buah hati Anda nutrisi lengkap dan asupan bergizi. Nutrisi penting dan esensial untuk si Kecil adalah vitamin (A, B kompleks, C, D, E, dan K), mineral (kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, sodium, kalium, dan klorida), protein, lemak sehat, karbohidrat, dan cairan. Setelah itu, orang tua disarankan memberi si Kecil susu bernutrisi yang sesuai dengan usianya. Manfaat susu untuk menjaga sistem imun, mendukung pertumbuhan tulang dan gigi, memproduksi energi, menutrisi otak, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. 3. Mempraktikkan Kebersihan yang Benar karena stunting juga dapat dipicu akibat

kebersihan lingkungan yang buruk. Maka dari itu, orang tua dan seluruh anggota keluarga harus mempraktikkan kebersihan yang tepat, misalnya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. 4. Mengatasi anak yang susah makan mengakibatkan gizi buruk adalah akibat anak yang susah makan karena alergi atau intoleransi makanan, refluks, muntah, diare, sembelit, kolik, atau kondisi kesehatan yang lebih serius lainnya.

Secara umum jumlah balita kurus yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tapung hulu sebesar 15,12%, Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebesar 13,24% dan Kecamatan Tapung sebesar 11,95% dan yang paling sedikit hanya terdapat di Kecamatan Bangkinang kurang dari 1% yaitu 0,84% dan Kecamatan Salo sebesar 0,18%. Oleh karena itu diperlukan program pemberian nutrisi dengan 1). Mengatur jadwal makan merupakan cara pertama yang harus dilakukan untuk menaikkan berat badan anak secara sehat. Jika anak makan secara konsisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka asupan nutrisi pun akan terpenuhi dengan baik, 2). Menambah porsi makan anak jika anak mampu untuk menghabiskan makanannya lebih dari satu porsi. Akan lebih baik juga jika anak makan ditambah dengan susu dan buah-buahan sebagai pendamping makan, 3). Berikan anak jus buah dan susu yang rendah lemak. Jus dan susu ini dapat diberikan kepada anak ketika anak merasa haus, berikan dengan diselingi dengan air putih biasa, 4). Berikan makanan yang mengandung kalori tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti panduan dan melihat isi kandungan gizi dan nutrisi dalam kemasan makanan. Hal ini dapat membuat berat badan anak berkembang lebih cepat, 5). Berikan makanan yang memiliki kadar lemak sehat seperti kacang-kacangan, olahan kacang seperti selai kacang, alpukat serta minyak zaitun. Selain untuk menambah berat badan, makanan ini juga cukup baik untuk mencegah terjadinya peradangan.

13) Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Dimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak

berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Imunisasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sejak bayi baru lahir untuk menjaga kesehatannya. Kemudian demi memperpanjang “masa berlaku” perlindungannya, beberapa jenis vaksin utama harus diulangi sesuai dengan jadwal dan jarak yang telah ditentukan. Vaksin campak adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak, yang mulai diberikan pada anak usia 9 bulan.

Campak atau measles adalah penyakit infeksi yang amat menular. Apabila satu orang penderita campak berada dalam satu ruangan dengan sepuluh orang lain yang belum pernah sakit / belum pernah di imunisasi campak, maka di perkirakan sepuluh orang tersebut akan terinfeksi. Penyebabnya adalah Paramyxovirus. Campak bisa menyerang anak-anak hingga orang dewasa, tapi kelompok usia anak lebih rentan menderita komplikasi, seperti infeksi telinga, diare, dan pneumonia, bahkan kematian.

Imunisasi anak penting untuk mencegah penularan sehingga terhindar dari komplikasi. Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak di Kabupaten Kampar sebesar 49,90% tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 78,80% tahun 2021 dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 27,17% per tahun, lihat Tabel 2.72 berikut.

Tabel 2.72
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang dimunisasi Campak
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	%	84,49	na	49,90	73,20	78,80	27,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

14) Non-Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Penyakit Polio yang disebabkan oleh virus polio ini termasuk kedalam penyakit yang dapat dihilangkan atau dihentikan peredarannya dengan memberikan imunisasi polio. Upaya yang dilakukan Negara Indonesia untuk

terbebas dari penyakit polio adalah Program Eradikasi Polio (ERAPO). Kegiatan yang termasuk kedalam program tersebut diantaranya imunisasi polio yang diberikan secara rutin, pelaksanaan imunisasi masal yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan pelaksanaan surveilans AFP. Pelaksanaan Surveilans AFP dilakukan untuk mencari adanya peredaran Virus Polio Liar (VPL). Hal tersebut dilaksanakan untuk pencapaian program eradikasi polio untuk menghentikan kasus polio. Selain itu surveilans AFP dilaksanakan untuk mendokumentasikan tidak adanya peredaran VPL atau VDPV dalam mempertahankan status Indonesia bebas polio (Gurnadi, Hartono. 2016).

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. b) Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu. Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. Non Polio AFP rate di Kabupaten Kampar tertangani sebesar 100% dari tahun 2017-2021, lihat Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73
Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

15) Jenis Penyakit Yang Dilaporkan

Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) biasanya disebabkan oleh masuknya kuman bakteri, yang ditandai oleh gejala klinis batuk, demam tinggi dan disertai adanya napas cepat ataupun tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam Pneumonia adalah pembunuh

utama pada balita di dunia, data WHO angka kematian pneumonia pada balita berada pada peringkat pertama. Faktor resiko terjadinya pneumonia pada balita antara lain: kurangnya pemberian ASI eksklusif, gizi buruk, dan polusi udara di indoor, Bayi Baru Lahir Rendah, serta kepadatan dan kurangnya imunisasi campak. Perkembangan penyakit Lahir Rendah, serta kepadatan dan kurangnya imunisasi campak. Perkembangan penyakit Pneumonia di Kabupaten Kampar terus mengalami penurunan kecuali TBC.

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Beban Tuberkulosis makin besar dengan adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatnya kasus TB-MDR, TB-HIV, TB dengan DM, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Target cakupan pelayanan penderita Diare semua umur (SU) yang datang ke sarana kesehatan adalah 10% dari perkiraan jumlah penderita Diare SU (Insidens Diare SU dikali jumlah penduduk di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun). Perkembangan jumlah yang meninggal karena penyakit TBC di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dari 9 kasus pada tahun 2020 meningkat menjadi 25 kasus pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 88,89% per tahun. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan jenis penyakit yang dilaporkan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021, pada Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74
Jenis Penyakit yang di Laporkan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Orang	0,00	0,00	23,00	15,00	11,00	-30,72
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Orang	650,00	452,00	372,00	428,00	600,00	27,62
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	0,62	0,68	0,45	0,88	0,62	33,01
4	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,00	0,00	0,00	9,00	25,00	88,89
5	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Orang	1071,00	1079,00	1005,00	938,00	940,00	-3,23
6	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Orang	0,00	0,00	0,00	999,00	889,00	-5,51
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Penderita diare yang ditangani	Orang	0,00	0,00	12,49	11,98	8,59	-16,20
9	Angka kejadian Malaria	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tingkat kematian akibat malaria	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	13,86

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembangbiak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina. Penyakit malaria adalah salah satu jenis penyakit serius dan berbahaya yang disebabkan oleh infeksi parasit jenis *Plasmodium*.

HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sekelompok gejala penyakit kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Program pengendalian HIV bertujuan untuk: 1.) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2.) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; 3.) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di seluruh wilayah Kabupaten dan penguatan surveilans PD3I. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Kecendrungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktifitas fisik dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

16) Cakupan Layanan Kesehatan

Cakupan efektif pelayanan kesehatan di Puskesmas dimana terdapat 4 esensi Jaminan Kesehatan Semesta yang terdiri dari penguatan sistem kesehatan, menjamin pelayanan yang terjangkau, meningkatkan akses terhadap pelayanan yang bermutu dan Membangun Kapasitas. Cakupan Efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas. Definisi mutu mempertimbangkan beberapa aspek dimensi mutu yang perlu diperhatikan, diantaranya safety/keamanan, patient focus (Pelayanan yang berfokus pada pasien), Technical competence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan).

Dalam pengukuran cakupan efektif perlu dipahami perbedaan antara konsep "layanan cakupan" dan "layanan cakupan yang efektif" contohnya seberapa banyak individu yang mengakses puskesmas untuk pelayanan hipertensi. Sedangkan dalam cakupan efektif perlu diketahui berapa individu yang membutuhkan pelayanan hipertensi menurut usia dan jumlah pasien hipertensi dengan tekanan darah yang terkontrol.

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan

kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga Kesehatan. Ada beberapa cakupan layanan yang mengalami penurunan. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 selama periode tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 0,57% atau naik dari 90,96% menjadi 92,00% pada tahun 2021. Jelasnya cakupan layanan Kesehatan Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 lihat Tabel 2.75.

Tabel 2.75
Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Kasus	0,00	0,00	828,00	910,00	1475,00	36,00
2	Cakupan kunjungan bayi	%	96,10	99,70	95,20	99,80	97,90	0,54
3	Cakupan puskesmas	Unit	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	3,08
4	Cakupan pembantu puskesmas	Pustu	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
5	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	90,60	94,40	88,10	84,80	92,00	0,57
6	Cakupan pelayanan nifas	%	77,30	95,80	91,10	90,10	96,80	6,34
7	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	4,04	16,20	18,90	7,80	5,30	56,72
8	Cakupan pelayanan anak balita	%	66,40	66,80	67,66	89,20	94,40	9,89
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00
11	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021

17) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu. Kematian saat bersalin dan satu minggu pertama diperkirakan 60% dari seluruh kematian ibu.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021

mengalami pertumbuhan 0,00% atau turun dari 90,60% pada tahun 2017 menjadi 90,10% pada tahun 2021. Penurunan angka terjadi disebabkan menurunnya ketersediaan jumlah ibu yang ditolong tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

Tabel 2.76
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90,60	95,20	87,20	90,10	90,10	0,00

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2021*

2.4.1.3 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib Bidang pekerjaan umum merupakan urusan wajib pemerintah daerah terkait pelayanan dasar yang terdiri dari pelayanan di sub urusan sumber urusan jalan, daya air, sub sub urusan keciptakaryaan, serta sub urusan jasa konstruksi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1) Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Sedangkan Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kampar sepanjang 2.073,10 km dengan kondisi baik hanya 58,63% atau 1.216 km.

Namun demikian sebagian jalan tidak tersedia data kondisi jalan tersebut. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.
- Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.
- Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Jalan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdapat di Kabupaten Kabupaten Kampar sepanjang 398,96 kilometer, dengan status kondisi baik mengalami penurunan selama tahun 2017-2021 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -3,58% atau berkurang dari 297,03 km tahun 2017 menjadi sepanjang 255,78 km pada tahun 2021.

Sementara proporsi jalan dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 64,11%, kondisi rusak sedang dengan proporsi 20,25%, kondisi rusak ringan dengan proporsi 15,21% dan kondisi rusak berat dengan proporsi 0,43%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa perlu dilakukan upaya semaksimal mungkin dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan mengingat masih terdapat kondisi jalan rusak sedang, ringan dan berat sepanjang 143,18 km dan kondisi ini akan meningkatkan biaya logistic selain memperlambat pergerakan barang dan orang.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan proporsi jalan yang dalam kondisi baik selama tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi

cukup baik walaupun mengalami penurunan dari 74,45% tahun 2017 menjadi 64,11% tahun 2021. Perkembangan proporsi jalan menurut kondisinya dapat dilihat pada Tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.77
Panjang Jalan Provinsi Riau Menurut Kondisi yang terdapat di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Kondisi	Satuan	Tahun					Proporsi (2019)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Baik	Km	297,03	293,56	290,09	286,62	255,78	-3,58
Sedang	Km	15,92	31,62	49,37	57,12	80,79	52,97
Rusak Ringan	Km	33,91	36,78	44,39	48,84	60,69	15,86
Rusak Berat	Km	52,11	37,00	15,11	6,38	1,70	-54,82
Panjang Jalan	Km	398,96	398,96	398,96	398,96	398,96	0,00
Rasio Jalan Baik	%	74,45	73,58	72,71	71,84	64,11	-3,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Pemukiman Wilayah Provinsi Riau Tahun 2021

Sedangkan jika proporsi jalan dilihat dari aspek jenis permukaan, maka proporsi dengan jenis permukaan aspal sebesar 75,59% atau sepanjang 301,56 km, proporsi jalan dengan jenis permukaan beton sebesar 11,12% atau sepanjang 44,38 km dan proporsi Panjang jalan dengan jenis permukaan krikil/base dan tanah sebesar 13,29% atau sepanjang 53,01 km. Perkembangan proporsi jalan menurut jenis permukaannya dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut.

Tabel 2.78
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km) Provinsi Riau yang terdapat di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Jenis Permukaan	Satuan	Tahun					Proporsi (2021)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Beton	Km	na	na	na	na	44,38	11,12
Aspal Hotmix	Km	na	na	na	na	301,56	75,59
Krikil dan Tanah	Km	na	na	na	na	53,01	13,29
Jumlah	Km	398,96	398,96	398,96	398,96	398,96	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Pemukiman Wilayah Provinsi Riau Tahun 2021

Berdasarkan jenis permukaan tersebut dapat dilihat bahwa proporsi dengan jenis permukaan tanah masih merupakan proporsi terbesar dan

terpanjang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya semaksimal mungkin untuk membangun dan memelihara jalan tersebut dalam mengurangi biaya logistic dalam transfortasi barang dan jasa (orang) terutama hasil-hasil pertanian juga dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani.

Secara lengkap hal tersebut kondisi panjang jalan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79
Panjang Jalan Menurut Kondisi (KM) di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Kondisi	Satuan	Tahun					Proporsi (2019)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Baik	Km	1.101,29	1.159,27	1.170,60	1.199,55	1.215,55	2,51
2	Rusak Ringan	Km	822,86	778,29	810,21	796,46	780,05	-1,27
3	Rusak Berat	Km	148,95	135,55	92,30	77,10	77,50	-14,21
4	Panjang Jalan	Km	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10	0,00
5	Rasio Jalan Baik	%	53,12	55,92	56,47	57,86	58,63	2,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Sedangkan Panjang jalan yang menjadi kewenangan dalam pengelolaan Kabupaten Kampar sepanjang 2.073,10 km. Proporsi Panjang jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,51% per tahun. Sementara kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan pertumbuhan masing-masing -1,27% dan -14,21% per tahun. Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2,51% per tahun.

b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah.

Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kabupaten dengan jumlah penduduk. Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Panjang Jalan	Km	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	0,00
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Penduduk/Jalan	Jiwa/km	357,94	361,27	364,01	390,86	393,89	2,46
4	Rasio Jalan /Penduduk	Km/Jiwa	0,0028	0,0028	0,0027	0,0026	0,0025	-2,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas jalan oleh penduduk disuatu wilayah maka dilakukan perhitungan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Nilai rasio ini diartikan sebanyak panjang jalan yang terdapat dalam 1 km yang dapat digunakan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi tingkat aksesibilitas jalan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan Tabel 2.80, menunjukkan bahwa setiap 1 km jalan di Kabupaten Kampar pada tahun 2017-2021 dimanfaatkan oleh 356 orang/km kemudian bertambah menjadi 393 orang/km. Tahun 2021 rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk 0,0025 angka ini masih tergolong rendah. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Kampar perlu terus diupayakan. Peningkatan angka rasio ini mengindikasikan bahwa tingkat aksesibilitas penduduk untuk pemanfaatan jalan semakin meningkat. Oleh karena itu upaya pembangunan, dan pemeliharaan jalan harus terus ditingkatkan dalam rangka menjamin aksesibilitas penduduk dapat terpenuhi dalam rangka memobilisasi barang, jasa dan orang.

c. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 tahun 2021 adalah mengalami peningkatan dari 4,45% tahun 2017 menjadi 5,23% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,77% per tahun. Kondisi ini masih jauh dari harapan. Perkembangan Kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut.

Tabel 2.81
Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat dilalui
Kendaraan Roda 4 Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	%	4,45	5,57	5,48	5,08	5,23	4,77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Oleh karena diperlukan peningkatan proporsi pembangunan infrastruktur jalan pada kawasan permukiman menjadi prioritas setiap tahunnya, sehingga persentase jalan yang dapat dilalui dengan kendaraan roda empat semakin tinggi dan jalannya semakin panjang. Konsep pengembangan jaringan jalan pada dasarnya peningkatan dan perbaikan jalan sehingga jalan tersebut dapat di akses dengan mudah oleh kendaraan dalam transportasi barang, orang dan kendaraan pemadam kebakaran.

d. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan > 40 km/jam sebesar 55,01% pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar 67,86% dengan persentase penurunan pertumbuhan sebesar -4,84% per tahun. Upaya peningkatan kondisi jalan baik harus terus dilakukan dalam rangka mempercepat dan memperlancar pergerakan barang dan jasa di wilayah ini mengingat wilayah merupakan wilayah dengan basis industri HTI, Perkebunan kelapa sawit,

perkebunan karet sehingga memerlukan kondisi jalan yang baik dalam rangka mengurangi biaya logistik.

Tabel 2.82
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Km	1.602,45	1.606,50	1.612,80	1.617,80	1.623,84	0,33
2	Panjang Jalan Kabupaten	Km	2.361,52	2.391,57	2.415,87	2.442,47	2.460,10	1,03
3	Persentase	%	67,86	67,17	66,76	66,24	55,01	-4,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan merupakan aspek kesehatan masyarakat yang terkait dengan cara hidup, bahan kimia, dan tekanan yang ada di sekeliling manusia yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraannya termasuk orang lain di sekelilingnya yang berperan dalam menentukan kualitas kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia, dimana lingkungan yang berguna harus ditingkatkan dan diperbanyak, sedangkan yang merugikan harus diperbaiki atau dihilangkan.

Menurut Blum, derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan dan keturunan. Keempat faktor tersebut saling terkait dengan beberapa faktor lain, yaitu sumber daya alam, keseimbangan ekologi, kesehatan mental, sistem budaya, dan populasi sebagai satu kesatuan. Lingkungan dan perilaku mempunyai pengaruh yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik, biologik dan sosio-kultural. Faktor perilaku antara lain higiene perseorangan (*personal hygiene*).

Sub sektor Sanitasi meliputi penanganan persampahan, air limbah dan drainase. Pembangunan drainase Kabupaten Kampar selain merupakan bagian dari sub sektor sanitasi juga sebagai sarana dan prasarana penanggulangan banjir/genangan kawasan perkotaan. Berikut data Tabel 2.83 mengenai perkembangan rasio pertambahan perumahan bersanitasi layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.83
Persentase Rumah Tangga Tinggal Bersanitasi Layak (Fasilitas Pengelolaan Air Limbah) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	RT	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	0,76
2	Jumlah RT Mendapat Akses Air Limbah	RT	615	701	722	791	937	11,25
3	Akses Air Limbah	%	0,37	0,41	0,42	0,47	0,55	10,38

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Pada tahun 2017 rasio jumlah RT yang telah memiliki tempat buang air besar sendiri sebanyak 0,37% kemudian bertambah 0,55% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 10,38%. Jika dilihat pada pertumbuhan jumlah RT di Kabupaten Kampar sebesar 0,76% per tahun atau naik dari 166.477 RT pada tahun 2017 menjadi 171.550 RT pada tahun 2021.

f. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang Pertanian, Industri, Rumah Tangga, Rekreasi, Aktivitas Lingkungan dan Irigasi.

Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani harus dilakukan dengan melalui adanya

irigasi yang baik. Berikut Tabel 2.84 disajikan data kondisi irigasi di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.84
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kampar
Tahun 2021

No	Infrastruktur	Satuan	Kondisi Irigasi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bangunan Utama	%	17	25	25	33
2	Jaringan Primer	%	82	9	5	4
3	Jaringan Sekunder	%	74	15	7	4
4	Jaringan Irigasi	%	80	10	5	5
	Rata-rata	%	63,25	14,75	10,5	11,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Faktor umur bangunan irigasi juga berpengaruh terhadap kondisi penyediaan sarana dan prasarana pendukung jaringan irigasi yang baik. Kalau kita lihat jaringan irigasi di Kabupaten Kampar yang tersebar di beberapa Kecamatan kondisinya belum baik mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk melakukan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan beras yang terus mengalami penurunan akibat produksi padi berkurang selama lima tahun terakhir.

Oleh karena itu perlu melihat kondisi irigasi beberapa tahun sebelumnya dalam menyusun perencanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi serta partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan sangat diperlukan guna penyediaan sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik.

g. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran

induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Salah satu infrastruktur sumber daya air dalam mencapai ketahanan pangan untuk mencapai ketersediaan air di lahan basah/sawah ialah layanan penyediaan air irigasi, penyediaan layanan irigasi di Kabupaten Kampar dibangun melalui dana APBD Kabupaten Kampar, APBD Provinsi Riau dan juga dana APBN. berikut disampaikan tabel daerah irigasi/rawa Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi.

Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi serta partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan sangat diperlukan guna penyediaan sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik.

Tabel 2.85
Perkembangan Pembangunan Irigasi Teknis
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jaringan Irigasi	Satuan	Panjang Jaringan					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jaringan primer	M	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	0,00
2	Jaringan Sekunder	M	51.135	51.135	51.135	51.135	51.265	0,06

No	Jaringan Irigasi	Satuan	Panjang Jaringan					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
3	Jaringan Tersier	M	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	0,00
4	Luas lahan budidaya	Ha	6.546	5.507	4.468	4.807	4.542	-8,17
5	Rasio	%	1,257	1,494	1,841	1,711	1,814	0,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.85, menunjukkan selama periode tahun 2017-2021 panjang ketersediaan bangunan jaringan irigasi primer tidak mengalami perubahan dari 4.236 meter pada tahun 2017 menjadi 4.236 meter pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 0,00% per tahun. Sedangkan panjang jaringan irigasi sekunder yang sudah terbangun sepanjang 51.135 meter pada tahun 2017 dan bertambah menjadi 51.265 meter pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 0,06% per tahun. Rasio ketersediaan jaringan irigasi terhadap luas persawahan lahan budidaya tumbuh sebesar 0,04% per tahun atau 1,25% tahun 2017 meningkat menjadi 1,81% pada tahun 2021.

h. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan akan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk minum maupun memasak, mandi, cuci dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan langkah-langkah komprehensif secara bertahap dalam memberikan pelayanan kebutuhan air bersih rumah tangga terutama air minum bersih selama periode 2017-2021.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kecepatan penyediaan air minum bersih di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang cukup baik namun masih terdapat sekitar 30,00% RT yang belum dapat menikmati penggunaan air minum bersih selama tahun 2017-2021. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah RT yang dapat mengakses air minum bersih sebesar 67,08% atau 111.673 RT tahun 2017 meningkat menjadi 73,85% atau 126.690 RT tahun 2021 dengan pertumbuhan 2,49% per tahun. Berikut Tabel

2.86 menjelaskan mengenai capaian perkembangan penyediaan air minum bersih di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.86
Perkembangan Akses Air Minum Bersih di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	RT	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	0,76
2	Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum Bersih	RT	111.673	118.678	115.366	120.697	126.690	3,27
3	Air Minum Bersih	%	67,08	69,66	67,51	71,73	73,85	2,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Penyediaan air minum bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum bersih merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum bersih dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum bersih menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan tingkat kesehatan dan ekonomi masyarakat.

i. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap

sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Pemanfaatan air bersih yang berasal dari penyediaan ledeng (perpipaan) yang bersumber dari air sungai hanya tersedia di beberapa wilayah kecamatan dengan jumlah rumah tangga yang menggunakannya sangat terbatas, sedangkan pemanfaatan sumber air bersih yang berasal dari sungai, sumur dangkal dan sumur dalam menjadi dominan, namun belum terdata dengan baik.

Tabel 2.87
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2019	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	RT	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	0,76
2	Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum Layak	RT	51.758	56.238	57.743	51.086	155.098	50,85
3	Air Minum Layak	%	31,09	33,01	33,79	30,36	90,41	49,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Sementara itu akses air minum layak dapat dilihat pada Tabel 2.87 terlihat bahwa penduduk yang memiliki akses air minum layak dengan rata-rata pertumbuhan Kabupaten mencapai 49,05% selama tahun 2017-2021 atau naik dari 31,09% tahun 2017 menjadi 90,41% tahun 2021, namun tahun 2021 termasuk data air minum bersih. Selain membersihkan badan, air bersih juga bermanfaat untuk membersihkan bahan makanan dan untuk masak. Bahan makanan yang bersih dapat menunjang kesehatan tubuh.

2) Penataan Ruang

Konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah.

Pengaturan penataan ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan

nusantara dan ketahanan nasional melalui antara lain: Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan; Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kampar telah memperuntukkan penggunaan ruang sebagai yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Indikator penataan ruang terdiri beberapa item di antaranya Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dan rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan, ruang publik yang berubah peruntukannya. Berikut disajikan Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.

Tabel 2.88
Rencana Pola Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

No	Rencana Peruntukan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A.	Kawasan Lindung	123.053	11,86
A.1	Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan di Bawahnya	4.382	3,56
1	Kawasan Hutan Lindung	4.231	96,55
2	Kawasan Bergambut	151	3,45
A.2	Kawasan Perlindungan Setempat	10.220	8,31
1	Sempadan Danau dan Waduk	1.083	10,60
2	Sempadan Sungai	9.137	89,40
A.3	Kawasan Konservasi	108.451	88,13
1	Suaka Alam	100.018	92,22
2	Badan Air	8.433	7,78
B.	Kawasan Peruntukan Budidaya	914.063	88,14
1	Kawasan Hutan Produksi	420.603	46,01
a.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	117.809	28,01
b.	Kawasan hutan Produksi Tetap	162.290	38,59
c.	Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	139.375	33,14
d.	Hutan Rakyat	1.129	0,27
2	Kawasan Pertanian	417.644	45,69
a.	Kawasan Tanaman Pangan	6.302	1,51
a.	Kawasan Hortikultura	27.245	6,52
c.	Kawasan KP2B	-	-
d.	Kawasan Perkebunan	384.097	91,97
3	Kawasan Perikanan	-	-
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	-	-
a.	Kawasan Pertambangan MIGAS	-	-
5	Kawasan Industri	5.850	0,64
6	Kawasan Pemukiman	69.966	7,65
a.	Kawasan Pemukiman Perkotaan	23.392	33,43
b.	Kawasan Pemukiman Perdesaan	46.574	66,57
Total		1.037.116	100,00
C. Outline		91.812	8,85
1	Pengembalian ke Fungsi Lindung	91.812	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau per satuan luas dan luasan RTH publik wilayah masuk dalam kategori rencana peruntukan pada Tabel 2.89 point B. Kawasan Budidaya bagian kawasan pemukiman dengan peruntukkan penggunaan lahan untuk kawasan pemukiman seluas 914.063 hektar. Sedangkan Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan berupa ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka

hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun *private* telah memiliki total luas lebih dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Di Kabupaten Kampar penetapan ruang terbuka hijau belum tertata secara administrasi baik dalam sistem tata ruang.

Tabel 2.89
Perkembangan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Bangunan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2019	2021	
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	ha	130.528	130.528	130.528	130.528	130.528	0,00
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	ha	961.300	961.300	961.300	961.300	961.300	0,00
3	Luas Wilayah	%	1.128.928	1.128.928	1.128.928	1.128.928	1.128.928	0,00
4	Rasio Ruang terbuka hijau (1:2)	Indek	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	0,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus meningkatkan nilai estetika kota.

b. Rasio Bangunan Ber IMB

Dalam pemanfaatan ruang untuk Kawasan pemukiman terutama untuk bangunan perumahan dan bangunan lainnya memerlukan beberapa persyaratan terkait pendirian bangunan diantaranya IMB. IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Rasio bangunan ber IMB, adalah perbandingan antara jumlah bangunan ber IMB dengan jumlah seluruh bangunan. IMB gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun

baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku di Kabupaten Kampar.

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Tabel 2.90
Perkembangan Rasio Bangunan ber IMB di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Bangunan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2019	2021	
1	Jumlah Bangunan ber-IMB	Unit	11.023	24.273	31.692	37.015	41.353	44,82
2	Jumlah Bangunan	Unit	199.793	204.461	209.089	213.744	218.392	2,25
3	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	Indek	5,52	11,87	15,16	17,32	18,94	41,61

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2021

Perkembangan rasio bangunan ber IMB di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dilihat jumlah bangunan ber IMB sebanyak 11.023 unit (5,52%) tahun 2017 meningkat menjadi 41.353 unit atau (18,94%) pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 41,61% per tahun. Angka tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat karena pertumbuhan pengurusan IMB lebih besar dari pertumbuhan jumlah bangunan, jelasnya lihat Tabel 2.90 di atas.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan masih rendah kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB padahal dengan adanya IMB masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat antara lain; bisa mendapatkan kepastian dan

perlindungan hukum pada bangunan yang dimiliki bangun agar ketika bangunan tersebut berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan, meningkatkan nilai jual rumah, syarat transaksi jual beli dan sewa menyewa rumah, jaminan kredit bank, peningkatan status tanah, Informasi peruntukan dan rencana jalan.

c. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW berkaitan dengan penerbitan IMB, penerbitan IMB harus berdasarkan zona kawasan sesuai RTRW, dimana zona tersebut adalah:

1. Kawasan perdagangan dan jasa, diperuntukkan bagi bangunan perdagangan dan jasa seperti ruko dan pasar;
2. Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, sedang atau tinggi diperuntukkan bagi bangunan perumahan maupun rumah-rumah tinggal pribadi;
3. Kawasan pemerintahan, diperuntukkan bagi bangunan pemerintahan dan perkantoran;
4. Kawasan daerah hijau, diperuntukkan bagi daerah hijau dan tidak diizinkan untuk diterbitkan IMB untuk bangunan;
5. Kawasan areal penggunaan lainnya, kawasan cadangan dan bisa diperuntukkan bagi seluruh bangunan.

Sebelum penertiban IMB harus dilakukan pengecekan izin lokasi terhadap RTRW sehingga izin yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan RTRW yang telah disahkan.

2.4.1.4 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni

dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang 23 tahun 2014 kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan yaitu a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; b). Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c). Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; d). Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Sedangkan kewenangan Kabupaten Kota terhadap urusan perumahan dan Kawasan permukiman bidang kawasan permukiman antara lain: Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Terkait dengan perumahan dan Kawasan pemukiman kumuh yaitu Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota dan Penyelenggaraan PSU perumahan.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan urusan perumahan dan kawasan permukiman menurut permendagri nomor 86 tahun 2017 dapat diukur dengan 9 (sembilan) indikator dan secara umum diuraikan sebagai berikut.

1) Perumahan Rakyat

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan rumah akan meningkatkan kualitas kehidupan, bermartabat akan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kualitas rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang dapat didiami oleh kepala rumah tangga bersama keluarganya. Oleh karena

itu upaya pemenuhan rumah yang layak huni harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di wilayah Kabupaten Kampar. Rasio rumah layak huni sebagaimana pada Tabel 2.91 sama pada tahun 2017-2021. Tahun 2017 sebesar 0,06 kemudian meningkat menjadi 0,16 tahun 2021. Perkembangan Pembangunan Rumah Layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.91
Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Perumahan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Unit	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	444	904	1.013	1.854	1.275	41,86
3	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,06	0,12	0,13	0,23	0,16	37,91

Sumber: *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2021*

b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni merupakan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dan sesuai tata ruang dan perizinan. Kualitas lingkungan yang masih rendah juga seringkali belum mendapat cukup perhatian dari penghuni itu sendiri. Penghuni seringkali hanya berpikir mengenai unit rumah yang mereka miliki padahal kualitas lingkungan dan juga prasarana sarana utilitas memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup mereka.

Hal tersebut diukur dengan membagi Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu. Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikali dengan 100%. Berikut disajikan perkembangan cakupan rasio ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 70,47% per tahun di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.92
Perkembangan Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Rumah Layak Huni	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Layak Huni di Suatu Wilayah Kerja Kurun Waktu Tertentu	Unit	80	300	500	429	282	73,30
2	Jumlah Penduduk dalam kurun waktu tertentu	Unit	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
3	Rasio	Indek	0,010	0,036	0,059	0,049	0,033	70,47

Sumber: *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2021*

2) Kawasan Pemukiman

Kondisi permukiman berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah kesejahteraan penduduk maka semakin rendah pula kondisi permukiman yang mereka diami (Maslow, 1943). Rendahnya kualitas permukiman dikarenakan penduduk miskin tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kurangnya kemampuan dalam memelihara serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang mereka diami.

a. Rasio Permukiman Layak Huni

Sebuah permukiman yang layak huni haruslah memiliki fasilitas lengkap juga sesuai kebutuhan masyarakatnya. Fasilitas yang harus dipenuhi antara lain bangunan tempat tinggal yang ramah lingkungan dan sesuai standar nasional.

Sedangkan permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah. Perkembangan luas pemukiman layak huni meningkat sebesar 41,86% per tahun atau naik dari 0,01 (1,00%) pada tahun 2017 menjadi 0,042 (4,20%) pada 2021 dengan jumlah wilayah pemukiman seluas 32.628,37 hektar sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Luas Permukiman Layak Huni di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Permukiman Layak Huni	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Permukiman Layak Huni	Ha	46.176	94.016	105.352	192.816	132.600	41,86
2	Jumlah Wilayah Permukiman	Ha	31.680,15	31.680,15	31.680,15	31.680,15	31.680,15	0,00
3	Rasio	Indek	0,01	0,03	0,033	0,061	0,042	41,86

Sumber: *Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2021*

b. Persentase Permukiman Kumuh

Indikator kekumuhan suatu wilayah dapat dilihat dari kondisi kawasan permukiman yang antara lain kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran.

Jumlah permukiman kumuh di Kabupaten Kampar seluas 284,84 hektar dengan proporsi terluas terdapat Kecamatan Siak Hulu seluas 80,84 hektar dengan proporsi sebesar 11,67% dari luas Kawasan pada tahun 2020 dan tahun 2021 hanya tersisa seluas 207,68 hektar atau berkurang sebanyak 77,16 hektar atau berkurang sebesar 27,09%. Jumlah Kawasan kumuh di Kabupaten Kampar sebanyak 2.463,61 unit berkurang sejak tahun 2017-2021 dengan pertumbuhan penurunan sebesar 0,09% per tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 2.94 berikut.

Tabel 2.94
Persentase Permukiman Kumuh di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Kawasan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Bangkinang Kota	177,18	43,70	24,66
2	Kampar Kiri	915,33	24,54	2,68
3	Siak Hulu	689,8	80,48	11,67
4	Tambang	371,94	39,62	10,65
5	Kampar	136,28	70,19	51,50

No	Kecamatan	Kawasan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
6	Kampa	173,08	26,31	15,20
Kabupaten Kampar		2.463,61	284,84	116,37

Sumber: *Sebaran Kawasan Kumuh Kab. Kampar berdasarkan SK Bupati Kampar No. 663-664/XI/2020*

c. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata merupakan luasan permukiman yang tertata dibandingkan dengan luasan permukiman seluruhnya. Berikut persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.95
Perkembangan Persentase Permukiman yang Tertata
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Permukiman Tertata	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Permukiman yang tertata pada waktu tertentu	Unit	444	904	1.013	1.854	1.275	41,86
2	Luas Permukiman yang seluruhnya pada waktu tertentu	Unit	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	0
3	Rasio	Indek	0,08	0,16	0,18	0,33	0,22	41,86

Sumber: *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 2.95, persentase pemukiman tertata mengalami perkembangan sejak tahun 2017-2021 yaitu hanya 0,08 atau 8,00% tahun 2017 kemudian meningkat menjadi 0,22 atau 22,00% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 41,86% per tahun.

Pembangunan permukiman masih perlu adanya program penanganan yang serius terkait penataan permukiman melalui pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap sarana hunian maupun prasarana infrastruktur permukiman sehingga dapat mendukung perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

d. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lingkungan yang sehat dan aman tentunya perlu didukung dengan PSU, selama periode 2017-2021, rasio ketersediaan PSU meningkat pada angka 17,00% tahun 2021, sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 16,00% dengan pertumbuhan PSU sebesar 22,41% per tahun. Berikut disajikan perkembangan PSU di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.96
Perkembangan Lingkungan Sehat dan Dukungan PSU
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	PSU	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Lingkungan	Unit	22	30	33	58	65	22,41
2	Kebutuhan PSU	Unit	374	374	374	374	374	0,00
3	Rasio Ketersediaan PSU	%	6	8	9	16	17	22,41

Sumber: *Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2021*

2.4.1.5 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- d. Penanggulangan bencana Kabupaten;
- e. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten;
- f. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g. Investigasi kejadian kebakaran;
- h. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dalam menjalankan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada tahun 2021, melakukan sebuah pendataan ulang untuk Petugas Perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar, pendataan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi dan sebagai dasar dari penerbitan SK (Surat Keputusan) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan tentunya dari SK penetapan nama-nama yang tercantum didalam SK tersebut untuk dapat menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan monitoring pengawasan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat Desa, pengamanan Pilkada maupun koordinasi dalam hal yang berhubungan dengan tupoksi Linmas.

Secara umum Kabupaten Kampar relatif kondusif, meskipun demikian sebagai daerah yang membuka diri untuk masuknya orang dari berbagai suku dan etnis dapat hidup secara berdampingan dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa, serta letak secara geografis Kabupaten Kampar yang strategis menuju Provinsi Sumatra Barat sangat memungkinkan terjadinya kasus kriminal dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada, serta aksi demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai bentuk perkembangan dalam melaksanakan sistem demokrasi, berikut penyajian data pelanggaran urusan kantrantibumas.

Selain itu penambahan penduduk dan mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran yang ada, adanya optimalisasi monitoring dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum juga akan berpengaruh terhadap data pelanggaran, namun hasil akhir dari setiap kegiatan adalah mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang lebih kondusif, maka untuk memperjelas penjelasan di atas. Untuk melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melimpahkan wewenang melalui organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Untuk melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja telah berupaya dalam menyelesaikan pelanggaran Perda, pelanggaran K3 dan jumlah petugas patroli didalam menjalankan tugas penertiban diwilayah Kabupaten Kampar. Namun demikian cakupan pelayanan Linmas mengalami penurunan dari 2.795 orang pada tahun 2017 menjadi hanya 1.471 orang pada tahun 2021 atau berkurang sebesar -12% per tahun. Perkembangan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 menunjukkan terjadinya penurunan sebesar -12,00% per tahun, jelasnya lihat Tabel 2.97 berikut.

2) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah bencana kebakaran. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selama tahun 2017-2021 cakupan

layanan bencana kebakaran dilaksanakan di 21 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar. Perkembangan cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/kota di Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021 menunjukkan terjadinya penanganan 100% karena dapat dilakukan di semua wilayah kecamatan, jelasnya lihat Tabel 2.97.

3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam dapat diselesaikan sebesar 100%. Namun demikian jumlah pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 24,58% per tahun atau naik dari 49 kali tahun 2017 menjadi 114 kali tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Kampar. Perkembangan penanganan ketertiban, ketentraman, keindahan tahun 2017-2021 tercantum pada Tabel 2.97 berikut.

4) Persentase Penegakan PERDA

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pertama, peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarah; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda). Penegakan Peraturan Daerah selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 100,00% per tahun. Realisasi penegakan Perda meningkat dari 100,00% tahun 2017 menjadi 100,00% tahun 2021. Pertimbangan Perda penyakit masyarakat masih menjadi perhatian khusus pada

tahun 2021. Berikut data capaian kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selama periode 2017-2021.

Tabel 2.97
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang	2.795	2.795	2.795	2.795	1.471	-12,00
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/kota	Kecamatan	21	21	21	21	21	0,00
3	Jumlah Aparat Pamong Praja	orang	456	464	465	461	385	-3,84
4	Jumlah Patroli Petugas satpol PP dalam melaksanakan pemantauan dan penyelesaian K3 dalam 24 jam	Kali	504	528	528	528	672	8,01
5	Jumlah Pelanggaran K3	Kali	49	67	94	94	114	24,58
6	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	Kali	49	67	94	94	114	24,58
7	Jumlah Perda	Buah	5	9	9	6	9	24,17
8	Jumlah Pelanggaran Perda	Buah	82	120	131	91	399	90,86
9	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.1.6 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial

Pelaksanaan penyelenggaraan untuk mendukung penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan Sosial adalah

semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial memerlukan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang biasa dikenal dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membangun kesejahteraan sosial, melalui Dinas Sosial pemerintah Kabupaten Kampar melakukannya penggalian potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), berbagai macam upaya yang dilakukan serta kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar.

Sedangkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar -5,43% per tahun. Pertumbuhan PSKS tersebut hanya ditunjang oleh penambahan pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tagana dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,90% dan 7,14% pertahun. Jumlah PSKS pada tahun 2017 terdapat 499 orang dan kemudian berkurang menjadi 383 orang PSKS pada tahun 2021. Dari data PMKS dan PSKS tersebut pada Tabel 2.97 diuraikan indikator kinerja penanganan PMKS oleh PSKS yang terdapat di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021. Jumlah PSKS secara aktif berperan dalam penanganan PMKS di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021, lihat Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.98
Jenis dan Jumlah PSKS Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenis PSKS	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	25,00
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	55,00	55,00	56,00	57,00	57,00	0,90
3	Tagana	Orang	56,00	56,00	56,00	56,00	72,00	7,14
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Unit	25,00	25,00	25,00	25,00	24,00	-1,00

No	Jenis PSKS	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
5	Karang Taruna (KT)	Unit	143,00	144,00	146,00	147,00	148,00	0,86
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Keluarga Pioner	Orang	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Unit	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	139,00	-	-	-	-	-25,00
10	Penyuluh Sosial	Orang	-	-	-	-	-	0,00
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
12	Dunia Usaha	Unit	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah		Unit-Orang	499,00	362,00	365,00	367,00	383,00	5,43

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2021

1) Persentase PSKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Di Kabupaten Kampar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari 26 Kategori yang ada hanya 18 Kategori yang termasuk dalam data PSKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kestabilan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, panyakid disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam, perempuan rawan sosial, keluarga fakir miskin, dan keluarga bermasalah sosial psikologis. Adapun saat ini kategori yang memperoleh bantuan sosial yaitu keluarga fakir miskin yang berjumlah sebanyak 10.599 KK atau 100%.

2) Persentase PSKS yang Tertangani

Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan

yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Dari 9 indikator, masih terdapat tiga indikator yang belum tertangani 100% yaitu Anak Dengan Kedistabilan hanya mencapai 85,00%, Lanjut Usia Terlantar tercapai 76,00% dan Penyandang Disabilitas tertangani 87,00% pada tahun 2021. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Berikut data PMKS yang dapat tertangani tahun 2021.

Tabel 2.99
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Tertangani
Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah	Jumlah Yang Tertangani	Persentase (%)
1	Anak Balita Terlantar	Orang	1	1	100,00
2	Anak Terlantar	Orang	10	10	100,00
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Orang	65	65	100,00
4	Anak Dengan Kedistabilan	Orang	100	85	85,00
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	7	7	100,00
6	Lanjut Usia Terlantar	Orang	300	227	76,00
7	Penyandang Disabilitas	Orang	100	87	87,00
8	Korban Bencana Alam	KK	25	25	100,00
9	Keluarga Fakir Miskin	KK	17.185	17.185	100,00

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2021

3) Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa tanggap Darurat

Kabupaten Kampar merupakan wilayah yang dilalui oleh Sungai Kampar. Kondisi ini juga berdampak negatif yaitu kerawanan terhadap bencana banjir. Daerah-daerah yang berada di tepi aliran sungai ini berpotensi terkena banjir terutama saat musim penghujan dimana debit air di sungai meningkat. Kawasan tersebut berpotensi terkena bencana banjir musiman karena morfologinya yang relatif rendah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggarkan untuk siaga tanggap darurat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk

membantu masyarakat yang terkena banjir. Berdasar tabel 2.100 menunjukan bahwa selama tahun 2017-2021 banjir hanya terjadi pada tahun 2017, 2019 dan 2021 dan pada tahun 2021 jumlah RT yang terkena banjir hanya 25 KK . Secara relatif seluruh RT yang terkena bencana banjir tertangani secara baik sebesar 100,00%. Berikut tabel yang menunjukkan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2017-2021.

Tabel 2.100
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jumlah Yang Menerima Jaminan Sosial	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah keluarga Terkena Banjir	KK	1.489	-	2.432	-	25	1.128,5
2	Persentase Bantuan Bencana Banjir	%	100	0	100	0	100	1.128,5

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2021

4) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Orang yang mengalami Penyandang Fisik dan Mental sekaligus atau cacat ganda adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari hari secara layak/wajar. Orang-orang ini perlu mendapatkan Jaminan Sosial dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Seseorang yang dikatakan Lanjut Usia (Lansia) Tidak Potensial, jika ia telah berusia 65 Tahun keatas yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Tabel berikut menunjukkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia potensial tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tahun 2017-2021.

Tabel 2.101

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jumlah Yang Menerima Jaminan Sosial	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Asistensi Sosial Penderita Disabilitas	Orang	9	13	67	58	58	6,00
2	Asistensi Lanjut Usia Tidak Potensial	Orang	59	63	227	0	0	4,00

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2021.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten Kampar, yaitu Bidang Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaaan dan Olahraga, Persandian, Kebudayaan dan Perpustakaan.

2.4.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bagian tenaga kerja dimana kewenangan Kabupaten terkait antara lain:

- 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja antara lain: Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta, Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja,

Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten.

- 2) Penempatan tenaga kerja yang terdiri dari pelayanan antar kerja di Kabupaten, Penerbitan izin LPTKS dalam Kabupaten, Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten, Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten, Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam Kabupaten.
- 3) Hubungan industrial tenaga kerja yang meliputi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Kabupaten, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten.

Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektor ekonomi mengingat banyak variabel yang terlibat, Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh *stakeholders*, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat.

Pencari merupakan kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Indikator ketenagakerjaan terkait dengan Perlindungan dan Keselamatan Pekerja dapat dilihat pada Tabel 2.102 dan penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 2.102
Perkembangan Realisasi Perlindungan dan Keselamatan Pekerja di
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	46,00	102,00	55,00	71,00	44,00	16,68
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	5,00	7,00	5,00	27,00	12,00	98,97
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	491	248	98	381	112	-27,05
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	0,00	0,00	0,00	200	324	62,00
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0,00	10	52	0,00	14,00	0,00
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	20	21	16	16	0,00	-29,70
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	0,00	0,00	150	40	300	144,17
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	Rasio	1.041	1.007	532	249	245	-26,31

Sumber: BPS Sakernas diolah Pusdatinaker dan Tim Tahun 2021

1) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Angka sengketa perusahaan pada tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang berfluktuatif, namun naik dari 46 kasus tahun 2017 menjadi 44 kasus tahun 2021, sedikit menurun dibandingkan 2020 sebanyak 71 kasus. Hal ini menandakan hubungan perusahaan dengan masyarakat tempatan kurang baik, perlu peran pemerintah daerah mendorong hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

2) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Pertumbuhan pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan sebesar -27,05% per tahun atau berkurang dari 491 orang pada tahun 2017 menjadi 113 orang pada tahun 2021. Penurunan jumlah pencari yang ditempatkan antara lain karena keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya Pendidikan tenaga kerja, ketidaksesuaian antara keahlian yang dibutuhkan dengan lapangan kerja yang tersedia, keengganan pekerja untuk bekerja keluar daerah dimana perusahaan beroperasi. Kondisi ini dapat memicu menurunnya daya serap tenaga kerja sehingga berakibat pada peningkatan angka pengangguran terbuka.

Sementara itu besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK turun dari 0,00 tahun 2017 menjadi 324 tahun 2021 dengan pertumbuhan penurunan sebesar 62,00% per tahun.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti motivasi kerja, keahlian/keterampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja.

Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Rasio lulusan S3 yang tinggi yang terlatih akan dapat melakukan riset secara mandiri. Riset adalah sebuah aktivitas yang mengeksplorasi intelektualitas manusia untuk mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi. Riset dilakukan menurut prinsip dan kaidah ilmiah universal seperti berpikir secara runtut dan argumentatif, menjunjung tinggi obyektivitas dan kejujuran ilmiah, serta rendah hati dalam mengakui karya-karya orang lain yang berpengaruh atau terkait dengan risetnya.

2.4.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan tujuan dari SDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau GAP pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. IPG diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan antara laki-laki dengan perempuan.

Berikut disajikan data pada Tabel 2.103 mengenai perkembangan realisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kampar 2017-2021. Dari delapan indikator yang disajikan menunjukkan bahwa realisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hanya tiga indikator yang mengalami penurunan kinerja yaitu indeks pemberdayaan gender yang mengalami pertumbuhan negatif -2,97% per tahun, Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan (PNS) dengan pertumbuhan -1,24% per tahun dan Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD dengan pertumbuhan -10,71% per tahun selama 2017-2021.

Tabel 2.103
Perkembangan Realisasi Indikator Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	Orang	5.347	5.176	5.155	4.983	5.081	-1,24
2	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	56,72	57,43	58,86	59,48	63,24	2,78
3	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	%	15,56	15,56	15,56	8,89	8,89	-10,71
4	Proporsi Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	0,00	0,00	0,00	54,77	61,41	12,12
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	28,63	31,41	33,54	34,76	35,43	5,51
6	Jumlah perempuan di lembaga swasta	%	106,70	107,80	108,90	119,09	120,19	3,08
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	89,22	89,29	89,83	89,52	89,79	0,16
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	60,80	61,18	54,41	54,95	53,62	-2,97

Sumber: DP3AKB dan BPS Provinsi Riau dan Pusat Tahun 2021

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Perbedaan capaian dalam ekonomi menjadi penyebab utama ketimpangan gender di Kabupaten Kampar. Salah satu sebab dari hal adalah kurangnya peran perempuan dalam pasar tenaga kerja. Pembebanan peran domestik mengakibatkan secara umum perempuan menjadi kurang produktif secara finansial. Sedangkan lima indikator lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan, jelasnya lihat Tabel 2.103.

Dalam rangka mewujudkan kelompok perempuan dan anak yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian, pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan program unggulan *3-ends*. Program ini didasarkan pada masih tingginya kekerasan pada perempuan, masih adanya praktek perdagangan manusia juga kesenjangan ekonomi antara laki laki dan perempuan. Program *3-ends* ini adalah (1) Akhiri kekerasan perempuan dan anak, (2) Akhiri perdagangan manusia dan (3) Akhiri

kesenjangan ekonomi antara laki laki dan perempuan. Program unggulan Kementrian PPPA ini tentu juga menjadi rujukan bagi daerah untuk melakukan upaya yang sejalan dengan kebijakan pusat dengan tetap mengacu pada data dan kebijakan daerah. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Sementara itu berdasarkan Tabel 2.104 adanya peningkatan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak. Enam indikator semua mengalami peningkatan, walaupun semua kasus yang terjadi dapat ditangani dengan baik. Namun demikian upaya pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berhasil dengan baik hal dapat dilihat dari jumlah kasus yang terus meningkat dengan pertumbuhan 47,13% per tahun. Demikian halnya kasus KDRT mengalami peningkatan dari 9 kasus tahun 2017 bertambah menjadi 11 kasus tahun 2021, walaupun tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya 1 kasus. Kasus kejahatan seksual mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 37,54% per tahun dengan jumlah kasus terbanyak terjadi tahun 2021 sebanyak 46 kasus berbanding 20 kasus tahun 2017. Demikian halnya dengan kasus penganiayaan juga meningkat dengan pertumbuhan sebesar 36,67% atau dari 3 kasus tahun 2017 bertambah menjadi 9 kasus tahun 2021. Paling banyak kasus kekerasan terjadi di rumah tangga, fasilitas umum, dan tempat yang masuk dalam kategori lainnya, sedangkan kasus kekerasan di sekolah dan tempat kerja jumlahnya sedikit.

Kemen PPPA telah menyusun proses bisnis layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan dan anak. Setidaknya terdapat enam layanan standar dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yakni pelayanan

pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, pelayanan mediasi, dan pelayanan pendampingan korban.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah terutama pihak yang wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pencegahan tidak terbatas pada penanganan pada kasus yang terjadi tetapi harus ada program penanganan yang bersifat preventif terutama terkait dengan bidang Pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pemerintahan dan tata Kelola kelembagaan, ekonomi dan sosial dan budaya masyarakat agar enam indikator tersebut mengalami perbaikan kinerja kedepan.

Tabel 2.104
Perkembangan Perlindungan Perempuan dan Anak
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kasus	49	47	40	35	112	47,13
2	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti	Kasus	49	47	40	35	112	47,13
3	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	9	6	5	1	11	217,50
5	Jumlah Kasus Kejahatan Seksual	Kasus	20	17	25	19	46	37,54
6	Jumlah Kasus Penganiayaan	Kasus	3	5	4	6	9	36,67

Sumber: DP3AKB Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.2.3 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan

Pangan merupakan hak azasi manusia, sebagaimana disebut dalam pasal 27 UUD 1945, yang dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No 18/2012 tentang pangan. Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga ketahanan pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap pangan akan semakin meningkat.

1) Ketersediaan Pangan Utama

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia termasuk penduduk Kabupaten Kampar. Beras memberikan kontribusi terbesar terhadap pemenuhan konsumsi kalori. Pengadaan beras dalam negeri dilakukan sebagai intervensi dari sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya. Pengadaan beras dalam negeri akan mampu menjadi jaminan pasar dan harga bagi produksi dalam negeri sehingga produsen beras masih tetap bersemangat untuk memproduksi beras untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan beras.

Berbagai kajian menyebutkan bahwa *multiplier effect* dari kegiatan pengadaan beras diantaranya adalah mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendorong pembangunan pedesaan melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja pada tanaman pangan khususnya beras.

Perkembangan produksi beras di Kabupaten Kampar menunjukkan tren penurunan dengan pertumbuhan -8,61% selama tahun 2017-2021. Penurunan produksi beras tersebut disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi padi yang mengalami penurunan sebesar -8,59% per tahun akibat berkurangnya luas tanam dan panen masing-masing -6,76% dan -10,46% per tahun. Penurunan produksi padi ini berakibat pada penurunan produksi beras dari 26.676,08 ton

tahun 2017 menjadi 18.306,22 ton tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar - 8,61% per tahun.

Upaya peningkatan produksi beras dalam rangka meningkatkan rasio ketersediaan beras dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Kampar harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian ke depan melalui program peningkatan produktifitas, peningkatan intensitas penggunaan lahan, jaminan ketersediaan lahan pertanian pangan padi berkelanjutan serta praktek pertanian terbaik (*Good Agricultural Proctices*). Berikut data ketersediaan terhadap kebutuhan pangan dan rasio ketersediaan dan kebutuhan beras di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.105
Perkembangan Realisasi Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan
Beras di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Tanam	Hektar	7.351,00	9.159,00	8.003,00	6.644,00	5.181,00	-6,76
2	Luas Panen	Hektar	8.331,00	8.656,00	7.195,00	7.088,00	5.147,00	-10,46
3	Produksi	Ton	42.236,18	42.017,48	37.245,45	36.823,04	28.965,54	-8,59
4	Produktivitas	Kw/Ha	5,07	4,85	5,18	5,20	5,63	2,78
5	Produksi Beras	Ton	26.676,08	26.555,05	25.778,14	23.272,16	18.306,22	-8,61
6	Konsumsi beras	Ton	79.726,07	83.565,21	73.654,26	82.534,67	85.671,91	2,20
7	Defisit	Ton	53.049,99	57.010,16	47.876,12	59.262,51	67.365,69	7,22
8	Rasio Ketersediaan	%	33,46	31,78	35,00	28,20	21,37	-9,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Tabel 2.105 menunjukkan bahwa penurunan rasio ketersediaan beras ini akan sulit menjamin ketahanan pangan dari aspek ketersediaan beras melalui produksi. Oleh itu perlu upaya yang maksimal untuk menjaga ketahanan pangan di Wilayah ini melalui program lainnya diantaranya diversifikasi pangan. Disisi lain terjadinya peningkatan konsumsi beras akibat peningkatan pertambahan jumlah penduduk, sehingga kebutuhan beras meningkat dengan pertumbuhan 2,20% per tahun dengan asumsi konsumsi per kapita sebanyak 98,10 kg/kapita/tahun.

Kondisi ini berakibat pada penurunan kemampuan penyediaan beras dari aspek produksi beras daerah sehingga rasio ketersediaan beras menurun dari 33,46% tahun 2017 menjadi 21,37% tahun 2021 atau dengan penurunan pertumbuhan sebesar -9,64% per tahun.

2) Ketersediaan Energi dan Protein

Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau *Recommended Dietary Allowances* (DRA) merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat (97,5%). Kegunaan AKG yang dianjurkan adalah 1) untuk menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi makanan bagi penduduk. 2) untuk perencanaan dalam pemberian makanan tambahan maupun perencanaan makanan institusi. 3) untuk perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional. 4) Acuan pendidikan gizi; dan 5) Acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.

Ketersediaan Zat Gizi Per Kapita yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama tersebut adalah Kalori, Protein, Lemak, Vitamin dan Mineral. Peningkatan konsumsi pangan padi-padian kkal/kapita/hari menunjukkan peningkatan 2,56% per tahun, pangan hewani meningkat 7,32% per tahun, kacang kacangan meningkat sebesar 0,92% per tahun dan gula meningkat sebesar 0,57% per tahun. Sementara empat indikator lainnya mengalami penurunan seperti konsumsi umbi umbian turun sebesar -1,88% per tahun, minyak lemak turun sebesar -4,12% per tahun dan sayur dan buah turun sebesar -2,33% pertahun serta penurunan yang paling signifikan adalah buah biji berminyak turun sebesar 10,66% per tahun. Oleh karena itu harus dilakukan upaya yang maksimal agar delapan komponen keterpenuhan gizi ini harus berjalan seimbang agar kesehatan masyarakat terjaga dan dapat meningkatkan usia harapan hidup masyarakat diwilayah ini. Ketersediaan Energi dan Protein di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106
Perkembangan Realisasi Ketersediaan Energi dan Protein
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Konsumsi	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Padi-padian	Kkal/kap/Hari	353,02	355,27	384,81	362,85	388,19	2,56
2	Umbi-umbian	Kkal/kap/Hari	97,53	96,27	92,77	94,21	90,32	-1,88
3	Pangan hewani	Kkal/kap/Hari	116,95	114,81	154,72	153,77	149,09	7,32
4	Minyak lemak	Gram/kap/Hari	24,25	23,53	21,75	21,4	20,47	-4,12
5	Buah biji berminyak	Gram/kap/Hari	34,55	33,37	22,56	20,04	20,91	-10,66
6	Kacang-kacangan	Gram/kap/Hari	38,73	38,61	40,4	39,32	40,12	0,92
7	Gula	Gram/kap/Hari	39,72	39,65	40,77	38,62	40,52	0,57
8	Sayur dan buah	Gram/kap/Hari	137,81	138,17	124,2	149,36	119,88	-2,33

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2021

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan dan program mutu dan keamanan pangan melalui kedua program tersebut seharusnya bisa dilakukan upaya dalam rangka tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan. Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pemantauan, sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan disemua rantai distribusi pangan baik, ditingkat petani, pengepul dan pedagang. Banyaknya cemaran terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan yang dilarang untuk digunakan dalam pangan dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan sakit pada konsumen.

Keamanan pangan segar adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan segar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pengawasan keamanan pangan

segar adalah upaya – upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan pangan segar yang beredar melalui inspeksi, pengambilan contoh, monitoring dan pengujian.

2.4.2.4 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pertanahan

Sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, secara umum permasalahan sektor pertanahan Kabupaten Kampar tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah.

Permasalahan yang bersifat umum antara lain adalah (1) Luas lahan bersertifikat, (2) Luas lahan yang dimiliki oleh pemerintah, (3) Luas lahan yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah, (4) Jumlah kasus sengketa tanah yang diselesaikan. Dari permasalahan umum tersebut dapat menimbulkan konflik dimasyarakat seperti (1) Adanya sertifikat kepemilikan tanah ganda, (2) Adanya alih fungsi lahan non pertanian, (3) tidak terkendalinya harga jual dan beli tanah, (4) masih banyaknya kepemilikan tanah yang terdaftar.

Undang-undang 23 tahun 2014 terkait kewenangan Kabupaten terhadap urusan pertanahan antara lain: Pemberian izin lokasi dalam satu Kabupaten, Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah Kabupaten; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten; Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kabupaten; Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Kabupaten, Penerbitan izin membuka tanah; Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten.

1) Penyelesaian izin lokasi

Kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan *Online Single Submission* (OSS), mengalami perubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Penelitian ini terfokus pada evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca OSS baik retrospective (*ex post*) untuk melihat apa yang terjadi, dan apa perbedaannya dengan pengaturan sebelumnya maupun prospective (*ex ante*) untuk melihat apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan.

Di Kabupaten Kampar lahan Pertanahan banyak dipergunakan sebagai usaha perkebunan, selain itu banyak pula lahan pertanahan dipergunakan untuk kegiatan usaha lainnya, untuk pemanfaatan lahan selain dilengkapi dengan bukti sah kepemilikan berupa sertifikat juga harus ada izin lokasi. Dari jumlah pemohon izin lokasi yang ada di Kabupaten Kampar persentase penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Kampar pada tahun 2017-2021. Disamping itu selama tahun 2017-2021 Pemerintah Daerah juga telah menertibkan aset-aset daerah dengan melengkapi administrasi kepemilikan lahan berupa sertifikat secara bertahap kemudian pemerintah daerah juga telah memfasilitasi konflik lahan masyarakat dengan berkoordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tabel 2.107
Perkembangan Realisasi Penyelesaian Izin Lokasi
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kondisi Lahan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Permohonan Izin Lokasi	Unit	Na	Na	Na	Na	395.355	0,00
2.	Izin Lokasi	Unt	Na	Na	Na	Na	Na	0,00
3.	Penyelesaian izin Lokasi	%	Na	Na	Na	Na	Na	0,00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2021

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Salah satu permasalahan yang sering timbul berkenaan dengan pertanahan adalah terkait dengan batas wilayah. Pada hakikatnya penetapan batas wilayah administrasi suatu daerah adalah sebagai upaya untuk menunjukkan batas dan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Namun demikian penetapan batas administrasi pemerintahan suatu daerah seringkali menimbulkan berbagai konflik kepentingan masyarakat, bahkan menyentuh aspek-aspek yang berkenaan dengan harga diri, kehormatan dan marwah suatu kesatuan masyarakat di daerah tertentu. Oleh karenanya penyelesaian berbagai permasalahan perbatasan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dan seimbang dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Secara administrasi, Kabupaten Kampar berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Rokan Hulu di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat. Kewenangan penyelesaian perbatasan antar daerah Kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi, maka sejak pemekaran wilayah Kabupaten Kampar telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan Kabupaten yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka merumuskan kesepakatan garis batas yang akan dilakukan pelacakan dan penetapan di lapangan.

3) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Jika mengacu pada Pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat tentang pendaftaran tanah yang digunakan sebagai jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Berdasarkan

data yang dikemukakan pada Tabel 2.108 menunjukkan pada tahun 2021 sekitar 305.772 hektar lahan yang disertifikat dari luas lahan 1.128.928 hektar yang terdapat di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.108
Perkembangan Realisasi Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Kondisi Lahan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	ha	Na	Na	Na	Na	305.772	0,00
2	Jumlah Luas Wilayah	ha	1.128.928	1.128.928	1.128.928	1.128.928	1.128.928	0,00
3	Persentase luas lahan bersertifikat	%	Na	Na	Na	Na	27,09	0,00

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.2.5 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu utama dalam wacana semua tingkat, baik nasional maupun internasional. Hal ini tidak lepas dari timbulnya kesadaran bahwa fenomena perubahan alam yang banyak menimbulkan bencana ini juga disumbang oleh perilaku manusia. Kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ekologis yang juga masuk dalam jaringan ekosistem yang luas membuat manusia harus selalu mempertimbangkan faktor lingkungan dalam setiap kegiatan maupun pembangunan. Kemajuan pembangunan nasional saat ini membawa perubahan yang signifikan, namun kemajuan pembangunan tidak diimbangi dengan kemajuan kelestarian lingkungan alamnya. Terbukti dengan banyaknya kerusakan alam yang terjadi akibat pembangunan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan lingkungan. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu indikator pembangunan berkelanjutan untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan yang dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan keseluruhan ekosistem. Sementara itu menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan Kabupaten antara lain Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/kota; Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/kota, kinerja masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109
Perkembangan Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/kota	Ada/Tidak	KLHS RPJMD	KLHS DDDT	KLHS RTRW	Tidak	RDTR Siak Hulu	Ada
2	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Izin	37	37	39	39	39	1,35
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/kota.	Kasus	28	18	21	14	13	-14,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2021

1) Pemantauan Kualitas Air

Mutu air adalah kondisi air yang diukur dan di uji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan status air adalah kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada satu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan, sumber air adalah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Pada tahun 2021 Kabupaten Kampar melakukan pemantauan kualitas air menggunakan metode *STORET* atau penentuan mutu air dengan menbandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air.

Pemantauan Kualitas Air dilakukan dengan menghitung Indeks Kualitas Air yang merupakan salah satu bagian dari perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Angka COD dan BOD yang lebih tinggi dari baku mutu menunjukkan tingkat pencemaran dalam kondisi baik. Hal ini perlu dilakukan tindakan pengelolaan lingkungan air supaya tidak berlanjut. Hasil pemantauan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.110
Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Air
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil					Indeks Kualitas Air
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	TSS	mg/L	50	27	12	8,66	17,346	12	Baik
2	DO	mg/L	6	4,5	4,8	5,9	3,6	4,17	Baik
3	BOD	mg/L	2	2,1	<0,2	2,8	63,22	8,241	Baik
4	COD	mg/L	10	16,74	<1,53	23,65	28,59	27,79	Baik
5	Total Fosfat	mg/L	0,2	<0,01	0,12	<0,10	0,815	0,149	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2021

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan konsep pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya. Dalam

pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar salah satunya pilar pembangunan lingkungan dengan 4 (empat) tujuan (1) Konsumsi dan produksi berkelanjutan, (2) Perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, (3) Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, (4) Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat.

Implementasi dukungan terhadap pilar pembangunan lingkungan Kabupaten Kampar melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, (2) peningkatan pengelolaan bencana, (3) pemulihan pencemaran air dan tanah, dari hasil kebijakan tersebut dilakukan melalui 4 (empat) program pembangunan, (1) Program pengendalian kebakaran hutan, (2) penyelenggaraan dan penanggulangan bencana, (3) pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, (4) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2) Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri. Pemantauan kualitas udara dilaksanakan 2 (dua) periode di tiap-tiap lokasi, dengan parameter-parameter yang dipantau adalah parameter kimia berupa SO_2 dan NO_2 . Pemantauan lingkungan khususnya kualitas udara menjadi konsekuensi bagi perusahaan dan kegiatan yang mengemisikan pencemar udara. Pemantauan kualitas udara meliputi udara emisi dan udara ambien diperlukan untuk pemenuhan peraturan (pemantaun rutin-abnormal-darurat, AMDAL/UKL-UPL, PROPER, dll) dan memprediksi dampak pencemaran emisi udara ke lingkungan. Empat komponen pencemaran udara secara keseluruhan menunjukkan kualitas baik terutama kadar NO_2 dan Kadar SO_2 . Hasil pemantauan indek kualitas udara di Kabupaten Kampar tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.111
Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Udara
Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Parameter	Parameter		
		Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Indeks Pencemaran Udara
		µg/m ³	µg/m ³	
1	Transportasi	16,27	12,15	Baik
2	Industri	6,39	2,47	Baik
3	Permukiman	9,40	5,02	Baik
4	Perkantoran	3,34	7,22	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2021

3) Index Kualitas Tutupan Lahan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) saat ini yang digunakan dalam perhitungan hanya tutupan lahan berhutan. Seringkali di daerah tutupan hutan diartikan sebagai status kawasan hutan. Berikut data indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Kampar tahun 2021.

Tabel 2.112
Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Hutan Produksi	Satuan	Luas	Indeks Tutupan Hutan
1	Hutan Produksi Tetap (HP)	Ha	162.290	Baik
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Ha	117.809	Baik
3	Hutan Produksi Konversi (HPK)	Ha	134.375	Baik
4	Kawasan Hutan Tata Guna	Ha	162.290	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2021

4) Persentase Cakupan Area Pelayanan

Pengelolaan lingkungan hidup perkotaan menjadi perhatian Kabupaten Kampar dengan menerbitkan PERDA tentang permasalahan pengelolaan persampahan (1) Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Sampah, (2) Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan. Pelayanan persampahan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 terdiri dari prasarana TPS dengan pertumbuhan sebesar 13,64% atau dari 85 unit TPS pada tahun 2017 bertambah menjadi 104 unit TPS pada tahun 2020 dan kemudian berkurang menjadi 85 unit TPS tahun 2021.

Rasio pengelolaan persampahan mengalami peningkatan dari 30,00% tahun 2017 turun menjadi 50,00% pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi peningkatan kemampuan penanganan. Oleh karena itu program peningkatan pengelolaan persampahan dengan meningkatkan daya tampung salah satu upaya menampung produksi sampah yang bertambah setiap tahunnya akibat pertambahan jumlah penduduk dan jumlah usaha. Berikut data pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Kampar tahun 2017-2021.

Tabel 2.113
Perkembangan Realisasi Cakupan Area Pelayanan Persampahan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Wilayah	Km ² /Ha	774,81	774,81	774,81	774,81	774,81	0,00
2	Luas Areal Pelayanan	Km ² /Ha	na	na	na	na	na	na
3	Jumlah TPS	Unit	85	93	98	104	85	0,66
4	Daya Tampung TPS (sampah)	Meter Kubik	99,5	120	120	134	138	8,85
5	Daya Tampung TPS (penduduk)	Meter Kubik	39.800	34.299	34.299	30.632	29.409	-7,13
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
7	Rasio	%	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	13,64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2021

5) Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola

untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga.

Jumlah sampah yang tertangani hanya tumbuh sebesar 1,26% sementara jumlah volume sampah meningkat sebesar 3,29% dan produksi sampah meningkat 2,00% pertahun. Oleh karena perlu adanya upaya extra penanganan sampah dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca berupa pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak tertangani secara baik. Masyarakat sebaiknya berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Berikut data pengelolaan persampahan Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.114
Perkembangan Realisasi Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah sampah yang ditangani	Meter Kubik	47.635	47.986	49.128	52.441	47.635	3,29
2	Volume produksi sampah	Meter Kubik	12.344.811	12.591.707	12.843.541	13.100.412	12.344.811	2,00
3	Persentase	%	0,39	0,38	0,38	0,40	0,39	1,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.2.6 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Adminsitasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Administrasi kependudukan mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan pembangunan kependudukan. Jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2017 sebanyak 508.732 jiwa meningkat menjadi 553.540 jiwa pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,70% per tahun.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Kampar dengan pertumbuhan sebesar 3,16% per tahun. Oleh karena itu program peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Admindex) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum dapat terpenuhi. Berikut data perkembangan penduduk wajib KTP dan ber KTP serta rasio penduduk ber KTP dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.115
Perkembangan Realisasi Jumlah Penduduk Wajib KTP dan
Sudah Ber KTP di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Penduduk	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	508.732	520.679	516.692	533.347	553.540	1,70
3	Jumlah Penduduk Ber KTP	Jiwa	435.309	483.576	516.690	533.322	553.522	4,92
4	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	85,57	92,87	100	100	100	3,16

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2021

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting (Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin) dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta.

Akte Kelahiran sangat bermanfaat untuk kegunaan antara lain: Pengakuan negara tentang status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang; merupakan dokumen atau alat bukti yang sah mengenai identitas seseorang; Data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya, seperti ijazah, KTP dan KK; syarat memasuki dunia pendidikan dari TK s/d perguruan tinggi; syarat melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI; syarat membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan; syarat Membuat passport; syarat mengurus tunjangan keluarga; syarat mengurus warisan; syarat mengurus beasiswa; Salah satu syarat mengurus pensiun bagi pegawai; syarat mengurus pencatatan perkawinan; syarat mengurus dokumen-dokumen jika hendak melaksanakan ibadah haji; syarat mengurus pelaporan dan Akta kematian; syarat mengurus perceraian; syarat mengurus pengakuan anak; dan syarat mengurus pengangkatan anak atau adopsi. Jelasnya lihat Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116
Perkembangan Realisasi Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran di Kabupaten
Kampar Tahun 2017-2021

No	Penduduk	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Bayi	Jiwa	1.153	4.929	6.430	7.171	6.267	40,30
2	Belum Memiliki Akte Kelahiran	Jiwa	90	334	530	348	236	21,26
3	Sudah Meiliki Akte Kelahiran	Jiwa	1.063	4.595	5.900	6.823	6.031	41,50
4	Rasio bayi ber akte kelahiran	%	92,19	93,22	91,76	95,15	96,23	0,86

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dari rasio tersebut dapat dilihat, kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 0,86% per tahun atau naik dari 92,19% tahun 2017 menjadi 96,23% tahun 2021, artinya anak umur 0-4 tahun sudah memiliki akte kelahiran. Hal ini mengindikasikan timbulnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akte kelahiran yang sudah mulai meningkat.

2.4.2.7 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.

Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Pemberdayaan masyarakat dapat dicirikan dari beberap karakter sebagai berikut.

1. Community leader: petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya Camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya.
2. Community organization: organisasi seperti PKK, karang taruna, majlis taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

3. Community Fund: Dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.
4. Community material: setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas.
5. Community knowledge: pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community based health education.
6. Community technology: teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang.

1) Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

- LSM Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak terlihat oleh pemerintah.
- LSM memelihara dan menjaga suasana lingkungan masyarakat agar tetap kondusif.
- LSM salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri yang berperan dalam ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan.

LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dan berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-

program pembangunan demi kepentingan publik. Perkembangan kondisi LSM Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117
Perkembangan Realisasi LSM Aktif di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Status Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah LSM Terdaftar	Unit	177	177	179	180	180	0,42
2	Jumlah LSM Aktif	Unit	65	72	108	110	113	16,34
3	Jumlah LSM Tidak Aktif	Unit	112	105	71	70	67	-11,08
4	Persentase LSM Aktif	%	36,72	40,68	60,34	61,11	62,78	15,78

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2021

LSM merupakan bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan. LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya, dimana jumlah LSM tumbuh hanya tumbuh sebesar 0,42% per tahun selama periode 2017-2021. Jumlah yang aktif pada tahun 2017 hanya 36,72% dan meningkat menjadi 62,78% tahun 2021 dengan pertumbuhan 15,78% per tahun. Semakin banyaknya LSM aktif diharapkan mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan secara keseluruhan, sehingga pemberdayaan masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar kedepan.

2) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pemberdayaan desa merupakan strategi komprehensif bagi pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari. Hal ini menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat dan berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam

pemenuhan kebutuhannya di masa depan. Penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat desa sangat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa

Kantor Desa adalah pusat pelayanan di desa, menjadi sentral segala kegiatan yang ada di desa baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat di kantor desa. Keberadaan dan kondisi dari sebuah kantor desa bisa mencerminkan dari identitas desa itu sendiri, bahkan tidak jarang masyarakat melihat kantor saja untuk menentukan nilai sebuah desa secara keseluruhan. Kantor yang layak adalah kantor yang dapat memberi rasa nyaman baik untuk aparatur maupun masyarakat.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,32% per tahun dari 75,21% tahun 2017 menjadi 82,64% tahun 2021. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya upaya keras untuk memenuhi Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sehingga mencapai 100% lima tahun kedepan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Adapun kelembagaan pedesaan antara lain: Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Aktivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka LPM harus didukung oleh sumberdaya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemerintahan desa dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan lancar, keaktifan LPM dalam pembangunan desa berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian selama tahun 2017-2021 kelompok binaan LPM mengalami pengurangan sebesar -0,56% per tahun atau berkurang dari 1.607 kelompok menjadi 1.571 kelompok tahun 2021 atau berkurang sebanyak 36 kelompok. Oleh karena itu diperlukan peningkatan jumlah pembinaan agar segala aspirasi masyarakat dalam pembangunan dapat dirumuskan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa di setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar.

Selama kurun waktu tahun 2017-2021 jumlah PKK Aktif di Kabupaten Kampar sebesar 100,00%. Hal ini tak terlepas dari peran serta masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan peran dalam pembangunan desa. Sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.118 persentase PKK yang aktif tahun 2017-2021 adalah atau sama dengan jumlah desa dan kelurahan per kecamatan. Berikut digambarkan perkembangan capaian Lembaga Pedesaan yang terdapat di Kabupaten Kampar selama 2017-2021.

Tabel 2.118
Perkembangan Lembaga Pedesaan di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Status Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	75,51	80,57	80,57	82,64	82,64	2,32
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga	Kelompok	1.607	1.607	1.571	1.571	1.571	-0,56

No	Status Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
	pemberdayaan masyarakat (LPM)							
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	242	242	242	242	242	0,00
4	Persentase LPM Berprestasi	%	50	50	50	50	50	0,00
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	0,00
6	Persentase Posyandu aktif	%	67,36	66,70	66,80	68,50	71,40	1,49
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	20,00	20,20	20,50	20,60	21,00	1,23
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	10,00	12,10	12,20	12,20	12,20	5,46

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2021

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tujuan tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat dapat secara mandiri dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Dengan adanya keterlibatan swadaya masyarakat, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Sehingga masyarakat merasa bahagia dan puas dengan adanya Program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data pelaksanaan swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat hanya tumbuh 1,23% per tahun atau dari 20,00% tahun 2017 dan meningkat menjadi hanya 21,00% tahun 2021. Demikian halnya dengan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat hanya berjalan berkisar antara 10,00% hingga 12,20% selama periode tahun 2017-2021.

Perkembangan jumlah desa menurut status desa mengalami peningkatan pada tahun 2017-2021, yang mana pada tahun 2017 jumlah desa berkembang 48 dan kemudian bertambah menjadi 136 desa tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 40,01% dari tahun 2017-2021. Sementara itu pada jumlah

desa tertinggal mengalami pengurangan dari 52 desa tahun 2017 berkurang menjadi 23 desa tahun 2021. Sedangkan desa mandiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari belum ada tahun 2017 bertambah menjadi 6 desa tahun 2021. jelasnya lihat Tabel 2.119 berikut.

Tabel 2.119
Perkembangan Jumlah Desa Menurut Status Desa
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Status Desa	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Desa	Unit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Unit	52,00	21,00	17,00	24,00	23,00	10,41
3	Jumlah Desa Tertinggal	Unit	140,00	94,00	52,00	21,00	19,00	26,67
4	Jumlah Desa Berkembang	Unit	48,00	115,00	148,00	146,00	136,00	40,01
5	Jumlah Desa Maju	Unit	2,00	11,00	24,00	45,00	58,00	171,14
6	Jumlah Desa Mandiri	Unit	0,00	1,00	1,00	6,00	6,00	45,83
7	Jumlah Program pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	Unit	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

Selain itu pemberdayaan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDES juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan sebesar 133,06% per tahun atau naik dari 15 BUMDES pada tahun 2017 menjadi 217 BUMDES tahun 2021. Peningkatan jumlah lembaga ekonomi BUMDES tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi sangat penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa.

2.4.2.8 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan

Sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Pengendalian jumlah penduduk lazimnya di Indonesia adalah dengan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkat kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak. Berikut data urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

1) Laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Tabel 2.120 dapat diketahui laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2021 rata – rata 2,46%, dan pada tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,77%. jika dihitung rata – rata jumlah anak per pasangan menikah adalah 1 orang, artinya program pengendalian penduduk yang rancang oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk dengan dua orang anak saja cukup sudah tercapai dengan baik.

2) Total Fertility Rate (TFR)

TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Tabel 2.120 dapat diketahui TFR Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan negative sebesar 5,08% per tahun atau TFR tahun 2017 sebesar

2,81% kemudian turun menjadi 2,25% tahun 2021. Secara umum pertambahan jumlah penduduk wilayah ini didominasi oleh faktor kelahiran. Pengendalian jumlah penduduk lazimnya adalah dengan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi.

3) Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitas, pendampingan dan pembinaan. Tabel 2.120 dapat diketahui peran aktif dinas dan badan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB meningkat secara signifikan dengan pertumbuhan sebesar 32,08% selama tahun 2017-2021.

4) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan. Rasio akseptor KB mengalami penurunan sebesar -15,04% per tahun. Faktor yang berpengaruh terhadap akseptor KB antara lain faktor Sosio Demografi. Faktor tersebut merupakan indikator terkait status Sosio-Ekonomi yang termasuk dalam pendidikan, pendapatan keluarga, status pekerjaan, jenis rumah, gizi serta pengukuran pendapatan tidak langsung lainnya (Bertrand, 1980). Sedangkan faktor pemungkin (jumlah petugas lapangan KB) dan faktor penguat (dukungan

masyarakat atau perangkat desa). Kondisi ini telah memberikan dampak terhadap TFR yang masih diatas 2% per tahun, lihat Tabel 2.120.

5) Rata-rata Usia Kawin Pertama (UKP)

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Kawin adalah status terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah (kawin sah, secara hukum/adat, agama, negara dan sebagainya, juga hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri).

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Selama periode tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa UKP rata-rata berada pada usia 22 tahun dan belum masuk dalam umur 25-49 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa masa reproduksinya pembuahan cukup lama, maka akan dapat melahirkan anak dengan jumlah yang banyak. Suatu masyarakat yang kebanyakan perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia muda, angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua, lihat Tabel 2.120.

6) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah kegiatan terpadu yang berbasis institusi. Kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. Selain itu wadah berbasis institusi itu adalah salah satu program yang dikembangkan

pemerintah sebagai wadah pusat pelayanan informasi dan konseling untuk penyiapan berkeluarga bagi remaja, konseling jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KB-KR), pertumbuhan dan perkembangan anak, dan konseling peningkatan ketahanan keluarga, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga serta memberikan informasi kependudukan dan KB.

Tabel 2.120
Perkembangan Realisasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Penduduk	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,42	0,93	0,76	7,38	0,77	2,46
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,81	2,77	2,75	2,75	2,25	-5,08
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	32,08
4	Rasio Akseptor KB	%	83,11	66,49	63,60	62,80	41,10	-15,04
5	Rata-rata Usia Kawin Pertama	Tahun	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
6	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	1.356,00	1.294,00	1.524,00	1.559,00	1.724,00	6,52

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Tahun 2021. Catatan PPKS Tahun 2021 angka estimasi.

Berdasarkan data Tabel 2.120 menunjukkan bahwa Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 6,52% per tahun atau bertambah dari 1.356 PPKS tahun 2017 menjadi 1.724 PPKS tahun 2021.

2.4.2.9 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan

Dalam rangka menunjang pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kampar diantara kawasan strategis Pariwisata, Pertanian dan Kawasan Industri peran transportasi memegang peranan yang penting dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan barang sehingga perlu pengelolaan sarana dan prasarana transportasi yang baik.

Jalur transportasi yang terdapat di Kabupaten Kampar adalah transportasi darat dan air. Sebagai daerah yang dilalui oleh 2 (dua) sungai yang besar, yaitu Sungai Kampar, transportasi air sudah sejak lama berkembang dan menopang mobilitas kehidupan masyarakat. Sungai dahulu merupakan jalur utama untuk distribusi kebutuhan makanan, hasil pertanian dan mobilisasi orang dari suatu tempat ke tempat lain. Seiring dengan semakin berkembangnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat menyebabkan sungai bukan lagi sebagai sarana transportasi yang dominan dan utama.

Pengembangan jaringan jalan sarana dan prasarana jalan bagi keperluan angkutan barang atau orang harus ditunjang dengan perlengkapan yang setiap tahun dilaksanakan untuk menjaga keselamatan berlalu lintas, menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran penggunaan jalan, perlengkapan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 Pasal 25 yaitu Alat Perlengkapan jalan berupa Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Pengendali dan Pengamanan Jalan, Pengawasan dan Pengamanan Jalan, Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, Penyandang Cacat, Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan Luar Badan Jalan. Perkembangan indikator kinerja perhubungan tahun 2017-2021 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121
Perkembangan Realisasi Sarana dan Prasarana Penunjang
Transportasi di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	5.325	20.960	17.950	9.392	5.784	48,29
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,70	0,70	0,60	0,50	0,45	-10,24
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	3.648	4.005	4.963	5.520	6.178	14,21
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	19,08	54,97	56,62	56,52	59,49	49,05

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	80,00	85,00	85,00	90,00	92,00	3,59
7	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	26,00	26,00	26,00	225,00	172,00	185,46
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Persen	70,00	60,00	50,00	40,00	30,00	-18,99
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ Unit	6.859	7.538	8.376	9.108	9.866	9,52
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang/ Unit	6.859	7.538	8.376	9.108	9.866	9,52

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Tahun 2021

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah penumpang bis terus meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 48,29% per tahun. Pertambahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 20.960 orang kemudian dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi yang dipicu oleh kemudahan dalam memperoleh kendaraan pribadi dengan pembelian kredit oleh lembaga keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Rasio Ijin Trayek

Pemberian izin trayek angkutan umum agar masyarakat mendapatkan angkutan umum yang layak dan aman untuk di naiki. Menyadari betul akan pentingnya efektivitas pemerintah mengeluarkan izin trayek angkutan umum. Berdasarkan Tabel 2.121 menunjukkan bahwa pemberian izin trayek rasionya mengalami penurunan sebesar 10,24% per tahun atau berkurang dari 0,70 tahun 2017 menjadi 0,45 pada tahun 2021. Kondisi ini sejalan dengan Jumlah arus penumpang angkutan umum yang menurun akibat penggunaan kendaraan umum yang terus mengalami pengurangan.

3) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe (pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan) dan uji berkala (pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji). Jumlah Uji KIR di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan 14,21% per tahun. Tingginya angka Uji kir angkutan umum menunjukkan adanya peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang menggunakan kendaraan umum terutama untuk angkutan barang, jelasnya tercantum pada Tabel 2.121.

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Khusus untuk wilayah Kabupaten Kampar hanya terdapat terminal bis sebanyak 3 unit dari tahun 2017-2021, Sedangkan pelabuhan laut dan udara tidak ada, jelasnya lihat Tabel 2.121.

5) Persentase Layanan Angkutan Darat

Penyelenggaraan layanan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan teratur adalah satu cara penyelenggaraan angkutan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil bus penumpang serta truk. Selama periode tahun 2017-2021 persentase jumlah angkutan darat mengalami peningkatan sebesar 49,05% per tahun atau naik dari 19,08% tahun 2017 menjadi 59,49% tahun 2021. Data ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kapasitas daya angkut armada transportasi barang karena jumlah barang mengalami peningkatan.

6) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali dengan bilangan 100. Berikut adalah data indikator kepemilikan KIR angkutan umum. Tabel 2.121 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021. Kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan sebesar 3,59% per tahun atau naik dari 80,00% tahun 2017 menjadi 92,00% tahun 2021.

7) Pemasangan Rambu Rambu

Sementara itu, jumlah rambu yang terpasang baru pada tahun 2017 sebesar 26,00 unit kemudian bertambah menjadi 172 unit pada tahun 2021. Tujuan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan bertujuan (1) Peningkatan pengamanan dan keselamatan jalan, (2) Menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/ kendaraan bermotor, dan (3) Menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ. Berikut data sarana dan prasarana penunjang transportasi di Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2021.

8) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kabupaten sepanjang 2.073,10 km.

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani

sejumlah kendaraan. Berdasarkan pada Tabel 2.121 menunjukkan bahwa rasio Panjang jalan per kendaraan mengalami pertumbuhan sebesar 18,99% atau jumlah kendaraan per km jalan berkurang dari 70,00 km pada tahun 2017 menjadi 30,00 km per kendaraan tahun 2021 atau bertambah kendaraan per km selama periode 2017-2021. Kondisi ini menunjukkan kepadatan lalu lintas terjadi dimana jumlah kendaraan semakin bertambah akibat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya beli terutama alat transportasi mobil penumpang.

9) Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan (Transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam kendaraan yang ada

10) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting. Aktifitas masyarakat yang terus meningkat menuntut peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi tersebut. Seiring meningkatnya permintaan akan pelayanan transportasi dalam mendukung kegiatan masyarakat di Kabupaten Kampar, jumlah kendaraan angkutan umum dari waktu ke waktu terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan produksi barang dan jasa yang harus diangkut melalui transportasi umum. Oleh karena itu peningkatan ketersediaan prasarana transportasi seperti; pertambahan panjang jalan, kapasitas jalan.

2.4.2.10 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informasi

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Begitu juga dalam organisasi pemerintahan. Saat ini dalam era informasi, pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan informasi dalam pemerintahan menjadi sangat krusial. Untuk itu pemerintah perlu untuk mengetahui, mengembangkan dan menjaga saluran informasi yang dimiliki, agar kewajiban pemerintah untuk memenuhi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan, tetapi juga menjaganya agar informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar telah memiliki portal saluran informasi resmi <http://portalkampar.go.id>, selain portal berskala Kabupaten, dalam memproduksi informasi pembangunan juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar, beberapa OPD Kabupaten Kampar telah merancang portal informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Penyebaran informasi dilakukan melalui media telekomunikasi, penyiaran dan internet. Media Telekomunikasi melakukan penyebaran informasi dengan pesan singkat (SMS Blast) melalui operator telekomunikasi seluler dibawah koordinasi Pusat Informasi dan Humas. Media Penyiaran dilakukan dengan Radio Siaran dimana chanel frekuensi untuk masing-masing lokasi dapat dilihat pada leaflet. Penyebarluasan informasi melalui internet merupakan salah satu langkah yang efektif dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar seiring pasatnya laju perkembangan teknologi beberapa tahun belakangan ini diseluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kampar. Perkembangan Indikator TIK di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	60,00	75,00	75,00	95,00	99,00	15,47
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	63,47	76,64	75,09	99,16	99,04	14,92
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	28,89	34,52	41,27	49,71	60,05	17,18
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	15,90	16,55	10,34	10,12	8,27	-1,83

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2017-2021

1) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Jaringan Telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk kegiatan telekomunikasi. Termasuk dalam kegiatan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan tetap untuk telekomunikasi publik dan sirkuit sewa, serta penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak seperti jaringan bergerak terestrial, Seluler dan satelit.

2) Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/telepon

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang agak lambat. Walaupun persentase penduduk yang menggunakan telepon selular terus mengalami peningkatan dari 63,47% tahun 2017 menjadi 99,04% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 13,17% per tahun dari total jumlah penduduk. Wilayah ini mempunyai peluang untuk tumbuh sangat cepat dan besar dalam penggunaan HP seiring dengan perkembangan pasar online baik terhadap produk

luar maupun yang dikembangkan di wilayah ini dan pengelolaan administrasi pemerintahan secara online.

3) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Kebutuhan terbesar terhadap akses internet saat ini adalah untuk Pendidikan dan pengajaran serta pasar online. Pemerintah juga harus membuka jalan dan memberikan berbagai insentif agar industri digital ini bisa tumbuh dan mendapat akses pendanaan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh rumah tangga di wilayah ini diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring tingkat penggunaan di dunia Pendidikan dan pemasaran. Pertumbuhan penggunaan dan kepemilikan akses internet dalam rumah tangga mengalami penurunan dari 15,90% tahun 2017 menjadi 8,27% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar -3,58% per tahun. Penurunan penggunaan internet rumah tangga disebabkan oleh akses internet lebih mudah dengan menggunakan HP/telp seluler.

2.4.2.11 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan sebagai penyangga perekonomian nasional. Koperasi diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam sistem perekonomian daerah dan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Peran koperasi dalam perekonomian Kabupaten Kampar diharapkan dapat melibatkan pelaku usaha besar dan usaha kecil menengah dalam menggerakkan perekonomian.

1) Persentase Koperasi Aktif

Aktif adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Perkembangan jumlah koperasi selama tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan negatif -10,99% dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 185 unit dari 285 unit koperasi pada tahun 2017 kemudian berkurang menjadi 93,00 unit koperasi aktif dari 276 unit koperasi pada tahun 2021.

Koperasi Penurunan jumlah koperasi aktif dapat disebabkan oleh adanya replanting pada perkebunan kelapa sawit sehingga tidak berjalannya kegiatan koperasi terutama dalam penyediaan transportasi TBS.

2) Persentase Jumlah UKM

Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) capaian selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari persentase UMKM tahun 2017 sebesar 5.421 kemudian meningkat menjadi menjadi 18.380 UMKM pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 35,55% per tahun. Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh UMKM tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level UMKM karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis UMKM dan keunggulan tersebut sulit didapatkan di level bisnis raksasa.

Mudahnya berinovasi di dalam menjalankan usaha dan teknologi dapat berubah-ubah disesuaikan kebutuhan sehingga tidak terlalu baku. Sehingga dapat bertumbuh sesuai dengan zamannya dan UMKM tidak memiliki birokrasi. Ruang lingkup yang kecil memudahkan UMKM dalam berkoordinasi dan fleksibel dalam menyesuaikan bisnisnya disesuaikan pasar. Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM.

UMKM Kabupaten Kampar merupakan penopang kelancaran dan stabilitas perekonomian Kabupaten Kampar. Adapun intisari yang ingin disampaikan adalah bahwa terlepas dari besarnya peran yang telah diberikan oleh UMKM untuk perekonomian, efektifitas pemberdayaan UMKM selama ini perlu peningkatan kinerja, karena struktur UMKM masih melulu didominasi Usaha Mikro. Target pemberdayaan UMKM sangatlah besar jika proses pengembangan usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan yang baik dan berkelanjutan. Perkembangan jumlah koperasi aktif dan UMKM selama tahun 2017-2021 di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123
Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Koperasi	Unit	285,00	241,00	257,00	272,00	276,00	-0,37
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	189,00	191,00	132,00	70,00	93,00	-10,99
3	Persentase Koperasi Aktif	%	66,32	79,25	51,36	25,74	33,70	-8,66
4	Jumlah UMKM	%	5.421	5.490	6.462	11.590	18.380	39,23

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.2.12 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan investasi, untuk itu pemerintah daerah dituntut dapat mengupayakan masuknya penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), dengan masuknya investor dari PMDN dan PMA. Investasi dapat membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, mengurangi jumlah dan tingkat pengangguran serta peningkatan produksi barang dan jasa serta transfer teknologi pada pekerja lokal. Peningkatan investasi juga dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru disekitar lokasi kegiatan investasi. Demikian halnya transfer teknologi akan menambah pengetahuan bagi pekerja lokal terutama tentang metode kerja yang baik serta penguasaan dalam pemanfaatan teknologi industri modern bagi pekrja dan masyarakat lokal.

1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Data investor dan investasi di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021, dapat dilihat dengan jumlah investor (PMDN/PMA) naik dari pada tahun 2017 sebanyak 20 unit menjadi 28 unit pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 9,18% per tahun. Pertambahan jumlah investor terutama berasal dari PMDN diaman pada tahun 2017 sebanyak 12 investor kemudian meningkat menjadi 20 investor pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 14,67% per tahun.

Sementara investor PMA tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2017-2021 hanya sebanyak 8 investor.

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi mengalami peningkatan realisasi investasi dari Rp.1.078,12 milyar tahun 2017 kemudian naik menjadi Rp. 7.914,80 milyar tahun 2021 dengan tingkat peningkatan pertumbuhan nilai investasi sebesar 102,43% per tahun. Pertumbuhan nilai investasi tersebut terutama didorong oleh besaran nilai investasi PMDN dari Rp. 800,61 milyar tahun 2017 naik menjadi 4.966,37 milyar tahun 2021. Peningkatan nilai investasi tersenut disebabkan karena optimalisasi pemanfaatan RTRW. Namun demikian masih diperlukan program peningkatan iklim investasi harus terus dilakukan dengan mendorong investor lokal untuk investasi pada industri hilir kelapa sawit dan karet serta sub sektor perikanan budidaya. Maka upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah antara lain meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

Tabel 2.124
Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi
di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Proyek	Unit	110	126	147	451	698	73,20
2	PMDN	Rp. Milyar	800,61	355,76	1.798,78	7.341,37	4.966,37	156,46
3	PMA	Rp. Milyar	277,52	439,76	184,72	239,96	2.948,43	289,77
4	Total	Rp. Milyar	1.078,12	795,53	1.983,50	7.581,33	7.914,80	102,43
5	Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	1.524	2.152	12.502	18.202	10.644	131,56

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2021

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang bekerja terserap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kampar mengalami peningkatan dari 1.524 orang pada tahun 2017 menjadi 10.644 orang pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 131,56% per tahun. Tingginya laju penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kampar telah mampu mengurangi angka pengangguran, namun belum secara signifikan dimana persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Kampar tahun 2017 sebanyak 5,93% dan hanya menurun menjadi 4,27% tahun 2021 dengan penurunan hanya 6,54% per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya peningkatan angkatan kerja setiap tahun lebih kurang 3,12%.

2.4.2.13 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Dalam regulasi tersebut juga memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat

pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Tabel 2.125
Perkembangan Organisasi Pemuda di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	11,50	12,00	13,38	14,00	14,00	5,12
2	Persentase wirausaha muda	%	77,42	79,50	80,61	75,98	77,58	0,11
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

Sementara dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait kepemudaan antara lain memuat tentang Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten. Berikut disajikan perkembangan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Sementara dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait olah raga antara lain memuat tentang Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten, Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi, Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Dalam regulasi atau undang-undang 23 Tahun 2014, tentang keperamukaan mengatur aspek Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten. Berikut disajikan beberapa

indikator perkembangan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Tabel 2.126
Perkembangan Olahraga di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	65	68	70	70	70	1,89
3	Cakupan pembinaan atlet muda	Cabor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah atlet berprestasi	Atlit	112	112	116	116	116	0,89
5	Jumlah prestasi olahraga		9	9	10	10	10	2,78

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dalam rangka mewadahi aktivitas kepemudaan diperlukan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan agar dapat menghasilkan generasi yang berprestasi, cerdas, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, bertanggung jawab, serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dalam hal ini beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemuda Kabupaten Kampar antara lain:

1. Melibatkan peran serta pemuda dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
2. Membangun fasilitas dan sarana olah raga di setiap kecamatan.
3. Memberikan ruang kepada pemuda untuk ber organisasi, berkreasi, dan berprestasi dalam bidang olahraga (pembinaan atlet muda).
4. Memberikan dukungan pemuda untuk berprestasi ditingkat Provinsi maupun Nasional.

2.4.2.14 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Wajib Bidang statistik yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan Kabupaten hanya terkait dengan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah Kabupaten.

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi dalam merancang kebijakan maupun melakukan evaluasi dengan efektif dan efisien, urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS dan OPD di daerah serta lembaga terkait lainnya, sehingga pertanggungjawaban produk data merupakan hasil analisa bersama, dalam kondisi ini sering terjadi perbedaan data, hal tersebut disebabkan antara lain karena perbedaan terhadap definisi data.

Salah satu isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan untuk penyusunan program dan kegiatan yang disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel yang baik. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang statistik yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kampar sejak 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.122 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar. Data yang disajikan dalam bentuk dokumen data statistik daerah, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap ketersediaan data valid, akurat dan update.

Kabupaten Kampar Dalam Angka (KDA) merupakan publikasi Kampar bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian setiap tahun. Buku ini berisi kumpulan data dari berbagai Dinas/Instansi di Kabupaten Kampar maupun hasil pengumpulan sensus dan survey. Data yang dicakup dalam buku ini meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, masalah sosial, pertanian, industri, perdagangan, penyediaan

air minum, keuangan dan pendapatan regional. Saat ini data tersebut tersedia di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang diterbitkan setiap tahunnya.

Tabel 2.127
Perkembangan Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	60,00
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00
3	Buku "PDRB"	%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.2.15 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Urusan persandian pada tahun 2017-2021 Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Dinas komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar melalui satu program penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dengan kegiatan layanan keamanan informasi kepada sistem elektronik pemerintah Kabupaten Kampar.

Adapun layanan yang dilakukan yaitu melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, penatalaksanaan persuratan dinas, penatalaksanaan persuratan berita rahasia, pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia, mengadakan dan memelihara peralatan dan sistem elektronik daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Tabel 2.128
Perkembangan Perangkat Daerah Menggunakan Sandi
dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	42	42	42	42	56	8,33

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.2.16 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Wajib Bidang kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan Kabupaten terkait: Kebudayaan antara lain; Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Kabupaten. Kesenian tradisional antara lain: Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah. Bidang sejarah adalah pembinaan sejarah local. Bidang cagar budaya antara lain: Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten, pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi. Bidang pemuseuman hanya mengatur terkait pengelolaan museum Kabupaten.

Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kampar pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan berakhlak mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya. Berikut data perkembangan pelestarian budaya di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021, terus dikembangkannya kegiatan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya, dan relokasi situs cagar budaya.

Tabel 2.129
Perkembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Kebudayaan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	18	20	7	8	11	-13,47
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1 (Candi Muara Takus)	1 (Candi Muara Takus)	1 (Candi Muara Takus)	1 (Candi Muara Takus)	1 (Candi Muara Takus)	0,00
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	12	12	12	12	12	0,00
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	12	12	12	12	12	0,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam melestarikan nilai budaya yang mana sebagian besar penduduknya bersuku melayu adalah dengan merajut nilai-nilai luhur warisan masa lalu yang dipadukan dengan kemajuan masa kini agar tercipta harmonisasi antara representasi masa lalu dan masa sekarang, beberapa kebiasaan yang masih tetap dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan telah menjadi agenda tahunan. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jenis perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Kampar terdiri dari Perpustakaan Umum, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus. Dari beberapa jumlah perpustakaan di Kabupaten Kampar tersebut, yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan adalah perpustakaan Desa. perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi atau tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi pustaka baik buku-buku atau bacaan lainnya, yang digunakan untuk sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar di sekolah, perpustakaan sekolah memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Perkembangan indikator perpustakaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.130

Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	11.361	10.100	10.377	28.335	34.237	46,38
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exemplar	18.890	19.651	20.788	20.780	20.788	2,45
3	Populasi yang harus dilayani		677.125	672.270	674.414	728.421	725.631	1,81
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk/1.000	%	0,0015	0,0013	0,0014	0,0038	0,0046	46,71
5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	3.787	3.366	3.459	14.165	11.412	70,43
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Exemplar	85.949	87.988	84.169	84.169	84.169	-0,49
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	75,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar Tahun 2021

Jumlah kunjungan perpustakaan menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 11.361 orang kemudian meningkat menjadi 34.237 orang pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 46,38%. Kinerja perpustakaan lihat tabel di atas.

2.4.2.17 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam pembinaan kearsipan.

Kearsipan di Kabupaten Kampar menganut sistem kearsipan desentralisasi dimana sistem kearsipan dalam pelaksanaannya tidak dipusatkan pada satu unit kerja masing-masing unit pengelola data menyimpan sendiri arsipnya. Perkembangan kearsipan dari tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 100% dari jumlah PD pada tahun 2021. Sedangkan jumlah kegiatan untuk peningkatan SDM kearsipan

sebanyak 1-5 kegiatan selama tahun 2017-2021, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.131 dibawah ini.

Tabel 2.131
Perkembangan Kearsipan di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	0,00
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	1	1	1	3	5	66,67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Kampar bersumber dari bidang perikanan tangkap atau air tawar dan bidang perikanan budidaya baik kolam dan keramba. Khusus untuk perikanan budidaya, komoditas yang dikembangkan antara lain ikan mas, patin, nila, bawal, gurami, lele, lompang, baung dan lainnya. Potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Kampar cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari luasnya perairan umum yang dimiliki seperti Sungai Kampar beserta anak sungainya, rawa-rawa dan danau serta potensi pengembangan kolam oleh masyarakat. Namun sangat disayangkan peruntukan budidaya sub sektor perikanan belum ada peruntukan dalam tataruang wilayah lihat Tabel 2.88 Rencana Peruntukan Kawasan RTRW 2019-2039. Perkembangan produksi perikanan menurut jenis budidaya Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.132 berikut ini.

Tabel 2.132

Produksi Perikanan Menurut Jenis Pengelolaan Kabupaten Kampar Tahun 2017–2021

No	Jenis Pengelolaan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Tawar	Ton	3.773,05	2.647,42	2.714,20	2.774,20	2.177,76	-11,65
2	Kolam	Ton	33.211,56	39.466,00	29.023,80	37.604,50	42.008,50	8,41
3	Keramba	Ton	24.936,49	24.284,76	27.512,84	15.767,65	14.916,86	-9,35
Jumlah		Ton	61.921,10	66.398,18	59.250,84	56.146,35	59.103,12	-0,88

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

Produksi ikan menurut jenis budidaya mengalami penurunan produksi sebesar -0,88% selama periode 2017-2021 atau turun dari 61.921,10 ton tahun 2017 menjadi 59.103,12 ton tahun 2021. Penurunan produksi terjadi pada jenis produksi ikan air tawar dengan rata-rata penurunan sebesar -11,65% dan produksi ikan keramba juga mengalami rata-rata penurunan sebesar -9,35%.

Perkembangan produksi perikanan menurut jenis ikan di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.133 berikut ini.

Tabel 2.133
Produksi Perikanan Menurut Jenis Ikan
Kabupaten Kampar Tahun 2017–2021

No	Jenis Ikan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mas	Ton	27.690,86	12.194,60	9.530,93	8.698,14	7.895,47	-23,94
2	Patin	Ton	20.079,34	25.942,55	14.332,51	32.401,13	21.909,73	19,53
3	Nila	Ton	1.667,89	8.996,48	19.327,61	2.953,73	12.533,19	198,46
4	Bawal	Ton	254,84	612,00	151,59	307,93	188,11	32,29
5	Gurami	Ton	136,29	123,20	25,32	138,64	163,53	94,11
6	Lele	Ton	27.690,86	7.761,29	12.595,36	3.638,74	14.056,32	51,37
7	Lomak	Ton	20.079,34	1.029,36	193,99	4.176,60	4.688,00	-40,95
8	Baung	Ton	1.664,53	793,60	91,53	1.053,70	173,95	206,73

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

Produksi menurut jenis ikan menunjukkan bahwa ikan patin mengalami peningkatan produksi dari 20.079,34 ton pada tahun 2017 naik menjadi sebanyak 21.909,73 ton pada tahun 2021. Produksi jenis ikan paling sedikit adalah jenis ikan gurami hanya berkisar antara 136,29 ton tahun 2017 naik menjadi 163,53 ton ada tahun 2021.

Sementara itu jumlah produksi perikanan berdasarkan jenis pengelolaan menurut kecamatan tahun 2021 menunjukkan bahwa produksi perikanan terbanyak terdapat di Kecamatan Kuok yaitu 22.870,55 ton atau 38,70% terutama dikontribusikan oleh jenis ikan patin sebanyak 12.390,74 ton atau sebesar 56,55% dari produksi di Kecamatan Kuok. Sementara itu produksi ikan paling sedikit terdapat di Kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 22,12 ton atau sebesar 0,04% dari produksi perikanan Kabupaten Kampar. Jumlah produksi perikanan menurut kecamatan Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.134 berikut.

Tabel 2.134
Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar
Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Distribusi (%)
1	Koto Kampar Hulu	22,12	0,04
2	Tambang	40,78	0,07
3	Kampar Kiri Hulu	62,30	0,11
4	Tapung Hulu	78,48	0,13
5	Kampar Kiri Hilir	94,95	0,16
6	Tapung Hilir	168,57	0,29
7	Kampar Kiri	269,93	0,46
8	Kampar Kiri Tengah	283,54	0,48
9	Rumbio Jaya	329,42	0,56
10	Bangkinang	423,47	0,72
11	Perhentian Raja	493,40	0,83
12	Tapung	549,57	0,93
13	Kampar Utara	602,16	1,02
14	Gunung Sahilan	833,00	1,41
15	Kampa	1.035,02	1,75
16	Siak Hulu	1.235,73	2,09
17	Bangkinang Kota	1.947,22	3,29
18	Salo	2.531,29	4,28
19	Kampar	11.496,63	19,45
20	XIII Koto Kampar	13.734,99	23,24
21	Kuok	22.870,55	38,70

Sumber: BPS Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2018-2022

2) Konsumsi Ikan

Ikan mengandung banyak asam lemak omega-3 yang sehat yang dapat mengurangi peradangan, membantu melindungi jantung Anda, dan mencegah penyakit kronis. Menurut National Institutes of Health, ikan mengandung vitamin D yang tinggi, dan dianggap sebagai salah satu sumber makanan terbaik untuk

nutrisi. Konsumsi ikan menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017-2021, KKP menargetkan peningkatan angka konsumsi ikan nasional dari 47,34 kg/kapita/tahun 2017 naik menjadi 56,39kg/kapita/tahun ditahun 2021.

Berdasarkan pada target tersebut menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi ikan di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 sebanyak 61,16 kg/kapita naik menjadi sebanyak 63,65 kg/kapita tahun 2021 dengan tingkat capaian 106,15%. Demikian halnya dengan konsumsi ikan nasional tahun 2021 sebanyak 59,97 kg/kapita. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian konsumsi ikan Kabupaten Kampar sebesar 0,20% per tahun.

Tabel 2.135
Perkembangan Konsumsi Ikan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Konsumsi Ikan Nasional	Kg/Kapita	47,34	50,69	54,49	56,39	59,97	5,77
2	Konsumsi Ikan Kab. Kampar	Kg/Kapita	61,16	63,38	60,90	63,78	63,65	0,20
3	Capaian dari konsumsi Nasional	%	129,19	125,03	111,76	113,11	106,15	-5,19

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, dan KKP Tahun 2022

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan konsumsi ikan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat Kabupaten Kampar serta minat untuk mengkonsumsi ikan perlu terus ditingkatkan, karena ikan diharapkan menjadi salah satu sumber protein utama dalam pola konsumsi dan budaya masyarakat Kabupaten Kampar. Menilik hal tersebut, pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) tidak hanya merupakan tugas dari Kabupaten Kampar namun juga tugas bersama antar instansi terkait karena dengan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Kampar akan turut mendukung pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Dalam upaya mendukung pelaksanaan gerakan nasional GEMARIKAN diperlukan suatu koordinasi lintas lembaga, lintas sektoral, lintas profesi dan lintas budaya. Langkah tersebut membutuhkan strategi baru yang melibatkan seluruh komponen bangsa, agar mampu membangunkan kesadaran

masyarakat Kabupaten Kampar untuk memilih ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga.

Konsumsi ikan yang banyak akan menghasilkan bangsa yang cerdas makan ikan perlu lebih digalakkan. Kalaupun ikan yang kaya DHA seperti tuna atau salmon sulit terjangkau, ikan lokal seperti lele, mas, mujair, bandeng, teri, kakap atau jenis lainnya tidak jadi masalah, karena ikan tersebut juga kaya protein, bahkan ikan asin memiliki kandungan protein tertinggi. Sebenarnya DHA dapat dibentuk dalam tubuh manusia, namun kemampuan fisiologis setiap orang untuk mengubah dari bahan baku (asam lemak tak jenuh ganda) menjadi DHA berbeda-beda, tergantung pada tingkat kesehatan, penyerapan dan kondisi lemaknya di dalam tubuh. Dengan demikian mengonsumsi ikan sangat dianjurkan, selain mengandung DHA ikan juga mengandung EPA (C₂₀H₃₀O₂). DHA dan EPA secara bersama dikenal sebagai Omega 3, yang sudah dikenal dapat mencegah serangan jantung, stroke dan impotensi.

Upaya peningkatan konsumsi ikan masih dapat dilakukan dengan melihat potensi pengembangan produksi perikanan budidaya yang masih luas, mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan dari produksi perikanan budidaya. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya harus tetap di topang dengan menekan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam. Pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga perwakilan rakyat, swasta maupun stake holder lainnya. "Perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, akan mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan di tambhan lagi usaha perikanan budidaya tidak mengenal gender.

3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda terhadap jumlah kelompok nelayan setiap tahunnya. Tujuan utama pembinaan kelompok nelayan dalam rangka peningkatan daya saing sub sektor perikanan.

Perkembangan bina cakupan kelompok bina nelayan terjadi peningkatan sebesar 13,64% per tahun dengan produksi kelompok nelayan dengan pertumbuhan sebesar 7,11% per tahun, jelasnya lihat pada Tabel 2.136 berikut.

Tabel 2.136
Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi
Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	30 KUB	35 KUB	40 KUB	45 KUB	50 KUB	13,64
2	Produksi Perikanan kelompok Nelayan	Ton	1.400,20	1.450,09	1.605,05	1.799,80	1.836,95	7,11

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, dan KKP Tahun 2022

4) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Standar kesejahteraan nelayan adalah angka Nilai Tukar Nelayan sebesar 100, apabila Nilai Tukar Nelayan di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan apabila Nilai Tukar Nelayan di atas 100 maka nelayan dikategorikan sejahtera.

Perkembangan NTN Provinsi Riau selama periode 2017-2021, tumbuh sebesar -2,37% per tahun sementara Kabupaten Kampar tumbuh sebesar 8,30%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan kondisi NTN Provinsi Riau mengalami tren penurunan sementara NTN Kabupaten Kampar dengan

kecenderungan peningkatan dan diharapkan juga dapat menggambarkan kondisi ril NTN Kabupaten Kampar dilapangan.

NTN mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual nelayan dengan produk yang dibutuhkan nelayan dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Angka NTN menunjukkan tingkat daya saing produk perikanan dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk perikanan dapat dilakukan. Perkembangan NTN Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	NTN Provinsi Riau	Indek	115,25	103,65	101,92	94,37	96,23	-2,37
2	NTN Kab. Kampar	Indek	77,01	79,75	88,28	98,99	101,03	8,30

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, dan KKP Tahun 2022

2.4.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa yang menjadi unggulan Kabupaten Kampar. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kampar terus berusaha meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penetapan tanda daftar usaha pariwisata. Peningkatan pengelolaan bidang-bidang tersebut diharapkan dapat menambah keberhasilan pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri serta peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.138
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Wisatawan	Juta Orang	1,49	1,65	1,19	0,87	1,10	-4,48
3	Jumlah	Juta Orang	1,49	1,65	1,19	0,87	1,10	-4,48

Sumber: Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.138. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 1,47 juta orang kemudian pada tahun 2021 kunjungan wisatawan menjadi 1,10 orang dengan pertumbuhan secara keseluruhan kunjungan wisatawan meningkat sebesar -4,48% selama tahun 2017-2021.

Kunjungan wisatawan terutama mendatangi 80 objek wisata diantaranya adalah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 kilometer dari Kota Pekanbaru.

Situs Candi Muara Takus dikelilingi oleh tembok berukuran 74 x 74 meter, yang terbuat dari batu putih dengan tinggi tembok $\pm$ 80 cm, di luar arealnya terdapat pula tembok tanah berukuran 1,5 x 1,5 kilometer, mengelilingi kompleks ini sampal ke pinggir Sungai Kampar Kanan. Di dalam kompleks ini terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan Candi sulung /tua, Candi Bungsu, Mahligai Stupa dan Palangka.

Para pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti kapan situs candi ini didirikan. Ada yang mengatakan abad ke-4, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9 bahkan pada abad ke-11. Namun candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya, sehingga beberapa sejarawan menganggap

kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Kampar.

Sementara itu lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Kampar berkisar antara 1-7 hari. Perkembangan lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.139 berikut.

Tabel 2.139
Perkembangan Lama Kunjungan Wisatawan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Lama Kunjungan	Hari	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	0,00

Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan selain mengetahui situs cagar budaya juga dapat meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pariwisata Kabupaten Kampar. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut karena diselenggarakannya berbagai program dan kegiatan kepariwisataan oleh pemerintah Kabupaten Kampar.

Disisi lain peningkatan jumlah kunjungan wisatawan telah berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat Pada Tabel 2.140 berikut.

Tabel 2.140
Jumlah PAD Sektor Wisata Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PAD Pariwisata	Rp. Milyar	54,80	196,98	133,45	111,48	54,80	49,30
2	Total PAD	Rp. Milyar	316,43	229,82	262,88	246,05	277,42	-1,64
3	Rasio	%	0,017	0,086	0,051	0,045	0,035	80,23

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata pada tahun 2017 sebesar Rp. 54,801 Juta kemudian meningkat menjadi Rp. 54,801 juta pada

tahun 2021 dengan peningkatan pertumbuhan rasio PAD sektor pariwisata terhadap total PAD sebesar 49,30% per tahun selama periode 2017-2021 atau naik dari 0,017% pada tahun 2017 menjadi 0,035% pada tahun 2021. Perkembangan nilai PAD sektor pariwisata di Kabupaten Kampar.

2.4.3.3 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pertanian

1) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Pertanian menjadi sektor tertinggi ketiga dari tiga sektor utama yang mendominasi struktur produk domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor pertanian terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06% per tahun atau naik dari 27,37% pada tahun 2017 menjadi 32,91% pada tahun 2021. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sektor pertanian terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 3,50% per tahun atau naik dari 29,78% pada tahun 2017 menjadi 34,15% tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan perkembangan pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya.

Walaupun kontribusi PDRB sektor pertanian baik harga berlaku dan harga konstan mengalami peningkatan, namun nilai PDRB baik harga berlaku dan harga konstan dengan masing-masing hanya tumbuh sebesar 5,69% per tahun dan 4,34% per tahun.

Nilai PDRB pertanian yang semakin meningkat sehingga akan sangat berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bagi sektor industri pengolahan, berperan pada pengendalian inflasi, pengurangan jumlah penduduk miskin, penurunan pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja di wilayah di Kabupaten Kampar. Bukti empiris menunjukkan bahwa tatkala sektor-sektor lain, khususnya sektor konstruksi dan industri manufaktur, mengalami kontraksi hebat, sementara sektor pertanian tetap mampu tumbuh positif. Ketika sektor-sektor lain melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian justru mengalami peningkatan. Tatkala ekspor

produk non-pertanian mengalami penurunan, ekspor produk pertanian justru mengalami peningkatan tajam. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sebagai sektor yang harus dikelola secara optimal sebagai andalan pembangunan ekonomi daerah dan pendukung sektor industri (high tech agro industry) secara berkelanjutan. Perkembangan kontribusi PDRB sektor pertanian selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.141 berikut.

Tabel 2.141
Perkembangan Realisasi Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB HB Kabupaten Kampar	Rp. Miliar	71.571,02	77.152,93	77.267,15	73.076,30	86.670,33	5,28
	PDRB HK Kabupaten Kampar	Rp. Miliar	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,37	2,08
2	PDRB HB Sektor Pertanian	Rp. Miliar	19.589,82	20.289,02	21.508,32	24.141,40	28.522,17	9,99
	PDRB HK Sektor Pertanian	Rp. Miliar	14.596,72	15.433,67	16.318,62	17.165,39	18.166,83	5,62
3	Kontribusi PDRB HB Sektor Pertanian	%	27,37	26,30	27,84	33,04	32,91	5,06
	Kontribusi PDRB HK Sektor Pertanian	%	29,78	30,89	31,45	33,38	34,15	3,50

Sumber: PDRB Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha 2011-2021

2) Produktifitas Bahan Pangan Utama (Padi)

Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu prioritas dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi, maka diperlukan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan terwujud jika tersedia peruntukan lahan pangan berkelanjutan, namun pada Tabel 2.88 (tidak tersedia berkelanjutan oleh karena itu upaya lain yang harus dilakukan adalah tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian), tersedia irigasi teknis persawahan, tersedia sarana prasarana produksi pertanian baik jumlah dan kualitas, adanya kelembagaan petani yang optimal, manajemen persawahan secara modern atau *Good Agricultural Practices*.

Berdasarkan data Tabel 2.142 menunjukkan bahwa walaupun lahan pertanian belum tersedia kecuali peruntukan lahan tanaman pangan dan luas tanamnya terus mengalami pengurangan. Pada tahun 2017 luas tanam pangan khususnya padi yaitu 7.351 hektar kemudian berkurang menjadi 5.181 hektar tahun 2021 dengan penurunan -6,76% per tahun. Demikian halnya dengan luas panen yang berkurang sebesar -10,46% per tahun. Kondisi hanya diimbangi dengan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi selama 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 produktivitas tanaman padi sebanyak 5,07 ton/ha kemudian naik menjadi 5,63 ton/ha pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 2,78% per tahun. Namun peningkatan produktivitas ini tidak secepat penurunan luas tanaman dan luas panen sehingga produksi terus berkurang dengan persentase pengurangan sebesar -8,59% pertahun. Upaya peningkatan produktivitas padi melalui optimalisasi pengelolaan usahatani secara baik (*Good Agricultural Practices*).

Tabel 2.142
Produktivitas Padi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Tanam	Hektar	7.351,00	9.159,00	8.003,00	6.644,00	5.181,00	-6,76
2	Luas Panen	Hektar	8.331,00	8.656,00	7.195,00	7.088,00	5.147,00	-10,46
3	Produksi	Ton	42.236,18	42.017,48	37.245,45	36.823,04	28.965,54	-8,59
4	Produktivitas	Kw/Ha	5,07	4,85	5,18	5,20	5,63	2,78

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kampar Tahun 2021

Selain produksi padi, komoditas pertanian di Kabupaten Kampar adalah tanaman Jagung, Kedelai, Kacang-Kacangan, dan Umbi-Umbian. Jagung merupakan tanaman semusim yang bisa tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah, tetapi biasanya lebih subur di tanah liat. Tak hanya pipilan jagung yang bisa digunakan, hampir seluruh bagian tanaman bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi termasuk untuk mendukung ketersediaan pakan ternak dan bahan baku industri.

Tabel 2.143
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian
di Kabupaten Kampar Tahun 2017–2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Panen							
	Jagung	Ha	1.162	1.163	1.164	1.165	1.167	0,10
	Kedelai	Ha	235	235	235	236	236	0,10
	Kacang Tanah	Ha	238	238	238	239	239	0,10
	Kacang Hijau	Ha	90	90	90	90	90	0,10
	Ubi Kayu	Ha	668	669	669	670	671	0,10
	Ubi Jalar	Ha	180	180	180	181	181	0,10
2	Produksi							
	Jagung	Ton	2.773	2.867	2.960	3.054	3.148	3,22
	Kedelai	Ton	270	279	288	297	307	3,22
	Kacang Tanah	Ton	226	234	241	249	257	3,22
	Kacang Hijau	Ton	87	90	93	96	99	3,22
	Ubi Kayu	Ton	17.017	17.592	18.167	18.743	19.318	3,22
	Ubi Jalar	Ton	1.497	1.548	1.598	1.649	1.699	3,22
3	Produktivitas							
	Jagung	Ton/ha	2,39	2,46	2,54	2,62	2,70	3,12
	Kedelai	Ton/ha	1,15	1,19	1,22	1,26	1,30	3,12
	Kacang Tanah	Ton/ha	0,95	0,98	1,01	1,04	1,07	3,12
	Kacang Hijau	Ton/ha	0,97	1,00	1,03	1,06	1,09	3,12
	Ubi Kayu	Ton/ha	25,47	26,31	27,14	27,97	28,80	3,12
	Ubi Jalar	Ton/ha	8,32	8,59	8,86	9,13	9,40	3,12

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2021, Data Tahun 2018-2021 Estimasi.

Kacang-kacangan yang dikembangkan di Kabupaten Kampar terdiri kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman kacang-kacangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.143 di atas.

Ubi kayu merupakan salah satu tanaman umbi yang paling sering dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Ubi kayu sering disajikan sebagai makanan ringan yang lezat. Sementara itu, daunnya bisa dimasak menjadi sayur yang bernutrisi. Demikian halnya dengan ubi jalar merupakan tanaman merambat yang batangnya tidak berkayu. Ubi jalar sering diolah menjadi berbagai masakan tradisional. Daun ubi jalar bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

3) Produktivitas Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Kampar antara lain Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao, Pinang dan Kopi. Sektor perkebunan berkembang sangat pesat, terutama perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengembangan perkebunan dengan berbagai macam pola. Ada pola perusahaan swasta yang menanamkan modalnya untuk pembukaan lahan perkebunan baru, ada Pola Kemitraan, Pola Inti Plasma, dan Pola Swadaya. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.144 berikut ini.

Tabel 2.144
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Panen							
	Kelapa Sawit	Ha	225.799	225.916	226.085	226.003	226.169	0,04
	Karet	Ha	93.349	93.098	93.367	93.402	92.741	-0,16
	Kelapa	Ha	1.853	1.838	1.839	1.798	1.798	-0,75
	Kakao	Ha	316	335	335	335	335	1,50
	Pinang	Ha	109	109	109	109	109	0,00
	Kopi	Ha	14	14	14	14	14	0,00
2	Produksi							
	Kelapa Sawit	Ton	2.664.676	2.665.029	2.703.547	2.703.547	2.868.627	1,89
	Karet	Ton	52.769	64.857	69.952	76.734	111.190	21,34
	Kelapa	Ton	446	446	451	483	485	2,16
	Kakao	Ton	43	43	44	44	45	1,15
	Pinang	Ton	22,40	22,40	22,40	27,90	27,90	6,14
	Kopi	Ton	417	417	417	417	417	0,00
3	Produktivitas							
	Kelapa Sawit	Ton/ha	11,80	11,80	11,96	11,96	12,68	1,85
	Karet	Ton/ha	0,57	0,70	0,75	0,82	1,20	21,59
	Kelapa	Ton/ha	0,24	0,24	0,25	0,27	0,27	2,96
	Kakao	Ton/ha	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	-0,27
	Pinang	Ton/ha	0,21	0,21	0,21	0,26	0,26	6,14
	Kopi	Ton/ha	30	30	30	30	30	0,00

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dari data luas lahan dan produksi perkebunan memperlihatkan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki jumlah luas lahan dan produksi dengan proporsi terbanyak bila dibandingkan dengan komoditas lainnya, disusul dengan komoditas karet. Selama tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan peningkatan luas panen, produksi produktivitas perkebunan Kabupaten Kampar secara positif. Hal ini dapat dilihat selama tahun 2017-2021 dimana semua komoditas mengalami peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas, kecuali kelapa sawit dan kakao. Menurunnya produktivitas tanaman kelapa sawit juga dapat disebabkan masih banyaknya tanaman umur muda yang baru direplanting dan atau tanaman yang sudah tua dan harus diremajakan. Oleh karena itu diperlukan pendataan khususnya tanaman kelapa sawit agar komoditas tetap menjadi andalan bagi ekonomi daerah terutama petani swadaya.

4) Produktivitas Peternakan

Komoditas unggulan sektor peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Kampar antara lain Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam Buras, dan Itik. Populasi terbesar untuk jenis ternak besar yaitu sapi, sedangkan untuk ternak kecil populasi terbanyak yaitu kambing. Melihat potensi ternak yang besar pemerintah ingin menjadikan Kabupaten Kampar sebagai sentra pengembangan sapi potong di daerah Riau.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan hal di atas, yaitu melalui pengembangan Kawasan Peternakan Pola Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dan Pola Sistem Integrasi Sapi dan Padi (SISPA), sehingga peternak sapi tidak lagi kesulitan menyediakan pakan ternaknya. Potensi lahan perkebunan untuk pengembangan pola SISKA di Kabupaten Kampar sebesar 226.169 hektar. Perkembangan populasi ternak ruminansia berkurang dari 72.452 ekor tahun 2017 menjadi 69.666 ekor tahun 2021 dengan pertumbuhan -0,71% per tahun. Pola SISKA yang telah dikembangkan di beberapa lokasi tersebut telah berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi di Kabupaten Kampar. Pola SISPA yang telah

dikembangkan di beberapa lokasi tersebut telah berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi di Kabupaten Kampar, lihat Tabel 2.145.

Tabel 2.145
Populasi Ternak Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Jenis Ternak	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Populasi Ternak	Ekor						
	Sapi Potong	Ekor	40.085	41.414	28.755	28.461	29.001	-6,59
	Kerbau	Ekor	15.938	16.105	14.309	14.420	14.621	-1,98
	Kambing	Ekor	16.020	16.276	20.739	21.069	24.751	12,02
	Domba	Ekor	409	471	1.408	1.064	1.293	52,80
	Ayam Buras	Ekor	294.318	309.534	302.259	291.745	326.994	2,86
	Ayam Ras Potong	Ekor	14.025.153	14.792.610	13.256.272	13.521.397	18.113.705	7,76
	Itik	Ekor	25.926	25.510	39.916	41.314	45.816	17,32
2	Produksi Daging							
	Sapi Potong	Kg	830.392	1.095.869	929.766	994.720	1.029.557	6,83
	Kerbau	Kg	711.454	789.086	1.026.850	1.066.892	1.138.544	12,91
	Kambing	Kg	31.585	39.061	42.668	36.083	39.507	6,74
	Domba	Kg	309	355	3.373	3.525	2.026	206,75
	Ayam Buras	Kg	362.815	205.816	477.429	486.978	495.239	23,10
	Ayam Ras Potong	Kg	3.690.626	3.788.474	4.235.243	3.941.528	4.271.347	3,97
	Itik	Kg	17.291	19.220	19.604	19.944	18.130	1,45
3	Produktivitas							
	Sapi Potong	Kg/Ekor	20,72	26,46	32,33	34,95	35,50	14,90
	Kerbau	Kg/Ekor	44,64	49,00	71,76	73,99	77,87	16,14
	Kambing	Kg/Ekor	1,97	2,40	2,06	1,71	1,60	-4,03
	Domba	Kg/Ekor	0,76	0,75	2,40	3,31	1,57	50,80
	Ayam Buras	Kg/Ekor	1,23	0,66	1,58	1,67	1,51	21,98
	Ayam Ras Potong	Kg/Ekor	0,26	0,26	0,32	0,29	0,24	-1,45
	Itik	Kg/Ekor	0,67	0,75	0,49	0,48	0,40	-10,40

Sumber: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Sedangkan populasi ternak unggas mengalami pertumbuhan sebesar 7,67% per tahun dimana jumlah ternak unggas tahun 2017 sebanyak 14.345.397 ekor kemudian bertambah menjadi 18.486.515 ekor tahun 2021. Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Kampar untuk kurun

waktu lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.145 diatas.

5) Cakupan Bina Kelompok Petani

Pembinaan kelompok tani bermaksud untuk membantu para petani agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi, permodalan, pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam petani dalam pengelolaan kelompok. Meningkatkan cakupan bina kelompok tani yang mendapat pelayanan baik bantuan maupun penyuluhan dan pendampingan.

Pembinaan kelompok tani di Kabupaten Kampar selalu ditingkatkan setiap tahunnya karena penguatan kelembagaan pertanian salah satunya adalah pembinaan terhadap kelompok tani. Cakupan pembinaan kelompok tani secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 17,79% per tahun atau bertambah dari 1.801 kelompok tahun 2017 menjadi 2.956 kelompok pada tahun 2021, jelasnya lihat Tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.146
Perkembangan Realisasi Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Produksi Perikanan	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kelompok Tani Tanaman Pangan	Kelompok	1.801	2.956	2.956	2.270	2.956	17,79
2	Kelompok Tani Perkebunan	Kelompok	771	774	767	760	778	0,24
3	Kelompok Tani Peternakan	Kelompok	257	257	257	257	257	0,00
4	Cakupan Pembinaan (%)	%	100	100	100	100	100	0,00

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2021

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kontribusi pertanian khususnya tanaman pangan maka program pendampingan kelompok yang fokus pada

perbaikan kualitas produksi, menguatkan kelembagaan kelompok dan membantu perencanaan bisnis, perbaikan pencatatan, dan organisasi kelompok tani. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok tani mutlak diperlukan agar kelompok tani memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai fasilitas dalam program pembangunan pertanian melalui pemetaan atas keberadaan dan kemampuan kelompok tani yang ada. Berikut disajikan kemampuan kelompok tani berdasarkan kelas kelompok tani di Kabupaten Kampar tahun 2021.

Tabel 2.147
Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Kampar Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok	Kelas Kelompok					Jumlah Anggota
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Dikukuhkan	
1	Kampar Kiri	96	79	3	0	0	14	2.190
2	Kampar Kiri Hulu	92	61	14	0	0	17	1.732
3	Kampar Kiri Hilir	67	60	5	0	0	2	1.453
4	Gunung Sahilan	130	61	3	0	0	39	2.512
5	Kampar Kiri Tengah	119	62	14	0	0	17	2.346
6	XIII Koto Kampar	146	119	24	1	0	2	3.648
7	Kuok	135	95	25	6	0	9	3.849
8	Salo	71	49	15	3	0	4	2.742
9	Tapung	476	464	2	0	0	10	6.605
10	Tapung Hulu	252	242	2	0	0	7	3.742
11	Tapung Hilir	317	294	12	0	0	11	5.825
12	Bangkinang Kota	56	33	6	2	0	14	834
13	Bangkinang	181	107	49	14	1	10	3.930
14	Kampar	130	73	33	7	0	17	2.990
15	Kampa	79	54	24	1	0	0	2.062
16	Rumbio Jaya	116	27	66	11	0	12	2.654
17	Kampar Utara	104	60	29	5	0	9	2.182
18	Tambang	106	58	29	1	0	18	2.559
19	Siak Hulu	117	92	23	1	0	2	1.851
20	Perhentian Raja	93	81	3	0	0	9	1.901
21	Koto Kampar Hulu	73	59	8	0	0	6	2.110
Jumlah		2.956	2.230	389	52	1	229	5.863

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2021

Pengklasifikasian terhadap kelompok tani diatas diukur berdasarkan pada
1). Kemampuan merencanakan; 2). Kemampuan mengorganisasikan;

3). Kemampuan melaksanakan kegiatan; 4). Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan dan 5). Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompoknya.

2.4.3.4 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perdagangan

a) Perdagangan Lokal

Salah satu kegiatan ekonomi atau perdagangan yang ada di Kabupaten Kampar adalah perdagangan lokal antara daerah atau wilayah atau masuknya barang dari dan keluar dari wilayah di Kabupaten Kampar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah. Perdagangan luar negeri terdiri dari kegiatan perdagangan dapat membantu terutama untuk melihat perdagangan komoditas unggulan yang berbasis hasil pertanian dan industri.

Tabel 2.148
Perkembangan Volume dan Nilai Perdagangan Lokal
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Volume							
	CPO Keluar	Ton	985.612,64	840.407,52	926.496,33	787.846,46	885.960,52	-1,75
	Beras Masuk	Ton	53.049,99	57.010,16	47.876,12	59.262,51	67.365,69	7,22
2	Nilai							
	CPO Keluar	Rp. Miliar	8.739,33	6.748,50	6.359,48	7.096,37	17.567,14	32,65
	Beras Masuk	Rp. Miliar	480,10	545,97	466,41	590,43	651,63	9,03

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Selama tahun 2017-2021, jumlah perdagangan atau barang (CPO) yang dijual keluar dari Kabupaten Kampar mengalami penurunan dengan pertumbuhan sebesar -1,75% per tahun. Sementara jumlah barang berupa beras yang didatangkan dari luar Kabupaten Kampar 2017-2021 tumbuh sebesar 7,22% per tahun, hal ini dapat dilihat Tabel 2.148 di atas.

Ketiadaan industri hilirisasi terhadap CPO di Kabupaten Kampar maka seluruh produksi CPO diperdagangkan ke luar wilayah terutama untuk kegunaan

bahan baku industri hilir yang terdapat di Kota Dumai dan ekspor melalui pelabuhan Dumai. Jumlah produksi CPO yang diperdagangkan tersebut nilainya mengalami peningkatan dari 8,739 triliun tahun 2017 meningkat menjadi 17,567 triliun tahun 2021 dengan pertumbuhan nilai perdagangan sebesar 32,65% per tahun.

Disisi lain perdagangan kebutuhan pokok terutama beras yang didatangkan untuk memenuhi defisit konsumsi beras di Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 9,03% per tahun dengan nilai Rp. 480,10 tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp. 651,63 milyar tahun 2021. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras di wilayah ini. Hal ini harus menjadi prioritas dalam rangka memenuhi ketersediaan beras melalui produksi bukan hanya melalui distribusi atau perdagangan antar wilayah se Riau atau luar provinsi Riau.

b) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sangat penting dalam rangka peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal.

Tabel 2.149
Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Pedagang	Satuan	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yangmendapatkan bantuan binaan	Kelompok	3,00	4,00	6,00	9,00	12,00	41,67
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	3,00	4,00	6,00	9,00	12,00	41,67
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Pada tahun 2017 sebanyak 3 kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan kemudian meningkat menjadi 12 kelompok

pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan tahun 2021 dengan pertumbuhan 41,67% per tahun.

2.4.3.5 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perindustrian

Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan pembuatan barang kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut pada umumnya tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan. Cakupan bina kelompok pengrajin adalah persentase kelompok pengrajin yang dibina pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh kelompok pengrajin yang ada. Pada tahun 2017 sebanyak 3 kelompok kemudian meningkat menjadi 12 kelompok tahun 2021 dengan pertumbuhan 41,67% per tahun. Kelompok pengrajin merupakan salah lembaga ekonomi kerakyatan yang harus dikembangkan dalam meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah. Jumlah kelompok pengrajin tahun 2017 sebanyak 230 kelompok dan kemudian bertambah menjadi 313 kelompok pengrajin dengan pertumbuhan 8,28% per tahun.

Tabel 2.150
Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kelompok Industri	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan pembinaan Pemda	Kelompok	3,00	4,00	6,00	9,00	12,00	41,67
2	Jumlah Kelompok Pengrajin	Kelompok	230	245	250	300	313	8,28
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.3.6 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Transmigrasi

Transmigrasi diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah terutama dibidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, pengembangan daerah, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan penyebaran pembangunan keseluruhan wilayah negara, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan nasional, pertahanan nasional memperkuat ketahanan nasional.

Pemerintah Kabupaten Kampar mencadangkan lokasi transmigrasi lokal. Diharapkan dengan pengembangan transmigrasi di wilayah tersebut akan terjadi peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan dan berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah Kabupaten Kampar kedepan.

2.4.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.4.1 Bidang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dalam hal ini Kabupaten Kampar dalam jangka 2023-2026.

Dokumen perencanaan Kabupaten Kampar terdiri dari rencana jangka panjang daerah (RPJPD) Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA-PD). RPJMD akan dijabarkan dalam rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005–2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

- b. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017–2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA)
- c. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA sejak tahun 2019-2039
- d. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD selama tahun 2017-2022.
- e. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD selama tahun 2017-2022
- f. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW selama tahun 2019-2039

Tabel 2.151
Perkembangan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedia

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.4.2 Bidang Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Kampar setiap tahun menetapkan perda APBD Kabupaten Kampar dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan pada Tabel 2.152 tersebut dapat dilihat kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2021 terjadinya peningkatan kinerja secara keseluruhan. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), SILPA mengalami penurunan sebesar 62,03% per tahun. Artinya terjadinya efektifitas pengelolaan anggaran baik dari aspek belanja maupun pendapatan. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung terjadi peningkatan sebesar 2,88% per tahun. Hal ini akan mempengaruhi proporsi besaran anggaran terhadap belanja wajib terutama terutama pembangunan infrastruktur daerah.

Demikian halnya dengan Perbandingan belanja langsung terhadap APBD yang naik sebesar 2,04% per tahun sementara Perbandingan belanja tidak langsung terhadap APBD hanya sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,22% per tahun dari tahun 2017-2020. Tahun 2021 sudah menggunakan nomenklatur pengelolaan keuangan daerah dengan pola belanja operasi dan belanja modal.

Penetapan APBD dilaksanakan secara fluktuatif, maka kedepan diperlukan ketepatan waktu sebagaimana regulasi yang berlaku yaitu 30 November tahun sebelum berjalan, namun jika dilihat 2017 disahkan pada tanggal 31 Januari.

Tabel 2.152
Perkembangan Indikator Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0,00
2	Jumlah SILPA	Rp. Juta	62.666.603.463	50.358.346.403	209.375.181.473	230.932.112.320	96.243.047.178	62,03
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,59	3,25	7,20	8,61	3,64	27,22
4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	82,10	63,57	89,35	83,59	Na	2,88
5	Perbandingan belanja langsung terhadap APBD	%	43,17	38,86	47,63	45,53	Na	2,04
6	Perbandingan belanja tidak langsung terhadap APBD	%	54,91	61,14	52,81	54,47	Na	0,22
7	Penetapan APBD	Waktu	31 Januari 2027	28 Desember 2017	28 Desember 2018	27 Desember 2019	31 Desember 2020	Sesuai

Sumber: Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.4.3 Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan dan pelatihan serta Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan dalam penyusunan, penyiapan, pelaksanaan, pengkoordinasian, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai meliputi Diklat Struktural, Fungsional, dan Pengembangan Karier Pegawai seluruh pegawai Kabupaten Kampar. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2.153
Perkembangan Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	67,45	46,55	35,68	31,68	31,83	-16,27
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5,49	33,69	85,95	31,78	6,72	131,73
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,36	0,05	0,72	0,02	0,10	89,17
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	35,00	35,00	35,00	36,00	38,00	2,10
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	OPD	176,00	176,00	193,00	644,00	667,00	61,73
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	5.894	5.968	6.091	5.547	5.412	-2,01

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar telah merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Perkembangan Indikator Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kampar 2017-2021.

2.4.4.4 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang binwas pemerintahan daerah, Penelitian dan pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sejak tahun 2017-2021. Penunjang Urusan Bidang penelitian dan pengembangan memberikan kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta pembangunan kerja sama antar daerah yang di implemntasikan melalui beberapa kegiatan antara lain.

Perkembangan kinerja indikator penelitian dan pengembangan selama tahun 2017-2021, kinerja masing masing indikator jelasnya lihat Tabel 2.154 berikut.

Tabel 2.154
Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	0	0	0	0	0	0
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	0	0	0	0	0	0
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	0	5	10	60	300,00
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	0	5	10	60	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.4.5 Bidang Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan antar pemerintah dan aparaturnya pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah serta pengawasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tindak lanjut dari fungsi pengawasan terdiri dari jumlah temuan, tindak lanjut yang selesai, tindak lanjut dalam proses dan belum ditindak lanjuti. Persentase tindak lanjut temuan turun sebesar -3,02% per tahun, sementara temuan BPK mengalami peningkatan sekitar 13,47% atau naik dari 2020 sebanyak 8 kasus menjadi 20 kasus pada tahun 2021, walaupun dari tahun 2017 ke 2019 mengalami penurunan. Selain dari itu fungsi pengawasan juga menjalankan beberapa rencana aksi KPK dalam rangka pencegahan tindak korupsi. Perkembangan kinerja indikator pengawasan selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2.155

Perkembangan Indikator Pengawasan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	65,01	64,31	71,52	50,74	54,22	-3,02
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	Na	Na	Na	Na	Na	0,00
3	Jumlah temuan BPK	Unit	32	23	22	8	20	13,47

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.4.4.6 Sekretariat Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan kewajiban kepala daerah yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahunnya berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 serta dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2018. Dari evaluasi tersebut yang dilakukan secara terukur mendapatkan perolehan Gambaran kinerja dari pemerintah daerah sampai dengan saat ini hasil evaluasi pemerintah Kabupaten Kampar terhadap kinerja pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan telah memperoleh nilai B dan level 3 sesuai penilaian SPIP.

2.4.4.7 Sekretariat DPRD

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu: Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu DPRD juga memiliki tugas dan wewenang dalam Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD

Tabel 2.156
Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Ket.
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	RKPD & Perubahan RKPD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Renstra OPD & Renstra Revisi OPD Setwan
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	DPA & DPPA OPD Setwan

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dalam menjalankan fungsi penunjang Sekretariat DPRD melakukan kegiatan memfasilitasi seluruh kebutuhan anggota DPRD, menyusun program-program kerja DPRD serta menjembatani komunikasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD seperti penyusunan jadwal kegiatan DPRD serta alat perangkat DPRD.

Jumlah Anggota DPRD yang menjalankan fungsi tersebut sebagaimana disajikan data jumlah anggota DPRD Kabupaten Kampar menurut fraksi dan jumlah orang masing-masing fraksi pada Tabel 2.157 berikut.

Tabel 2.157
Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Fraksi Partai Golkar	Orang	9	9	6	6	6	Berkurang
2	Fraksi PPP	Orang	0	0	6	6	6	Tetap
3	Fraksi Partai Gerindra	Orang	5	5	6	6	6	Bertambah
4	Fraksi PAN	Orang	5	5	5	5	5	Tetap

No	Uraian	Satuan	Tahun					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	
5	Fraksi Partai Demokrat	Orang	7	7	6	6	6	Berkurang
6	Fraksi PKB	Orang	5	5	0	0	0	Berkurang
7	Fraksi Nasdem	Orang	0	0	5	5	5	Tetap
8	Fraksi Hanura-Perjuangan	Orang	5	5	0	0	0	Berkurang
9	Fraksi PBB-PKPI	Orang	4	4	6	6	6	Bertambah

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan tentang kemampuan suatu daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani dibandingkan dengan daerah sekitar.

2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Tabel 2.158
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

Konsumsi RT Kabupaten Kampar	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Total Konsumsi Rumah Tangga						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	32.496,78	34.370,41	36.361,63	36.729,47	41.052,05	6,08
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	20.624,32	21.368,45	22.072,86	21.648,80	23.654,66	3,56
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	35,02	36,29	37,86	37,06	39,32	2,98
Rata-rata Konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Juta Rp)						
a. ADHB	162,65	168,10	173,91	174,63	201,10	5,59
b. ADHK 2010	103,23	104,51	105,57	102,93	115,87	3,08
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Juta Rp)						
a. ADHB	43,79	45,89	48,18	45,33	50,27	3,69
b. ADHK 2010	27,79	28,53	29,25	26,72	28,97	1,23
Pertumbuhan						
a. Total Konsumsi RT	5,04	5,77	5,79	1,01	11,77	6,08
b. Per-RT	4,34	3,35	3,45	0,41	15,16	5,59
c. Perkapita	2,65	2,52	-8,66	8,43	1,23	5,84
Jumlah RT (<i>unit</i>)	199.793	204.461	209.089	210.333	204.142	0,56
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46

Sumber: BPS, PDRB Pengeluaran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 dan Olahan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Selama periode 2017-2021, rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB harga berlaku terus mengalami peningkatan dari Rp.43,79 Juta/Kapita/tahun 2017 meningkat menjadi Rp 50,27 juta/kapita/tahun pada tahun 2021 atau bertambah sebanyak Rp. 6,46 juta/kapita/selama lima tahun dengan rata pertumbuhan sebesar 3,69% per tahun. Berikut Tabel 2.158 disajikan perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

Demikian halnya dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB harga konstan di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Selama periode 2017-2021, rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB harga konstan terus mengalami peningkatan dari Rp.27,79 Juta/Kapita/tahun 2017 meningkat menjadi Rp 28,97 juta/kapita/tahun pada tahun 2021 atau bertambah sebanyak

Rp. 1,17 juta/kapita/selama lima tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 1,23% per tahun.

2.5.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani

NTP diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan atau daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 2010, $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Tabel 2.159
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks yang diterima petani (It)	134,77	123,6	133,68	134,51	148,38	2,70

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	Indeks yang dibayar petani (lb)	128,35	133,05	136,85	105,65	147,66	5,87
3	NTP	105,00	92,90	97,68	127,32	100,49	0,72

Sumber: BPS Kabupaten Kampar (Riau Dalam Angka tahun 2017-2021) dan BRS, dan olahan 2021

Berdasarkan Tabel 2.159 menunjukkan bahwa terjadinya penurunan nilai NTP dari tahun 2017 sebesar 105,00 menjadi sebesar 100,49 pada tahun 2021, hal ini menerangkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani hal ini akan berakibat pada penurunan produktivitas sektor pertanian. Oleh karena perlu dukungan pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani agar biaya logistik mengalami penurunan sehingga terjadi peningkatan penerimaan petani dan sekaligus dapat meningkatkan daya beli petani. Berikut Tabel 2.159 disajikan perkembangan NTP per tahun di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021.

2.5.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka semakin rendah proporsi pendapatan yang digunakan untuk belanja konsumsi barang kebutuhan pokok (pangan) atau semakin tinggi proporsi pendapatan untuk belanja konsumsi barang kebutuhan bukan pokok (non pangan). Berdasarkan Tabel 2.160 dapat dilihat bahwa selama periode 2017-2021, rata-rata pertumbuhan konsumsi non pangan RT/kapita harga berlaku sebesar 3,19% per tahun atau naik dari Rp. 23,91 juta/kapita tahun 2017 menjadi 26,64 juta/kapita tahun 2021 atau bertambah sebanyak Rp. 2,72 juta/kapita atau hanya bertambah senilai Rp. 0,54 juta/Kapita/Tahun.

Tabel 2.160
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) Per
Kapita Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
A	Harga Beraku (Juta Rupiah)						
1	Total Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT	17.744.194,00	18.701.650,00	19.831.675,00	18.801.416,00	21.751.093,84	5,48
2	Jumlah RT	199.793	204.461	209.089	210.333	204.142	0,56
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
4	Rasio (Juta Rp/RT)	88,81	91,47	94,85	89,39	106,55	5,03
5	Rasio (Juta Rp/Kapita)	23,91	24,97	26,28	23,20	26,64	3,19
6	Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi RT	54,60	54,41	54,54	51,19	52,98	-0,69
B	Harga Konstan (Juta Rupiah)						
1	Total Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT	11.442.508	11.811.143	12.165.327	11.383.543	12.776.163	3,01
2	Jumlah RT	199.793	204.461	209.089	210.333	204.142	0,56
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
4	Rasio (Juta Rp/RT)	57,27	57,77	58,18	54,12	62,58	2,56
5	Rasio (Juta Rp/Kapita)	15,42	15,77	16,12	14,05	15,65	0,75
6	Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi RT	55,48	55,27	55,11	52,58	54,01	-0,63

Sumber: BPS, PDRB Pengeluaran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 dan Olahan)

Selama periode yang sama rata-rata pertumbuhan konsumsi non pangan RT harga konstan sebesar 2,56% per tahun atau naik dari Rp. 15,42 juta/kapita tahun 2017 menjadi 15,65 juta/kapita tahun 2021 atau bertambah sebanyak Rp. 0,23 juta/kapita atau hanya bertambah senilai Rp.0,05 juta/Kapita.

Dalam periode yang sama terjadi kecenderungan penurunan rasio konsumsi non pangan terhadap total konsumsi RT baik pada PDRB harga berlaku maupun PDRB harga konstan. Rasio konsumsi RT pada harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 54,60% kemudian turun menjadi 52,98% atau berkurang sebesar 1,62% dengan penurunan pertumbuhan sebesar -0,63% per tahun selama tahun 2017-2021. Demikian halnya rasio konsumsi non pangan pada harga konstan mengalami penurunan sebesar -1,47% per tahun dari 55,48% pada tahun 2017 menjadi 54,01% pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara sebaliknya yaitu terjadinya peningkatan konsumsi pangan RT dari 44,52% pada tahun 2017 meningkat menjadi 45,99% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 0,86% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa kecapatan peningkatan pendapatan RT belum

selaras kecepatan peningkatan peningkatan harga barang dan jasa pada sektor pangan.

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.5.2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infrastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan perhitungan rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kabupaten sepanjang 2.073,10 km. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan.

Rasio panjang jalan per kendaraan di Kabupaten Kampar mengalami pertumbuhan sebesar 9,40% atau jumlah kendaraan per km jalan bertambah dari 131,91 kendaraan pada tahun 2017 bertambah menjadi 188,90 kendaraan per km tahun 2021 atau bertambah sebanyak 57,00 kendaraan per km selama periode 2017-2021. Pertambahan jumlah kendaraan terutama disumbang oleh kendaraan mobil penumpang dengan pertumbuhan sebesar 9,23% per tahun, bus dengan pertumbuhan sebesar 11,19% per tahun, truk dengan pertumbuhan sebesar 8,42% per tahun, sepeda motor dengan pertumbuhan sebesar 9,48% per tahun dan total dengan pertumbuhan sebesar 9,40% per tahun. Kondisi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya beli terutama alat transportasi mobil penumpang. Berikut Tabel 2.161 disajikan mengenai panjang jalan terhadap jumlah kendaraan per kilometer di Kabupaten Kampar selama tahun 2017 -2021.

Tabel 2.161
Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kondisi Jalan							
Baik	Km	1.101,29	1.159,27	1.170,60	1.199,55	1.215,55	2,51
Rusak Ringan	Km	822,86	778,29	810,21	796,46	780,05	-1,27
Rusak Berat	Km	148,95	135,55	92,30	77,10	77,50	-14,21
Jumlah	Km	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10	2.073,10	0,00
Proporsi jalan kondisi Baik	%	53,12	55,92	56,47	57,86	58,63	2,51
Jenis Kendaraan							
Mobil Penumpang	Unit	23.993	26.708	29.040	31.627	34.151	9,23
Bus	Unit	59	64	75	82	90	11,19
Truk	Unit	16.320	17.732	19.461	20.979	22.549	8,42
Sepeda Motor	Unit	233.096	259.197	283.834	309.447	334.816	9,48
Jumlah	Unit	273.468	303.701	332.410	362.135	391.606	9,40
Rasio Kendaraan Per Panjang Jalan	Unit/km	131,91	146,5	160,34	174,68	188,90	9,40

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2021

2.5.2.2 Ketaatan Terhadap RTRW

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang RTRW belum disahkan, progres terakhir Ranperda RTRW sudah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan DPRD Kabupaten Kampar, dan saat ini masih dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga, indikator ketaatan terhadap RTRW belum bisa diukur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karakteristik wilayah, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kampar meliputi:

1. Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah;
2. Pemulihan kawasan lindung dan kawasan hutan melalui skenario Kampar Kabupaten hijau;
3. Penguatan fungsi dan pengembangan kemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan; dan

4. Pembangunan ekonomi wilayah yang mantap dengan basis ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang dapat menghasilkan nilai tambah.

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan, Rencana sistem perkotaan Kabupaten Kampar dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan, dimana pengembangan pusat kegiatan diarahkan terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), untuk menunjang aksesibilitas regional.

2.5.2.3 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif yang digunakan dalam analisis terdiri dari data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari padi, palawija, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, sayur-sayuran, kacang panjang, cabe, terung, ketimun, kangkong, bayam, dan buah-buahan. Sementara dari sub sektor perkebunan seperti komoditas Kelapa Sawit Karet, Kelapa, Kakao, Pinang dan Kopi.

Rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Kampar sebesar 91,71% tahun selama tahun 2017-2021. Berikut disajikan data luas wilayah produktif Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.162
Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Wilayah Produktif	Hektar	838.247	838.247	838.247	838.247	838.247	0,00
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	914.063	914.063	914.063	914.063	914.063	0,00

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
3	Rasio	%	91,71	91,71	91,71	91,71	91,71	0,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.5.2.4 Luas Wilayah Industri

Guna lahan industri di Kabupaten Kampar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kawasan industri kecil dan kawasan industri besar, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri dalam skala kecil.

Peruntukan luas wilayah industri di Kabupaten Kampar seluas 5.850 hektar yang terletak di Kecamatan Tambang, Tapung, dan Siak Hulu dan khusus untuk industri agro di kota Petapahan. Luas Kawasan peruntukan industri tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri kecil dan menengah. Kawasan peruntukan Industri merupakan sektor usaha yang menunjang dalam sistem agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi karet, kelapa sawit, dan kayu dan perikanan. Industri skala menengah ke atas perlu dikembangkan dalam sistem kemitraan dengan skala menengah dan kecil atau rumah tangga. Berdasarkan data tersebut menunjukkan rasio luas wilayah industri di Kabupaten Kampar terhadap Kawasan budidaya sebesar 1,67%. Berikut disajikan data perkembangan luas wilayah industri Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 163
Persentase Luas Wilayah Industri Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Luas Wilayah Industri	Hektar	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	0,00
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	914.063	914.063	914.063	914.063	914.063	0,00

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
3	Rasio	%	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.5.2.5 Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Rumah makan atau restoran merupakan usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kabupaten Kampar juga giat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha kuliner. Lokasi restoran merupakan pilihan utama yang mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pemilihan kuliner. Selain tempat yang strategis, fasilitas dan sarana penunjang wisata seperti arena bermain, spot-spot khusus untuk selfi yang saat ini paling digemari wisatawan. Berikut perkembangan data jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.164
Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Restoran/Rumah Makan/warung/ Kafe	Unit	96	118	133	133	133	9,19

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan pada Tabel 2.164 menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe sebesar 9,19% per tahun atau naik dari 96 unit pada tahun 2017 bertambah menjadi 133 unit pada tahun 2021. Pertambahan unit usaha kuliner makanan dan minum di wilayah ini didorong oleh peningkatan sektor ekonomi lainnya selama periode 2017-2021.

2.5.2.6 Hotel dan Penginapan

Ketersediaan akomodasi hotel di suatu wilayah dengan jumlah dan kualitas yang baik menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah bersangkutan. Jumlah hotel, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur. Hotel memiliki peran

sebagai faktor yang mendukung jalannya usaha diberbagai sektor karena memiliki peran dalam membantu meningkatkan efisisensi sumber daya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya serta sebagai penguat daya saing karena hotel mampu berperan sebagai atraksi wisata sekaligus sebagai perantara yang dapat menciptakan citra suatu destinasi serta reputasi manajemen. Berikut data jumlah akomodasi hotel, kamar dan tempat tidur Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Tabel 2.165
Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
4.	Hotel Bintang	Unit	3	3	3	3	3	0,00
5.	Jumlah Kamar	Unit	277	277	277	277	277	0,00
6.	Jumlah Tempat Tidur	Unit	406	406	406	406	406	0,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan data Tabel 2.165 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kampar Akomodasi hotel masih kategori non Bintang. Perkembangan hotel non bintang dengan pertumbuhan sebesar 3,82% per tahun, kamar tumbuh sebesar 4,09% per tahun dan tempat tidur tumbuh sebesar -1,74. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kapasitas kamar atau penambahan ukuran kamar tanpa penambahan tempat tidur.

2.5.2.7 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Air Minum Layak

Sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan atas sistem air bersih perkotaan dan sistem air bersih perdesaan. Sistem penyediaan air bersih perkotaan ditujukan untuk melayani kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (perkantoran, perdagangan, jasa, industri dll).

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkat produksi air minum untuk melayani kebutuhan pelanggan khususnya non niaga/rumah tangga, niaga dan industri harus terus dilakukan.

Tabel 2.166
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	RT	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	5,08
2	Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum Layak	RT	130.964	141.344	185.023	191.173	219.127	14,19
3	Akses Air Minum	%	65,55	69,13	88,49	90,07	90,41	8,91
4	Jumlah Sambungan Rumah (SR) SPAM IKK	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rumah Ranga Berakses SPAM/Sumur Bor	%	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	4,70

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kecepatan penyediaan air minum layak di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah RT yang dapat mengakses air minum yang bersumber dari leding dan sumur pompa/bor sebesar 14,49% lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah RT yang hanya sebesar 5,08%. Kondisi tersebut telah meningkatkan rasio akses air minum RT mencapai 90,41% pada tahun 2021 dari 65,55% pada tahun 2017 atau naik 24,86% selama 2017-2021.

2.5.2.8 Rasio Elektrifikasi

Selama periode tahun 2017-2021, penyediaan listrik oleh PT. PLN di Kabupaten Kampar terus meningkat dari rasio elektrifikasi 98,26% tahun 2017 meningkat menjadi 107,95% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 1,62%

per tahun. Berikut data Rasio elektrifikasi Kabupaten Kampar sepanjang tahun 2017-2021

Tabel 2.167
Persentase Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Kampar
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga	Unit	166.477	170.367	170.888	168.266	171.550	5,99
2	Rumah Tangga Berlistrik	Unit	196.324	211.835	234.913	248.457	261.643	7,32
3	Rasio Elektrifikasi	%	98,26	103,61	112,35	117,06	107,95	1,62

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2021

Peningkatan rasio elektrifikasi diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akibat adanya penerangan untuk belajar, selain itu juga akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat karena ketersediaan energi listrik yang dapat digunakan untuk usaha produktif. Adanya korelasi kuat antara rasio elektrifikasi dan kemiskinan.

Akses kelompok masyarakat terhadap listrik, mereka juga mampu mengakses air bersih dan sanitasi dengan pompa air. Listrik juga akan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, misalnya alat pengolah makanan. Selain itu juga ketersediaan energi listrik juga akan mendorong peningkatan investasi pada di wilayah Kabupaten Kampar.

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.5.3.1 Angka Kriminalitas

Iklim investasi dipengaruhi oleh adanya rasa aman dan kondisi yang kondusif perpolitikan suatu daerah, Investor perlu diberikan rasa aman dalam menanamkan modal, rasa aman dapat ditunjukkan dari angka kriminalitas serta kondisi yang kondusif perpolitikan dapat dilihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi. Salah satu indikator yang menggambarkan iklim berinvestasi yang baik pada suatu wilayah adalah rendahnya angka kriminalitas.

Tabel 2.168
Angka Kriminalitas Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kasus	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pencurian	Kasus	180	194	95	139	220	0,60
2	Curanmor	Kasus	-	-	-	-	-	-
3	Penganiayaan	Kasus	67	140	118	90	101	0,97
4	Pembunuhan	Kasus	2	2	4	2	1	45,45
5	Pemerasan	Kasus	4	2	1	2	2	45,45
6	Pemeriksaan	Kasus	-	-	-	-	-	-
7	Pengrusakan	Kasus	-	-	-	-	-	-
8	Perjudian	Kasus	-	-	-	-	-	-
9	Penipuan	Kasus	35	35	17	15	16	4,24
10	Narkotika	Kasus	-	-	-	-	-	-
11	Penebangan Liar	Kasus	-	-	-	-	-	-
Jumlah		Kasus	288	373	235	248	340	0,34

Sumber: Polres Kabupaten Kampar Tahun 2022

Secara keseluruhan dari 11 jenis kriminalitas, namun yang terdapat jenis kriminalitas di Kabupaten Kampar hanya 5 jenis dan secara relatif berfluktuatif dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,34% per tahun sehingga suasananya relatif aman dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Meskipun rendah, trend kecenderungan angka kriminalitas semakin meningkat dengan tingkat peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2021.

Selama tahun 2017-2021 angka kriminalitas yang cenderung mengalami peningkatan hanya kasus pencurian dan penganiayaan yang tumbuh masing-masing sebesar 0,60% dan 0,97% per tahun, sedangkan tindak kriminal yang lainnya cenderung mengalami penurunan seperti penipuan dan relatif sedikit.

2.5.3.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas keamanan wilayah. Perkembangan jumlah demonstrasi menurut masalah yang dimunculkan Kabupaten Kampar selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.169 berikut.

Tabel 2.169
Jumlah Demonstrasi Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Masalah	Satuan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Lahan	Kali	3,00	1,00	0,00	4,00	14,00	250,00
2	Agama	kali	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	300,00
3	Politik	kali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4	Sumber Daya Alam	Kali	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ketenagakerjaan	Kali	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	-50,00
6	Lainnya	Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Demonstrasi	Kali	4,00	3,00	0,00	7,00	20,00	185,71

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar Tahun 2021

Jumlah unjuk rasa yang terdapat di Kabupaten Kampar selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 4 kejadian tahun 2017 bertambah menjadi 20 kejadian tahun 2021. Demonstrasi terbanyak terkait dengan kasus lahan 3 kasus tahun 2017 bertambah menjadi 14 kasus tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 250,00% per tahun. Selama periode 2017-2021 jumlah kasus terbanyak pada tahun 2021 yaitu 20 kasus.

Kedepan perlu adanya penyelesaian kasus secara tuntas untuk mengurangi jumlah kasus tersebut menunjukkan semakin bertambah untuk menjaga keamanan. Para investor jika ingin berinvestasi di suatu daerah tidak akan hanya melihat pada satu faktor saja sebab ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih daerah tersebut seperti kemudahan dalam berusaha, infrastruktur yang memadai, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik tetapi termasuk kondisi keamanan.

2.5.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.5.4.1 Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada,

memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti motivasi kerja, keahlian/keterampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di wilayah ini.

Pertumbuhan tertinggi terhadap rasio lulusan S1, S2 dan S3 adalah lulusan S2 dengan pertumbuhan 20,03% per tahun selama tahun 2017-2021. Rasio lulusan S3 yang tinggi dan terlatih akan dapat melakukan riset secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan dan menjawab fenomena yang dihadapi oleh kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar kedepan. Riset adalah sebuah aktivitas yang mengeksplorasi intelektualitas manusia untuk mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi. Riset dilakukan menurut prinsip dan kaidah ilmiah universal seperti berpikir secara runtut dan argumentatif, menjunjung tinggi obyektivitas dan kejujuran ilmiah, serta rendah hati dalam mengakui karya-karya orang lain yang berpengaruh atau terkait dengan risetnya. Kompetensi inilah yang dituntut dari seorang doktor, di manapun ia bekerja. Singkat kata, seorang doktor mungkin tidak bisa mempertahankan posisi leading edgenya dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena berbagai sebab, tetapi ia tetap dituntut untuk bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bernas, obyektif, dan orisinal dalam profesinya sehingga dapat menunjang dan meningkatkan kemajuan dan

dayasaing daerah. Berdasarkan data Pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan rasio lulusan S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk 15 tahun ke atas dari 3,70% tahun 2017 menjadi 4,93% tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 7,56% per tahun. Jelasnya lihat pada Tabel 2.170 berikut.

Tabel 2.170
Perkembangan Realisasi Rasio Lulusan S1, S2 dan S3
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kasus	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk 15 Th Keatas	Jiwa	538.506	549.274	546.348	605.912	584.841	2,20
2	Tidak/Belum tamat SD/ Sederajat	%	273.849	278.678	283.426	288.255	331.410	5,04
3	Tamat SD/ Sederajat	%	165.015	160.931	156.738	152.654	155.435	-1,47
4	SLTP/ Sederajat	%	128.527	127.244	125.948	124.665	126.710	-0,35
5	SLTA/ Sederajat	%	142.243	146.387	150.420	154.564	155.485	2,25
6	Akademi/ Diploma I/ SARMUD	%	5.937	5.815	5.690	5.568	14.026	36,39
7	Jumlah S1, S2 dan S3	Jiwa	19.921	22.315	24.496	26.892	28.849	9,71
	Jumlah S1	Jiwa	19.021	21.257	23.297	25.533	27.448	9,61
	Jumlah S2	Jiwa	844	999	1.135	1.290	1.329	12,15
	Jumlah S3	Jiwa	37	59	64	69	72	20,03
8	Rasio Lulusan S1, S2 dan S3	%	3,70	4,06	4,48	4,95	4,93	7,56

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2021

2.5.4.2 Tingkat atau Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan tinggi yaitu jika lebih dari 41%, rasio ketergantungan sedang jika berkisar antara 30 – 40%, dan Rasio ketergantungan rendah bila kurang dari 30%. Rasio ketergantungan penduduk menggambarkan seberapa banyak penduduk usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif (0-14 Tahun dan >65 Tahun).

Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Kampar dari tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori tinggi karena selama periode tahun tersebut melebihi 41%. Hal tersebut dapat dilihat 42,50% pada tahun 2017 meningkat menjadi 46,42% pada tahun 2021. Artinya pada tahun 2017 rasio ketergantungan sebesar 42,50% hal ini menunjukkan bahwa di antara 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 42,50 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) yang mengantungkan hidupnya dengan usia produktif. Rasio ini pada tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi

44,27% artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 44,27 orang penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Tabel 2.171 menunjukkan struktur usia belum produktif, produktif, dan tidak produktif serta rasio ketergantungan di Kabupaten Kampar selama 2017-2021.

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Banyak usia produktif tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Kampar memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut berperan dalam meningkatkan kualitas SDM agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan masyarakat sehingga dapat membuka lapangan usaha seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan.

Tabel 2.171
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Rasio Ketergantungan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk					Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	0-4	47.156	52.570	55.205	63.274	63.763	7,97
2	5-9	78.464	74.128	76.575	82.958	83.600	1,72
3	10-14	77.923	72.984	76.501	83.715	84.362	2,17
4	15-19	69.209	71.600	57.527	60.887	61.358	-2,40
5	20-24	68.150	69.047	66.317	71.623	72.177	1,53
6	25-29	66.973	63.768	64.993	69.863	70.403	1,35
7	30-34	67.553	64.714	65.187	65.979	66.489	-0,37
8	35-39	66.042	64.755	66.308	69.196	69.731	1,39
9	40-44	55.799	55.556	58.601	62.136	62.617	2,96
10	45-49	49.196	49.366	50.615	54.132	54.551	2,65
11	50-54	35.656	38.777	41.175	43.820	44.159	5,53
12	55-59	26.803	28.578	30.412	33.006	33.261	5,59
13	60-64	15.357	18.997	20.203	22.747	22.923	10,85
14	65-69	8.658	10.880	12.157	13.317	13.420	11,93
15	70-74	4.449	5.800	5.962	6.511	6.561	10,78
16	75+	4.661	7.436	6.891	7.136	7.191	14,13
17	Jumlah Penduduk	742.049	748.956	754.629	810.299	816.566	2,46
18	Jumlah Penduduk <15 tahun (Belum Produktif)	203.543	199.682	208.281	229.947	231.725	3,40
19	Jumlah Penduduk 15-64 Tahun (Umur Produktif)	520.738	525.158	521.338	553.389	584.841	2,99
20	Jumlah Penduduk 65 Tahun Ke atas (Umur Tidak Produktif)	17.768	24.116	25.010	26.963	27.172	12,00
21	Rasio Ketergantungan (%)	42,50	42,62	44,75	46,42	44,27	1,09

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2021

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komposisi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis untuk mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan. Analisis keuangan daerah ini dilakukan analisis melalui kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi keuangan di masa depan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa merencanakan program dan kebijakan yang akan di lakukan di suatu daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sangat ditentukan oleh kapasitas daerah dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*). Sumber-sumber pembiayaan daerah, secara umum berasal dari: (1) investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (2) investasi pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota; dan (3) investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 tahun 2014 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah mengandung prinsip dasar yakni: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku serta memegang prinsip: (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

(2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Untuk mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana pembangunan lima tahunan melalui RPJMD dan RPD 2023-2026, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk masyarakat umum. Arah gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah menyangkut kepada, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah. Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah akan meningkatkan kemampuan dalam membiayai belanja daerah. Disamping itu penentuan jenis belanja dan alokasinya secara tepat sesuai dengan kondisi daerah akan dapat menentukan keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Berkenaan dengan itu pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan menurut

undang undang, yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan melalui pendekatan yang berfokus kepada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat (*money follow program*) dengan perencanaan yang *holistik* (menyeluruh), *tematik* (terfokus), *terintegrasi* (terpadu), dan *spasial* (lokasi yang jelas).

Terkait dengan hal tersebut dalam pelaksanaan terutama menyangkut pada keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dilihat dari realisasi target pendapatan, realisasi target belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah dilihat dari perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah yang terdiri dari *rasio likuiditas*, *rasio solvabilitas* dan *rasio aktivitas*.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar

3.1.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sumber sumber pendapatan daerah terdiri dari

- (1) Pendapatan Asli Daerah; yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer; yang terdiri dari
 - a. Transfer pemerintah pusat; yang terdiri dari, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan; dan dana desa
 - b. Transfer antara daerah yang terdiri dari, pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; yang terdiri dari hibah, dana darurat, lain lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan merupakan sumber utama pembiayaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dialokasikan dalam belanja daerah. Semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah maka semakin besar peluang daerah untuk bisa membiayai belanja daerah. Untuk melihat kinerja pendapatan daerah Kabupaten Kampar dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan pendapatan.

Data pada Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan pendapatan Kabupaten Kampar selama kurun waktu 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,95%. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,44%. Sedangkan pertumbuhan pendapatan pajak daerah sebesar 5,67% dan pendapatan retribusi daerah tumbuh sebesar 16,20%. Manakala komponen Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -7,48% dan -6,46%. Penurunan PAD ini berakibat pada penurunan kemandirian keuangan daerah selama periode tahun 2017-2021. Rata – rata pertumbuhan realisasi pendapatan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	URAIAN	CATATAN	Realisasi						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.	2.147.366.658.736,76	2.220.571.511.817,91	2.327.551.167.364,67	2.740.386.717.079,62	2.364.677.158.217,73	2.437.859.087.698	2,95
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.	162.363.324.671,18	316.432.572.651,91	229.382.839.237,67	262.882.861.942,62	246.053.581.866,15	277.420.117.554	-6,44
4	Hasil Pajak Daerah	5.1.1.1.	66.719.699.407,02	98.335.386.350,80	114.532.289.252,95	125.596.329.592,00	114.156.064.087,00	146.101.688.702	5,67
5	Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.2.	9.966.313.604,73	8.790.847.528,00	14.488.684.166,70	9.061.327.594,00	10.985.538.155,50	12.793.411.760	16,20
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3.	20.611.304.329,00	30.123.709.254,00	31.687.665.925,00	30.345.896.566,00	23.246.742.484,00	27.916.502.794	-7,48
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4.	65.066.007.330,43	179.182.629.519,11	68.674.199.893,02	97.879.308.190,62	97.665.237.139,65	90.608.514.298	-6,46
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	1.985.003.334.065,58	1.887.481.589.166,00	1.994.236.613.127,00	2.360.783.215.137,00	2.001.276.349.475,58	2.100.668.840.144	2,94
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.2.1.	1.571.302.634.040,00	1.525.027.088.899,00	1.676.335.496.809,00	1.957.011.119.683,00	1.629.589.954.092,00	1.928.631.672.211	3,31
11	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1.	255.126.583.386,00	232.036.085.819,00	222.848.856.511,00	205.212.510.570,00	204.179.514.316,00		-4,13
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.2.1.2.	287.883.663.156,00	264.186.431.811,00	373.824.111.279,00	526.830.735.281,00	300.507.257.774,00		13,16
13	Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.3.	721.681.861.000,00	728.616.246.000,00	774.370.036.000,00	821.233.336.000,00	765.107.999.000,00		1,83
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.4.	306.610.526.498,00	300.188.325.269,00	305.292.493.019,00	403.734.537.832,00	359.795.183.002,00		7,69
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.1.2.2.	151.159.631.000,00	192.408.523.000,00	184.378.856.000,00	245.996.698.200,00	228.444.100.800,00		7,37
17	Dana Otonomi Khusus	5.1.2.2.1.	0	0	0	0	15.839.028.000,00		
18	Dana Penyesuaian	5.1.2.2.2.	151.159.631.000,00	192.408.523.000,00	184.378.856.000,00	245.996.698.200,00	212.605.072.800,00		5,22
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.2.3.	262.541.069.025,58	170.045.977.267,00	133.522.260.318,00	157.775.397.254,00	143.242.294.583,58	172.037.167.933	-4,18
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.3.1.	111.537.964.072,58	113.539.475.361,00	110.505.614.318,00	133.355.397.254,00	117.875.294.583,58		2,13
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.2.3.2.	151.003.104.953,00	56.506.501.906,00	23.016.646.000,00	24.420.000.000,00	25.367.000.000,00		-16,43
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3.	0	16.657.350.000,00	103.931.715.000,00	116.720.640.000,00	117.347.226.876,00	59.770.130.000	178,93
25	Pendapatan Hibah	5.1.3.1.	0	16.657.350.000,00	103.931.715.000,00	116.720.640.000,00	117.347.226.876,00	1.094.000.000	178,93
26	Pendapatan Dana Darurat	5.1.3.2.	0	0	0	0	0		
27	Pendapatan Lainnya	5.1.3.3.	0	0	0	0	0	58.676.130.000	

Sumber: BAPENDA dan BPKAD Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dilihat dari sisi kontribusi terutama Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil yang hanya memberikan kontribusi sebesar rata-rata 11,03% dan mengalami penurunan dari 14,25% tahun 2017 turun menjadi hanya 10,41% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Kampar masih berada dalam kategori rendah atau kurang mampu. Keadaan ini patut untuk menjadi perhatian mengingat komponen pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dikelola langsung penerimaannya oleh Pemerintah Daerah yang menjadi indikator kemandirian daerah.

Dilihat dari pendapatan transfer selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar 2,94%, dengan masing-masing komponen pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tumbuh sebesar 3,31%, transfer pemerintahan pusat lainnya yang tumbuh rata-rata sebesar 7,37%.

Sedangkan pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -4,18%. Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya penurunan dari komponen Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar -16,43%, kecuali pendapatan bagi hasil pajak yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,13%.

Selain dari itu, secara keseluruhan kontribusi pertumbuhan dari dana transfer pemerintah pusat dan dana perimbangan yang ini berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta transfer pemerintah pusat lainnya yang berasal dana otonomi khusus dan dana penyesuaian rata-rata sebesar 92,61%. Besarnya kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kampar adalah transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan menjadi dilema bagi Kabupaten Kampar disatu sisi pendaparan transfer pemerintah pusat setiap tahun hanya mengalami pertumbuhan yang sangat rendah, disisi lain persentase PAD terhadap pendapatan masih sangat rendah. Oleh sebab itu menggali potensi dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya terutama pendapatan asli daerah patut menjadi perhatian

kedepannya terutama sector ekonomi yang banyak digeluti oleh masyarakat terutama sub sector perkebunan.

3.1.1.2 Belanja

Belanja daerah pada dasarnya adalah sebagai pelaksanaan kewajiban daerah yang disusun dalam rangka untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang sub urusan, urusan kewilayahan dan urusan pemerintahan umum. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan mandatori yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kampar berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran, dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja. Setiap perencanaan dan penganggaran pada program dan kegiatan dikaitkan dengan hasil dan keluaran yang diharapkan dengan mendahulukan program dan kegiatan yang menjadi pendukung prioritas daerah. Penetapan target capaian kinerja setiap belanja, dalam program dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dengan memegang prinsip efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Struktur belanja daerah sesuai dengan PP No. 12 tahun 2019, dimana Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga secara umum tumbuh sebesar 4,47% per tahun selama tahun 2017-2021. Pada belanja operasi selama kurun waktu tersebut mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,20% per tahun. Penurunan belanja operasi ini disebabkan menurunnya belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,82% per tahun. Penurunan belanja pegawai disebabkan adanya kebijakan pengurangan tenaga honor dan honorarium pada masing-masing kegiatan.

Namun demikian terjadi peningkatan belanja barang dan jasa sebesar 12,31% per tahun. Sementara penurunan pada belanja hibah dalam rangka untuk mengkonsentrasi kegiatan pada belanja lainnya yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Belanja hibah dengan rata-rata pertumbuhan penurunan sebesar -41,15% per tahun. Penurunan pada belanja hibah dalam rangka untuk mengkonsentrasi kegiatan pada belanja lainnya yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Selanjutnya perkembangan komponen belanja modal dalam kurun waktu yang sama mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 15,54% per tahun. Pertumbuhan tertinggi belanja modal berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 623,74% per tahun. Dari enam komponen belanja modal hanya belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami pertumbuhan negative sebesar 18,13% per tahun.

Sementara itu komponen belanja tak terduga hanya terjadi pada tahun tumbuh sebesar 1.683,99% yang semula hanya Rp. 1,23 milyar tahun 2017 kemudian naik menjadi Rp. 11,79 milyar pada tahun 2020 akibat peningkatan belanja kesehatan.

Belanja transfer yang terdiri dari komponen yang berasal dari belanja transfer nagi hasil ke desa kepada desa. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mempercepat pembangunan desa mengalami pertumbuhan sebesar 37,94% per tahun yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa sebesar 41,93% dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa dengan pertumbuhan sebesar 16,80% selama periode 2017-2021. Selanjutnya komponen belanja transfer dari bantuan keuangan dalam kurun waktu yang sama mengalami pertumbuhan 9,32% per tahun, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trendnya cukup fluktuatif. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017-2021, secara lebih rinci disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021 (Rp. Juta) (PP No. 12 tahun 2019)

No	URAIAN	CATATAN	Realisasi						Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	BELANJA	5.2.	2.360.507.515.750,30	2.232.826.396.846,42	2.168.293.382.294,82	2.714.727.108.612,92	2.497.866.793.719,31	2.432.511.200.684	4,77
2	BELANJA OPERASI	5.2.1.	1.748.832.845.258,30	1.586.635.068.229,42	1.519.345.176.787,08	1.731.255.069.162,92	1.677.667.836.396,33	1.727.407.841.851	2,20
3	Belanja Pegawai	5.2.1.1.	1.210.874.808.774,00	997.271.235.658,72	989.028.383.687,25	996.091.496.888,00	942.843.640.945,00	980.261.149.266	-1,82
4	Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.2.	425.130.698.001,30	531.010.223.024,70	489.328.198.375,83	702.036.847.574,92	711.138.619.155,33	654.294.744.500	12,31
5	Belanja Bunga	5.2.1.3.	0	0	0	0	0	74.277.448.085	
6	Belanja Subsidi	5.2.1.4.	2.723.332.212,00	2.668.379.760,00	1.948.451.774,00	1.327.974.700,00	0	18.574.500.000	-52,94
7	Belanja Hibah	5.2.1.5.	101.213.506.271,00	44.902.149.786,00	25.412.352.950,00	24.963.350.000,00	23.685.576.296,00		
8	Belanja Bantuan Sosial	5.2.1.6.	8.890.500.000,00	10.783.080.000,00	13.627.790.000,00	6.835.400.000,00	0		-41,15
9	BELANJA MODAL	5.2.2.	377.690.961.517,00	352.062.836.537,00	315.557.219.865,74	578.989.100.174,00	425.556.346.479,98	348.643.374.842	15,54
10	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.2.2.1	0	2.460.807.730,00	4.140.521.471,00	10.635.118.700,00	0	1.125.952.960	41,70
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.	37.706.199.580,00	82.001.435.800,00	46.927.498.748,00	87.701.233.063,00	1.314.306.030,00	139.048.356.088	-18,13
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.2.3.	103.471.299.373,00	54.573.122.658,00	75.630.571.003,74	138.827.490.154,00	113.508.592.543,79	51.549.311.363	34,64
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.2.2.4.	236.282.046.064,00	186.253.508.315,00	154.721.702.453,00	306.551.568.973,00	77.581.973.550,66	145.332.172.309	2,17
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5.	231.416.500,00	26.773.962.034,00	2.182.440.000,00	35.273.689.284,00	192.880.990.351,53	11.587.582.122	623,74
15	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.2.6.	0	0	31.954.486.190,00	0	40.270.484.004,00	-	26,02
16	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.3.	197.275.000,00	784.548.080,00	1.233.285.648,00	227.925.056,00	11.798.042.545,00	3.392.283.032	1683,99
17	Belanja Tidak Terduga	5.2.3.1.	197.275.000,00	784.548.080,00	1.233.285.648,00	227.925.056,00	11.798.042.545,00	3.392.283.032	1683,99
18	TRANSFER	5. .4.	233.786.433.975,00	293.343.944.000,00	332.157.699.994,00	404.255.014.220,00	382.844.568.298,00	353.067.700.959	9,88
19	TRANSFER/ BAGIL HASIL KE DESA	5.2.4.1.	2.894.388.550,00	5.292.225.000,00	9.754.817.500,00	11.265.841.500,00	12.844.826.571,00	13.935.415.056	37,94
20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.2.4.1.1.	2.479.957.500,00	4.365.899.000,00	8.193.554.500,00	10.112.409.000,00	11.599.395.900,00		41,93
21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.2.4.1.2.	414.431.050,00	926.326.000,00	1.561.263.000,00	1.153.432.500,00	1.245.430.671,00		16,80
22	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	5.2.4.2.	230.892.045.425,00	288.051.719.000,00	322.402.882.494,00	392.989.172.720,00	369.999.741.727,00	339.132.285.903	9,32
23	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.2.4.2.1.	0	0	0	391.655.071.770,00	369.999.741.727,00	339.132.285.903	-5,53
24	Bantuan Keuangan Lainnya	5.2.4.2.2.	230.892.045.425,00	288.051.719.000,00	322.402.882.494,00	1.334.100.950,00	0		-62,55
25	SURPLUS/DEFISI	5.	-213.140.857.013,54	-12.254.885.028,51	159.257.785.069,85	25.659.608.466,70	-133.189.635.501,58	5.347.887.014	-700,83

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar, Tahun 2021

3.1.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Jika dilihat komponen sumber-sumber pembiayaan antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Selama kurun waktu tahun anggaran 2017-2021 sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Kampar yang berasal dari SiLPA kecuali pada tahun 2020, malah justru mengalami deficit sebesar 133,19 milyar. Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA menunjukkan terjadinya peningkatan dengan rata-rata sebesar 163,03 dari tahun 2017-2019. Namun tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pembiayaan ini disebabkan oleh terjadinya deficit sebesar 133,19 milyar.

SiLPA adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman apabila digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Penggunaan SiLPA dalam pembiayaan pembangunan apabila APBD mengalami defisit. Maka defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang atau penerimaan pembiayaan lainnya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017–2021 (PP No. 12 tahun 2019)

(dalam Rupiah)

Komponen	Pembiayaan					Rata - Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
PEMBIAYAAN DAERAH	62.613.231.431,77	50.117.396.403,26	205.272.503.853,47	0,00	96.243.047.178	63,87
						63,87
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	62.613.231.431,77	50.117.396.403,26	206.272.503.853,47	0,00	96.243.047.178	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	62.613.231.431,77	50.117.396.403,26	206.272.503.853,47	0,00	96.243.047.178	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-100,00
						-100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	1.000.000.000,00	0	101.590.934.192	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	1.000.000.000,00	0	0	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0,00
SILPA	50.358.346.403,26	209.375.181.473,11	230.932.112.320,17	133.189.635.501,58	101.590.934.192	163,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah salah satu komponen laporan keuangan daerah yang memberikan informasi tentang posisi keuangan daerah diantaranya berupa asset daerah, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca diterbitkan.

Disamping itu neraca juga sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, karena dapat memberikan informasi kepada manajemen pemerintah daerah mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan daerah. Neraca dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif dan dapat mendorong terciptakannya tata kelola pemerintahan yang baik (*good gvernance*).

Dalam Neraca Kabupaten Kampar kurun waktu tahun 2017-2021, komponen asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,78%. Asset yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar adalah asset lainnya yang tumbuh rata-rata sebesar 363,92%. Penyumbang terbesar meningkatnya jumlah asset lainnya ini berasal dari aset lain-lain yang tumbuh dalam kurun waktu sama rata-rata sebesar 547,60%.

Berbeda halnya dengan asset lainnya, aset lancar mengalami pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 1,37%, pada Investasi Jangka Panjang justru mengalami penurunan walaupun dengan rata-rata penurunannya sebesar 1,46%. Penurunan investasi jangka Panjang disumbangkan oleh semua sub komponen penyertaan modal pemerintah dan investasi non permanen lainnya

Kemudian asset tetap yang secara nominal nilainya paling besar dibandingkan dengan asset yang lainnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,00%. Asset tetap dipengaruhi oleh belanja modal, semakin besar belanja modal yang dianggarkan dan direalisasikan maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Peningkatan nilai asset ini disebabkan karena peningkatan pada asset tetap yang dominan pada: tanah, peralatan dan mesin dan kosntruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya kewajiban daerah yang tercatat dalam Neraca Daerah selama kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi, rata-rata turun sebesar 465,71%. Peningkatan jumlah kewajiban didominasi oleh utang belanja.

Sementara itu Ekuitas dana Kabupaten Kampar mengalami peingkatan rata-rata sebesar 1,59% selama kurun waktu 2017-2021. Peningkatan ekuitas dana ini menjadi hal yang positif karena meningkatkan kemampuan daerah Kabupaten Kampar untuk mendanai sendiri kegiatan pembangunan daerah. Secara lebih rinci neraca daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Neraca Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	CAT	Tahun					Pertumbuhan /Tahun (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	A S E T	7.	4.562.133.310.696,04	4.325.647.767.820,60	4.085.230.964.652,48	4.585.418.749.412,72	4.554.156.297.698,96	2,00
2								
3	ASET LANCAR	7.1.	122.053.480.735,40	104.702.756.421,81	278.495.844.447,92	468.413.201.542,17	317.861.867.266,21	67,35
4	Kas di Kas Daerah	7.1.1.	47.559.517.412,11	43.187.879.256,84	197.899.216.607,42	201.193.167.524,16	84.458.766.120,98	100,62
5	Kas di Bendaharawan Penerima	7.1.2.	0,00	0,00	0,00	22.021.300,00	18.819.500,00	-14,54
6	Kas di Bendahara pengeluaran	7.1.3.	879.792.237,00	650.896.366,00	595.874.114,00	766.515.880,00	980.638.124,00	16,04
7	Kas di Bendaharawan BLUD	7.1.4.	3.999.187.264,96	665.811.872,72	798.012.583,35	9.371.191.119,71	6.775.099.700,91	355,49
8	Kas Lainnya di Bendaharawan Pengeluaran	7.1.5.	55.098.580,50	40.477.567,00	50.704.827,00	36.610.591,60	416.815.487,00	345,33
9	Kas di Bendahara JKN	7.1.6.	10.211.176.518,00	5.612.808.907,70	6.928.002.547,70	7.443.871.380,70	3.519.376.719,70	-7,28
10	Kas di Bendahara Bos	7.1.7.	240.950.000,00	240.950.000,00	4.636.830,00	12.099.032.824,00	490.347.012,00	86879,75
11	Investasi dalam Deposito	7.1.8.	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Piutang Pajak	7.1.9.1.	125.858.318.467,00	135.485.213.466,00	147.167.462.883,00	165.283.580.673,00	177.745.741.615,00	9,49
13	Piutang Retribusi	7.1.9.2.	150.000.000,00	497.500.000,00	708.450.000,00	921.700.000,00	1.242.060.000,00	35,75
14	Piutang Lain lain PAD Yang Sah	7.1.9.3.	0,00	8.485.622.016,00	14.965.566.900,00	9.458.979.600,00	9.883.212.551,00	14,68
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	7.1.9.4.	0,00	0,00	0,00	147.286.785.964,00	132.658.297.122,00	
16	Piutang Transfer Pemda Lainnya	7.1.9.5.	460.423.371,15	309.559.256,15	4.190.760.758,54	22.043.634.386,15	9.778.008.067,57	541,38
17	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.1.9.6.	923.169.178,04	872.856.775,50	3.970.034.395,14	0,00	2.065.421.333,00	
18	Penyisihan Piutang Pajak	7.1.10.1.	(82.179.532.775,69)	(102.408.866.395,17)	(111.638.343.298,47)	(124.826.946.764,60)	(135.628.211.943,76)	9,83
19	Penyisihan Piutang Retribusi	7.1.10.2.	(5.500.000,00)	(116.000.000,00)	(195.804.750,00)	(345.911.250,00)	(527.095.750,00)	65,95
20	Penyisihan Piutang Bunga	7.1.10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	7.1.10.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian	7.1.10.5.	(546.024.815,23)	(711.946.372,14)	(818.134.577,77)	-		
23	Persediaan	7.1.11.	14.446.905.297,56	11.889.993.705,20	13.869.404.628,01	17.658.968.313,45	23.984.571.606,81	26,60
24	Belanja Dibayar Dimuka	7.1.12.	0,00	0,00	0,00	0,00		

25	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.1.13.	233.657.851.987,11	218.597.607.243,21	218.965.160.468,55	210.090.825.504,69	180.071.774.762,57	-6,06
26	INVESTASI JANGKA NON PERMANEN	7.1.13.1.	48.025.182.107,55	32.829.537.463,22	33.197.090.688,56	13.787.322.464,21	10.568.401.482,51	-26,90
27	Dana Bergulir	7.1.13.1.1.	168.750.000.000,00	168.750.000.000,00	168.750.000.000,00	168.750.000.000,00	169.150.000.000,00	0,08
28	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	7.1.13.1.2.	(120.724.817.892,45)	(135.920.462.536,78)	(135.552.909.311,44)	(154.962.677.535,79)	(158.581.598.517,49)	5,46
29	INVESTASI PERMANEN	7.1.13.2.	185.632.669.879,56	185.768.069.779,99	185.768.069.779,99	196.303.503.040,48	169.503.373.280,06	-2,66
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.1.13.2.1.	185.632.669.879,56	185.768.069.779,99	185.768.069.779,99	196.303.503.040,48	168.703.373.280,06	-2,80
31	Investasi Permanen Lainnya	7.1.13.2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	
32	ASET TETAP	7.1.14.	4.202.016.942.973,53	3.740.179.404.588,87	3.583.591.552.527,01	3.890.868.493.363,21	4.013.352.436.918,26	2,51
33	Tanah	7.1.14.1.	317.591.846.327,00	280.606.090.619,00	412.925.112.909,44	437.041.634.809,44	489.764.967.564,60	21,69
34	Peralatan dan Mesin	7.1.14.2.	634.292.469.723,14	689.982.318.483,14	740.239.419.957,14	837.302.180.312,14	894.837.885.136,29	9,09
35	Gedung dan Bangunan	7.1.14.3.	1.688.684.915.027,60	1.655.951.337.757,89	1.714.800.650.805,02	1.804.245.793.579,02	1.831.692.609.816,02	3,43
36	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.1.14.4.	5.126.691.213.249,51	5.192.096.297.078,80	5.330.605.595.677,80	5.657.710.859.252,80	5.450.386.533.337,49	1,71
37	Aset Tetap Lainnya	7.1.14.5.	40.696.861.511,34	59.730.657.814,34	88.838.950.919,34	121.471.871.671,34	137.295.245.498,34	32,83
38	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.1.14.6.	35.899.370.155,29	12.370.337.693,00	44.999.693.178,20	92.460.508.113,00	93.141.440.989,66	123,33
39	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.1.14.7.	(3.641.839.733.020,35)	(4.150.557.634.857,30)	(4.748.817.870.919,92)	(5.059.364.354.374,54)	(4.883.766.245.424,14)	5,83
40	DANA CADANGAN	7.1.15.	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Dana Cadangan	7.1.15.1.	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	ASET LAINNYA	7.1.16.	4.405.035.000,00	262.167.999.566,71	4.178.407.209,00	16.046.229.002,65	42.870.218.751,92	117,60
43	Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.16.1.	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.1.16.2.	0,00	0,00	0,00	3.970.034.395,14	3.970.034.395,14	0,00
45	Kerjasama Pemamfaatan	7.1.16.3.	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	0,00
46	Aset Lain-lain	7.1.16.4.	2.158.535.000,00	259.921.499.566,71	1.931.907.209,00	9.829.694.607,51	36.380.885.015,78	193,22
47	Aset Tak Berwujud	7.1.16.5.			0,00	0,00	272.799.341,00	0,00
48	KEWAJIBAN	7.1.17.	75.774.286.202,04	8.486.989.997,32	20.300.587.977,31	25.553.126.768,79	35.273.626.817,32	67,70
49	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.1.17.1.	75.774.286.202,04	8.486.989.997,32	20.300.587.977,31	25.553.126.768,79	35.273.626.817,32	67,70
50	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	7.1.17.1.2.	23.770.744,00	39.908.970,00	3.943.656,00	298.300,00	416.815.487,00	46482,58
51	Utang Bunga	7.1.17.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	390.159.772,00	0,00
52	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.1.17.1.4.	0,00	0,00	0,00	333.125.387,08		
53	Utang Belanja	7.1.17.1.5.	75.750.515.458,04	8.447.081.027,32	20.296.644.321,31	25.219.703.081,71	34.466.651.558,32	67,07
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.1.17.1.6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.1.17.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Utang Dalam Negeri	7.1.17.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Utang Jangka Panjang Lainnya	7.1.17.2.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	EKUITAS	7.1.18.	4.486.359.024.494,00	4.317.160.777.823,28	4.064.930.376.675,17	4.559.865.622.643,92	4.518.882.670.881,64	1,81
59	JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS	8	4.562.133.310.696,04	4.325.647.767.820,60	4.085.230.964.652,48	4.585.418.749.412,72	4.554.156.297.698,96	2,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar Tahun 2021

Informasi yang diperoleh dari Neraca Daerah, dapat dijadikan bahan untuk melakukan analisis faktor fundamental keuangan Pemerintah Daerah, melalui analisis rasio-rasio untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Rasio keuangan dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu: (1) rasio likuiditas, yaitu rasio yang menyatakan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek; (2) rasio aktivitas, menyatakan kemampuan daerah dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya; dan (3) rasio solvabilitas (leverage), menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka Panjang. Adapun rasio-rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun
Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A.	Rasio Likuiditas						
1.	Rasio Lancar (Current Ratio)	1,61	12,34	13,72	18,33	9,01	535,74
2.	Rasio Cepat (Quick Ratio)	1,42	10,94	13,04	17,64	8,33	595,46
B.	Rasio Solvabilitas						
1.	Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset	1,66	0,20	0,50	0,56	0,77	-36,67
2.	Rasio Hutang Terhadap Modal	1,69	0,20	0,50	0,56	0,78	-36,67
C.	Rasio Aktivitas						
1.	Rata-Rata Umur Piutang (Hari)	12,15	17,08	18,51	15,21	15,11	7,62

Sumber: Data Olahan, 2021

Mencermati dari data Tabel 3.5 di atas terlihat bahwa bahwa rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan trend yang meningkat atau semakin baik. Dapat dilihat dari *current rasio* dari 1,61 pada tahun 2016 selanjutnya mengalami perkembangan fluktuatif hingga menjadi sebesar 9,01 pada tahun 2020. Besaran *current ratio* 9,10 pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa dari total kewajiban sebesar Rp. 35.273.626.817,32 akan dijamin oleh asset lancar sebesar Rp. 317.861.867.266,21. Tidak jauh berbeda dengan *current ratio*, *quick ratio* juga menunjukkan trend yang fluktuatif pada tahun 2016 sebesar

1,42 pada tahun 2020 sebesar 8,33. Besaran rasio 8,33 berarti bahwa dari total kewajiban sebesar Rp. 35.273.626.817,32 dijamin oleh aset lancar senilai Rp. 293.877.295.659,40 aset lancar dikurangi persediaan. Kedua rasio likuiditas tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Kabupaten Kampar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Selanjutnya rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya selama kurun waktu 2016-2020 juga menunjukkan kecenderungan yang turun. Hal ini dilihat rasio solvabilitas yang ditunjukkan dari rasio total hutang terhadap total asset dari 1,66 pada tahun 2016 turun menjadi 0,77 pada tahun 2020. Rasio Solvabilitas lainnya yaitu rasio hutang terhadap total modal (ekuitas) juga mengalami penurunan dengan nilai yang sama dengan rasio hutang dengan total asset. Dari informasi rasio solvabilitas yang diuraikan diatas, memberikan gambaran bahwa kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kampar sangat baik. Keadaan ini memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar apabila berkeinginan membuat kebijakan peminjaman uang dalam rangka mempercepat proses pembangunan .

Dilihat dari rasio aktivitas rata-rata umur piutang menunjukkan kinerja yang sangat berfluktuatif. Rata-rata umur piutang pada tahun 2016 selama 12,15 hari kemudian meningkat menjadi 15,11 hari pada tahun 2020, rasio terbaik terjadi pada tahun 2016 hanya selama 12,15 hari. Kondisi ini menggambarkan bahwa piutang pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga dimana penagihan semakin lama sehingga perputran piutang menjadi uang kas juga semakin lambat.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besarnya tercermin dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, dan berbasis berkinerja untuk mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat. Keuangan daerah diharapkan mampu dikelola secara efisien, mengalokasikan sumberdaya pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. Berkenaan dengan itu maka perlu dilakukan perencanaan secara cermat dengan proses identifikasi dan penyerapan aspirasi untuk menjamin terwujudnya efektivitas dan efisien dalam penggunaan anggaran belanja daerah.

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah adalah bahwa: “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga arah kebijakan keuangan daerah tetap harus berpedoman kepada rencana pembangunan dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi. Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Kampar juga diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memberikan fasilitasi kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas seperti sektor pertanian, perikanan, industri, Usaha kecil dan menengah serta pariwisata.

Dalam kebijakan penganggaran di Kabupaten Kampar juga memperhatikan pada upaya untuk memecahkan masalah penting dan mendesak terutama pada sektor yang memiliki daya ungkit pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, guna dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran dengan tetap mendahulukan pemenuhan pada urusan pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Proporsi masing-masing jenis belanja tersebut dapat merupakan kebijakan dalam alokasi anggaran.

Data Tabel 3.6 memperlihatkan bahwa proporsi belanja daerah pada masing-masing komponen belanja tahun 2016-2021 sebagian besar diperuntukkan pada belanja operasi yakni rata-rata sebesar 69,53% dari total belanja. Sementara belanja modal selama kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 14,11%. Sedangkankan proporsi belanja transfer rata-rata sebesar 13,85% dari total belanja. Dilihat dari tingkat kecendrungan selama 3 tahun terakhir belanja operasi memiliki trend yang berfluktuasi dengan kecenderungan proporsi yang mengalami penurunan. Belanja modal juga berfluktuasi namun dengan kecendrungan meningkat di tahun akhir dan belanja transfer juga berfluktuasi dengan kecendrungan menurun proporsinya pada tahun terakhir.

Pada Tabel 3.6 memperlihatkan bahwa realisasi belanja daerah selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 4,77% pertahun. Peningkatan belanja daerah terutama disebabkan oleh adanya peningkatan belanja modal dengan pertumbuhan sebesar 15,54% per tahun atau naik dari Rp. 377,690 milyar pada tahun 2016 menjadi 425,556 milyar pada tahun 2020. Namun demikian dilihat dari proporsi belanja modal mengalami penurunan tahun 2021 menjadi Rp.348,634 milyar. Adapun realisasi Belanja Daerah selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017-2021 secara nominal dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	URAIAN	CATATAN	Realisasi												Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
1	BELANJA	5.2.	2.360.507.515.750,30		2.232.826.396.846,42		2.168.293.382.294,82		2.714.727.108.612,92		2.497.866.793.719,31		2.432.511.200.684		4,77
2	BELANJA OPERASI	5.2.1.	1.748.832.845.258,30	74,09	1.586.635.068.229,42	71,06	1.519.345.176.787,08	70,07	1.731.255.069.162,92	63,77	1.677.667.836.396,33	67,16	1.727.407.841.851	71,01	2,20
3	Belanja Pegawai	5.2.1.1.	1.210.874.808.774,00	69,24	997.271.235.658,72	62,85	989.028.383.687,25	65,10	996.091.496.888,00	57,54	942.843.640.945,00	56,20	980.261.149.266	56,75	-1,82
4	Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.2.	425.130.698.001,30	24,31	531.010.223.024,70	33,47	489.328.198.375,83	32,21	702.036.847.574,92	40,55	711.138.619.155,33	42,39	654.294.744.500	37,88	12,31
5	Belanja Bunga	5.2.1.3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	74.277.448.085	4,30	
6	Belanja Subsidi	5.2.1.4.	2.723.332.212,00	0,16	2.668.379.760,00	0,17	1.948.451.774,00	0,13	1.327.974.700,00	0,08	0	0,00	18.574.500.000	1,08	-52,94
7	Belanja Hibah	5.2.1.5.	101.213.506.271,00	5,79	44.902.149.786,00	2,83	25.412.352.950,00	1,67	24.963.350.000,00	1,44	23.685.576.296,00	1,41		0,00	
8	Belanja Bantuan Sosial	5.2.1.6.	8.890.500.000,00	0,51	10.783.080.000,00	0,68	13.627.790.000,00	0,90	6.835.400.000,00	0,39	0	0,00		0,00	-41,15
9	BELANJA MODAL	5.2.2.	377.690.961.517,00	16,00	352.062.836.537,00	15,77	315.557.219.865,74	14,55	578.989.100.174,00	21,33	425.556.346.479,98	17,04	348.643.374.842		15,54
10	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.2.2.1.	0	-	2.460.807.730,00	0,70	4.140.521.471,00	1,31	10.635.118.700,00	1,84	0	-	1.125.952.960	0,32	41,70
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.	37.706.199.580,00	9,98	82.001.435.800,00	23,29	46.927.498.748,00	14,87	87.701.233.063,00	15,15	1.314.306.030,00	0,31	139.048.356.088	39,88	-18,13
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.2.3.	103.471.299.373,00	27,40	54.573.122.658,00	15,50	75.630.571.003,74	23,97	138.827.490.154,00	23,98	113.508.592.543,79	26,67	51.549.311.363	14,79	34,64
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.2.2.4.	236.282.046.064,00	62,56	186.253.508.315,00	52,90	154.721.702.453,00	49,03	306.551.568.973,00	52,95	77.581.973.550,66	18,23	145.332.172.309	41,69	2,17
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5.	231.416.500,00	0,06	26.773.962.034,00	7,60	2.182.440.000,00	0,69	35.273.689.284,00	6,09	192.880.990.351,53	45,32	11.587.582.122	3,32	623,74
15	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.2.6.	0	-	0	-	31.954.486.190,00	10,13	0	-	40.270.484.004,00	9,46	-	-	26,02
16	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.3.	197.275.000,00	0,01	784.548.080,00	0,04	1.233.285.648,00	0,06	227.925.056,00	0,01	11.798.042.545,00	0,47	3.392.283.032	0,14	1683,99
17	Belanja Tidak Terduga	5.2.3.1.	197.275.000,00	100,00	784.548.080,00	100,00	1.233.285.648,00	100,00	227.925.056,00	100,00	11.798.042.545,00	100,00	3.392.283.032	100,00	1683,99
18	TRANSFER	5. 4.	233.786.433.975,00	9,90	293.343.944.000,00	13,14	332.157.699.994,00	15,32	404.255.014.220,00	14,89	382.844.568.298,00	15,33	353.067.700.959	14,51	9,88
19	TRANSFER/ BAGIL HASIL KE DESA	5.2.4.1.	2.894.388.550,00	1,24	5.292.225.000,00	1,80	9.754.817.500,00	2,94	11.265.841.500,00	2,79	12.844.826.571,00	3,36	13.935.415.056	3,95	37,94
20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.2.4.1.1.	2.479.957.500,00	85,68	4.365.899.000,00	82,50	8.193.554.500,00	83,99	10.112.409.000,00	89,76	11.599.395.900,00	90,30		0,00	41,93
21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.2.4.1.2.	414.431.050,00	14,32	926.326.000,00	17,50	1.561.263.000,00	16,01	1.153.432.500,00	10,24	1.245.430.671,00	9,70		0,00	16,80
22	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	5.2.4.2.	230.892.045.425,00	98,76	288.051.719.000,00	98,20	322.402.882.494,00	97,06	392.989.172.720,00	97,21	369.999.741.727,00	96,64	339.132.285.903	96,05	9,32
23	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.2.4.2.1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	391.655.071.770,00	99,66	369.999.741.727,00	100,00	339.132.285.903	100,00	-5,53
24	Bantuan Keuangan Lainnya	5.2.4.2.2.	230.892.045.425,00	100,00	288.051.719.000,00	100,00	322.402.882.494,00	100,00	1.334.100.950,00	0,34	0	0,00		0,00	-62,55
25	SURPLUS/DEFISI	5.	-213.140.857.013,54	-9,03	-12.254.885.028,51	-0,55	159.257.785.069,85	7,34	25.659.608.466,70	0,95	-133.189.635.501,58	-5,33	5.347.887.014	0,22	-700,83

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar Tahun 2021

3.2.1.2 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Belanja aparatur adalah belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Belanja kebutuhan aparatur masuk dalam 2 kategori belanja baik itu belanja Operasi maupun belanja modal. Pemenuhan kebutuhan ini cukup penting untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Data pada Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan kecenderungan penurunan. Penurunan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur ini sejalan dengan menurunannya kemampuan keuangan daerah disisi lain terjadinya penurunan belanja lainnya dalam komponen belanja operasi.

Dilihat dari proporsinya pemenuhan belanja aparatur pada belanja operasi selama selama 5 tahun dengan rata-rata sebesar 41,60% atau turun dari 44,66% pada tahun 2017 menjadi 40,30% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan -0,49% per tahun. Komponen dengan proporsi terbesar dalam pemenuhan belanja aparatur pada belanja operasi adalah gaji dan tunjangan pegawai sebesar 40,30% selama lima tahun. Sedangkan pemenuhan belanja aparatur pada belanja langsung selama 5 tahun dengan rata-rata sebesar 38,40%, dan proporsinya mengalami penurunan dari 45,83% pada tahun 2015 menjadi 40,40% pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar -0,44% per tahun.

Dengan demikian belanja operasi merupakan proporsi yang terbesar dalam belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Keadaan ini dapat dipahami karena belanja pemenuhan aparatur yang terbesar terdapat pada komponen gaji dan tunjangan. Secara lebih rinci belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total
Belanja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Belanja Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	%
		(a)	(b)	(c)
1	2017	997.271.235.659	2.232.826.396.846	44,66
2	2018	989.028.383.687	2.168.293.382.295	45,61
3	2019	996.091.496.888	2.715.727.108.613	36,68
4	2020	942.843.640.945	2.497.866.793.719	37,75
5	2021	980.261.149.266	2.432.511.200.684	40,30

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar Tahun 2021

Sementara itu jika dilihat belanja aparatur baik pada belanja operasi dan belanja modal menunjukkan proporsi terbesar pada belanja daerah selama tahun 2017-2021. Walaupun proporsi belanja aparatur mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 40,30%, namun secara nominal belanja aparatur mengalami hanya sedikit dari tahun dan hampir menyamai nilai nominal belanja aparatur pada tahun 2017. Selanjutnya dilihat dari proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total belanja pengeluaran daerah selama kurun waktu 2017-2021 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2017 proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran adalah sebesar 77,66%, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 40,30%, namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi 36,68% dan 37,75% tahun 2020. Namun demikian secara nominal jumlah belanja pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat selama kurun waktu yang sama. Penurunan proporsi disebabkan meningkatnya total belanja secara keseluruhan lebih besar dibandingkan meningkatnya belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara keseluruhan rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 5 tahun adalah sebesar 41,60% dari total belanja (belanja modal dan operasi).

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit APBD apabila diperkirakan belanja lebih besar dibandingkan pendapatan. Sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2017-2021.

Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 dan hanya pada tahun 2018, 2019 dan 2021 yang tidak mengalami defisit dimana belanja lebih sedikit daripada pendapatan atau dengan kata lain pada tahun 2018, 2019 dan 2021 APBD kabupaten Kampar surplus, artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk mengetahui lebih lanjut defisit riil Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kampar
Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp)

Uraian	Tahun Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pendapatan	2.220.571.511.817, 91	2.327.551.167.364, 67	2.740.386.717.079, 62	2.364.677.158.217, 73	2.437.859.087.698, 00	2,95
Belanja	2.232.826.396.846, 42	2.168.293.382.294, 82	2.714.727.108.612, 92	2.497.866.793.719, 31	2.432.511.200.684, 00	2,93
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
Surplus/ Defisit Riil	-12.254.885.028,51	159.257.785.069,8 5	25.659.608.466,70	133.189.635.501,5 8	5.347.887.014,00	

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar Tahun 2021

Untuk menutupi defisit pada 2 tahun yang defisit kebijakan penganggaran Kabupaten Kampar adalah memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali penerimaan piutang. Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kampar 2017-2021 lihat Tabel 3.9.

Dari Tabel 3.9, terlihat bahwa untuk menutupi defisit pada 2 tahun (2017 dan 2020) dalam APBD Kabupaten Kampar bersumber dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Selanjutnya tahun 2018, 2019 dan 2021 Realisasi APBD Kabupaten Kampar mengalami surplus dengan besaran Silpa lebih sedikit pada tahun 2018 yang Silpanya relatif cukup besar. Penurunan SiLPA ini menunjukkan terjadi efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran dalam pembangunan Kabupaten Kampar.

Untuk menutupi defisit riil komposisi penutup pada anggaran dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2017-2021 seluruhnya berasal dari Silpa tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun tahun anggaran 2017 dan 2019 realisasi anggaran APBD Kabupaten Kampar berada pada posisi surplus, dimana realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja. Kondisi ini menyebabkan realisasi pembiayaan pembiayaan pada tahun 2017 dan 2019 tidak digunakan untuk menutup defisit.

Sementara itu sumber penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kampar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan Penerimaan Piutang Daerah. Sumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) antara lain adalah pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Proporsi penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kampar yaitu sebagian besar bersumber

dari sisa penghematan belanja Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017-2021 (Rp. Juta)

No	Uraian	Tahun Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pendapatan	2.220.571.511.817,91	2.327.551.167.364,67	2.740.386.717.079,62	2.364.677.158.217,73	2.437.859.087.698,00	2,95
B	Belanja	2.232.826.396.846,42	2.168.293.382.294,82	2.714.727.108.612,92	2.497.866.793.719,31	2.432.511.200.684,00	2,93
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
A- (B+C)	Defisit Riil	- 12.254.885.028,51	159.257.785.069,85	25.659.608.466,70	- 133.189.635.501,58	5.347.887.014,00	0,02
Ditutup Dengan Penerimaan Pembiayaan:							
	Sisa Lebih Perhitungananggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	62.613.231.431,77	50.117.396.403,26	206.272.503.853,47	0,00	96.243.047.178	63,21
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Atau Penerimaan Piutang						
D	Penerimaan Pembiayaan Daerah	62.613.231.431,77	50.117.396.403,26	206.272.503.853,47	0,00	96.243.047.178	63,87
D+ DEFISIT RIIL	Sisa Lebih Pembiayaananggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	50.358.346.403,26	209.375.181.473,11	230.932.112.320,17	- 133.189.635.501,58	101.590.934.192	163,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Kampar Tahun 2021

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah merupakan hal penting dilakukan untuk memperkirakan besaran kemampuan daerah untuk membiayai belanja. Hasil proyeksi pendapatan daerah menjadi dasar untuk menentukan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat memperkirakan besaran belanja dalam kurun waktu yang sama kedepannya.

Proyeksi data untuk tahun 2023-2026 kedepan didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun kebelakang. Namun demikian juga harus dipertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi kedepan yang mempengaruhi pendapatan daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan

Proyeksi terhadap pendapatan daerah dilakukan mengacu pada rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir, sebagai pedoman dan memperkirakan kecenderungan ekonomi saat ini dan kedepannya. Sebagaimana diketahui perekonomian saat sedang mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Penurunan ini tentunya akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2021 sebagai tahun berjalan pendapatan Kabupaten Kampar diperkirakan akan menurun yang diperkirakan menurun sebesar -0,63% per tahun Selanjutnya pada tahun

2021 diperkirakan wabah Covid-19 akan dapat diatasi dengan ditemukan vaksin dan obatnya. Oleh sebab itu mulai tahun 2021 ekonomi akan masuk pada masa pemulihan dan bergerak tumbuh. Berkenaan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 4,48%. Sedangkan sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan diperkirakan juga akan meningkat secara bervariasi. Bagi hasil Pajak diperkirakan akan tumbuh sekitar 2,00% per tahun. Penetapan angka ini karena sebagian besar penerimaan bagi hasil pajak ini berasal dari Pajak Bumi dan bangunan sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Dan diperkirakan kecil kemungkinan terjadi pertambahan secara signifikan wajib pajak PBB sektor tersebut. Sementara itu dari bagi hasil sumber daya alam diperkirakan akan akan meningkat paling tinggi sekitar 2,95% pertahun. Kemungkinan pertambahan bagi hasil sumberdaya alam batubara ini hanya akan disumbangkan dengan naiknya harga dipasaran internasional. Dana alokasi umum diperkirakan akan meningkat sebesar 0,47% per tahun dan dana alokasi khusus sekitar 2,90%. Sumber-sumber pendapatan lain seperti dana penyesuaian dan bagi hasil pajak dengan provinsi diperkirakan juga tumbuh sebesar 2,90% per tahun. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022-2026

No	URAIAN	CATATAN	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.	2.509.775.930.785	2.583.814.320.744	2.660.036.843.205	2.738.507.930.080	2.819.293.914.017
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.	285.604.011.022	294.029.329.347	302.703.194.563	311.632.938.802	320.826.110.497
4	Hasil Pajak Daerah	5.1.1.1.	150.411.688.519	154.848.833.330	159.416.873.913	164.119.671.694	168.961.202.009
5	Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.2.	13.170.817.407	13.559.356.520	13.959.357.538	14.371.158.585	14.795.107.763
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3.	28.740.039.626	29.587.870.795	30.460.712.984	31.359.304.017	32.284.403.485
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4.	93.281.465.470	96.033.268.701	98.866.250.128	101.782.804.506	104.785.397.239
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	2.162.638.570.929	2.226.436.408.771	2.292.116.282.830	2.359.733.713.173	2.429.345.857.712
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.2.1.	1.985.526.306.541	2.044.099.332.584	2.104.400.262.895	2.166.480.070.651	2.230.391.232.735
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.1.2.2.	-	-	-	-	-
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.2.3.	177.112.264.387	182.337.076.187	187.716.019.934	193.253.642.522	198.954.624.977
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3.	61.533.348.835	63.348.582.626	65.217.365.813	67.141.278.105	69.121.945.809
25	Pendapatan Hibah	5.1.3.1.	1.126.273.000	1.159.498.054	1.193.703.246	1.228.917.492	1.265.170.558
26	Pendapatan Dana Darurat	5.1.3.2.	-	-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya	5.1.3.3.	60.407.075.835	62.189.084.572	64.023.662.567	65.912.360.613	67.856.775.251

Sumber: Estimasi Tim Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022

3.3.1.2 Proyeksi Belanja

Selanjutnya proyeksi belanja selama tahun 2023-2026 dilakukan berdasarkan pertumbuhan proyeksi dari pendapatan. Artinya besaran belanja sangat tergantung pada perkiraan pendapatan daerah. Pendapatan daerah diproyeksi meningkat maka belanja daerah pada sisa tahun RPJMD juga diproyeksi meningkat. Berdasarkan peningkatan pendapatan maka diperkirakan belanja yang meningkat dengan pertumbuhan sebesar 2,59% per tahun. Pertumbuhan belanja tersebut terutama disumbang oleh pertumbuhan belanja operasi sebesar 2,93% per tahun. Peningkatan belanja untuk belanja operasi didorong oleh utamanya adalah adalah belanja hibah yang diperkirakan tumbuh dengan besaran yang sama pertahun, belanja pegawai tumbuh sebesar 1,46% per tahun, belanja barang dan jasa diperkirakan tumbuh sebesar 2,93% per tahun. Sementara pertumbuhan belanja modal diperkirakan tumbuh sebesar sekitar 2,00% per tahun. Berdasarkan besaran perkiraan peningkatan belanja tersebut untuk periode sisa tahun RPJMD 2023-2026 dapat dilihat perkiraan belanja seperti pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022-2026

No	URAIAN	CATATAN	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	BELANJA	5.2.	2.504.270.281.104	2.578.146.254.397	2.654.201.568.902	2.732.500.515.184	2.813.109.280.382
2	BELANJA OPERASI	5.2.1.	1.778.366.373.186	1.830.828.181.195	1.884.837.612.540	1.940.440.322.110	1.997.683.311.612
3	Belanja Pegawai	5.2.1.1.	1.009.178.853.169	1.038.949.629.338	1.069.598.643.403	1.101.151.803.384	1.133.635.781.584
4	Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.2.	673.596.439.463	693.467.534.427	713.924.826.692	734.985.609.080	756.667.684.548
5	Belanja Bunga	5.2.1.3.	76.468.632.804	78.724.457.471	81.046.828.967	83.437.710.421	85.899.122.879
6	Belanja Subsidi	5.2.1.4.	19.122.447.750	19.686.559.959	20.267.313.477	20.865.199.225	21.480.722.602
7	Belanja Hibah	5.2.1.5.	-	-	-	-	-
8	Belanja Bantuan Sosial	5.2.1.6.	-	-	-	-	-
9	BELANJA MODAL	5.2.2.	358.928.354.400	369.516.740.855	380.417.484.710	391.639.800.509	403.193.174.624
10	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.2.2.1	1.159.168.572	1.193.364.045	1.228.568.285	1.264.811.049	1.302.122.975
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.	143.150.282.593	147.373.215.929	151.720.725.799	156.196.487.210	160.804.283.583
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.2.3.	53.070.016.048	54.635.581.522	56.247.331.177	57.906.627.446	59.614.872.956
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.2.2.4.	149.619.471.392	154.033.245.798	158.577.226.549	163.255.254.732	168.071.284.747
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5.	11.929.415.795	12.281.333.561	12.643.632.901	13.016.620.071	13.400.610.363
15	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.2.6.	-	-	-	-	-
16	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.3.	3.492.355.381	3.595.379.865	3.701.443.571	3.810.636.157	3.923.049.923
17	Belanja Tidak Terduga	5.2.3.1.	3.492.355.381	3.595.379.865	3.701.443.571	3.810.636.157	3.923.049.923
18	TRANSFER	5.4.	363.483.198.137	374.205.952.482	385.245.028.081	396.609.756.409	408.309.744.223
19	TRANSFER/BAGIL HASIL KE DESA	5.2.4.1.	14.346.509.800	14.769.731.839	15.205.438.929	15.653.999.377	16.115.792.359
20	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	5.2.4.2.	349.136.688.337	359.436.220.643	370.039.589.152	380.955.757.032	392.193.951.864
21	SURPLUS/DEFISI	5.5	5.505.649.681	5.668.066.347	5.835.274.304	6.007.414.896	6.184.633.635

Sumber: Estimasi Tim Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2021

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

3.3.2.1 Proyeksi SiLPA

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kampar Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang 2023-2026, diperkirakan semakin meningkat. Peningkatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah. Sedangkan SiLPA diperkirakan semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2016-2020.

3.3.2.2 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus dianggarkan.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah besaran proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari beberapa komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

3.3.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Hasil dari analisis serta pengolahan data-data yang dilakukan pembahasan sebelumnya sehingga dapat disajikan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 Perkiraan kapasitas rii kemampuan keuangan daerah dapat disajikan

secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapanya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022-2026

No	URAIAN	CATATAN	Proyeksi				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PEMBIAYAAN DAERAH	5.3.	99.082.217.069	102.005.142.473	105.014.294.176	108.112.215.854	111.301.526.222
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.3.1.	99.082.217.069	102.005.142.473	105.014.294.176	108.112.215.854	111.301.526.222
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	5.3.1.2.	99.082.217.069	102.005.142.473	105.014.294.176	108.112.215.854	111.301.526.222
4	Pencairan Dana Cadangan	5.3.1.3.	-	-	-	-	-
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.3.2.	-	-	-	-	-
6	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.3.2.1.	-	-	-	-	-
7	Pembayaran Pokok Utang	5.3.2.2.	-	-	-	-	-
8	SILPA	5.4.	104.587.866.750	107.673.208.820	110.849.568.480	114.119.630.750	117.486.159.857

Sumber : BPKAD Kabupaten Kampar Tahun 2021

Perlu dipahami bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, maka sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dan lain-lain), bantuan sosial dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali secara berbeda. Selain itu diperlukan juga adanya sumber-sumber pembiayaan yang tidak mengikat seperti CSR, Hibah masyarakat dan hibah lainnya serta kolaborasi pembiayaan.

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas semasa periode pelaksanaan RPD 2023-2026.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas 3 mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I,

Dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama. Di dalamnya termasuk kewajiban untuk anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan 10% dan anggaran belanja peningkatan kapasitas pegawai 0,16 %, serta belanja Infrastruktur 25%

dari transfer umum di lingkungan Kabupaten Kampar.

Prioritas II,

Dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJPD periode 5 tahun 2023-2026, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

Prioritas III,

Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Kabupaten Kampar 5 (lima) tahun terakhir, dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

4.1.1.1 Aspek Geografi

Permasalahan pembangunan dari aspek geografi di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

- 1) Ketinggian tempat se-Kabupaten Kampar berada di daerah dataran rendah dan dapat ditanami komoditas tanaman pangan dengan peruntukan luas lahan 417.644 hektar atau 45,69%, namun rasio ketersediaan pangan utama terus mengalami penurunan rasio antara kebutuhan dan ketersediaan dimana tahun 2021 untuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) Kabupaten Kampar. Oleh karena itu sebagian kebutuhan saat ini masih dipenuhi dengan mendatangkan dari kabupaten lain dan provinsi lain.
- 2) Penggunaan lahan di Kabupaten Kampar pada tahun 2021 didominasi oleh sub sektor perkebunan seluas 384.097 hektar atau sebesar 91,97% dari

peruntukan sektor pertanian. Namun belum sepenuhnya dapat mensejahterakan masyarakat tersebut terlihat masih tingginya angka penduduk miskin yaitu 7,82% tahun 2021.

- 3) Kabupaten Kampar memiliki satu Sungai Kampar. Wilayah bagian hulu dari sungai-sungai yang mengalir bermuara di pantai timur yang mengakibatkan daerah ini rentan terhadap bencana banjir dan genangan air. Disamping itu sungai Kampar belum sepenuhnya dijadikan sebagai sumber air baku perpipaan dan sumber air irigasi.
- 4) Risiko rawan bencana masuk kategori tinggi baik bencana banjir, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor/Gerakan Tanah, Kekeringan, Epidemik dan Wabah Penyakit dan Konflik Sosial
- 5) Terdapat sumber energi yang berasal dari PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar diharapkan dapat potensi mendukung penyediaan energi terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat seperti sector industri pengolahan.
- 6) Terdapat banyak potensi wisata alam yang belum tergarap secara maksimal, kedepan jika digarap secara maksimal dapat meningkatkan PAD dari sektor pariwisata yang hanya mencapai Rp. 54,80 Milyar tahun 2021.

4.1.1.2 Aspek Demografi

Permasalahan pembangunan dari aspek demografi di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Kampar semakin bertambah, dengan pertumbuhan 2,46% per tahun selama periode 2010-2021, penambahan jumlah penduduk ini berdampak terhadap permintaan lahan perumahan, pertanian dan lainnya.
- 2) Penduduk Kabupaten Kampar dengan kelompok umur terbanyak pada usia sekolah, umur 10-14 tahun yaitu 84.362 jiwa atau 36,41% dari jumlah penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2021. Kelompok umur (belum produktif) menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam tingkat ketergantungan antara umur produktif dan non produktif dan Kabupaten

Kampar masuk dalam kategori dengan rasio ketergantungan tinggi. Disisi lain hal ini menjadi tanggung jawab pemerintahan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dini dan kesehatan.

4.1.1.3 Potensi Wilayah

Permasalahan pembangunan dari pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- 1) Luas peruntukan lahan untuk sektor budidaya terutama sektor pertanian, namun tidak dibarengi dengan peruntukan luas lahan yang memadai pengembangan kawasan industri. Dalam RTRW yang lama hanya diperukkan seluas 5.850 hektar sementara dalam draft RTRW. Kontribusi sektor industri pengolahan hanya tumbuh sebesar 0,58% per tahun selama tahun 2010-2021.
- 2) Tidak terdapat potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu diperuntukkan dalam RTRW Kabupaten Kampar sehingga sulitnya peningkatan produktifitas untuk meningkatkan rasio ketersediaan beras dari aspek produksi.
- 3) Potensi pengembangan ternak ruminansia belum dikembangkan secara optimal sesuai dengan peruntukan lahan dengan sistem SISKAN yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan ternak. Dalam RTRW belum juga tertuang peruntukan lahan untuk pengembangan sub sektor peternakan.

4.1.2 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

4.1.2.1 Fokus Pemerataan Ekonomi

Permasalahan pembangunan pemerataan ekonomi di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

- 1) Nilai PDRB harga berlaku Kabupaten Kampar belum mengalami pergeseran struktur dari tahun 2010-2021 perekonomian yang signifikan, dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Kondisi ini

menggambarkan lambatnya perkembangan inovasi pada sektor industri sehingga berpengaruh terhadap lambatnya pengembangan sektor lainnya terutama sektor jasa hanya berkontribusi dibawah satu persen kecuali kelompok sektor perdagangan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor jasa maka pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan perlu dilakukan secara maksimal.

- 2) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar periode 2011-2021 mengalami penurunan, dimana tahun 2021 tumbuh sebesar 3,45%. Secara relatif masih beradap pada posisi kelima terendah dari Kabupaten Kota di provinsi Riau. Oleh karena itu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sektoral dengan peningkatan kapasitas inovasi, inovasi dan penerapan teknologi dengan manajemen terbaik atau *good agricultural practices* pada sektor pertanian dan *good manufacturing practices* pada sektor industri pengolahan dan pengembangan sector jasa berbasis IT.
- 3) Belum efektifnya pengendalian inflasi yang tercermin dari angka inflasi yang berfluktuatif, walaupun sudah terjadi perbaikan angka inflasi dari 17,81% tahun 2011, kemudian turun menjadi 14,64% pada tahun 2021.
- 4) Walaupun dari nilai sisi penerimaan PDRB per kapita harga berlaku dan konstan yang juga mengalami peningkatan, namun kondisi belum mampu meningkatkan peringkat PDRB perkapita Kabupaten di Provinsi Riau. Pada tahun 2021 PDRB perkapita Kabupaten Kampar berada pada posisi 3, terendah. Kondisi ini memberikan gambaran terjadinya percepatan peningkatan pendapatan perkapita wilayah lainnya di Riau lebih baik dibandingkan dengan wilayah ini.
- 5) Masih terdapat Jumlah penduduk miskin sebesar 7,82% tahun 2021 dan menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan penduduk miskin terbanyak walaupun angka garis kemiskinan terendah kedua se Riau yaitu Rp. 477.603 per kapita per bulan kondisi ini menunjukkan bahwa harga-harga yang harus dibayar oleh penduduk wilayah ini lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya di Riau, namun masih sulitnya

keluar dari kelompok penduduk miskin terbanyak kedua di provinsi Riau. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa, serta rendah akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi.

4.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

- 1) Selama periode 2010-2021 IPM Kabupaten Kampar masih pada kategori sedang, namun pada tahun 2021 sudah masuk kategori tinggi tahun 2021 yaitu sebesar 73,02, dan sudah berada diatas IPM Provinsi Riau (72,94) dan Nasional (72,30). Tiga indikator pembentuk IPM terutama bidang pendidikan dan ekonomi termasuk yang tinggi dibandingkan dengan provinsi Riau, akan tetapi Angka Harapan Hidup (AHH) berada dibawah provinsi Riau, lihat Bab II Tabel 2.31. Oleh karena itu upaya mempercepat peningkatan AHH dengan penanganan aspek kesehatan masyarakat dengan meningkatkan konsumsi diatas 2.100 kilokalori perhari yang saat ini (2021) hanya 2.062,09. Rendahnya AHH wilayah dibandingkan dengan AHH Provinsi Riau dan Nasional dapat disebabkan masih rendahnya kualitas manajemen pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat.
- 2) Masih terdapat angka buta huruf sebesar 0,62% dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas pada tahun 2021. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan pengetahuan masyarakat secara informal dan sisi lain kebanyakan orang buta huruf merupakan generasi berusia lanjut yang tidak mengenal teknologi.
- 3) Masih terdapat penduduk usia kerja yang menganggur sebanyak 16.805 orang dari jumlah angkatan kerja sebanyak 393.561 orang pada tahun 2021 lihat Bab II Tabel 2.35. Masalah pengangguran di wilayah ini pertama adalah karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap

tahunnya. Banyaknya para pencari kerja yang tidak sesuai kriteria dengan permintaan lapangan usaha. Lapangan usaha (Perusahaan) akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

- 4) Terjadinya penurunan produktifitas tenaga kerja per kapita sebesar - 1,27% dari tahun 2017 sebesar Rp.149,38 juta menjadi Rp. 141,19 juta tahun 2021.
- 5) Terjadinya penurunan rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar - 3,92% per tahun selama tahun 2017-2021, lihat Bab II Tabel 2.39. Hal tersebut terjadi karena belum sepenuhnya potensi penerimaan daerah tergarap dengan baik, persoalan administrasi, kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, kurangnya intensitas pemberitahuan kepada wajib pajak terhadap objek pajak. Adanya regulasi yang kurang mendukung terhadap potensi penerimaan terutama pada sub sektor perkebunan.

4.1.3 Aspek Pelayanan Umum

4.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan aspek pelayanan umum urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menurut bidang di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahanh Wajib Bidang Pendidikan

- a) Berkurangnya lembaga PAUD sebesar -13,50% pertahun mengakibatkan berkurangnya jumlah siswa PAUD sebesar -4,92% per tahun. Sementara jumlah penduduk anak usia dini tumbuh sebesar 11,43% per tahun.
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memasukkan putra putrinya ke sekolah sesuai kelompok usia sekolah atau terdapat siswa sekolah yang bukan merupakan penduduk wilayah tersebut, hal

tersebut dapat dilihat dari APK SD/MI yang melebihi 100% yaitu 102,18 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,24%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang bersekolah belum termasuk usia sekolah atau melebihi usia sekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh sosialisasi terkait usia sekolah yang belum maksimal atau masih terdapat penduduk luar diwilayah perbatasan yang memanfaatkan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk jejang pendidikan SMP/MTs menunjukkan APK pada tahun 2021 sudah mencapai 100,30 tahun 2021 sementara APK SMP/MTs baru mencapai 84,64 kondisi menunjukkan bahwa terdapat siswa SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan ke SMP/MTs baik yang belum memasuki usia sekolah maupun melebihi usia sekolah. Kondisi ini terutama disebabkan oleh faktor ekonomi dan lainnya.

- c) APM SD/MI dan SMP/MTs masing-masing 97,80 dan 84,64 pada tahun 2021. APM kondisi ini menggambarkan masih terdapat usia sekolah yang bersekolah di wilayah Kabupaten Kampar belum sesuai usia sekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh pemahaman dan kesadaran orang tua yang masih rendah dalam menyekolahkan putra putrinya sesuai usia sekolah atau atau disebabkan oleh jangkauan atau akses pendidikan yang masih terbatas terutama jarak sekolah dan infrastruktur wilayah. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan APM adalah mematuhi regulasi terkait dengan usia sekolah baik oleh orang tua siswa termasuk manajemen sekolah. Kondisi ini dapat dilihat pada Bab II Tabel 2.50
- d) Tingginya angka putus sekolah selama periode tahun 2017-2021. APTS untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,44% dari jumlah siswa SD/MI tahun 2021. Sementara itu APTS jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2021 sebesar 1,26% meningkat dengan pertumbuhan sebesar 711,24%. Kondisi ini terjadi karena adanya faktor ekonomi dan sosial lainnya lihat Bab II Tabel 2.52.

- e) Masih terdapat lulusan SD/MI sebesar 3,62% yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP/MTs setelah tamat SD/MI tetapi menunda tahun berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat AM (angka melanjutkan sebesar 103,62% pada tahun 2021. Demikian halnya dengan lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/AMK/MA setelah lulus melainkan dengan menunda sebesar 10,43%. Lihat Bab II Tabel 2.54 menjelaskan data yang siswa yang melanjutkan.
- f) Terjadinya penurunan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik atau terdapat 44,97% bangunan SD/MI dalam kondisi rusak. Lihat Bab II Tabel 2.55. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius karena akan mempengaruhi kualitas lulusan akibat terganggunya proses pendidikan dan pengajaran pada jenjang pendidikan berikutnya yaitu SMP/MTs bahkan ke SMA/SMK/MA. Kerusakan bangunan sangat merugikan masyarakat karena bangunan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dari aspek ekonomis, kerusakan bangunan mengakibatkan masyarakat juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pada gedung-gedung sekolah dasar, kerusakan bangunan yang parah akan mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu juga akan mengurangi daya tampung sekolah atau tingkat partisipasi sekolah.
- g) Masih terdapat 8,60% guru SD/MI yang belum berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2021 dan guru SMP/MTs yang belum kualifikasi S1/D4 sebesar 4,00% pada tahun 2021 Lihat Bab II Tabel 2.58. Kondisi ini terjadi karena kekurangan biaya dan sebagian guru tidak bersedia melanjutkan pendidikan akibat dari usia guru yang sudah mendekati masa pensiun.
- h) Masih terdapat 59,86% guru SD/MI yang belum bersertifikasi pada tahun 2021 dan guru SMP/MTs yang belum bersertifikasi sebesar

61,33% pada tahun 2021 Lihat Bab II Tabel 2.58. Masalah utama masih tingginya jumlah guru yang bersertifikasi antara lain lebih banyak disebabkan faktor internal dari peserta sertifikasi yaitu dari 10 komponen sertifikasi yang diujikan belum mampu dipenuhi oleh guru peserta sertifikasi. Sedangkan faktor eksternalnya berupa proses dari rekrutmen peserta sertifikasi lebih kecil karena sudah diatur oleh kuota dari LPMP. Sertifikasi guru sangat erat kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru dalam rangka peningkatan kualitas dalam proses pengajaran yang akan berdampak pada kualitas lulusan.

2) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Kesehatan

- a) Masih tingginya angka kematian bayi pada tahun 2021 sebanyak 31 bayi per 1.000 kelahiran, lihat Bab II Tabel 2.59. Hal ini dapat terjadi karena permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.
- b) Selain itu kejadian AKBA sebanyak 32 balita lihat Tabel Bab II. 2.60. Permasalahan ini terjadi karena pelayanan Kesehatan terhadap setiap ibu hamil belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar baik terhadap ibu bersalin dan setiap bayi baru lahir.
- c) Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan selama tahun 2017-2021 dengan pertumbuhan sebesar 17,01%. Pada tahun 2021 AKI sebanyak 112 orang dari jumlah ibu melahirkan dan 7 orang per 100.000 kelahiran hidup, lihat Bab II Tabel 2.62. Permasalahan terjadinya karena menurunnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru mencapai 90,10% hingga tahun 2021. Hal tersebut juga terjadi karena akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga Kesehatan yang

mengalami penurunan. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 baru mencapai 92,00% tahun 2021. Lihat Bab II Tabel 2.74.

3) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Masih terdapat jalan dengan kondisi rusak dengan rasio jalan rusak terhadap panjang jalan 2.073,10 km pada tahun 2021 sebesar 41,37%, lihat Bab II Tabel 2.79. Permasalahan utama tingginya rasio angka kerusakan jalan kendaraan berat yang melintasi jalan yang melebihi MST jalan yang hanya sebesar 8 ton terutama untuk penggunaan pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit, industri kehutanan dan tambang.
- b) Masih rendahnya rasio panjang jalan yang belum dapat dilewati dengan kecepatan diatas 40 km per jam yaitu hanya 5,23% pada tahun 2021. Permasalahan ini terjadi karena kondisi permukaan jalan sebagian besar masih didominasi oleh jalan kerikil dan jalan tanah.
- c) Jumlah RT yang mendapatkan pembangunan fasilitas air limbah pada tahun 2021 hanya 0,55% dari jumlah RT yang ada. Masih rendahnya akses sanitasi air limbah tersebut disebabkan oleh kemampuan pemerintah dalam pembangunan infrastuktur air limbah masih sangat terbatas sementara dengan pertambahan jumlah RT terus mengalami peningkatan.
- d) Masih tingginya rasio irigasi yang mengalami kerusakan sebanyak 36,75%. Kondisi ini menghambat upaya peningkatan produksi pangan padi sehingga terus mengalami penurunan lihat bagian pangan.
- e) Masih tingginya rasio rumah tangga yang belum mendapatkan akses minum bersih tahun 2021 yaitu sebesar 22,15%. Kondisi ini menyebabkan masih tingginya penyakit yang diakibatkan kekurangan air bersih dan masih terdapat 9,59% RT yang belum mendapatkan air minum layak.

- f) Masih terdapat rasio bangunan yang belum mendapatkan IMB sebesar 81,06% pada tahun 2021. Rendahnya rasio ini berkaibat pada rendahnya penerimaan PAD yang diperoleh dari pengeluaran izin membangun.

4) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- a) Masih rendahnya rasio rumah layak huni yang dibangun pada tahun 2021 hanya 0,15%, lihat Bab II Tabel 2.99. Rendahnya rasio rumah layak huni disebabkan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun rumah layak huni sangat terbatas terutama untuk penduduk miskin.
- b) Masih terdapat 284,84 hektar kawasan pemukiman kumuh dari jumlah kawasan pemukiman, lihat Bab II Tabel 2.93. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah dan kurangnya partisipasi lembaga sosial terutama dalam penataan kawasan kumuh. Hal ini mengakibatkan pada lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.
- c) Rasio ketersediaan PSU baru 17% dari kawasan pemukiman warga terutama yang belum memiliki PSU seperti Prasarana Jalan, Prasarana Drainase, Prasarana Air Minum, Prasarana Air Limbah, Prasarana Persampahan, Prasarana Jaringan Listrik, Ruang Terbuka Hijau, lihat Bab II Tabel 2.96.

5) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a) Berkurangnya jumlah Linmas sebesar -12,00% per tahun atau berkurang

sebanyak 1.324 orang selama periode 2017-2021. Disatu sisi jumlah masyarakat terus mengalami pertambahan. Pertambahan jumlah masyarakat mengakibatkan risiko gangguan K3 semakin tinggi.

- b) Masih terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran K3 dengan pertumbuhan 24,58% per tahun, lihat Bab II Tabel 2.95. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya penjagaan K3 akibat berkurang jumlah aparat satpol PP yang dapat mencegah pelanggaran K3.

6) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Sosial

- a) Masih terdapat 25,00% dari 12 indikator PSKS yang belum dapat data baik kasus maupun penanganan pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena terbatasnya kemampuan PSKS dalam baik dari sisi jumlah maupun cakupan layanan serta secara umum rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu penanganan PMKS tersebut. Lihat Bab II Tabel 2.98
- b) Masih terdapat PSKS belum tertangani 100% tahun 2021 yaitu Anak Dengan Kedistabilitan, Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas. Lihat Bab II Tabel 2.98.
- c) Belum sinkronnya dan bersinerga program penanggulangan kemiskinan antar OPD sehingga jumlah penduduk miskin secara nominal masih sangat banyak terutama pada lapangan usaha pertanian.

4.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan aspek pelayanan umum urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan tidak pelayanan dasar menurut bidang di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Tenaga Kerja

- a) Rendahnya kemampuan OPD terkait dalam penempatan tenaga kerja misalnya pada tahun 2021 hanya 112 orang yang ditempatkan oleh OPD terkait. Lihat Bab II Tabel 2.102. Rendahnya penempatan pencari kerja hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja yang

tersedia akibat rendahnya investasi disetiap lapangan usaha. Disisi lain lapangan kerja yang sedia tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja atau pencari kerja.

- b) Menurunnya kemampuan tenaga dimana rasio lulusan S1-S3 yang bekerja tahun 2021 hanya mencapai 245 orang dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2021. Lihat Bab II Tabel 2.102. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja akibat belum tersedia program peningkatan kualitas tenaga kerja secara terstruktur sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia.

2) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Terjadinya penurunan Indeks Pemberdayaan Gender dengan pertumbuhan -2,97% per tahun. Berkurang dari 60,80% tahun 2017 menjadi 53,62% tahun 2021. Lihat Bab II Tabel 2.103.
- b) Masih tingginya kasus kejahatan seksual hingga mencapai 46 kasus pada tahun 2021 dari hanya 20 kasus pada tahun 2017 atau naik sebesar 37,54% per tahun dan KDRT dari 9 kasus tahun 2017 naik menjadi 11 kasus tahun 2021. Lihat Bab II Tabel 2.103. Penyebab utama kekerasan seksual antara lain 1) keluarga yang mengalami *broken home*, 2) pola asuh orang tua yang tidak sehat, 3) mudahnya mendapatkan konten pornografi, 4) tingginya angka kemiskinan dan 5) tingginya angka pengangguran, 6) rentannya ketahanan keluarga, 7) kecendrungan korban kejahatan seksual yang belum tertangani 8) rendahnya efek jera 9) efek cegah dari norma dan hukum. Sedangkan Huraerah (2010) menyebutkan kekerasan seksual terjadi karena; 1) lemahnya pengawasan orang tua dalam media elektronik, 2) anak mengalami cacat (keterbelakangan, autisme, dll), 3) keluarga yang belum matang secara psikologis, 4) kesibukan orang tua dan 5) kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Faktor tersebut

berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang.

3) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pangan

- a) Turunnya rasio ketersediaan pangan pokok beras hingga tahun 2021 hanya terpenuhi sebesar 21,37% dari total kebutuhan beras wilayah ini. Penyebab utama turun ketersediaan beras tersebut adalah menurunnya luas panen dan produksi. Lihat Bab II Tabel 2.105.
- b) Terjadinya penurunan rasio ketersediaan energi dan protein terutama Umbi-umbian, Minyak lemak, Buah biji berminyak dan Sayur dan buah, lihat bab II Tabel 2.106
- c) Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, Mengacu pada kondisi tersebut maka perlu mengembangkan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Untuk mengatasi dengan pengembangan komoditas pangan lokal potensial yang telah dikembangkan namun belum optimal adalah sagu. Keterbatasan (belum optimalnya) pengelolaan cadangan pangan daerah ini akan berdampak pada:
 - 1) Instabilitas pasokan pangan antar waktu dan antar daerah
 - 2) Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta kerawanan pangan pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi
 - 3) Instabilitas harga ketika mengalami goncangan dari pasar domestik maupun internasional, dan
 - 4) Rendahnya akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana alam dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

4) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pertanian

- a) Belum terdapatnya data terkait permasalahan yang bersifat umum antara lain adalah (1) Luas lahan bersertifikat hanya baru mencapai 27,09%, (2) Luas lahan yang dimiliki oleh pemerintah, (3) Luas lahan

yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah, (4) Jumlah kasus sengketa tanah yang diselesaikan belum terdata dengan baik.

- b) Permasalahan umum tersebut dapat menimbulkan konflik dimasyarakat seperti (1) Adanya sertifikat kepemilikan tanah ganda, (2) Adanya alih fungsi lahan non pertanian, (3) tidak terkendalinya harga jual dan beli tanah, (4) masih banyaknya kepemilikan tanah yang belum terdaftar. Semua hal tersebut merupakan kewenangan Kabupaten untuk menyelesaikan sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

5) Urusan Lingkungan Hidup

- a) Menurunnya cakupan areal penangan sampah dimana pada tahun 2021 hanya mencapai 50,00%. Lihat Bab II Tabel 2.114. Sedangkan jumlah sampah yang tertangani baru mencapai 45,34%. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya kemampuan stakeholders terkait dalam cakupan pelayanan akibat peningkatan produksi volume sampah sementara partisipasi sangat kurang dalam penanganan sampah baik sampah RT maupun sampah pasar dan pusat keramaian.
- b) Rasio jumlah sampah yang tertanangi hanya 0,39% dari jumlah volume produksi sampah di wilayah ini.

6) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Adminsitasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Masih terdapat bayi lahir yang belum berakte kelahiran sebesar 5,77% tahun 2021, Rasio pasangan berakte nikah, Penerapan KTP Nasional, berbasis NIK, Cakupan penerbitan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Cakupan penerbitan akta kelahiran baru mencapai 96,23% atau masih terdapat sekitar 236 bayi yang belum memiliki akte kelahiran. Lihat Bab II Tabel 2.116.

7) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Rendahnya keaktifan LSM, atau masih terdapat LSM tidak aktif yang mencapai 7,22% tahun 2021 Lihat Bab II Tabel 2.117. Penyebab tidak aktif LSM mempunyai keterbatasan dalam pengelolaan kelembagaan terutama terbatasnya sumber pembiayaan, sumber informasi yang terbatas, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, kebijakan dan sebagainya.
- b) Masih terdapat 11,36% desa atau 28 desa yang belum memiliki kantor desa yang layak dari 250 desa tahun 2021. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kecepatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- c) Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah masih lemahnya pemeliharaan pasca pemberdayaan masyarakat hanya 12,20% tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh masih tingginya ketergantungan perekonomian masyarakat masih pada alam; rendahnya kualitas sumber daya manusia; minimnya sarana dan prasarana desa, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, buruknya aksesibilitas transportasi dan komunikasi. Lihat Bab II Tabel 2.118.
- d) Masih terdapat 23 desa yang dalam kategori desa sangat tertinggal dari 250 desa yang ada. Lihat Bab II Tabel 2.119.

8) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yang belum menjadi rasio akseptor KB tahun 2021 hanya sebesar 41,10%. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya keluarga miskin yang tidak tertampung dalam Jamkesmas belum tentu dapat tertampung

dalam Jamkesos ataupun Jamkesda.

9) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Perhubungan

- a) Masih rendahnya kesediaan rambu-rambu lalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2021 hanya sebanyak 172 unit dari kebutuhan. Rendahnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akibat kurang tersedianya anggaran yang memadai. Selain itu beberapa lokasi yang rawan kecelakaan justru rambu-rambu lalu lintas yang hilang, terutama disebabkan lokasi pemasangan rambu rambu lalu lintas tersebut kurang berkoordinasi dengan instansi terkait di kabupaten pasalnya ditempatkan pada titik yang kurang ada pengawasan.
- b) Semakin tingginya kepadatan jalan raya dimana rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan tahun 2021 sebesar 30,00 km per kendaraan. Oleh karena itu risiko tinggi angka kecelakaan jalan raya semakin tinggi jika rasio panjang jalan dengan kondisi baik semakin berkurang dan kemampuan menyediakan rambu-rambu jalan yang terbatas serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan jalan raya.

10) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

- a) Masih rendahnya akses internet rumah tangga yang terdapat diwilayah ini. Ini ditunjukkan dengan adanya jumlah rumah tangga yang belum dapat mengakses internet 30,95% pada tahun 2021. Lihat Bab II Tabel 2.122. Faktor pertama yaitu keterbatasan ekonomi yang menyebabkan kurang mampunya masyarakat untuk membeli perangkat TIK ataupun berlangganan pada akses internet, berlangganan akses internet yang menurut mereka cukup mahal selain itu juga faktor kondisi wilayah yang belum sepenuhnya terdapat sarana dan parasarana telekomunikasi.
- b) Belum semua OPD memiliki website sendiri, dan sudah memiliki belum terkoneksi satu sama lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar.

Selain itu data dan informasi pembangunan belum tersedia secara lengkap dan ter update dimasing-masing OPD terutama untuk data kinerja OPD sebagai acuan dalam kebutuhan perencanaan pembangunan.

- c) Belum tersedianya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung sistem teknologi informasi.
- d) Terjadinya penurunan jumlah RT yang memiliki komputer pribadi sebesar 3,85% per tahun. Kondisi ini dapat menyebabkan turunnya produktifitas dalam hal kemampuan mendapatkan informasi yang dapat menunjang peningkatan keinerja dalam pengelolaan usaha.

11) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Masih terdapat 366,30% koperasi yang tidak aktif dari jumlah koperasi yang terdaftar di OPD terkait. Lihat Bab II Tabel 2.123. Penyebab tidak aktif koperasi karena sisa hasil usaha atau laba yaitu kurang mampu membukukan kegiatan, kurang mampu mengelola keuangan (manajemen keuangan), penggunaan teknologi kurang (manajemen operasional), kurang mampu mengelola produk (manajemen produksi), kurang mampu membuat anggaran (perencanaan) dan keterbatasan pengetahuan (*Skill*) hasil ini tidak sesuai dengan kualitas kinerja organisasi yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- b) Masih rendahnya kemampuan pendataan kondisi perkembangan kemampuan pengelolaan usaha. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

12) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Penanaman Modal

- a) Walaupun Terjadi peningkatan jumlah investor tahun 2021 dengan tingkat peningkatan selama periode 2017-2021 sebesar 73,21% per

tahun.

- b) Peningkatan investasi belum mampu menjadi lokomotif dalam pengurangan angka penangguran dan penurunan kemiskinan diwilayah ini. Sehingga jumlah angka kemiskinan masih termasuk tinggi.
- c) Perlunya mendorong investor lokal untuk investasi pada industri hilir kelapa sawit dan karet serta sub sektor perikanan budidaya.

13) Urusan Kepemudaaan dan Olahraga

- a) Belum maksimalnya pembinaan terhadap pemuda terutama dalam bidang ekonomi masih belum maksimal. Kenyataan ini dapat dilihat dari masih kecilnya jumlah usahawan muda di Kabupaten Kampar.
- b) Persentase organisasi pemuda yang aktif. Permasalahan dalam bidang kemudahan dan olahraga adalah masih belum optimalnya pembinaan terhadap olahragawan. Pembinaan terhadap bibit unggul sebagai regenerasi atlet belum dilakukan secara baik.

14) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Statistik

- a) Masih terbatasnya data, khususnya data statistik sektoral untuk kebutuhan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor.
- b) Masih terbatasnya pendataan secara sectoral yang akurat, valid dan up to date serta ter up date secara berkala.
- c) Belum sepenuhnya data kebutuhan perencanaan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dapat terpenuhi secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan yang mengacu pada undang-undang 23 tahun 2014.

15) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Persandian

Persentase perangkat daerah yang sudah menggunakan layanan persandian di Kabupaten Kampar mencapai 56%. Namun demikian sistem elektronik daerah di lingkungan pemerintah daerah belum sepenuhnya menyajikan data yang menjadi kebutuhan perencanaan dan publik.

16) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Kebudayaan

- a) Belum semua acara event yang diadakan tersosialisasi dengan baik, sehingga sebagian event yang dilaksanakan tidak diketahui masyarakat secara umum.
- b) Permasalahan dalam urusan kebudayaan adalah masih belum optimalnya pelestarian budaya khususnya Budaya Melayu. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah karya seni budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi.
- c) Belum terinternalisasinya nilai-nilai, tradisi dan hasil karya Budaya Melayu Riau di lingkungan Sekolah (ekstrakurikuler) dan ruang umum (publik).

17) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Perpustakaan

- a) Pemasalahan pada Perpustakaan Daerah adalah masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah pengunjung terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani hanya tumbuh sebesar 1,81% pada tahun 2017-2021.
- b) Koleksi buku yang dimiliki belum terdigitalisasi secara optimal sebagian besar mengandalkan hardcopy.

18) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Kearsipan

- a) Persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku dari sebelumnya belum menggunakan (tidak ada) meningkat menjadi 80% pada tahun 2021.
- b) Masih peningkatan kapasitas SDM kearsipan sehingga masih rendahnya kualitas pengelola kearsipan.

4.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Permasalahan aspek pelayanan umum urusan pemerintahan pilihan menurut bidang di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a) Terjadinya penurunan produksi perikanan air tawar sebesar -11,65%

per tahun dan keramba -9,35% per tahun, lihat Bab II Tabel 2.132.

- b) Terjadinya penurunan rasio konsumsi ikan dari target nasional dengan kecenderungan pertumbuhan -5,19% per tahun selama tahun 2017-2021.
- c) Cakupan bina kelompok nelayan meningkat sebesar 13,64% per tahun dari jumlah kelompok yang ada. Sehingga kondisi belum mampu meningkatkan konsumsi ikan per kapita akibat laju pertumbuhan produksi lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan permintaan.

2) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pariwisata

- a) Masih rendahnya pertumbuhan kunjungan wisatawan dengan pertumbuhan -4,48% per tahun dan rata-rata lama menginap hanya 1-7 hari. Lihat Bab II Tabel 2.138. Rendahnya kunjungan wisatawan ke wilayah ini disebabkan oleh minimnya fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung, masih rendahnya kualitas pelayanan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b) Masih rendahnya kontribusi PAD pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kampar hanya sebesar 0,035% pada tahun 2021, lihat Bab II Tabel 2.140. Penyebab masih rendah penerimaan PAD dari sektor pariwisata karena belum terkelolanya objek wisata secara optimal.

3) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pertanian

- a) Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan tanaman pangan dan belum tergarapnya lahan pertanian berkelanjutan, sehingga produksi pangan beras terus mengalami penurunan lihat Bab II Tabel 2.142. Penyebab utama belum optimalnya intensitas pemanfaatan lahan tanaman pangan karena kondisi infrastruktur irigasi yang dalam kondisi rusak sebesar 36,75% dari panjang irigasi yang ada, lihat bagian permasalahan irigasi.
- b) Peningkatan produktifitas tanaman padi sebesar 2,78% per tahun. Hal ini belum mampu meningkatkan ketersediaan akibat belum optimalnya

pelaksanaan praktek pertanian terbaik (*Good Agricultural Practices*) terutama terkait dengan *precision farming*.

- c) Terjadinya penurunan luas areal panen padi sebesar -10,46% per tahun. Penurunan luas panen terutama disebabkan oleh turunnya intensitas pemanfaatan lahan.
- d) Terjadinya penurunan produktivitas ternak selama periode 2017-2021 terutama ternak unggas. Penyebabnya berkurangnya produksi ternak unggas terutama terbatasnya cadangan pakan dan kurangnya edukasi cara membuat pakan cadangan seperti pembuatan pakan lokal. Agar pakan tetap tersedia dan campur tangan pemerintah serta dunia swasta agar tidak terus menerus berkurang.
- e) Masih terdapat kelompok tani sebanyak 229 yang belum dikukuhkan pada tahun 2021.

4) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Perdagangan

- a) Terjadinya trend penurunan penjualan CPO keluar mengalami penurunan sebesar -1,75% per tahun. Sementara trend jumlah beras masuk ke wilayah ini mengalami peningkatan sebesar 7,22% per tahun. Penyebab utama berkurangnya CPO keluar dan bertambahnya beras masuk akibat dari penurunan produksi CPO dan beras di wilayah ini. Kinerja perdagangan baik keluar dan masuk Kabupaten Kampar diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor dan pemenuhan kebutuhan diwilayah ini.
- b) Penurunan perdagangan migas juga terjadi dikarenakan turunnya harga komoditas di pasar global sehingga memicu penurunan jumlah ekspor ke negara-negara mitra dagang, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, India dan Tiongkok.

5) Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Perindustrian

- a) Belum berkembangnya industri hilir berbasis sumber daya lokal.
Kabupaten Kampar yang kaya akan sumberdaya alam baik di darat

maupun di laut masih mengandalkan pada ekspor produk-produk primer dan produk-produk antara dalam mengembangkan perekonomiannya. Belum berkembangnya industri hilir sektor tambang dan non migas sebagai keunggulan komparatif Kabupaten Kampar menyebabkan manfaat yang diperoleh masyarakat wilayah masih sangat rendah. Dengan mengembangkan industri hilir yang menghasilkan produk-produk yang siap saji dan siap konsumsi akan meningkatkan nilai tambah produk yang dinikmati masyarakat Kabupaten Kampar. Pengembangan industri hilir mengindikasikan bahwa Kabupaten Kampar mampu meningkatkan keunggulan komparatif yang dimiliki menjadi keunggulan kompetitif.

- b) Belum maksimalnya operasi kawasan industri kecil karena masih terbatasnya sarana dan prasarana dan memerlukan waktu untuk pengembangannya.
- c) Terbatasnya pembinaan kelompok pengrajin. Sementara IKM dari pengrajin mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat kelembagaan usaha UMKM yang tumbuh 39,23% per tahun. Padahal produk industri kerajinan sangat berguna dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di wilayah ini.

4.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

Permasalahan aspek pelayanan umum penunjang urusan menurut bidang di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

1) Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya konsisten. Konsistensi antar dokumen perencanaan baik terhadap pusat maupun Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam upaya penyelesaian permasalahan pembangunan secara bersama-sama, konsisten atau tidaknya dokumen perencanaan dapat dilakukan dengan penyelarasan.

Di sisi lain dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antar wilayah.

- b) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan yang baik dan komprehensif pada tahapan input perencanaan, dibutuhkan basis data dan informasi yang valid, *up to date*, dan akuntabel agar dapat menggambarkan kondisi daerah secara utuh. Dengan keterbatasan data dan informasi yang dimiliki, belum mampu menggambarkan kondisi Kabupaten Kampar, walaupun secara letak geografis berada pada posisi strategis.

2) Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

- a) Terjadinya peningkatan SILPA dari APBD, kondisi ini menggambarkan efektifitas perencanaan dan atau masih tingginya porsi belanja terhadap risiko ketidakpastian.
- b) Masih rendahnya rasio belanja langsung terhadap total APBD sebesar 2,04% dari tahun 2017-2021.

3) Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

- a) Berkurangnya jumlah pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
- b) Menurunnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dengan penurunan -2,01% per tahun.

4) Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a) Terbatasnya data persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.
- b) Penelitian dan pengembangan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD). Penelitian dan pengembangan yang dilakukan belum sepenuhnya menunjang tujuan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD) Kabupaten Kampar, tujuan pembangunan pada bidang ekonomi misalnya lebih difokuskan kepada peningkatan nilai tambah terhadap pemanfaatan sumber daya alam, di kala migas tidak menjadi sektor utama dalam pembentuk PDRB Kabupaten Kampar.

5) Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

- a) Belum tersedianya data tindak lanjut dari fungsi pengawasan terdiri dari jumlah temuan, tindak lanjut yang selesai, tindak lanjut dalam proses dan belum ditindak lanjuti.
- b) Masih terjadinya pelanggaran kedisiplinan oleh pegawai. Kondisi ini akan menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

6) Sekretariat DPRD

Belum optimalnya sistem informasi yang terkait dengan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD selama lima tahun.

4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan aspek daya saing daerah menurut bidang di Kabupaten Kampar sebagai berikut.

4.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- a) Terjadinya penurunan pertumbuhan total konsumsi RT perkapita berdasarkan harga konstan dengan pertumbuhan -249,73% pertahun sementara berdasarkan per RT tumbuh -215,32% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi akibat peningkatan harga terhadap konsumsi Rumah Tangga. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan kuantitas dan kualitas konsumsi Rumah Tangga.
- b) Nilai Tukar Petani hanya tumbuh 0,72% per tahun sementara nilai yang harus dibayar oleh petani tumbuh sebesar 5,87% per tahun. Upaya peningkatan NTP dapat dilakukan dengan perbaikan infrastruktur pada sektor pertanian, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor pertanian dapat dikurangi sehingga beban yang dibayar petani semakin turun baik dalam pengadaan input maupun dalam distribusi output.
- c) Terjadinya penurunan rasio konsumsi perkapita non pangan. Untuk harga berlaku dengan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,69% per tahun sementara berdasarkan harga konstan turun sebesar -0,63% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat karena rasio konsumsi non pangan terus mengalami penurunan lima tahun terakhir.

4.1.4.2 Fokus Infrastruktur Wilayah

- a) Menurunnya kemampuan rasio infrastruktur jalan yang baik untuk menampung jumlah kendaraan yang rasionya peningkatan rasio

jumlah kendaraan terhadap panjang jalan sebesar 9,40% per tahun. Namun belum dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik yang hanya tumbuh sebesar 2,51% per tahun. Sehingga berisiko pada peningkatan angka kecelakaan darat akibat dari tingginya rasio jalan yang masih dalam kondisi rusak. Rendahnya percepatan pertumbuhan kondisi jalan yang baik disebabkan proporsi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan mengalami penurunan akibat penurunan kemampuan keuangan daerah.

- b) Masih terdapat 5,23% jumlah wilayah yang dapat dilalui dengan kendaraan roda empat. Kondisi ini menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa serta sulitnya melakukan optimalisasi peningkatan pemantaan sumberdaya alam yang tersedia dan berisiko terhadap peningkatan angka inflasi daerah.
- c) Belum sepenuhnya luas wilayah budidaya dapat diproduktifkan. Kondisi ini dapat dilihat dari rasionya pada tahun 2021 sebesar 91,71%. Disisi lain peruntukan wilayah produktif sebelum sepenuhnya dioptimalkan pemanfaatannya hingga tahun 2021. Sehingga kondisi ini belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya belanja atau konsumsi non pangan.
- d) Rendahnya rasio wilayah industri yang diperuntukkan dalam RTRW hanya 0,64% dari luas budidaya, sehingga pergeseran struktur ekonomi ke arah yang lebih elastis sangat lambat. Padahal wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam atau bahan baku yang dapat menjadi bahan baku atau supplier terhadap sektor industri.

4.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Masih tingginya angka kriminalitas terutama kasus pencurian dan penganiayaan selama periode 2017-2021. Tentunya kondisi ini sangat mengganggu kelancaran perkembangan investasi. Disisi lain

ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang terutama seperti kesetersediaan jalan kawasan, air bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah dan sarana pendukung lainnya diwilayah peruntukan kawasan industri masih juga menjadi persolaan hingga saat ini.

4.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

- a) Masih rendahnya rasio pendidikan tinggi terhadap jumlah ketenagakerjaan yang terdapat di kabupaten Kampar. Dimana pendidikan tinggi untuk jenjang pendidikan S1/D4, S2 dan S3 baru mencapai 7,56% dari jumlah penduduk angkatan kerja di kabupaten Kampar.
- b) Rasio ketergantungan cukup tinggi hingga tahun 2021 masih mencapai 46,42% dari jumlah penduduk. Rasio ketergantungan didominasi oleh penduduk yang belum produktif atau usia dini dan usia sekolah. Tentunya kondisi ini berimplikasi pada beban bagi umur produktif dan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan mengikut aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum dan aspek dayasaing daerah maka masalah pembangunan Kabupaten Kampar antara lain.

- 1) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Kampar yang disebabkan oleh akses pendidikan yang belum merata dan terdapat kecenderungan penurunan jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Pelayanan kesehatan belum berjalan secara maksimal akibat terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dan SDm Kesehatan juga yang masih terbatas. Rendahnya dayasaing tenaga kerja untuk mendorong terciptanya inovasi dalam rangka peningkatan produktifitas wilayah dengan pendekan konsep pembangunan berkelanjutan.

- 2) Rendahnya kemampuan pemerintah dalam peningkatan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih dan energi listrik) serta konektivitas untuk mendorong percepatan, pergerakan, pertumbuhan produksi barang dan jasa dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
- 3) Masih rendahnya optimalisasi dan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta rendah peran serta kesetaraan gender untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- 4) Masih terdapatnya kendala dalam mewujudkan peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya peningkatan kemandirian keuangan daerah terutama disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur penunjang dan lemahnya kualitas SDM dan inovasi yang terbatas dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan.
- 5) Masih rendahnya peran agama dan budaya untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, menjaga dan memelihara sarana prasarana, infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat serta mendukung pemerintah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang dengan terjalinnya koordinasi yang baik

antar wilayah dan antar sektor. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

- 1) Masih terjadinya ketidakpastian perekonomian global akibat pandemi Covid 19. Kondisi tersebut akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia yang belum stabil.
- 2) Risiko geopolitik jadi tantangan ekonomi. Perkembangan geopolitik di sejumlah negara tidak sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar seperti terutama akibat Pandemi Covid 19.
- 3) Harga komoditas internasional dipengaruhi pasar global diantaranya produk komoditas bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Karakteristik dari komoditas yaitu harganya ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar bukan ditentukan oleh penyalur ataupun penjual. Keadaan tersebut memerlukan kebijakan yang efektif pada saat harga komoditas naik atau turun. Beberapa hal yang mempengaruhi harga komoditas yaitu:
 - a. Fluktuasi harga komoditas pertanian disebabkan oleh naiknya harga input (pupuk, bibit, benih, obat, peralatan, serta upah tenaga kerja), naiknya harga komoditas lain yang berhubungan, adanya teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas budidaya, adanya ramalan penjualan harga yang mengikuti tren serta kondisi cuaca yang berpengaruh pada tinggi rendahnya harga komoditas.
 - b. Lesunya permintaan dari negara-negara pengimpor akibat Covid 19 dan kestabilan politik di beberapa negara importir.
 - c. Pada komoditas pertambangan, kurangnya pasokan batu bara bagi negara importir, mengingat batu bara adalah kekuatan dominan sebagai pembangkit listrik. Komoditas pertambangan lain yang

mengalami fluktuasi harga adalah minyak bumi, emas, serta perak. Situasi negara-negara produsen minyak serta perkembangan teknologi dan penemuan baru menjadi faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga minyak. Pada komoditas emas dan perak, faktor penyebab naik turunnya harga adalah karena pengaruh nilai tukar US Dollar yang mempengaruhi perdagangan terutama komoditas unggulan wilayah ini seperti CPO dan karet.

- 4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* berisikan 17 tujuan (*goals*) transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa dengan target hingga 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia yang meliputi permasalahan pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.
- 5) Tuntutan kualitas produksi yang ramah lingkungan pada pasar global. Perubahan iklim global (*Global Warming Climate Change*). Fenomena perubahan iklim global yang menyebabkan adanya peningkatan suhu udara bumi yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan berdampak juga bagi lingkungan, ekonomi, kesehatan hingga kelestarian flora dan fauna. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer karena terjadi radiasi gelombang yang panjang sehingga panas tertahan dan mengakibatkan atmosfer bumi semakin memanas.
Aktivitas manusia yang dibarengi dengan kemajuan teknologi industri dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim seperti limbah, asap dari transportasi dan industri berbahan bakar fosil hingga kotoran hewan dan tumbuhan yang menumpuk dapat menghasilkan gas metana yang

berperan dalam terbentuknya GRK di atmosfer.

- 6) Berkembangnya perdagangan narkoba dan obat-obatan psikotropika. Asia Tenggara (ASEAN) menjadi wilayah penting bagi peredaran narkoba internasional. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, ASEAN memiliki jumlah penduduk yang banyak, khususnya pada usia produktif. Kedua, perekonomian ASEAN bergerak secara progresif dan wilayah ini dipandang sebagai wilayah utama oleh negara industri dunia, diantaranya Amerika, Jepang, Korea Selatan dan Uni Eropa sehingga potensial sebagai pangsa pasar barang dan jasa termasuk narkoba. Ketiga, karakteristik geografis yang terdiri dari kepulauan dan wilayah dengan area perbatasan yang luas menjadikan sulitnya kontrol sehingga ini menjadi faktor penarik (*pull factors*) dari para kartel narkoba internasional.
- 7) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mendorong interaksi jejaring ekonomi, politik dan IPTEK sangat terbuka. Perkembangan teknologi dan inovasi dewasa ini secara langsung juga berdampak pada perilaku dan gaya hidup manusia. Interaksi manusia pun mengalami perubahan besar. Teknologi di bidang komunikasi dan media telah membuka lembaran baru bagi kehidupan manusia dan berpengaruh pada beragam sisi kehidupan pribadi dan sosial. Teknologi modern selain berdampak positif juga memiliki dampak negatif yang tergantung pada pemanfaatannya.
- 8) Keterbatasan energi dan pengembangan energi baru terbarukan. Dalam rangka mengatasi isu tersebut, PBB telah menetapkan 3 target besar dalam struktur energi global yaitu menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

- 1) Perkembangan ekonomi makro yang tidak terlepas dari kondisi perekonomian global. Salah satu dampak dari gejolak perekonomian

global adalah tekanan terhadap sejumlah indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri maupun ekonomi makro lainnya akibat pandemi Covid 19 terhadap ekonomi nasional.

- 2) Stabilitas moneter dalam menjaga stabilitas laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan.

- 3) Bencana alam

Peningkatan peristiwa bencana alam dapat mengakibatkan dampak terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan.

- 4) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Hal ini dapat dilakukan dengan membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana yaitu dengan meningkatkan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan

daerah; penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana; penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.

5) Sampah/limbah

Peningkatan jumlah produksi sampah baik material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cair ataupun gas. Sampah dibagi 2 yaitu sampah padat dan cair. Sampah padat ialah hasil sisa dari manusia berupa zat padat dan sebaliknya. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

6) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Peran perempuan dalam pembangunan dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas hidup terutama akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan dan hukum, perluasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik serta untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan terkait pembangunan nasional baik di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, organisasi atau kelompok tertentu serta di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, diperlukan strategi komprehensif dalam memberdayakan perempuan di Indonesia. Upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pihak swasta, pelaku ekonomi serta masyarakat umum termasuk keluarga.

7) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Arah kebijakan nasional untuk Pengarusutamaan Gender adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai

bentuk kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

8) Penguatan investasi melalui penyebaran investasi.

Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- b. Pengembangan potensi investasi nasional (*National champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
- c. Promosi investasi, untuk mendorong *investor awareness and willingness*, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
- d. Pemberian insentif investasi, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM.
- e. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).

9) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan pekerjaan.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ditujukan pada penciptaan tenaga kerja profesional, mandiri, memiliki etos kerja yang tinggi, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing tinggi. Sedangkan perluasan kesempatan kerja diarahkan pada penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah penganggur dan setengah penganggur, transformasi tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja antar daerah, dan peningkatan kesempatan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat.

10) Peningkatan Pengawasan Tenaga kerja asing.

Tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia membawa berbagai dampak, ada dampak positif dan ada pula dampak negatif. Beberapa dampak positif yang timbul karena adanya tenaga kerja asing di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan

Dengan adanya tenaga kerja asing, maka kita akan mendapatkan ilmu baru di sebuah bidang pekerjaan. Ilmu baru ini bisa kita dapatkan dari tenaga kerja asing yang mungkin biasa dilakukan di negara asalnya. Dengan adanya ilmu baru ini maka menambah inovasi di Indonesia. Tidak hanya ilmu baru saja, namun juga teknologi baru. Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan sangat menguntungkan apabila tenaga kerja asing berasal dari negara maju di bidangnya.

b. Pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat

Pengembangan suatu bidang pekerjaan sangat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli. Penggunaan tenaga kerja asing yang sudah berpengalaman di suatu bidang akan dapat menjadi sarana pengembangan yang baik di suatu bidang pekerjaan. Dan pengalaman yang baik ini bisa ditularkan untuk orang-orang lokal Indonesia.

c. Adopsi teknologi baru cepat terjadi

Adopsi teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli di bidangnya. Teknologi dari negara maju akan mudah dilakukan apabila didukung oleh seseorang yang berpengalaman, apalagi dari negara asal teknologi tersebut.

d. Terjadinya peningkatan investasi di Indonesia

Dengan adanya tenaga kerja asing yang datang di Indonesia maka diperkirakan akan adanya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga didapatkan dari hasil perekrutan tenaga kerja asing tersebut.

e. Memicu produktivitas tenaga kerja lokal

Persaingan tenaga kerja asing dan lokal pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu dirinya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan.

Selain dampak positif, selanjutnya ada pula dampak negatif dari

masuknya tenaga asing di Indonesia yaitu adanya peraturan pemerintah mengenai penggunaan tenaga kerja asing memang menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini karena mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yaitu:

a. Mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal

Dampak negatif masuknya tenaga kerja asing yang paling terasa adalah terasa menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit.

b. Menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. Kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Jika tidak diasah, maka tenaga kerja lokal tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

c. Perputaran keuangan dari pendapatan pekerja asing tidak berperan dalam rangka meningkatkan permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya tidak memicu pertumbuhan ekonomi.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi

1) Perkembangan ekonomi Provinsi yang tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional. Salah satu dampak dari gejolak perekonomian nasional adalah tekanan terhadap sejumlah indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi maupun ekonomi makro lainnya akibat pandemi Covid 19.

2) Stabilitas laju inflasi daerah.

Menjaga stabilitas inflasi daerah dengan peningkatan produksi barang dan jasa di wilayah provinsi Riau. Artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3) Bencana alam

Peningkatan peristiwa bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan.

4) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Hal ini dapat dilakukan dengan membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana yaitu dengan meningkatkan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah; penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana; penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.

5) Sampah/limbah

Peningkatan jumlah produksi sampah baik material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cair ataupun gas. Sampah dibagi 2 yaitu sampah padat dan cair. Sampah padat ialah hasil sisa dari manusia berupa zat padat dan sebaliknya. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

6) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Peran perempuan dalam pembangunan dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas hidup terutama akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan dan hukum, perluasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik serta untuk terlibat secara aktif dalam

berbagai kegiatan terkait pembangunan nasional baik di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, organisasi atau kelompok tertentu serta di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, diperlukan strategi komprehensif dalam memberdayakan perempuan di Indonesia. Upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pihak swasta, pelaku ekonomi serta masyarakat umum termasuk keluarga.

- 7) Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarus utamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Arah kebijakan nasional untuk Pengarus utamaan Gender adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

- 8) Penguatan investasi melalui penyebaran investasi.

Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- f. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
- g. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness*, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
- h. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM.
- i. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).

- 9) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan pekerjaan.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ditujukan pada penciptaan tenaga kerja profesional, mandiri, memiliki etos kerja yang tinggi, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing tinggi. Sedangkan perluasan kesempatan kerja diarahkan pada penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah penganggur dan setengah penganggur, transformasi tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja antar daerah, dan peningkatan kesempatan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat.

a. Adopsi teknologi baru cepat terjadi

Adopsi teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli di bidangnya. Teknologi dari negara maju akan mudah dilakukan apabila didukung oleh seseorang yang berpengalaman, apalagi dari negara asal teknologi tersebut.

b. Terjadinya peningkatan investasi di Indonesia

Dengan adanya tenaga kerja asing yang datang di Indonesia maka diperkirakan akan adanya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga didapatkan dari hasil perekrutan tenaga kerja asing tersebut.

c. Memicu produktivitas tenaga kerja lokal

Persaingan tenaga kerja asing dan lokal pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu dirinya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan.

Selain dampak positif, selanjutnya ada pula dampak negatif dari masuknya tenaga asing di Indonesia yaitu adanya peraturan pemerintah mengenai penggunaan tenaga kerja asing memang menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini karena mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja asing di Provinsi Riau yaitu:

a. Mempersempit kesempatan kerja tenaga kerja lokal

Dampak negatif masuknya tenaga kerja asing yang paling terasa adalah terasa menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal

ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit.

- b. Menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. Kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Jika tidak diasah, maka tenaga kerja lokal tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.
- c. Perputaran keuangan dari pendapatan pekerja asing tidak berperan dalam rangka meningkatkan permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya tidak memicu pertumbuhan ekonomi.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kampar

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kampar kedepan yang harus mendapatkan perhatian terdiri dari:

- 1) Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan berprestasi dalam bidang keagamaan serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat
- 2) Pengembangan budaya masyarakat yang mendukung kemajuan pembangunan daerah melalui
 - a) Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Kampar;
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Kampar;
 - c) Peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Kampar;
 - a) Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi;

- d) Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Kampar;
 - e) Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- 3) Peningkatan daya masyarakat dalam pembangunan daerah melalui:
- a) Peningkatan akses, pemerataan dan kualitas pendidikan terutama golongan miskin dan anak-anak yatim;
 - b) Peningkatan cakupan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau baik pencegahan maupun penyembuhan;
 - c) Percepatan pelayanan warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana Covid 19 dan kejadian luar biasa;
 - d) Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui peningkatan produktivitas lapangan usaha masyarakat.
 - e) Peningkatan konektifitas dan kualitas jalan melalui peningkatan kemantapan jalan dalam kondisi baik dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi;
 - f) Peningkatan ketersediaan air bersih dan air minum perpipaan melalui pengelolaan ketersediaan kualitas air baku, sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan;
 - g) Peningkatan pemenuhan akses sanitasi masyarakat terutama yang berdomisili di daerah kumuh;
 - h) Peningkatan kapasitas elektrifikasi melalui peningkatan akses dan infrastruktur energi ke seluruh wilayah dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk mendorong pengembangan IKM
 - i) Peningkatan pembangunan rumah layak huni terutama bagi penduduk yang belum memiliki rumah layak huni terkhusus pada penduduk yang berdomisili di wilayah kumuh

- j) Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan pemulihan kawasan kritis dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.
- k) Peningkatan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal;
- l) Peningkatan kemandirian industri melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan
- m) Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong peningkatan nilai investasi.
- n) Peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan
- o) Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk pengurangan jumlah penduduk miskin;
- p) Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta kesetaraan gender
- q) Pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan Pengelolaan pariwisata.
- r) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
- s) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam rangka mendorong percepatan proses pelayanan publik serta pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja.

Berdasarkan isu strategis dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah maka isu strategis utama adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan peran agama dan budaya untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, menjaga dan memelihara sarana prasarana, infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat serta mendukung pemerintah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Peningkatan kualitas SDM dan Inovasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah.
- 3) Peningkatan, percepatan, pemerataan kualitas dan akses serta inovasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja untuk mendorong peningkatan daya saing sumberdaya manusia untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 4) Peningkatan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesetaraan gender.
- 5) Peningkatan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih dan energi listrik) serta konektivitas untuk mendorong percepatan, pergerakan, pertumbuhan produksi barang dan jasa untuk mendukung percepatan terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi

5.1.1 Visi RPJPD

Visi dan misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pernyataan visi dan misi pembangunan daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kampar. Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dijadikan acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026, isu strategis pembangunan Kabupaten Kampar dan juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 adalah:

**Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam
Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025**

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 diperlukan adanya konsistensi antara dengan RPJPD Kabupaten Kampar.

5.1.2 Misi RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025

- 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
- 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum,

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan.

- 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Bertitik tolak dari visi Kabupaten Kampar dalam mewujudkan negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025, maka untuk mencapai visi tersebut pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka Panjang. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan menjadi berbeda-beda. Tahapan tersebut menjadi berkesinambungan dari tahap ke tahap berikutnya untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang, sehingga atas dasar tersebut tahapan dan skala prioritas yang terkait dengan RPD Kampar tahun 2023-2026.

5.2 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kampar merupakan cita-cita masyarakat Kabupaten Kampar yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2023-2026. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

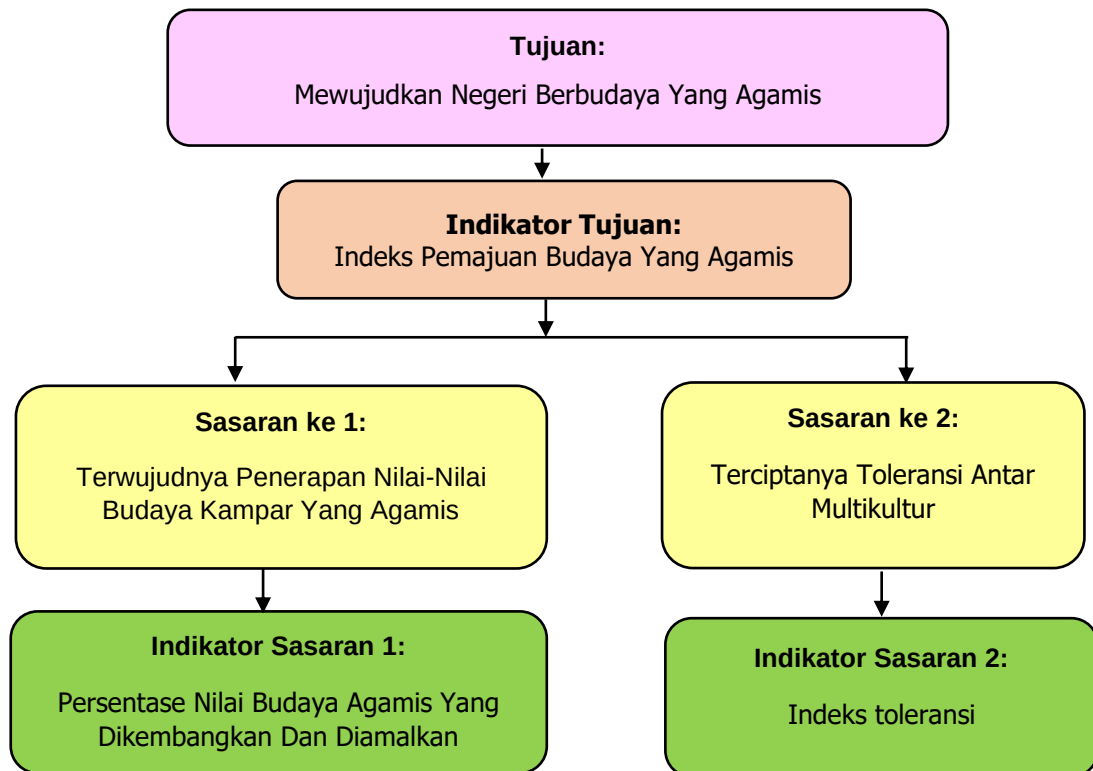
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPD Kabupaten Kampar selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RJPD Kabupaten Kampar tahun 2005-2025 berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kampar periode kelima. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Kampar akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Kampar. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (*impact*) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

5.2.1 Tujuan dan Sararan pada Misi Satu RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Satu (Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global) dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut.



Gambar 5.1: Penjabaran Misi Satu, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi satu dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

5.2.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis dengan indicator tujuan: Indeks pemajuan budaya yang agamis.

5.2.1.2 Sasaran

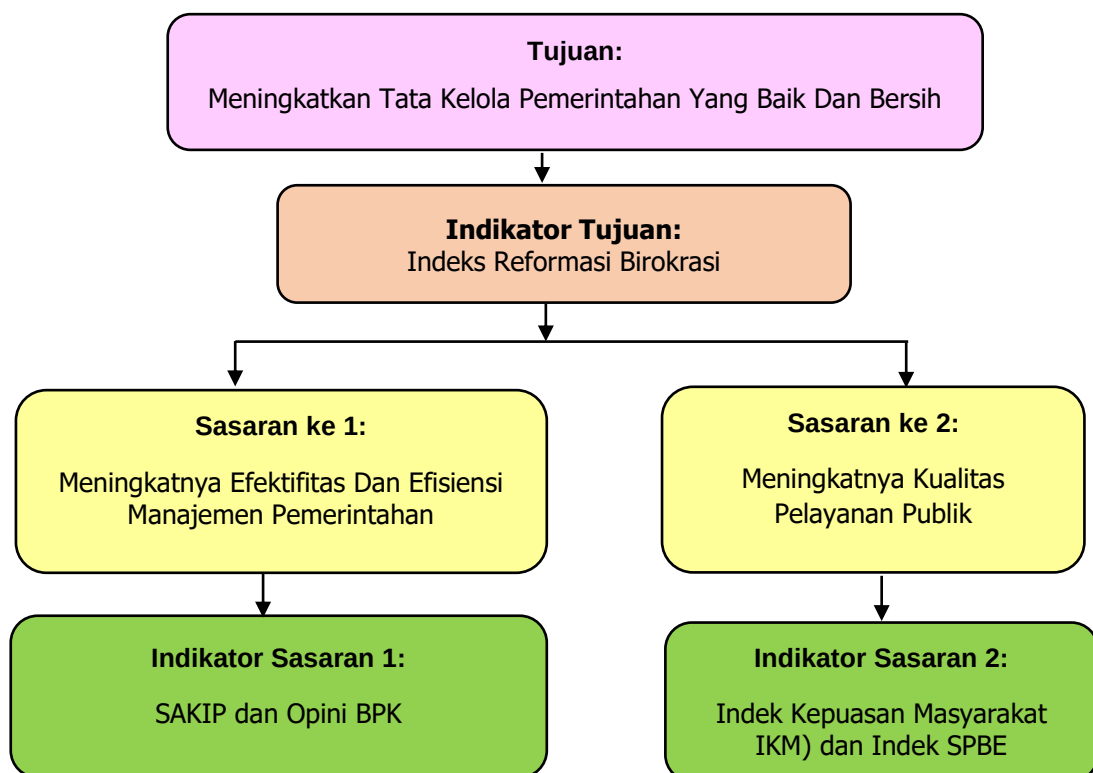
Untuk mencapai tujuan di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis. Adapun indikator sasaran untuk menggambarkan capaian kinerja adalah Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan.

b) Terciptanya toleransi antar multikultur. Adapun indikator sasaran untuk menggambarkan capaian kinerja adalah Indeks toleransi.

5.2.2 Tujuan dan Sararan pada Misi Dua RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Dua (Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat) dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut.



Gambar 5.2: Penjabaran Misi Dua, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dua dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

5.2.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menggunakan indicator tujuan yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi.

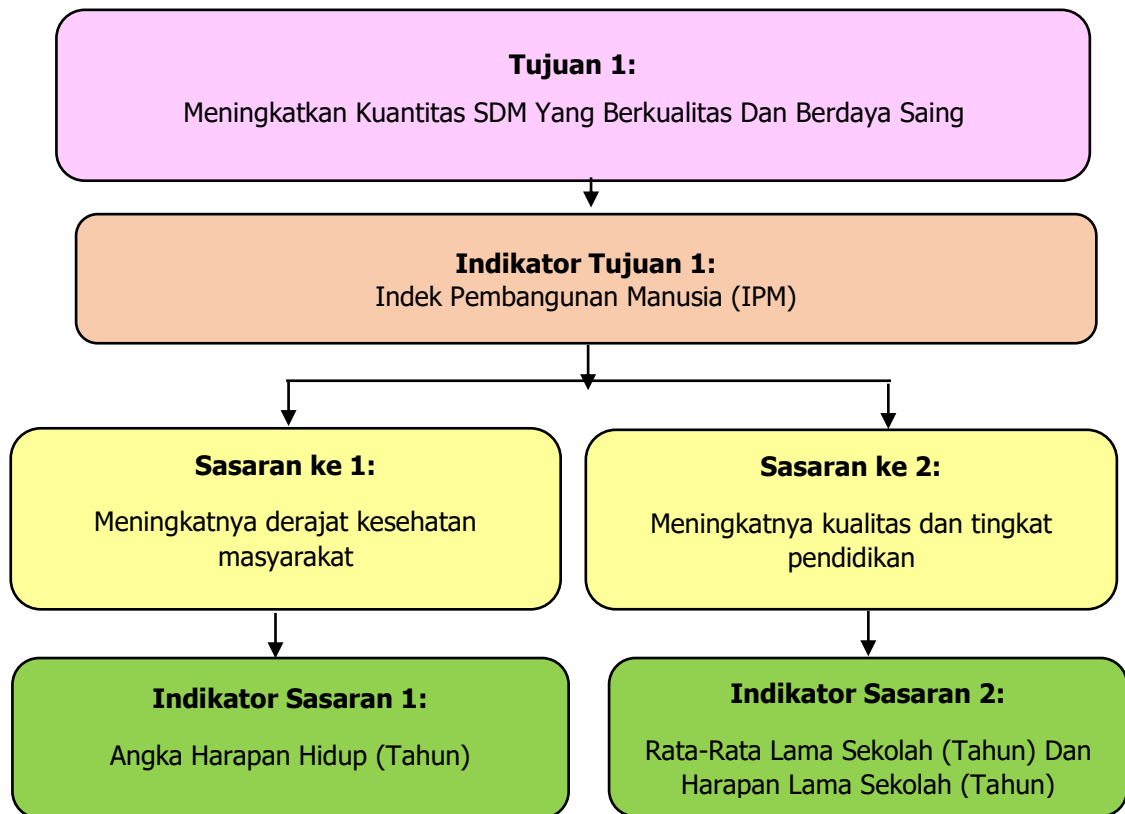
5.2.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas maka ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Nilai SAKIP dan Opini BPK.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks SPBE.

5.2.3 Tujuan dan Sararan pada Misi Tiga RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Tiga (Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan). Pada Misi Tiga terdapat Tiga tujuan antara lain Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat serat Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan dapat dilihat pada Gambar 5.3.1; 5.3.2 dan 5.3.3 berikut



Gambar 5.3.1: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Satu dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tiga dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

5.2.3.1 Tujuan

1) Tujuan Satu

Tujuan satu yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan indicator tujuan satu adalah: Indek Pembangunan Manusia (IPM).

5.2.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan satu di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

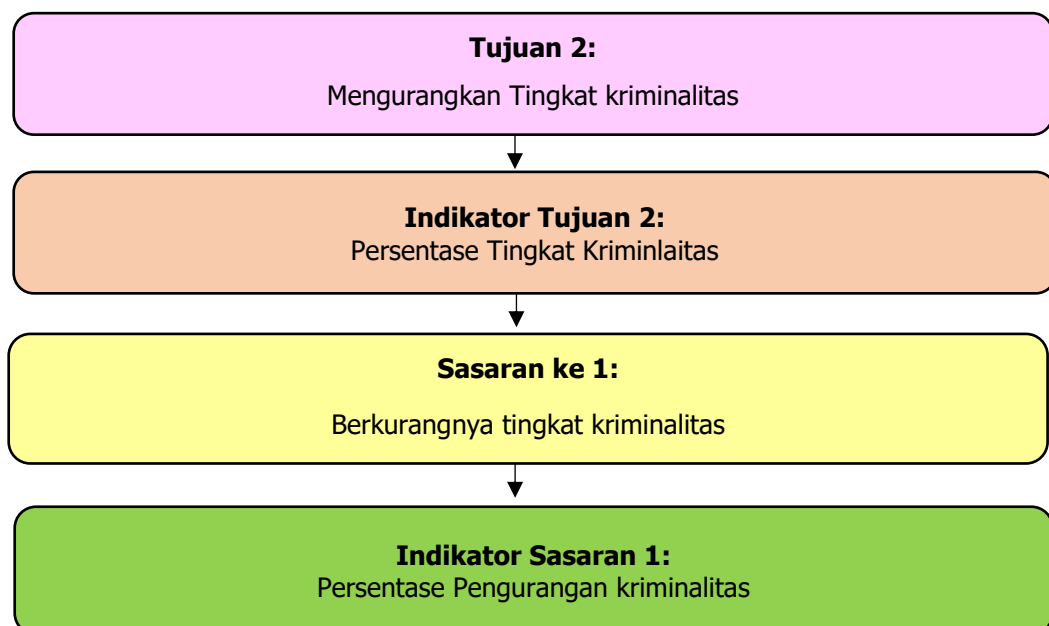
- a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Angka harapan hidup (Tahun).
- b) Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah Rata-rata lama sekolah (Tahun) dan Harapan lama sekolah (Tahun).

2) Tujuan Dua

Tujuan dua yang ingin dicapai adalah Mengurangkan tingkat kriminalitas dengan indicator adalah: Persentase Tingkat Kriminlaitas.

5.2.3.3 Sasaran

Untuk mencapai tujuan dua di atas telah ditetapkan ada 1 (satu) sasaran yang harus dicapai yaitu: Berkurangnya tingkat kriminalitas. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Pengurangan kriminalitas.



Gambar 5.3.2: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Dua dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

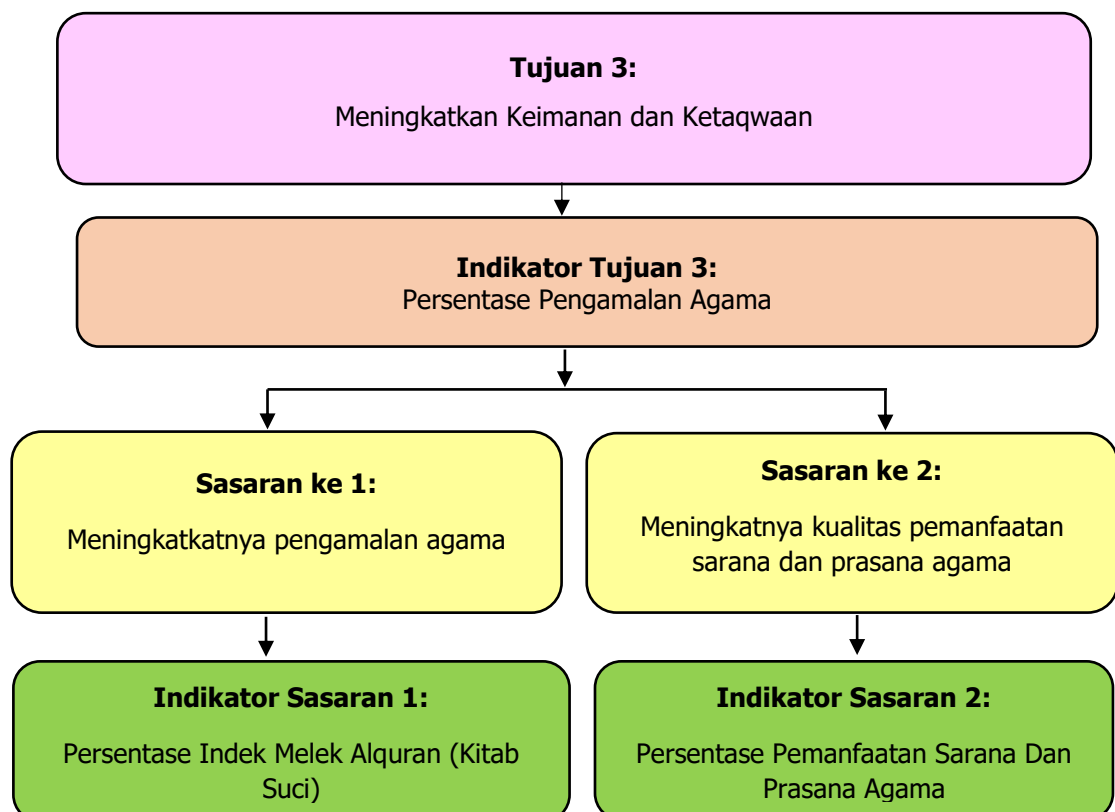
3) Tujuan Tiga

Tujuan tiga yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan dengan indicator tujuan satu adalah: Persentase Pengamalan Agama.

5.2.3.4 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tiga di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

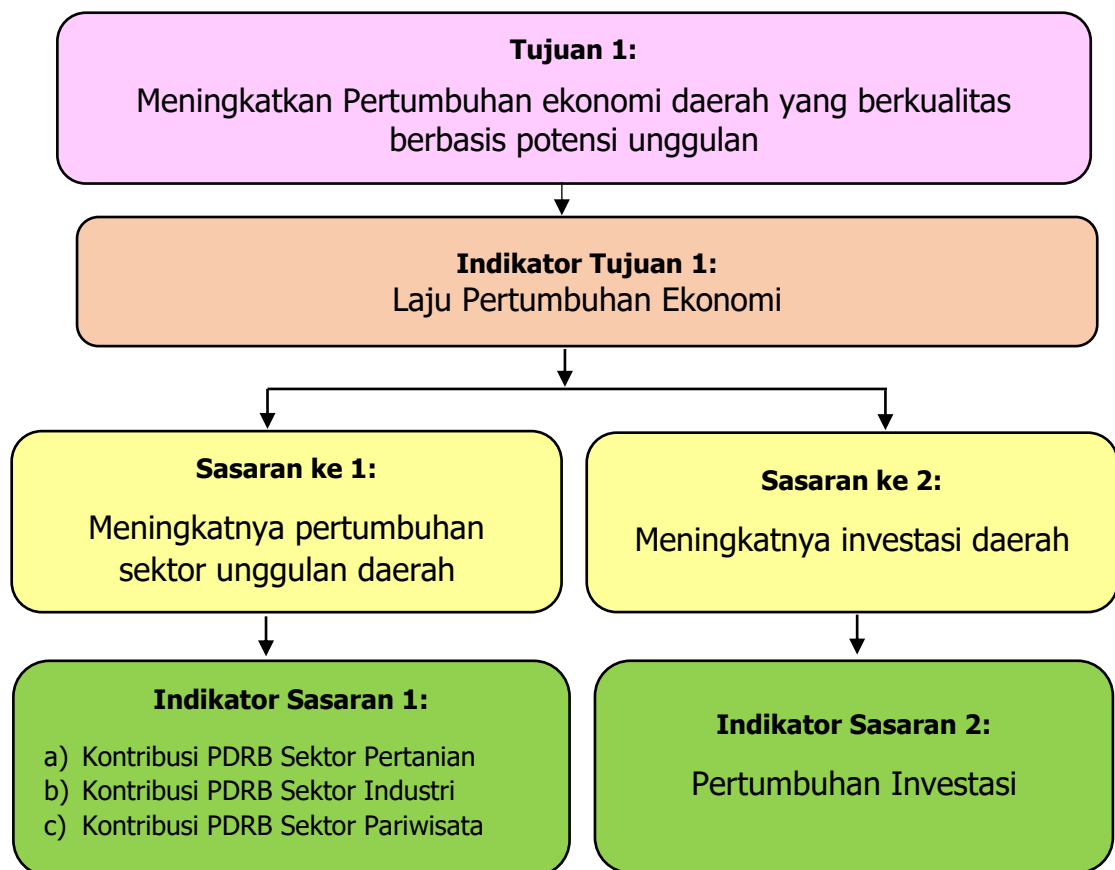
- a) Meningkatkan pengamalan agama. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Indeks Melek Alquran (Kitab Suci).
- b) Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama.



Gambar 5.3.3: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Tiga dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

5.2.4 Tujuan dan Sararan pada Misi Empat RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Empat (Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional). Pada Misi empat terdapat Tiga tujuan antara lain Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan dan Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan serat Meningkatkan Daya beli masyarakat. Tujuan satu dapat dilihat pada Gambar 5.4.1 berikut.



Gambar 5.4.1: Penjabaran Misi Empat, Tujuan Satu dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

5.2.4.1 Tujuan

- a) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan dengan indicator tujuan satu adalah: Laju Pertumbuhan Ekonomi.
- b) Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan dengan indicator tujuan dua adalah Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c) Meningkatkan Daya beli masyarakat dengan indicator tujuan tiga dengan indicator Penurunan Tingkat Kemiskinan

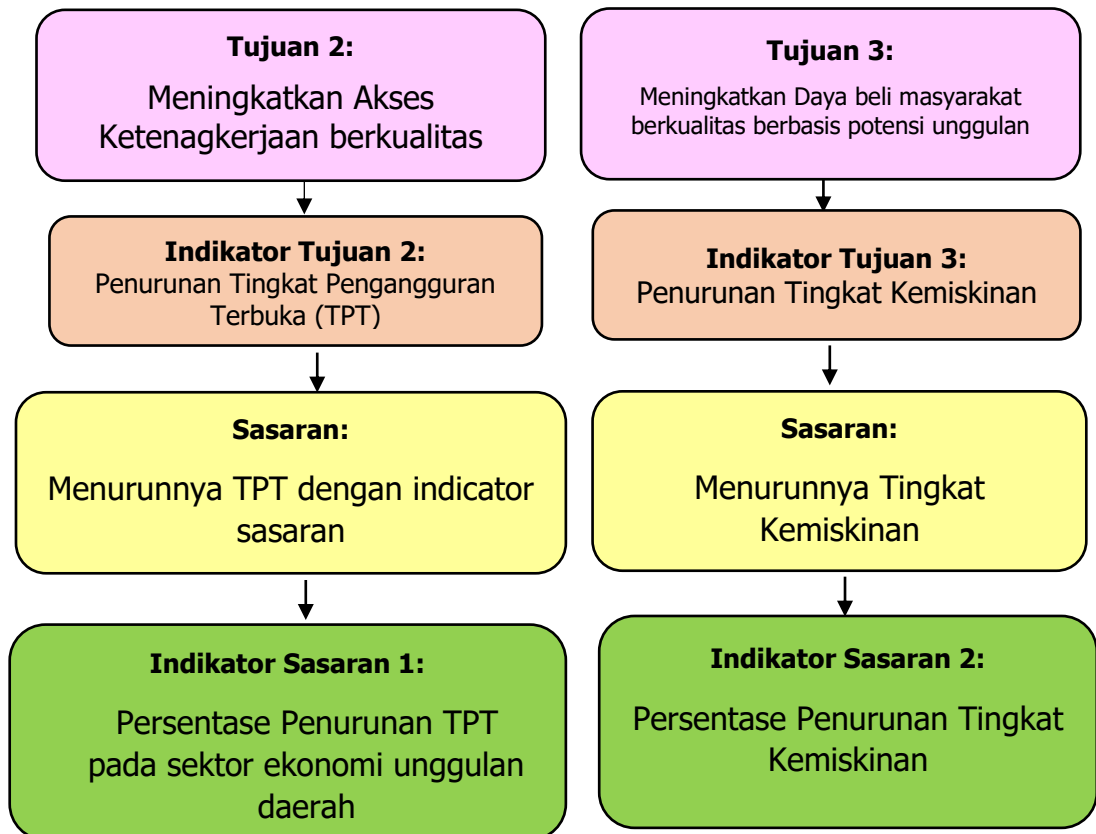
5.2.4.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan satu telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

- a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Kontribusi PDRB Sektor Industri serta Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata.
- b) Meningkatnya investasi daerah. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Pertumbuhan Investasi.

Untuk mencapai tujuan dua telah ditetapkan satu sasaran yang harus dicapai yaitu: Menurunnya TPT dengan indicator sasaran yaitu Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah, jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.4.2

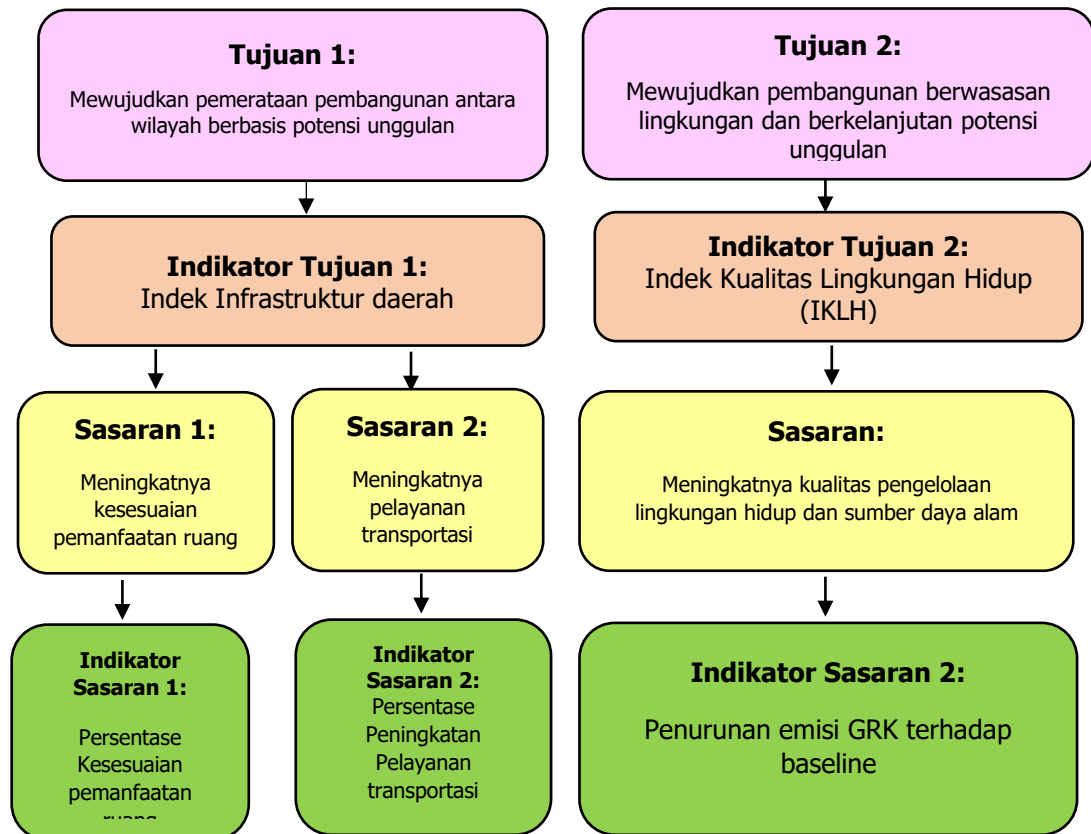
Sedangkan mencapai tujuan tiga ditetapkan satu sasaran yang harus dicapai yaitu Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan indicator sasaran yaitu Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan, jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.4.2



Gambar 5.4.2: Penjabaran Misi Empat, Tujuan Dua dan Tujuan Tiga dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

5.2.5 Tujuan dan Sararan pada Misi Lima RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Lima (Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan). Pada Misi lima terdapat dua tujuan antara lain Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah dan Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan satu dan dua dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut.



Gambar 5.5: Penjabaran Misi Lima, Tujuan Satu dan Dua dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

5.2.5.1 Tujuan

- Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah dengan indicator tujuan satu adalah: Indek Infrastruktur daerah.
- Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan indicator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

5.2.5.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan satu telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

- Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang.

- b) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Penurunan emisi GRK terhadap baseline.

Tabel 5.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD
Kabupaten Kampar 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Visi: Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025									
Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar Yang Menjamin Sistem Bermasyarakat Dan Bernegara Untuk Menghadapi Tantangan Global									
1.1	Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis		Indeks pemajuan budaya yang agamis	NA	57,47	58,30	59,45	60,25	60,25
	1.1.1	Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1.2	Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B
Misi 2: Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat									
2.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	52,43	57,63	62.50	67.50	70.00	70.00
	2.1.1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP	Nilai B	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2.1.2	Meningkatnya	Indek Kepuasan	86,78	87,44	88,10	88,77	89,45	89,45

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026		
		kualitas pelayanan publik	Masyarakat (IKM)							
			Indeks SPBE	C	C	C	B	B	B	
Misi 3: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan										
3.1	Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,02	73,90	74,18	74,54	74,90	74,90	
	3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	70,83	71,04	71,19	71,34	71,49	71,49	
	3.1.2	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,27	9,53	9,63	9,73	9,82	9,82	
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13,55	14,02	14,14	14,26	14,40	14,40	
3.2	Mengurangkan tingkat kriminalitas		Persentase Tingkat Kriminlaitas	3,24	3,20	3,15	3,11	3,09	3,09	
	3.2.1	Berkurangnya tingkat kriminalitas	Persentase Pengurangan kriminalitas	-0,34	-0,30	-0,25	-0,21	-0,18	-0,18	
3.3	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan		Persentase Pengamalan Agama	100	100	100	100	100	100	
	3.3.1	Meningkatkatnya pengamalan agama	Persentase Indek melek Alquran (Kitab Suci)	65,71	68,45	69,81	71,17	72,53	72,53	
	3.3.2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan	Persentase Pemanfaatan sarana dan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	
		sarana dan prasana agama	prasana agama						
Misi 4: Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional									
4.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,45	2,21-3,46	2,47-3,47	2,56-3,48	2,62-3,49	2,62-3,49
	4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	34,15	34,27	34,39	34,51	34,63	34,63
			Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	31,15	31,75	32,37	33,00	33,64	33,64
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%)	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	0,99
	4.1.2	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	4,40	2,87	3,83	4,79	5,75	4,80
4.2	Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan		Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27	4,20	4,13	4,06	3,99	3,99
	4.2.1	Menurunnya TPT	Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	-6,54	-1,72	-1,69	-1,67	-1,64	-1,64
4.3	Meningkatkan Daya beli masyarakat		Penurunan Tingkat	7,82	7,51	7,25	7,04	6,88	6,88

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	
			Kemiskinan						
	4.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan	-5,96	-3,96	-3,42	-2,88	-2,34	-2,34
Misi 5: Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan									
5.1	Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah		Indek Infrastruktur daerah	58,69	59,22	59,75	60,29	60,83	60,83
	5.1.1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Na	80,42	85,31	90,21	95,10	95,10
	5.1.2	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Na	60,04	74,20	86,60	100,00	100,00
5.2	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,13	70,96	71,38	71,79	72,21	72,21
	5.2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penurunan emisi GRK terhadap baseline (GgCO2-e)	36.620,73	35.940,55	34.102,87	33.762,78	32.840,49	32.840,49

BAB VI

Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran dan target pembangunan selama periode 2023-2026 yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka dirumuskan sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

6.1.1 Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPD
Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1						
Mewujudkan pembangunan nilai- nilai budaya masyarakat Kampar	Tujuan (1) = Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	IK = indeks pemajuan budaya yang agamis	Terwujudnya penerapan nilai- nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	Peningkatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan serta pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara
			Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman
Misi 2						
Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset	Tujuan (2) = Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan	IK = indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP, Opini BPK	Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
daerah dan pelayanan masyarakat	bersih		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM, Indeks SPBE	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Misi 3						
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan	Tujuan (3.1) = Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	IK = Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan
	Tujuan (3.2) Mengurangkan tingkat kriminalitas	IK= Tingkat Kriminlaitas	Berkurangnya tingkat kriminalitas	Persentase Pengurangan kriminalitas	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
	Tujuan (3.3) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	Ik= Pengamalan Agama	Meningkatkatnya pengamalan agama	Persentase Melek Kitab Suci (Alquran)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama	Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
Misi 4						
Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional, dan internasional	Tujuan (4.1) = Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	IK = Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor pertanian, industri, pariwisata	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan
					Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
					Peningkatan dayatarik destinasi, pengelolaan	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi	dan promosi pariwisata	
					Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
					Peningkatan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
	Tujuan (4.2) Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan	IK= Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya TPT	Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan
	Tujuan (4.3) Meningkatkan Daya beli masyarakat	IK= Penurunan Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan tingkat kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah
Misi 5						
Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang yang	Tujuan (5.1) = Mewujudkan pemerataan pembangunan	IK=Indek Infrastruktur daerah	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan jaringan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan	antara wilayah		peruntukan		sarana prasarana yang merata	prasarana yang merata
					Pengembangan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu
			Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Pengembangan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu
	Tujuan (5.2) = Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	IK = IKLH	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penurunan emisi GRK terhadap baseline	Peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
					Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan

6.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Setelah dirumuskan, maka setiap pernyataan arah kebijakan dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, arah kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dengan prioritas arah kebijakan menyesuaikan tema/fokus pembangunan tahun berkenaan, lebih jelas di lihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Meningkatkan Intensitas pemberian pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Meningatkan Kualitas pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Memantapkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat
3	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
4	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik
5	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan Sarana dan Prasana IT untuk pelayanan berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Memantapkan kualitas dan Publik pelayanan berbasis IT
6	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
7	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Memantapkan kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT
8	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat	Memantapkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
9	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana Alquran	Memantapkan kualitas pendidikan Alquran
10	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
11	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
12	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
13	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan
14	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
15	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk pemenuhan kebutuhan lokal
16	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya) sebagai sub sector unggulan
17	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan sebagai sub sector unggulan
18	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
19	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata Berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, dan kualitas pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT
20	Meningkatkan iklim investasi yang	Meningkatkan iklim investasi	Meningkatkan iklim investasi	Meningkatkan iklim investasi yang

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	kondusif	yang kondusif	yang kondusif terutama pada sector unggulan	kondusif pada sector unggulan terutama sector industry pengolahan
21	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
22	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.
23	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah
24	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata
25	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait
26	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas
27	Membangun dan mengembangkan	Membangun dan	Membangun dan	Membangun dan

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	sistem Transportasi terpadu	mengembangkan sistem Transportasi terpadu	mengembangkan sistem Transportasi terpadu	mengembangkan sistem Transportasi terpadu
28	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
29	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar untuk 5 (lima) tahun mendatang memperhatikan arahan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039 sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039.

Dengan mengacu pada tujuan penataan ruang dan sasaran pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Kampar, konsepsi struktur ruang wilayah Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2039 sebagai berikut:

1. Sebagai antisipasi terhadap proses globalisasi yang terus berlangsung, **struktur ruang wilayah Kabupaten Kampar pada saat ini maupun ke depan secara bertahap harus terbuka dan bersifat orientasi keluar (*outward looking*)**. Namun, orientasi keluar ini tidak boleh sampai menyebabkan terputusnya basis perekonomian setempat pada proses perekonomian global dan hilangnya akar sosial-budaya lokal. Investasi asing di wilayah Kabupaten Kampar perlu diupayakan agar senantiasa terkait dengan potensi SDA, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan bahan-bahan lain yang bersifat lokal atau setempat;
2. **Orientasi ke luar**, dimana struktur ruang wilayah Kabupaten Kampar perlu ditunjang dengan pusat-pusat permukiman perkotaan jenjang PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), serta dilengkapi dengan simpul-simpul jaringan transportasi internasional berupa pelabuhan bandar udara Pekanbaru yang dekat dengan wilayah Kabupaten Kampar, yang tidak hanya handal dalam pelayanan tetapi juga mampu bersaing dengan prasarana serupa di daerah dan Negara lain. Perkotaan jenjang PKN berfungsi sebagai “Gerbang Utama Antar Bangsa”, yang dilengkapi

dengan Bandar Udara jenjang Hub Internasional (*International Hub*), untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaksi ekonomi wilayah Kabupaten Kampar ke beberapa negara-negara ASEAN dengan tersambungannya jalan tol pada khususnya, yang secara bertahap juga dikembangkan untuk melayani negara-negara belahan dunia lainnya.

3. Secara nasional **sistem permukiman perkotaan** ditata menurut jenjang fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Terkait pada sistem permukiman perkotaan nasional ini, untuk keperluan penataan struktur ruang eksternal wilayah Kabupaten Kampar dibutuhkan pengembangan pusat-pusat permukiman perkotaan dengan jenjang sebagai PKN dan PKW;
4. Secara mikro, tata ruang wilayah Kabupaten Kampar harus pula ditunjang oleh **struktur ruang internal yang integratif terhadap struktur ruang eksternal** (lokasi PKN, PKW, dan simpul-simpul kegiatan transportasi internasional). Struktur ruang internal wilayah Kabupaten Kampar ini dibentuk melalui penataan sistem permukiman perkotaan pada jenjang di bawah PKW, yaitu PKL dan jenjang dibawah yang disebut sebagai Sub PKL (Sub Pusat Kegiatan Lokal);
5. Jenjang PKL secara umum akan terkait dengan ibukota-ibukota Kabupaten dan Perkotaan lain yang bukan ibukota Kabupaten namun telah menunjukkan perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan perkotaannya
6. Untuk menciptakan interaksi dan hubungan langsung ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia, **PKN perlu dilengkapi fasilitas bandar udara dengan kelas fungsi “Pusat Penyebaran Primer atau Pusat Penyebaran Sekunder”**. Dalam beberapa kasus (tergantung pada kebutuhan) PKN juga dapat

- dilengkapi dengan pelabuhan kelas fungsi lebih bawah dan pelabuhan penyeberangan;
7. Khusus untuk PKW yang berlokasi di pedalaman (*upland*) maka **Pelabuhan Sungai dapat dikembangkan terdekat dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan fisik, teknis dan ekonomisnya dan dihubungkan ke PKW melalui jalan darat dan/atau sungai;**
 8. Untuk PKL yang berlokasi ditepi sungai dapat dikembangkan pelabuhan sungai dengan kelas fungsi disesuaikan kapasitas alur sungai. Pengembangan bandar udara pada PKL perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, dengan kelas fungsi "Pusat Penyebaran Tersier" atau kelas lebih bawah;
 9. **Pada tiap-tiap pusat permukiman (PKN, PKW, dan PKL) ditetapkan fungsi-fungsi utama pelayanan perkotaan** berdasarkan potensi sektor/subsektor unggulan kawasan dan peran perkotaan yang bersangkutan dalam konteks eksternal maupun internal wilayah;
 10. Untuk menciptakan interaksi ekonomi dan ruang (pola aliran barang dan penumpang) yang efisien dan kompak di antara pusat-pusat, dan antara pusat dengan kawasan-kawasan produksi di wilayah hinterland perlu dikembangkan sistem transportasi darat (utamanya jaringan jalan) secara terpadu inter dan intra moda terhadap fasilitas pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan dan bandar udara.
 11. Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten adalah kawasan budidaya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan kabupaten dan/atau menurut peraturan

perundang-undangan dimana perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

Menggunakan terminologi, notasi dan simbol berdasarkan beberapa pedoman peraturan yang telah disebut, Kawasan Budidaya Ruang Daratan di wilayah Kabupaten Kampar diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) kawasan peruntukan hutan produksi;
- b) kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c) kawasan peruntukan pertanian;
- d) kawasan peruntukan perikanan;
- e) kawasan peruntukan pertambangan dan geologi;
- f) kawasan peruntukan industri;
- g) kawasan peruntukan pariwisata;
- h) kawasan peruntukan permukiman; dan
- i) kawasan peruntukan lainnya.

Arah kebijakan penataan ruang yang termuat dalam RTRW Kabupaten Kampar 2019-2039 selain terkait dengan struktur dan pola ruang, juga memperhatikan arahan pengembangan kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah penataan ruang yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Berikut ini diuraikan kawasan strategis Kabupaten Kampar.

6.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisa yang bertumpu kepada peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis di wilayah Kabupaten Kampar terdiri atas:

1) Kawasan Strategis PEKANSIKAWAN

Pengembangan Kawasan PEKANSIKAWAN (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan) dimaksudkan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, percepatan

pengembangan daerah perbatasan, pengelolaan potensi daerah dengan saling menguntungkan demi kepentingan masyarakat. Objek kesepakatan bersama ini meliputi: bidang sosial budaya, bidang sosial ekonomi, bidang tata ruang dan lingkungan hidup, dan bidang sarana dan prasarana, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.

2) Kawasan Industri Kampar

Luas peruntukan kawasan industri yang terdapat di Kabupaten Kampar yaitu 5.850 hektar atau 0,64% dari peruntukan lahan budidaya. Pelaksanaan penggunaan kawasan tersebut terbagi kepada tiga kawasan peruntukan industri yaitu di tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tambang, Siak Hulu, dan Tapung. Kecamatan Tambang terdapat di Desa Sungai Pinang seluas lebih kurang 2.139 ha, Kecamatan Siak Hulu berada di Lintas Timur seluas lebih kurang 1.833 ha dan di Kecamatan Tapung berada di Desa Garuda Sakti sisi timur lebih kurang 1.888 ha. Diharapkan KPI tersebut dapat memberikan peningkatan kontribusi sector industri pengolahan dengan pengembangan industri berbasis sumber daya alam seperti pengembangan produk industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kakao. Selain itu industri berbahan baku hasil perikanan budidaya yang sudah dikembangkan di beberapa sentra produksi seperti di kecamatan XIII Kota Kampar dan industri lainnya seperti hasil peternakan.

6.2.2 Sosial Budaya

Kawasan strategis budaya untuk Kabupaten Kampar mencakup lokasi yaitu:

1. Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya

Candi Muara Takus merupakan salah satu peninggalan candi tertua di Pulau Sumatera yang diduga sempat menjadi pusat kerajaan maritim Sriwijaya. Candi ini berada di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, jaraknya kurang lebih 135 km dari Kota Pekanbaru. Dengan demikian amat penting untuk melestarikan Candi Muara Takus sebagai pelestarian nilai-nilai budaya masa pra Islam Kabupaten Kampar. Kawasan ini juga penting bagi penelitian kondisi masa silam di Kabupaten Kampar. Penetapan kawasan Candi Muara Takus sebagai kawasan strategis dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan kawasan PLTA Koto Panjang yang akan dapat meningkatkan daya tarik wisata Candi Muara Takus.

6.2.3 Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Didasari analisis yang bertumpu kepada fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasan strategis di wilayah Kabupaten Kampar berupa:

1. Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang. Danau PLTA Koto Panjang merupakan pembangkit listrik tenaga air yang selama ini mensuplai kebutuhan energi untuk daerah Riau – Sumbar. Posisi Danau PLTA Koto Panjang terbentang di sepanjang perbatasan Sumbar – Riau yang dilintasi jalan nasional. Disamping sebagai sumber energi, Danau PLTA Koto Panjang juga berfungsi sebagai penyangga dan pengendali hidrologis wilayah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daerah rawan bencana terutama bencana longsor serta banjir pada bagian hilir Danau PLTA Koto Panjang. Danau PLTA yang mempunyai debit yang besar, juga potensial menjadi sumber air baku serta untuk keperluan pengairan/irigasi untuk mendukung sektor pertanian di daerah *hinterlandnya*. Danau PLTA Koto Panjang juga menyimpan potensi wisata yang besar. Keindahan danau tersebut membutuhkan sentuhan

professional sehingga dapat diciptakan objek wisata unggulan di masa mendatang. Mengingat vitalnya fungsi Danau PLTA Koto Panjang maka perlu langkah-langkah mendesak untuk perlindungan dan pelestarian kawasan ini guna tetap menjaga kesinambungan suplai energi sekaligus pelestarian kawasan Danau PLTA Koto Panjang.

6.3 Kebijakan Khusus Daerah

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dibutuhkan pembangunan antar wilayah yang merata dan keikutsertaan stakeholder lainnya. Untuk melaksanakan pembangunan dimaksud, dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, untuk itu diperlukan sumber pembiayaan lainnya.

a. Pengelolaan BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba/keuntungan. Pemerintah Kabupaten Kampar, memiliki 7 (tujuh) BUMD yang diharapkan mampu berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah sesuai dengan tujuan pendirian BUMD dimaksud. Dalam rangka menjalankan tujuan tersebut BUMD memerlukan pembiayaan, maka pemerintah dapat melakukan penyertaan modal dalam rangka peningkatan kapasitas BUMD dimaksud.

b. Kerjasama Pembangunan Daerah

Dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan di semua bidang, Pemerintah Kabupaten Kampar dapat melakukan kerjasama, baik antar pemerintah maupun dengan swasta.

c. Kebijakan Khusus Daerah Lainnya

Dalam rangka mendukung kebijakan provinsi Riau dan Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 terhadap Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas, Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan, Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, serta Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, diperlukan kebijakan strategis untuk mendukung kebijakan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api (Bagian Trans Sumatera), bagian Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, antara lain:
 - a. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi (185 Km)

6.4 Program Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kampar akan dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pada subbab ini akan disajikan program pembangunan daerah, yaitu program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Program pembangunan daerah disusun dalam RPD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Visi dan Misi RPJPD menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program dan kegiatan perangkat

daerah secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 disajikan per misi yang selanjutnya dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasarannya masing-masing.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kampar

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
	Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar Yang Menjamin Sistem Bermasyarakat Dan Bernegara Untuk Menghadapi Tantangan Global														
	1.1	Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	Indeks kemajuan budaya yang agamis		22.688.501.231		22.324.860.653		22.517.407.250		22.661.611.247		90.192.380.381	OPD Terkait	
	1.1.1	Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan	100 Persen	100 Persen	1.337.036.471	100 Persen	1.208.048.491	100 Persen	1.130.968.791	100 Persen	1.034.904.754	100 Persen	5.195.444.334	OPD Terkait
2 22 02		Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Kebudayaan yang dikembangkan	1 objek	1 Objek	511.807.362	1 Objek	430.120.999	1 Objek	365.064.134	1 Objek	277.535.402	1 Objek	1.584.527.898	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dibina	45 lembaga	45 lembaga	595.229.109	45 lembaga	535.170.492	45 lembaga	492.730.656	45 lembaga	452.969.352	45 lembaga	2.380.916.436	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumen sejarah	NA dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	107.892.000	1 Dokumen	124.170.000	1 Dokumen	152.200.000	4 Dokumen	570.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dilestakikan	2 objek	2 objek	130.000.000	2 objek	134.865.000	2 objek	149.004.000	2 objek	152.200.000	2 objek	660.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum	NA	20 Persen	50.000.000	25 Persen	75.000.000	30 Persen	100.000.000	35 Persen	150.000.000	35 Persen	375.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.1.2	Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Nilai B	Nilai B	21.351.464.760	Nilai B	21.116.812.162	Nilai B	21.386.438.459	Nilai B	21.626.706.492	Nilai B	99.092.147.951	OPD Terkait
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	20 Persen	20 Persen	3.101.732.500	20 Persen	3.067.644.460	20 Persen	3.106.813.138	20 Persen	3.141.716.934	100	14.395.140.533	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20 Persen	20 Persen	8.948.181.500	20 Persen	8.849.840.985	20 Persen	8.962.838.621	20 Persen	9.063.532.508	100 Persen	41.528.510.342	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20 Persen	20 Persen	1.809.225.500	20 Persen	1.789.342.112	20 Persen	1.812.189.011	20 Persen	1.832.548.226	100 Persen	8.396.615.546	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20 Persen	20 Persen	2.352.089.410	20 Persen	2.326.239.947	20 Persen	2.355.942.132	20 Persen	2.382.410.195	100 Persen	10.916.046.952	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	20 Persen	20 Persen	5.140.235.850	20 Persen	5.083.744.658	20 Persen	5.148.655.556	20 Persen	5.206.498.630	100 Persen	23.855.834.580	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Misi 2: Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparat dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat														
	2.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks reformasi birokrasi	52,43 Indeks	57,63 Indeks	1.684.679.561.619	62,50 Indeks	1.647.999.942.039	67,50 Indeks	1.640.293.560.057	70,00 Indeks	1.639.620.646.098	310	6.612.593.709.813	OPD Terkait
	2.1.1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP, Opini BPK			1.636.144.526.351		1.604.446.344.725		1.593.230.344.168		1.595.896.418.013	-	6.429.717.633.257	OPD Terkait
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	664.543.259.073	100 Persen	646.185.855.299	100 Persen	654.323.944.255	100 Persen	661.558.958.168	100 Persen	3.025.556.364.587	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	169.687.731.098	100 Persen	152.902.326.779	100 Persen	154.854.633.210	100 Persen	156.594.362.720	100 Persen	717.505.079.406	Dinas Kesehatan
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	88.434.062.605	100 Persen	118.769.972.282	100 Persen	118.152.502.105	100 Persen	117.573.537.034	100 Persen	517.762.266.417	Rumah Sakit Umum Daerah
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	19.746.000.000	100 Persen	21.304.354.320	100 Persen	23.537.863.872	100 Persen	25.966.147.968	100 Persen	105.996.528.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	8.046.187.000	100 Persen	8.816.223.951	100 Persen	8.166.834.738	100 Persen	8.355.102.710	100 Persen	38.696.617.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	14.494.421.574	100 Persen	14.265.764.490	100 Persen	14.349.284.023	100 Persen	14.435.041.147	100 Persen	66.663.894.526	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	7.106.121.824	100 Persen	3.224.887.160	100 Persen	3.266.063.563	100 Persen	3.302.756.474	100 Persen	18.978.412.447	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	10.002.011.544	100 Persen	11.742.246.000	100 Persen	6.047.079.000	100 Persen	6.586.455.000	100 Persen	39.022.011.544	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	13.805.200.000	100 Persen	13.032.868.086	100 Persen	12.599.308.877	100 Persen	12.161.727.179	100 Persen	59.502.137.650	Dinas Sosial
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	8.946.452.076	100 Persen	8.566.171.566	100 Persen	8.160.314.250	100 Persen	7.807.871.446	100 Persen	38.591.796.131	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	4.747.112.500	100 Persen	6.055.693.620	100 Persen	7.670.099.358	100 Persen	5.716.434.901	100 Persen	28.259.780.350	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	24.008.000.000	100 Persen	24.823.431.720	100 Persen	26.283.130.124	100 Persen	27.786.520.087	100 Persen	119.880.947.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	14.558.995.631	100 Persen	10.937.457.267	100 Persen	14.582.843.265	100 Persen	14.746.675.642	100 Persen	63.718.298.718	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	7.110.833.817	100 Persen	6.353.378.651	100 Persen	6.801.181.934	100 Persen	6.444.930.616	100 Persen	30.862.210.589	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	7.584.527.581	100 Persen	8.183.098.498	100 Persen	9.040.999.582	100 Persen	9.973.714.445	100 Persen	40.713.744.056	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	12.795.000.000	100 Persen	12.429.607.950	100 Persen	12.588.313.210	100 Persen	12.330.212.845	100 Persen	58.029.095.000	Dinas Perhubungan
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	10.398.000.000	100 Persen	10.283.725.980	100 Persen	10.415.031.924	100 Persen	10.532.040.618	100 Persen	48.257.118.000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	13.015.987.778	100 Persen	12.599.987.400	100 Persen	11.880.585.600	100 Persen	11.181.373.000	100 Persen	56.074.987.778	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	7.162.086.025	100 Persen	6.498.312.893	100 Persen	5.982.986.779	100 Persen	5.500.184.753	100 Persen	28.344.811.727	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	7.698.410.000	100 Persen	9.539.451.000	100 Persen	10.240.051.560	100 Persen	13.379.338.860	100 Persen	48.259.870.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	9.878.000.000	100 Persen	9.110.580.300	100 Persen	8.557.796.400	100 Persen	8.049.972.150	100 Persen	40.927.150.000	Dinas Perikanan
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	20.437.060.561	100 Persen	17.579.151.753	100 Persen	16.195.592.980	100 Persen	14.975.212.379	100 Persen	79.231.958.267	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	13.223.288.000	100 Persen	13.425.622.838	100 Persen	13.181.307.740	100 Persen	13.279.168.430	100 Persen	61.528.509.000	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	8.033.499.802	100 Persen	7.323.169.322	100 Persen	6.792.098.836	100 Persen	6.298.796.849	100 Persen	32.660.499.208	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	109.238.629.855	100 Persen	108.725.908.813	100 Persen	110.114.156.431	100 Persen	111.351.244.682	100 Persen	509.508.631.157	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	50.267.460.062	100 Persen	46.463.002.559	100 Persen	39.712.729.796	100 Persen	41.535.307.131	100 Persen	204.498.421.875	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	12.740.560.548	100 Persen	10.896.184.142	100 Persen	9.924.999.950	100 Persen	9.771.467.376	100 Persen	48.689.460.550	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	14.199.239.719	100 Persen	13.811.974.200	100 Persen	12.716.663.600	100 Persen	11.780.280.000	100 Persen	60.403.239.719	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	16.856.442.314	100 Persen	15.913.408.649	100 Persen	15.384.023.650	100 Persen	14.849.727.105	100 Persen	72.653.373.429	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	7.325.778.035	100 Persen	10.709.761.985	100 Persen	7.956.063.681	100 Persen	7.889.553.032	100 Persen	39.215.868.885	Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	14.344.016.999	100 Persen	13.541.540.968	100 Persen	13.091.059.942	100 Persen	12.636.399.428	100 Persen	61.824.506.268	Inspektorat
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.445.775.466	100 Persen	2.189.196.531	100 Persen	2.021.384.511	100 Persen	1.840.383.730	100 Persen	9.740.901.864	Kecamatan Kampar Kiri
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	1.469.981.304	100 Persen	1.943.854.200	100 Persen	1.894.834.200	100 Persen	1.838.576.000	100 Persen	8.336.981.304	Kecamatan Tapung Hilir
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.025.958.443	100 Persen	1.833.236.527	100 Persen	1.767.740.777	100 Persen	1.566.113.985	100 Persen	8.258.363.772	Kecamatan Tapung Hulu
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	5.903.711.518	100 Persen	5.481.931.022	100 Persen	5.098.401.988	100 Persen	6.335.563.954	100 Persen	26.485.135.119	Kecamatan Tapung
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.357.193.873	101 Persen	2.135.679.757	100 Persen	2.165.372.209	100 Persen	2.344.572.706	100 Persen	10.429.272.657	Kecamatan Tambang
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	8.015.664.654	100 Persen	7.772.104.636	100 Persen	7.806.416.524	100 Persen	7.776.417.484	100 Persen	36.308.980.556	Kecamatan Kampar
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.025.958.443	100 Persen	1.833.236.527	100 Persen	1.767.740.777	100 Persen	1.566.113.985	100 Persen	8.258.363.772	Kecamatan Kampar Kiri Hulu
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.776.946.155	100 Persen	2.746.427.517	100 Persen	2.587.323.403	100 Persen	2.583.086.178	100 Persen	12.351.459.983	Kecamatan Siak Hulu
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.357.193.873	100 Persen	2.131.292.868	100 Persen	2.156.486.405	100 Persen	2.331.057.126	100 Persen	10.395.898.929	Kecamatan Xili Koto Kampar
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	1.652.524.419	100 Persen	1.634.363.176	100 Persen	1.643.962.826	100 Persen	1.672.791.200	100 Persen	7.654.392.079	Kecamatan Rumbio Jaya
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.027.248.605	100 Persen	1.852.912.033	100 Persen	1.864.083.086	100 Persen	1.779.029.272	100 Persen	8.677.704.605	Kecamatan Kampar Utara
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.183.898.562	100 Persen	2.159.897.517	100 Persen	2.176.207.360	100 Persen	2.211.015.287	100 Persen	10.120.499.476	Kecamatan Kampa
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	1.307.456.929	100 Persen	1.470.230.618	100 Persen	1.562.966.928	100 Persen	1.484.452.260	100 Persen	6.781.439.009	Kecamatan Salo

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.516.994.914	100 Persen	2.304.795.346	100 Persen	2.421.662.872	100 Persen	2.453.070.619	100 Persen	11.229.345.389	Kecamatan Bangkinang		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	1.787.000.000	100 Persen	2.070.627.300	100 Persen	2.027.282.200	100 Persen	1.967.946.000	100 Persen	9.125.000.000	Kecamatan Kuok		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.751.257.403	100 Persen	3.117.809.070	100 Persen	3.369.891.020	100 Persen	3.397.104.000	100 Persen	14.753.857.403	Kecamatan Bangkinang Kota		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	1.885.714.700	100 Persen	1.859.701.137	100 Persen	1.958.403.694	100 Persen	1.812.985.320	100 Persen	8.702.283.300	Kecamatan Kampar Kiri Tengah		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.057.458.090	100 Persen	1.921.286.790	100 Persen	1.918.053.990	100 Persen	1.788.730.500	100 Persen	8.861.908.090	Kecamatan Kampar Kiri Hilir		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	977.111.856	100 Persen	966.373.397	100 Persen	978.712.365	100 Persen	989.707.805	100 Persen	4.534.776.125	Kecamatan Gunung Sahilan		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	2.049.250.000	100 Persen	1.928.789.780	100 Persen	1.994.584.100	100 Persen	1.938.647.500	100 Persen	9.151.495.000	Kecamatan Perhentian Raja		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	1.329.677.850	100 Persen	1.496.630.743	100 Persen	1.332.937.135	100 Persen	1.347.280.517	100 Persen	6.374.889.922	Kecamatan Koto Kampar Hulu		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	6.945.092.868	100 Persen	6.816.168.947	100 Persen	6.854.773.700	100 Persen	6.581.872.720	100 Persen	31.455.886.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	Na Persen	25 Persen	3.851.170.000	25 Persen	3.635.716.294	25 Persen	3.514.768.375	25 Persen	3.392.698.321	100 Persen	16.599.024.096	Inspektorat		
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Na Persen	25 Persen	442.150.000	25 Persen	417.413.918	25 Persen	403.527.976	25 Persen	389.513.203	100 Persen	1.905.721.769	Inspektorat		
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah	100 Persen	100 Persen	9.982.350.000	100 Persen	7.274.618.100	100 Persen	7.094.659.900	100 Persen	6.883.245.000	100 Persen	35.688.850.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100 Persen	100 Persen	3.755.585.000	100 Persen	6.288.651.554	100 Persen	5.943.856.479	100 Persen	5.676.439.785	100 Persen	25.389.460.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensinya antar dokumen Pembangunan Daerah.	100 Persen	100 Persen	3.331.932.733	100 Persen	3.055.655.535	100 Persen	2.869.604.143	100 Persen	2.690.799.864	100 Persen	13.732.920.608	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	1.740.182.337	100 Persen	1.595.889.898	100 Persen	1.498.720.065	100 Persen	1.405.335.213	100 Persen	7.172.349.442	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase terlaksananya Penelitian dan Pengembangan daerah	100 Persen	100 Persen	460.532.500	100 Persen	294.455.250	100 Persen	309.623.358	100 Persen	344.696.434	100 Persen	1.615.016.050	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	100 Persen	123.781.127.373	100 Persen	111.291.611.621	100 Persen	102.466.017.239	100 Persen	94.197.437.931	100 Persen	495.124.509.492	BPKAD		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan RMD	100 Persen	100 Persen	1.384.000.000	100 Persen	1.244.354.400	100 Persen	1.145.675.200	100 Persen	1.053.224.000	100 Persen	5.536.000.000	BPKAD		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terpenuhiya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	37.932.973.737	100 Persen	37.457.721.075	100 Persen	37.800.924.127	100 Persen	37.748.925.536	100 Persen	174.863.015.164	Sekretariat DPRD		
	Program Pengelolaan Arsip	Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah	100 Persen	100 Persen	113.319.139	100 Persen	116.883.000	100 Persen	124.170.000	100 Persen	20.090.400	100 Persen	419.719.139	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah	100 Persen	100 Persen	85.757.586	100 Persen	91.708.200	100 Persen	120.031.000	100 Persen	136.980.000	100 Persen	512.757.586	Dinas Perpustakaan dan Arsip		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
	2.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM, Indeks SPBE	86,78 Indek	87,44 Indek	48.535.035.268	88,10 Indek	43.553.597.314	88,77 Indek	47.063.215.889	89,45 Indek	43.724.228.085	89,45 Indek	182.876.076.556	OPD Terkait
		Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah PSKS yang Mendapatn PKMS	262 Orang PSKS	262 Orang PSKS	3.575.200.000	262 Orang PSKS	3.375.185.436	262 Orang PSKS	3.262.904.492	262 Orang PSKS	3.149.581.825	262 Orang PSKS	15.409.558.900	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga migran yang dilakukan penanganan	100 Persen	100 Persen	40.000.000	100 Persen	37.762.200	100 Persen	36.505.980	100 Persen	35.238.105	100 Persen	172.405.000	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	160 Orang PMKS	160 Orang PMKS	1.915.600.000	160 Orang PMKS	1.808.431.758	160 Orang PMKS	1.748.271.382	160 Orang PMKS	1.687.552.848	160 Orang PMKS	8.256.475.450	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.852 KPM	34.852 KPM	1.080.000.000	34.852 KPM	1.019.579.400	34.852 KPM	985.661.460	34.852 KPM	951.428.835	34.852 KPM	4.654.935.000	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100 Persen	100 Persen	1.830.200.000	100 Persen	1.727.809.461	100 Persen	1.670.331.115	100 Persen	1.612.319.494	100 Persen	7.888.390.775	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	15 Makam	15 Makam	675.200.000	15 Makam	637.425.936	15 Makam	616.220.942	15 Makam	594.819.212	15 Makam	2.910.196.400	Dinas Sosial
		Program Pendaftaran Penduduk	Tertaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Persen	20 Persen	1.510.500.000	20 Persen	1.493.899.605	20 Persen	1.512.974.199	20 Persen	1.529.971.856	100 Persen	7.010.230.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Tertaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	20 Persen	20 Persen	945.000.000	20 Persen	934.614.450	20 Persen	946.547.910	20 Persen	957.181.995	100 Persen	4.385.745.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tercapainya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 Persen	20 Persen	730.000.000	20 Persen	721.977.300	20 Persen	731.195.740	20 Persen	739.410.430	100 Persen	3.387.930.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	20 Persen	20 Persen	100.000.000	20 Persen	98.901.000	20 Persen	100.163.800	20 Persen	101.289.100	100 Persen	464.100.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Penataan Desa	Persentase penataan desa yang terb administrasi	100 Persen	100 Persen	275.000.000	100 Persen	343.905.750	100 Persen	275.450.450	100 Persen	345.513.025	100 Persen	1.444.275.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kapasitas penatakelolaan pemerintahan desa yang akuntabel dan terb administrasi	100 Persen	100 Persen	5.730.000.000	100 Persen	1.516.781.700	100 Persen	4.676.242.200	100 Persen	1.330.151.900	100 Persen	14.813.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan	Pembanguna 1 n Kawasan Perdesaan	Pembanguna 2 n Kawasan Perdesaan	200.000.000	Pembanguna 3 n Kawasan Perdesaan	197.802.000	Pembanguna 4 n Kawasan Perdesaan	200.327.600	Pembanguna 5 n Kawasan Perdesaan	202.578.200	Pembanguna 5 n Kawasan Perdesaan	928.200.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lemmbaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	100 Persen	100 Persen	464.000.000	100 Persen	458.900.640	100 Persen	464.760.032	100 Persen	469.981.424	100 Persen	2.153.424.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang disediakan	100 Persen	100 Persen	7.490.000.000	100 Persen	7.407.684.900	100 Persen	7.502.268.620	100 Persen	7.586.553.590	100 Persen	34.761.090.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas	100 Persen	100 Persen	5.575.000.000	100 Persen	5.513.730.750	100 Persen	5.584.131.850	100 Persen	5.646.867.325	100 Persen	25.873.575.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah Ketersediaan data dan Informasi	47 Data	47 Data	250.000.000	47 Data	247.252.500	47 Data	250.409.500	47 Data	253.222.750	47 Data	1.160.250.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Index Keamanan Informasi	73 Persen	75 Persen	275.000.000	78 Persen	271.977.750	80 Persen	275.450.450	83 Persen	278.545.025	83 Persen	1.276.275.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kamor	100 Persen	100 Persen	1.643.999.979	100 Persen	2.031.404.630	100 Persen	2.057.342.262	100 Persen	2.080.455.675	100 Persen	9.122.533.318	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	70 persen	70 persen	250.000.000	70 persen	323.676.000	70 persen	385.754.800	70 persen	578.360.000	70 persen	1.836.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20 persen	20 persen	6.591.247.311	20 persen	6.476.663.950	20 persen	7.138.820.092	20 persen	7.219.021.864	100 persen	31.904.821.633	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	20 persen	20 persen	500.000.000	20 persen	449.550.000	20 persen	455.290.000	20 persen	460.405.000	100 persen	2.155.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	12.285.000	20 persen	11.045.444	20 persen	10.169.523	20 persen	9.348.885	100 persen	49.140.000	Kecamatan Kampar
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	11.283.705	20 persen	10.761.400	20 persen	10.273.500	100 persen	50.600.000	Kecamatan Kampar Kiri Hulu
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	10.150.000	20 persen	10.038.452	20 persen	10.166.626	20 persen	10.280.844	100 persen	47.106.150	Kecamatan Siak Hulu
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	10.150.000	20 persen	10.038.452	20 persen	10.166.626	20 persen	10.280.844	100 persen	47.106.150	Kecamatan XlII Koto Kampar
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	11.423.066	20 persen	11.568.919	20 persen	11.698.891	100 persen	53.603.550	Kecamatan Rumblo Jaya
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	10.384.605	20 persen	9.561.090	20 persen	8.789.550	100 persen	46.200.000	Kecamatan Kampar Utara
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	11.423.066	20 persen	11.568.919	20 persen	11.698.891	100 persen	53.603.550	Kecamatan Kampa
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	10.384.605	20 persen	14.900.400	20 persen	13.698.000	100 persen	59.100.000	Kecamatan Salo
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	15.000.000	20 persen	13.486.500	20 persen	12.417.000	20 persen	11.415.000	100 persen	60.000.000	Kecamatan Bangkinang
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	13.486.500	20 persen	14.486.500	20 persen	15.220.000	100 persen	64.050.000	Kecamatan Kuok
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	12.587.400	20 persen	12.830.900	20 persen	12.556.500	100 persen	57.550.000	Kecamatan Bangkinang Kota
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	11.423.066	20 persen	11.568.919	20 persen	11.698.891	100 persen	53.603.550	Kecamatan Kampar Kiri Tengah
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	17.802.180	20 persen	17.218.240	20 persen	16.589.800	100 persen	73.950.000	Kecamatan Kampar Kiri Hilir
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	16.500.000	20 persen	16.183.800	20 persen	14.900.400	20 persen	13.698.000	100 persen	70.500.000	Kecamatan Gunung Sahilan
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	16.500.000	20 persen	16.183.800	20 persen	14.900.400	20 persen	13.698.000	100 persen	70.500.000	Kecamatan Perhentian Raja
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan komunitas.desa	20 persen	20 persen	11.550.000	20 persen	11.423.066	20 persen	11.568.919	20 persen	11.698.891	100 persen	53.603.550	Kecamatan Koto Kampar Hulu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20 persen	20 persen	399.000.000	20 persen	448.650.900	20 persen	413.072.200	20 persen	455.839.000	100 persen	1.996.000.000	Kecamatan Kampar Kiri

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah					Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2					-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
						Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20 persen	20 persen	384.007.666	20 persen	377.622.000,00	20 persen	401.483.000,00	20 persen	418.550.000,00	100 persen	1.839.007.666	Kecamatan Tambang
						Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20 persen	20 persen	365.998.330	20 persen	361.976.008	20 persen	366.597.835	20 persen	356.202.386	100 persen	1.679.525.939	Kecamatan Kampar
						Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20 persen	20 persen	365.998.330	20 persen	361.976.008	20 persen	366.597.835	20 persen	356.202.386	100 persen	1.679.525.939	Kecamatan Xili Koto Kampar
						Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20 persen	20 persen	757.356.558	20 persen	749.033.210	20 persen	758.597.108	20 persen	767.119.642	100 persen	3.514.891.786	Kecamatan Bangkinang
						Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20 persen	20 persen	732.000.000	20 persen	710.289.000	20 persen	711.908.000	20 persen	3.881.100.000	100 persen	7.482.000.000	Kecamatan Bangkinang Kota
						Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20 persen	20 persen	366.000.000	20 persen	413.586.000	20 persen	405.622.000	20 persen	418.550.000	100 persen	1.866.000.000	Kecamatan Kampar Kiri Hilir
						Misi 3: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan										-	-	
				3.1	Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,02 Indek	73,90 Indek	581.159.003.183	74,18 Indek	680.206.303.715	74,54 Indek	754.266.478.405	74,90 Indek	818.340.827.760	74,90 Indek	2.833.972.613.063	
				3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,83 Tahun	71,04 Tahun	168.063.986.058	71,19 Tahun	198.222.886.135	71,34 Tahun	186.550.624.891	71,49 Tahun	219.445.687.520	71,49 Tahun	772.283.184.605	
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	94.082.949.738	100 Persen	93.048.978.120	100 Persen	94.237.057.609	100 Persen	95.295.773.043	100 Persen	436.638.969.733	Dinas Kesehatan
						Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	33.951.670.624	100 Persen	59.385.555.000	100 Persen	50.040.510.000	100 Persen	73.550.650.000	100 Persen	257.101.670.624	RSUD
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	100 Persen	100 Persen	11.363.131.209	100 Persen	11.238.250.397	100 Persen	11.381.744.018	100 Persen	11.509.613.334	100 Persen	52.736.291.941	Dinas Kesehatan
						Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	100 Persen	100 Persen	12.951.347.764	100 Persen	11.824.376.775	100 Persen	4.264.285.679	100 Persen	3.159.175.648	100 Persen	52.736.291.941	RSUD
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Puskesmas dan fasilitas kesehatannya memenuhi sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 Persen	100 Persen	267.153.841	100 Persen	264.217.820	100 Persen	267.591.439	100 Persen	270.597.721	100 Persen	1.239.860.975	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang menjalankan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 Persen	100 Persen	365.720.722	100 Persen	361.701.452	100 Persen	366.319.773	100 Persen	370.435.228	100 Persen	1.697.309.873	Dinas Kesehatan
					Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility rate (TFR)	20 Persen	20 Persen	316.077.827	20 Persen	341.022.689	20 Persen	376.774.884	20 Persen	415.644.871	100 Persen	1.696.705.774	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	100 Persen	100 Persen	8.101.882.451	100 Persen	14.568.805.026	100 Persen	17.672.578.395	100 Persen	26.110.516.137	100 Persen	79.965.294.296	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	20 Persen	20 Persen	6.664.051.883	20 Persen	7.189.978.857	20 Persen	7.943.763.094	20 Persen	8.763.281.538	100 Persen	35.772.630.507	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				3.1.2	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah			413.095.017.125		481.983.417.580		567.715.853.514		598.895.140.240	-	2.061.689.428.459	
					Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9,27 Tahun	9,53 Tahun	395.801.945.138	9,63 Tahun	462.264.751.346	9,73 Tahun	545.006.313.675	9,82 Tahun	572.170.384.557	9,82 Tahun	2.320.189.273.836	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
					Program Pengembangan Kurikulum	Rata-rata Nilai UN SD dan SMP	55,13 Persen	60 Persen	445.000.000	80,36 Persen	458.541.000	80,50 Persen	467.707.000	90,00 Persen	475.625.000	90,50 Persen	2.145.000.000	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi PAUD/SD/SMP/Non formal	28,33 Persen	28,67 Persen	550.000.000	29,34 Persen	606.892.500	30,00 Persen	620.850.000	30,78 Persen	620.215.000	31,67 Persen	2.790.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga
		Program Pengendalian Perzinahan Pendidikan	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	179.820.000	100 Persen	206.950.000	100 Persen	228.300.000	100 Persen	900.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terjadinya Kolektarian Bahasa Daerah Kompar	0 Jenis	5 Jenis	350.000.000	5 Jenis	359.640.000	5 Jenis	372.510.000	5 Jenis	380.500.000	5 Jenis	1.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik	68 Persen	70 Persen	12.492.748.673	72 Persen	14.658.980.983	75 Persen	17.475.463.914	79 Persen	21.061.160.627	80 Persen	77.583.179.482	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	55 persen	60 Persen	2.460.000.000	64 Persen	2.526.471.000	70 Persen	2.533.068.000	75 Persen	2.671.110.000	80 Persen	11.840.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Peningkatan Kegiatan Kepemudaan bagi pemuda dan Siswanya	21 Kecamatan	21 Kecamatan	350.000.000	21 Kecamatan	361.887.750	21 Kecamatan	383.167.925	21 Kecamatan	405.085.056	21 Kecamatan	1.747.681.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan	440.000 Pengunjung	445.000 Pengunjung	449.623.410	455.000 Pengunjung	512.487.000	465.000 Pengunjung	575.321.000	465.000 Pengunjung	791.440.000	465.000 Pengunjung	2.754.623.410	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Kuno	Adanya pengumpulan naskah kuno	30 Naskah	30 Naskah	45.699.904	30 Naskah	53.946.000	30 Naskah	74.502.000	40 Naskah	91.320.000	40 Naskah	315.699.904	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	3.2	Mengurangkan Tingkat Kriminalitas	Persentase Tingkat Kriminalitas	3,24 Persen	3,20 Persen	16.937.965.147	3,15 Persen	18.291.212.242	3,11 Persen	16.463.328.675	3,09 Persen	15.467.777.190	3,09 Persen	67.160.283.253	
	3.2.1	Berkurangnya Tingkat Kriminalitas	Persentase penurunan Tingkat Kriminalitas	0,34 Persen	0,30 Persen	16.937.965.147	0,25 Persen	18.291.212.242	0,21 Persen	16.463.328.675	0,18 Persen	15.467.777.190	0,18 Persen	67.160.283.253	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20 Persen	20 Persen	397.874.660	20 Persen	429.274.929	20 Persen	474.279.327	20 Persen	523.208.361	100 Persen	2.135.791.177	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 Persen	100 Persen	223.951.375	100 Persen	241.625.618	100 Persen	266.957.206	100 Persen	294.497.850	500 Persen	1.202.170.982	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Lembaga	1 Lembaga	2.880.270.167	1 Lembaga	3.107.581.088	1 Lembaga	3.433.374.207	1 Lembaga	3.787.578.312	5 Lembaga	15.461.290.255	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	tercapainya APE	1 Kegiatan	1 Kegiatan	52.982.214	1 Kegiatan	57.163.570	1 Kegiatan	63.156.495	1 Kegiatan	69.672.035	5 Kegiatan	284.408.525	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100 Persen	100 Persen	952.893.191	100 Persen	1.028.095.521	100 Persen	1.135.879.176	100 Persen	1.253.062.169	100 Persen	5.115.130.648	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak	100 Persen	100 Persen	1.148.542.482	100 Persen	1.239.185.455	100 Persen	1.369.099.392	100 Persen	1.510.342.552	100 Persen	6.165.376.043	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	11.281.451.058	100 Persen	12.188.286.061	100 Persen	9.720.582.872	100 Persen	8.029.415.910	100 Persen	47.131.355.860	Satuan Polisi Pamong Praja
	3.3	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	Pengamalan Agama											-	
	3.3.1	Meningkatkatnya pengamalan agama	Persentase indeks melek Alquran (KIKAS-Suoh)	65,71 persen	68,45 persen	19.060.000.000	69,81 persen	18.294.617.070	71,17 persen	18.528.208.666	72,53 persen	18.736.365.637	72,53 persen	74.619.191.373	
	3.3.2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana agama	100 persen	100 persen	19.060.000.000	100 persen	18.294.617.070	100 persen	18.528.208.666	100 persen	18.736.365.637	100 persen	74.619.191.373	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	20 Persen	20 Persen	19.060.000.000	20 Persen	18.294.617.070	20 Persen	18.528.208.666	20 Persen	18.736.365.637	100 Persen	86.410.887.000	Sekretariat Daerah
	Misi 4: Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional												-	-	
	4.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,45 Persen	2,21-3,46 Persen	56.720.332.632	2,47-3,41 Persen	55.071.614.991	2,56-3,41 Persen	54.614.184.729	2,62-3,41 Persen	54.169.962.072	2,62-3,41 Persen	220.576.094.425	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
	4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor pertanian, industri dan pariwisata	22,08 Persen	22,32 Persen	53.203.332.632	22,57 Persen	50.857.533.291	22,83 Persen	50.535.614.129	23,09 Persen	50.203.630.072	23,09 Persen	204.800.110.125	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 Persen	100 Persen	499.492.477	100 Persen	483.260.604	100 Persen	489.431.031	100 Persen	494.929.591	100 Persen	2.278.596.687	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 Persen	100 Persen	8.197.297.000	100 Persen	8.107.208.706	100 Persen	8.210.724.172	100 Persen	8.302.968.356	100 Persen	38.043.655.377	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Persen	100 Persen	10.436.532.004	100 Persen	9.322.670.803	100 Persen	8.670.210.677	100 Persen	8.162.294.092	100 Persen	42.004.970.668	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 Persen	100 Persen	6.752.064.000	100 Persen	6.677.858.817	100 Persen	6.763.123.881	100 Persen	6.839.104.857	100 Persen	31.336.329.024	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 Persen	100 Persen	993.714.000	100 Persen	982.793.083	100 Persen	995.341.704	100 Persen	1.006.523.967	100 Persen	4.611.826.674	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 Persen	100 Persen	136.375.128	100 Persen	134.876.365	100 Persen	136.598.510	100 Persen	138.133.139	100 Persen	632.916.966	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 Persen	100 Persen	511.488.000	100 Persen	505.866.747	100 Persen	512.325.817	100 Persen	518.081.592	100 Persen	2.373.815.808	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	100 Persen	100 Persen	120.517.191	100 Persen	119.927.707	100 Persen	120.714.598,1	100 Persen	122.070.778	100 Persen	559.320.283	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	100 Persen	100 Persen	990.000.000	100 Persen	979.119.900	100 Persen	991.621.620	100 Persen	1.002.762.090	100 Persen	4.594.590.000	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 Persen	100 Persen	722.172.915	100 Persen	669.467.109	100 Persen	636.796.216	100 Persen	606.057.689	100 Persen	3.032.429.661	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
			Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 Persen	100 Persen	1.640.114.000	100 Persen	1.622.089.147	100 Persen	1.642.800.507	100 Persen	1.661.256.710	100 Persen	7.611.769.074	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 Persen	100 Persen	2.050.000.000	100 Persen	2.067.930.000	100 Persen	2.317.840.000	100 Persen	2.435.200.000	100 Persen	10.350.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	224.775.000	100 Persen	248.340.000	100 Persen	228.300.000	100 Persen	1.100.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ruang lingkup Kabupaten Kampar	100 Persen	100 Persen	350.000.000	100 Persen	314.685.000	100 Persen	289.730.000	100 Persen	266.350.000	100 Persen	1.400.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.178 Ton	2.287 Ton	3.100.000.000	2.401 Ton	2.787.210.000	2.521 Ton	2.814.520.000	2.647 Ton	2.739.600.000	2600 Ton	13.200.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	59.103 Ton	59.494 Ton	4.833.301.296	59.885 Ton	3.416.580.000	60.783 Ton	3.145.640.000	61.695 Ton	2.891.800.000	61.695 Ton	16.233.301.296	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Terjaganya Kelestarian Sumberdaya Perairan/Perikanan	100 Persen	100 Persen	2.600.000.000	100 Persen	1.888.110.000	100 Persen	1.738.380.000	100 Persen	1.598.100.000	100 Persen	8.900.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	61.281 Ton	61.781 Ton	1.950.000.000	62.286 Ton	1.708.290.000	63.304 Ton	1.696.990.000	64.342 Ton	1.750.300.000	64.295 Ton	8.200.000.000	Dinas Perikanan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata	400 DTW	400 DTW	1.611.663.417	400 DTW	1.593.951.235	400 DTW	1.467.548.474	400 DTW	1.349.123.446	400 DTW	6.930.152.691	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase publikasi dan event wisata	100 Persen	100 Persen	786.469.303	100 Persen	777.826.005	100 Persen	716.143.218	100 Persen	658.353.453	100 Persen	3.381.818.002	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Industri Pariwisata	100 Persen	100 Persen	719.955.501	100 Persen	695.724.391	100 Persen	619.646.681	100 Persen	543.406.751	100 Persen	2.713.733.323	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	23,53 Persen	29,41 Persen	120.000.000	35,29 Persen	135.000.000	41,18 Persen	145.200.000	47,06 Persen	159.720.000	47,06 Persen	559.920.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi masyarakat	20 persen	20 persen	1.242.881.300	20 persen	1.838.042.178	20 persen	2.005.284.243	20 persen	2.185.248.941	100 persen	8.581.169.900	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Pola Pangan Harapan	20 persen	2.349.287.400	20 persen	3.238.270.758	20 persen	3.540.514.093	20 persen	3.866.390.935	100 persen	15.308.655.400	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan	20 persen	84.071.300	20 persen	253.260.286	20 persen	272.154.482	20 persen	292.136.105	100 persen	1.078.406.200	Dinas Ketahanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terpantaunya mutu dan keamanan pangan	20 persen	155.936.400	20 persen	313.474.452	20 persen	347.994.206	20 persen	385.417.582	100 persen	1.431.436.400	Dinas Ketahanan Pangan	
		4.1.2 Meningkatkan investasi daerah	Pertumbuhan investasi	4,40 Persen	4,44 Persen	3.517.000.000	4,49 Persen	4.214.081.700	4,53 Persen	4.078.570.600	4,58 Persen	3.966.332.000	4,58 Persen	15.775.984.300	OPD Terkait
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase capaian program pengembangan iklim penanaman modal	100 Persen	1.050.000.000	100 Persen	1.753.245.000	100 Persen	1.680.434.000	100 Persen	1.617.125.000	100 Persen	7.155.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase capaian program promosi penanaman modal	100 Persen	700.000.000	100 Persen	786.712.500	100 Persen	827.800.000	100 Persen	856.125.000	100 Persen	3.700.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase capaian program pelayanan penanaman modal	100 Persen	1.150.000.000	100 Persen	1.114.884.000	100 Persen	1.051.306.000	100 Persen	1.004.520.000	100 Persen	4.980.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	392.000.000	100 Persen	352.447.200	100 Persen	324.497.600	100 Persen	298.312.000	100 Persen	1.568.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Capaian Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 Persen	225.000.000	100 Persen	206.793.000	100 Persen	194.533.000	100 Persen	190.250.000	100 Persen	940.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		4.2 Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,27 Persen	4,20 Persen	3.585.000.000	4,13 Persen	3.083.913.000	4,06 Persen	2.873.293.800	3,99 Persen	2.627.809.100	3,99 Persen	12.170.015.900	OPD Terkait
		4.2.1 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	-6,54 Persen	-1,72 Persen	3.585.000.000	-1,69 Persen	3.083.913.000	-1,67 Persen	2.873.293.800	-1,64 Persen	2.627.809.100	-1,64 Persen	12.170.015.900	OPD Terkait
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terlaksananya program-program perencanaan tenaga kerja	100 persen	200.000.000	100 persen	193.306.500	100 persen	177.977.000	100 persen	163.615.000	100 Persen	845.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	NA Persen	25 Persen	1.665.000.000	25 Persen	1.335.163.500	25 Persen	1.229.283.000	25 Persen	1.130.085.000	100 Persen	6.120.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	NA Persen	25 Persen	780.000.000	25 Persen	701.298.000	25 Persen	670.518.000	25 Persen	593.580.000	100 Persen	3.150.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	NA Persen	25 Persen	940.000.000	25 Persen	854.145.000	25 Persen	795.515.800	25 Persen	740.529.100	100 Persen	3.824.100.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		4.3 Meningkatkan Daya beli masyarakat	Penurunan Tingkat Kemiskinan	7,82 Persen	7,51 Persen	2.896.039.123	7,25 Persen	2.979.972.256	7,04 Persen	3.086.933.814	6,88 Persen	2.718.622.403	6,88 Persen	11.681.567.596	OPD Terkait
		4.3.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	-5,96 Persen	-3,96 Persen	2.896.039.123	-3,42 Persen	2.979.972.256	-2,88 Persen	3.086.933.814	-2,34 Persen	2.718.622.403	-2,34 Persen	11.681.567.596	OPD Terkait
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Kualitas Pengurus Dan Pengawas Koperasi	50 Orang	60 Orang	443.790.169	70 Orang	408.002.741	80 Orang	379.786.502	90 Orang	363.758.000	100 Orang	1.834.370.507	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan UMK Terbina	15 UMK	25 UMK	485.173.227	35 UMK	316.824.858	45 UMK	418.039.000	55 UMK	384.305.000	65 UMK	1.847.553.227	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Pengembangan UMKM	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK	15 UMK	20 UMK	485.581.100	25 UMK	441.081.467	30 UMK	410.242.035	35 UMK	380.942.217	40 UMK	1.972.324.400	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha	15 Rekomendasi	17 Rekomendasi	133.563.137	19 Rekomendasi	392.726.880	21 Rekomendasi	467.707.000	23 Rekomendasi	373.487.507	25 Rekomendasi	1.626.148.297	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Blogram Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Layanan Sarana pasar	4 Pasar	4 Pasar	258.120.465	4 Pasar	291.536.290	4 Pasar	313.008.121	4 Pasar	219.259.674	4 Pasar	1.248.614.860	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	19 Kecamatan	19 Kecamatan	217.572.897	19 Kecamatan	309.606.719	19 Kecamatan	343.000.434	19 Kecamatan	302.656.790	19 Kecamatan	1.373.985.848	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan standarisasi Metrologian	400 UTTP	654 UTTP	366.097.950	654 UTTP	342.645.167	659 UTTP	315.472.883	659 UTTP	290.015.540	659 UTTP	1.509.391.800	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Event Pemasaran yang Dilakui	3 Event	70.021.114	3 Event	67.451.484	3 Event	62.102.478	3 Event	57.091.068	3 Event	295.084.456	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrologian	100 Persen	366.097.950	100 Persen	342.645.167	100 Persen	315.472.883	100 Persen	290.015.540	100 Persen	1.509.391.800	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	100 Persen	70.021.114	100 Persen	67.451.484	100 Persen	62.102.478	100 Persen	57.091.068	100 Persen	295.084.456	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	
	Misi 5: Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan											-	-		
	5.1	Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah	Indek Infrastruktur Daerah	58,69 Indek	59,22 Indek	176.132.037.188	59,75 Indek	191.232.071.916	60,29 Indek	204.448.866.219	60,83 Indek	219.392.698.688	60,83 Indek	791.205.674.011	
	5.1.1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Na Persen	80,42 Persen	121.857.037.188	85,31 Persen	137.014.094.166	90,21 Persen	149.538.615.769	95,10 Persen	163.104.553.663	95,10 Persen	571.514.300.786	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Irigasi Dalam Kondisi	70 Persen	70 Persen	2.855.748.452	70 Persen	3.081.124.120	70 Persen	3.404.143.539	70 Persen	3.755.332.061	70 Persen	15.329.657.692	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	85 Persen	85 Persen	1.980.000.000	85 Persen	2.136.261.600	85 Persen	2.360.223.360	85 Persen	2.603.715.840	85 Persen	10.628.640.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Permukiman Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar	100 Persen	100 Persen	1.086.483.238	100 Persen	1.172.228.495	100 Persen	1.295.122.787	100 Persen	1.428.734.149	100 Persen	5.832.242.019	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir	100 Persen	100 Persen	794.933.028	100 Persen	857.669.143	100 Persen	947.585.607	100 Persen	1.045.343.291	100 Persen	4.267.200.494	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang sehat	90 Persen	90 Persen	26.438.975.634	90 Persen	28.525.539.591	90 Persen	31.516.105.003	90 Persen	34.767.464.471	90 Persen	141.924.421.203	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Jasa Konstruksi	NA Persen	25 Persen	1.267.140.000	25 Persen	1.367.142.689	25 Persen	1.510.471.428	25 Persen	1.666.299.237	100 Persen	6.802.007.520	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	80 Persen	80 Persen	68.421.113.548	80 Persen	73.820.907.829	80 Persen	81.560.156.824	80 Persen	89.974.311.684	80 Persen	367.284.537.524	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata Ruang	100 Persen	100 Persen	3.540.000.000	100 Persen	3.819.376.800	100 Persen	4.219.793.280	100 Persen	4.655.128.320	100 Persen	19.002.720.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan pembangunan untuk kepentingan Umum dengan penyediaan lahan melalui proses ganti kerugian	NA Persen	25 Persen	1.200.000.000	25 Persen	1.294.704.000	25 Persen	1.430.438.400	25 Persen	1.578.009.600	100 Persen	6.441.600.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar	NA Persen	25 Persen	420.000.000	25 Persen	453.146.400	25 Persen	500.653.440	25 Persen	552.303.360	100 Persen	2.254.560.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Pendataan Tanah Masyarakat Di Dalam Kawasan Hutan Negara	NA Persen	25 Persen	300.000.000	25 Persen	323.676.000	25 Persen	357.609.600	25 Persen	394.502.400	100 Persen	1.610.400.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembaan Perumahan	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program	100 Persen	100 Persen	929.828.752	100 Persen	1.348.650.000	100 Persen	1.382.426.000	100 Persen	1.415.460.000	100 Persen	5.959.828.752	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
		Program Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	500 Unit	500 Unit	843.274.000	500 Unit	1.339.659.000	500 Unit	1.356.764.200	500 Unit	1.372.006.900	2.500 Unit	5.775.174.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	5.300.000.000	100 Persen	10.924.065.000	100 Persen	11.063.547.000	100 Persen	11.187.841.500	100 Persen	45.516.500.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	153 Paket	153 Paket	6.077.464.262	153 Paket	6.100.393.500	153 Paket	6.178.285.300	153 Paket	6.247.695.850	100 Paket	28.535.814.262	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 Persen	100 Persen	402.076.274	100 Persen	449.550.000	100 Persen	455.290.000	100 Persen	460.405.000	100 Persen	2.057.076.274	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		5.1.2 Meningkatkan pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Na Persen	60,04 Persen	54.275.000.000	74,20 Persen	54.217.977.750	86,60 Persen	54.910.250.450	100 Persen	56.288.145.025	100 Persen	219.691.373.225	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100 Persen	100 Persen	49.775.000.000	100 Persen	49.227.972.750	100 Persen	49.856.531.450	100 Persen	50.416.649.525	100 Persen	231.005.775.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Pelayaran	100 Persen	100 Persen	4.500.000.000	100 Persen	4.450.545.000	100 Persen	4.507.371.000	100 Persen	4.558.009.500	100 Persen	20.884.500.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pengelolaan Penerbangan	NA Persen	-	-	-	179.820.000	20 Persen	182.116.000	30 Persen	945.162.000	50 Persen	1.662.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pengelolaan perkeretaapian	NA Persen	-	-	-	359.640.000	20 Persen	364.232.000	30 Persen	368.324.000	50 Persen	1.324.000.000	Dinas Perhubungan
		5.2 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	IKLH	70,13 Indek	70,96 Indek	10.850.000.000	71,38 Indek	11.218.520.250	71,79 Indek	11.878.205.675	72,21 Indek	12.557.636.744	72,21 Indek	46.504.362.669	
		5.1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam informasi	Persentase Penurunan emisi GRK terhadap baseline	##### (GgCO2-e)	##### (GgCO2-e)	10.850.000.000	##### (GgCO2-e)	11.218.520.250	##### (GgCO2-e)	11.878.205.675	##### (GgCO2-e)	12.557.636.744	##### (GgCO2-e)	46.504.362.669	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana	100 Persen	100 Persen	280.000.000	100 Persen	289.510.200	100 Persen	306.534.340	100 Persen	324.068.045	100 Persen	1.398.145.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	100 Persen	100 Persen	1.940.000.000	100 Persen	2.005.892.100	100 Persen	2.123.845.070	100 Persen	2.245.328.598	100 Persen	9.687.147.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana	100 Persen	100 Persen	2.000.000.000	100 Persen	2.067.930.000	100 Persen	2.189.531.000	100 Persen	2.314.771.750	100 Persen	9.986.750.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Terlaksana	100 Persen	100 Persen	330.000.000	100 Persen	341.208.450	100 Persen	361.272.615	100 Persen	381.937.339	100 Persen	1.647.813.750	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Terlaksana	100 Persen	100 Persen	1.030.000.000	100 Persen	1.064.983.950	100 Persen	1.127.608.465	100 Persen	1.192.107.451	100 Persen	5.143.176.250	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh Terlaksana	100 Persen	100 Persen	240.000.000	100 Persen	248.151.600	100 Persen	262.743.720	100 Persen	277.772.610	100 Persen	1.198.410.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksana	100 Persen	100 Persen	550.000.000	100 Persen	568.680.750	100 Persen	602.121.025	100 Persen	636.562.231	100 Persen	2.746.356.250	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksana	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	258.491.250	100 Persen	273.691.375	100 Persen	289.346.469	100 Persen	1.248.343.750	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Terlaksana	100 Persen	100 Persen	230.000.000	100 Persen	237.811.950	100 Persen	251.796.065	100 Persen	266.198.751	100 Persen	1.148.476.250	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana	100 Persen	100 Persen	4.000.000.000	100 Persen	4.135.860.000	100 Persen	4.379.062.000	100 Persen	4.629.543.500	100 Persen	19.973.500.000	Dinas Lingkungan Hidup

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025 yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Penyajian Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 7.1 sedangkan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kampar disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026
1			2	3	4	5	6
5.2			BELANJA	2.578.146.254.397	2.654.201.568.902	2.732.500.515.184	2.813.109.280.383
5.2	1		BELANJA OPERASI	1.830.828.181.195	1.884.837.612.539	1.940.440.322.110	1.997.683.311.613
5.2	1	1	Belanja Pegawai	1.038.949.629.338	1.069.598.643.403	1.101.151.803.384	1.133.635.781.584
5.2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	693.467.534.427	713.924.826.692	734.985.609.080	756.667.684.548
5.2	1	3	Belanja Bunga	78.724.457.471	81.046.828.967	83.437.710.421	85.899.122.879
5.2	1	4	Belanja Subsidi	19.686.559.959	20.267.313.477	20.865.199.225	21.480.722.602
5.2	1	5	Belanja Hibah	-	-	-	-
5.2	1	6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
5.2	2		BELANJA MODAL	369.516.740.855	380.417.484.711	391.639.800.508	403.193.174.624
5.2	2	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.193.364.045	1.228.568.285	1.264.811.049	1.302.122.975
5.2	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.373.215.929	151.720.725.799	156.196.487.210	160.804.283.583

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026
5.2	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.635.581.522	56.247.331.177	57.906.627.446	59.614.872.956
5.2	2	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.033.245.798	158.577.226.549	163.255.254.732	168.071.284.747
5.2	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.281.333.561	12.643.632.901	13.016.620.071	13.400.610.363
5.2	2	6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-
5.2	3		BELANJA TAK TERDUGA	3.595.379.865	3.701.443.571	3.810.636.157	3.923.049.923
5.2	3	1	Belanja Tidak Terduga	3.595.379.865	3.701.443.571	3.810.636.157	3.923.049.923
5.2	4		TRANSFER	374.205.952.482	385.245.028.081	396.609.756.409	408.309.744.223
5.2	4	1	Transfer /Bagi Hasil Ke Desa	14.769.731.839	15.205.438.929	15.653.999.377	16.115.792.359
5.2	4	1	Transfer/Bantuan Keuangan	359.436.220.643	370.039.589.152	380.955.757.032	392.193.951.864

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kampar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
		Lokalitas			1.449.283.445.946		1.431.681.665.880		1.429.938.766.305		1.441.957.032.327		6.629.806.423.637		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	664.543.259.073	100,00 Persen	646.185.855.299	100,00 Persen	654.323.944.255	100,00 Persen	661.558.958.168	100,00 Persen	3.025.556.364.587	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	169.687.731.098	100,00 Persen	152.902.326.779	100,00 Persen	154.854.633.210	100,00 Persen	156.594.362.720	100,00 Persen	717.505.079.406	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	88.434.062.605	100,00 Persen	118.769.972.282	100,00 Persen	118.152.502.105	100,00 Persen	117.573.537.034	100,00 Persen	517.762.266.417	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	19.746.000.000	100,00 Persen	21.304.354.320	100,00 Persen	23.537.863.872	100,00 Persen	25.966.147.968	100,00 Persen	105.996.528.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	8.046.187.000	100,00 Persen	8.816.223.951	100,00 Persen	8.166.834.738	100,00 Persen	8.355.102.710	100,00 Persen	38.696.617.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	14.494.421.574	100,00 Persen	14.265.764.490	100,00 Persen	14.349.284.023	100,00 Persen	14.435.041.147	100,00 Persen	66.663.894.526	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	7.106.121.824	100,00 Persen	3.224.887.160	100,00 Persen	3.266.063.563	100,00 Persen	3.302.756.474	100,00 Persen	18.978.412.447	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	10.002.011.544	100,00 Persen	11.742.246.000	100,00 Persen	6.047.079.000	100,00 Persen	6.586.455.000	100,00 Persen	39.022.011.544	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	13.805.200.000	100,00 Persen	13.032.868.086	100,00 Persen	12.599.308.877	100,00 Persen	12.161.727.179	100,00 Persen	59.502.137.650	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	8.946.452.076	100,00 Persen	8.566.171.566	100,00 Persen	8.160.314.250	100,00 Persen	7.807.871.446	100,00 Persen	38.591.796.131	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	4.747.112.500	100,00 Persen	6.055.693.620	100,00 Persen	7.670.099.358	100,00 Persen	5.716.434.901	100,00 Persen	28.259.780.350	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	24.008.000.000	100,00 Persen	24.823.431.720	100,00 Persen	26.283.130.124	100,00 Persen	27.786.520.087	100,00 Persen	119.880.947.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	14.558.995.631	100,00 Persen	10.937.457.267	100,00 Persen	14.582.843.265	100,00 Persen	14.746.675.642	100,00 Persen	63.718.298.718	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	7.110.833.817	100,00 Persen	6.353.378.651	100,00 Persen	6.801.181.934	100,00 Persen	6.444.930.616	100,00 Persen	30.862.210.589	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	7.584.527.581	100,00 Persen	8.183.098.498	100,00 Persen	9.040.999.582	100,00 Persen	9.973.714.445	100,00 Persen	40.713.744.056	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	12.795.000.000	100,00 Persen	12.429.607.950	100,00 Persen	12.588.313.210	100,00 Persen	12.330.212.845	100,00 Persen	58.029.095.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	10.398.000.000	100,00 Persen	10.283.725.980	100,00 Persen	10.415.031.924	100,00 Persen	10.532.040.618	100,00 Persen	48.257.118.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	13.015.987.778	100,00 Persen	12.599.987.400	100,00 Persen	11.880.585.600	100,00 Persen	11.181.373.000	100,00 Persen	56.074.987.778	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	7.162.086.025	100,00 Persen	6.498.312.893	100,00 Persen	5.982.986.779	100,00 Persen	5.500.184.753	100,00 Persen	28.344.811.727	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	7.698.410.000	100,00 Persen	9.539.451.000	100,00 Persen	10.240.051.560	100,00 Persen	13.379.338.860	100,00 Persen	48.259.870.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	9.878.000.000	100,00 Persen	9.110.580.300	100,00 Persen	8.557.796.400	100,00 Persen	8.049.972.150	100,00 Persen	40.927.150.000	DINAS PERIKANAN
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	20.437.060.561	100,00 Persen	17.579.151.753	100,00 Persen	16.195.592.980	100,00 Persen	14.975.212.379	100,00 Persen	79.231.958.267	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	13.223.288.000	100,00 Persen	13.425.622.838	100,00 Persen	13.181.307.740	100,00 Persen	13.279.168.430	100,00 Persen	61.528.509.000	DINAS PERKEBUNAN , PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	8.033.499.802	100,00 Persen	7.323.169.322	100,00 Persen	6.792.098.836	100,00 Persen	6.298.796.849	100,00 Persen	32.660.499.208	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	109.238.629.855	100,00 Persen	108.725.908.813	100,00 Persen	110.114.156.431	100,00 Persen	111.351.244.682	100,00 Persen	509.508.631.157	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	50.267.460.062	100,00 Persen	46.463.002.559	100,00 Persen	39.712.729.796	100,00 Persen	41.535.307.131	100,00 Persen	204.498.421.875	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	12.740.560.548	100,00 Persen	10.896.184.142	100,00 Persen	9.924.999.950	100,00 Persen	9.771.467.376	100,00 Persen	48.689.460.550	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	14.199.239.719	100,00 Persen	13.811.974.200	100,00 Persen	12.716.663.600	100,00 Persen	11.780.280.000	100,00 Persen	60.403.239.719	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	16.856.442.314	100,00 Persen	15.913.408.649	100,00 Persen	15.384.023.650	100,00 Persen	14.849.727.105	100,00 Persen	72.653.373.429	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	7.325.778.035	100,00 Persen	10.709.761.985	100,00 Persen	7.956.063.681	100,00 Persen	7.889.553.032	100,00 Persen	39.215.868.885	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	14.344.016.999	100,00 Persen	13.541.540.968	100,00 Persen	13.091.059.942	100,00 Persen	12.636.399.428	100,00 Persen	61.824.506.268	INSPEKTORAT
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.445.775.466	100,00 Persen	2.189.196.531	100,00 Persen	2.021.384.511	100,00 Persen	1.840.383.730	100,00 Persen	9.740.901.864	KECAMATAN KAMPAR KIRI
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	1.469.981.304	100,00 Persen	1.943.854.200	100,00 Persen	1.894.834.200	100,00 Persen	1.838.576.000	100,00 Persen	8.336.981.304	KECAMATAN TAPUNG HILIR
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.025.958.443	100,00 Persen	1.833.236.527	100,00 Persen	1.767.740.777	100,00 Persen	1.566.113.985	100,00 Persen	8.258.363.772	KECAMATAN TAPUNG HULU
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	5.903.711.518	100,00 Persen	5.481.931.022	100,00 Persen	5.098.401.988	100,00 Persen	6.335.563.954	100,00 Persen	26.485.135.119	KECAMATAN TAPUNG
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.357.193.873	101,00 Persen	2.135.679.757	100,00 Persen	2.165.372.209	100,00 Persen	2.344.572.706	100,00 Persen	10.429.272.657	KECAMATAN TAMBANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	8.015.664.654	100,00 Persen	7.772.104.636	100,00 Persen	7.806.416.524	100,00 Persen	7.776.417.484	100,00 Persen	36.308.980.556	KECAMATAN KAMPAR		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.025.958.443	100,00 Persen	1.833.236.527	100,00 Persen	1.767.740.777	100,00 Persen	1.566.113.985	100,00 Persen	8.258.363.772	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.776.946.155	100,00 Persen	2.746.427.517	100,00 Persen	2.587.323.403	100,00 Persen	2.583.086.178	100,00 Persen	12.351.459.983	KECAMATAN SIAK HULU		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.357.193.873	100,00 Persen	2.131.292.868	100,00 Persen	2.156.486.405	100,00 Persen	2.331.057.126	100,00 Persen	10.395.898.929	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	1.652.524.419	100,00 Persen	1.634.363.176	100,00 Persen	1.643.962.826	100,00 Persen	1.672.791.200	100,00 Persen	7.654.392.079	KECAMATAN RUMBIO JAYA		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.027.248.605	100,00 Persen	1.852.912.033	100,00 Persen	1.864.083.086	100,00 Persen	1.779.029.272	100,00 Persen	8.677.704.605	KECAMATAN KAMPAR UTARA		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.183.898.562	100,00 Persen	2.159.897.517	100,00 Persen	2.176.207.360	100,00 Persen	2.211.015.287	100,00 Persen	10.120.499.476	KECAMATAN KAMPA		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	1.307.456.929	100,00 Persen	1.470.230.618	100,00 Persen	1.562.966.928	100,00 Persen	1.484.452.260	100,00 Persen	6.781.439.009	KECAMATAN SALO		
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.516.994.914	100,00 Persen	2.304.795.346	100,00 Persen	2.421.662.872	100,00 Persen	2.453.070.619	100,00 Persen	11.229.345.389	KECAMATAN BANGKINANG		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	1.787.000.000	100,00 Persen	2.070.627.300	100,00 Persen	2.027.282.200	100,00 Persen	1.967.946.000	100,00 Persen	9.125.000.000	KECAMATAN KUOK
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.751.257.403	100,00 Persen	3.117.809.070	100,00 Persen	3.369.891.020	100,00 Persen	3.397.104.000	100,00 Persen	14.753.857.403	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	1.885.714.700	100,00 Persen	1.859.701.137	100,00 Persen	1.958.403.694	100,00 Persen	1.812.985.320	100,00 Persen	8.702.283.300	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.057.458.090	100,00 Persen	1.921.286.790	100,00 Persen	1.918.053.990	100,00 Persen	1.788.730.500	100,00 Persen	8.861.908.090	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	977.111.856	100,00 Persen	966.373.397	100,00 Persen	978.712.365	100,00 Persen	989.707.805	100,00 Persen	4.534.776.125	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	2.049.250.000	100,00 Persen	1.928.789.780	100,00 Persen	1.994.584.100	100,00 Persen	1.938.647.500	100,00 Persen	9.151.495.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	1.329.677.850	100,00 Persen	1.496.630.743	100,00 Persen	1.332.937.135	100,00 Persen	1.347.280.517	100,00 Persen	6.374.889.922	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	6.945.092.868	100,00 Persen	6.816.168.947	100,00 Persen	6.854.773.700	100,00 Persen	6.581.872.720	100,00 Persen	31.455.886.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Urusan Wajib				834.022.112.043		947.125.906.713		1.036.524.587.787		1.112.043.144.668		4.277.912.483.910	
	Terkait Pelayanan Dasar				692.507.607.261		798.084.853.058		874.965.328.827		937.330.179.740		3.648.896.297.505	
	Pendidikan				397.296.945.138		463.869.644.846		546.674.330.675		573.875.024.557		2.327.724.273.836	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9,27 Tahun	9,53 Tahun	395.801.945.138	9,63 Tahun	462.264.751.346	9,73 Tahun	545.006.313.675	9,82 Tahun	572.170.384.557	9,82 Tahun	2.320.189.273.836	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
		Program Pengembangan Kurikulum	Rata-rata Nilai UN SD dan SMP	55,13 Persen	60 Persen	445.000.000	80,36 Persen	458.541.000	80,50 Persen	467.707.000	90,00 Persen	475.625.000	90,50 Persen	2.145.000.000	Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olahraga
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi PAUD/SD/SMP/Non Formal	28,33 Persen	28,67 Persen	550.000.000	29,34 Persen	606.892.500	30,00 Persen	620.850.000	30,78 Persen	620.215.000	31,67 Persen	2.790.000.000	Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olahraga
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan	100,00 Persen	100,00 Persen	150.000.000	100,00 Persen	179.820.000	100,00 Persen	206.950.000	100,00 Persen	228.300.000	100,00 Persen	900.000.000	Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olahraga
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terjaganya Kelestarian Bahasa Daerah Kampar	- Jenis	5,00 Jenis	350.000.000	5,00 Jenis	359.640.000	5,00 Jenis	372.510.000	5,00 Jenis	380.500.000	5,00 Jenis	1.700.000.000	Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olahraga
		Kesehatan				152.981.973.898		176.123.079.564		160.557.508.518		184.156.244.974		673.818.806.954	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar	100,00 Persen	100,00 Persen	94.082.949.738	100,00 Persen	93.048.978.120	100,00 Persen	94.237.057.609	100,00 Persen	95.295.773.043	100,00 Persen	436.638.969.733	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar	100,00 Persen	100,00 Persen	33.951.670.624	100,00 Persen	59.385.555.000	100,00 Persen	50.040.510.000	100,00 Persen	73.550.650.000	100,00 Persen	257.101.670.624	RSUD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	100,00 Persen	100,00 Persen	11.363.131.209	100,00 Persen	11.238.250.397	100,00 Persen	11.381.744.018	100,00 Persen	11.509.613.334	100,00 Persen	52.736.291.941	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	100,00 Persen	100,00 Persen	12.951.347.764	100,00 Persen	11.824.376.775	100,00 Persen	4.264.285.679	100,00 Persen	3.159.175.648	100,00 Persen	52.736.291.941	RSUD
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Puskesmas dan fasilitas kesehatanlainnya memenuhi sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100,00 Persen	100,00 Persen	267.153.841	100,00 Persen	264.217.820	100,00 Persen	267.591.439	100,00 Persen	270.597.721	100,00 Persen	1.239.860.975	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peresentase Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang menjalankan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00 Persen	100,00 Persen	365.720.722	100,00 Persen	361.701.452	100,00 Persen	366.319.773	100,00 Persen	370.435.228	100,00 Persen	1.697.309.873	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				106.384.393.900		114.780.250.266		126.813.601.829		139.896.329.053		487.874.575.048	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Irigasi Dalam Kondisi	70,00 Persen	70,00 Persen	2.855.748.452	70,00 Persen	3.081.124.120	70,00 Persen	3.404.143.539	70,00 Persen	3.755.332.061	70,00 Persen	15.329.657.692	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih	85,00 Persen	85,00 Persen	1.980.000.000	85,00 Persen	2.136.261.600	85,00 Persen	2.360.223.360	85,00 Persen	2.603.715.840	85,00 Persen	10.628.640.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Perumahan Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar	100,00 Persen	100,00 Persen	1.086.483.238	100,00 Persen	1.172.228.495	100,00 Persen	1.295.122.787	100,00 Persen	1.428.734.149	100,00 Persen	5.832.242.019	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir	100,00 Persen	100,00 Persen	794.933.028	100,00 Persen	857.669.143	100,00 Persen	947.585.607	100,00 Persen	1.045.343.291	100,00 Persen	4.267.200.494	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib	90,00 Persen	90,00 Persen	26.438.975.634	90,00 Persen	28.525.539.591	90,00 Persen	31.516.105.003	90,00 Persen	34.767.464.471	90,00 Persen	141.924.421.203	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Jasa Konstruksi	NA Persen	25,00 Persen	1.267.140.000	25,00 Persen	1.367.142.689	25,00 Persen	1.510.471.428	25,00 Persen	1.666.299.237	100,00 Persen	6.802.007.520	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	80,00 Persen	80,00 Persen	68.421.113.548	80,00 Persen	73.820.907.829	80,00 Persen	81.560.156.824	80,00 Persen	89.974.311.684	80,00 Persen	367.284.537.524	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata	100,00 Persen	100,00 Persen	3.540.000.000	100,00 Persen	3.819.376.800	100,00 Persen	4.219.793.280	100,00 Persen	4.655.128.320	100,00 Persen	19.002.720.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				13.552.643.288		20.162.317.500		20.436.312.500		20.683.409.250		74.834.682.538	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	929.828.752	100,00 Persen	1.348.650.000	100,00 Persen	1.382.426.000	100,00 Persen	1.415.460.000	100,00 Persen	5.959.828.752	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
	Program Kawasan Permukiman	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dbawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	500,00 Unit	500,00 Unit	843.274.000	500,00 Unit	1.339.659.000	500,00 Unit	1.356.764.200	500,00 Unit	1.372.006.900	2.500,00 Unit	5.775.174.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100,00 Persen	100,00 Persen	5.300.000.000	100,00 Persen	10.924.065.000	100,00 Persen	11.063.547.000	100,00 Persen	11.187.841.500	100,00 Persen	45.516.500.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	153,00 Paket	153,00 Paket	6.077.464.262	153,00 Paket	6.100.393.500	153,00 Paket	6.178.285.300	153,00 Paket	6.247.695.850	100,00 Paket	28.535.814.262	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100,00 Persen	100,00 Persen	402.076.274	100,00 Persen	449.550.000	100,00 Persen	455.290.000	100,00 Persen	460.405.000	100,00 Persen	2.057.076.274	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				13.175.451.037		14.543.366.691		12.163.679.934		10.688.231.585		50.570.729.247		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100,00 Persen	100,00 Persen	11.281.451.058	100,00 Persen	12.188.286.061	100,00 Persen	9.720.582.872	100,00 Persen	8.029.415.910	100,00 Persen	47.131.355.860	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar	100,00 Persen	100,00 Persen	1.643.999.979	100,00 Persen	2.031.404.630	100,00 Persen	2.057.342.262	100,00 Persen	2.080.455.675	100,00 Persen	9.122.533.318	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	70,00 persen	70,00 persen	250.000.000	70,00 persen	323.676.000	70,00 persen	385.754.800	70,00 persen	578.360.000	70,00 persen	1.836.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Sosial				9.116.200.000		8.606.194.191		8.319.895.372		8.030.940.320		34.073.229.883		
	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah PSKS yang Menangani PMKS	262 Orang PSKS	262 Orang PSKS	3.575.200.000	262 Orang PSKS	3.375.185.436	262 Orang PSKS	3.262.904.492	262 Orang PSKS	3.149.581.825	262 Orang PSKS	15.409.558.900	Dinas Sosial	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	1,00 Orang	1,00 Orang	40.000.000	1,00 Orang	37.762.200	1,00 Orang	36.505.980	1,00 Orang	35.238.105	5,00 Orang	172.405.000	Dinas Sosial	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17		
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	160,00 Orang PMKS	160,00 Orang PMKS	1.915.600.000	160,00 Orang PMKS	1.808.431.758	160,00 Orang PMKS	1.748.271.382	160,00 Orang PMKS	1.687.552.848	160,00 Orang PMKS	8.256.475.450	Dinas Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	34852 KPM	34852 KPM	1.080.000.000	34852 KPM	1.019.579.400	34852 KPM	985.661.460	34852 KPM	951.428.835	34852 KPM	4.654.935.000	Dinas Sosial	
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100,00 Persen	100,00 Persen	1.830.200.000	100,00 Persen	1.727.809.461	100,00 Persen	1.670.331.115	100,00 Persen	1.612.319.494	100,00 Persen	7.888.390.775	Dinas Sosial	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	15 Makam	15 Makam	675.200.000	15 Makam	637.425.936	15 Makam	616.220.942	15 Makam	594.819.212	15 Makam	2.910.196.400	Dinas Sosial	
		Tidak Terkait Pelayanan				141.514.504.783		149.041.053.655		161.559.258.959		174.712.964.929		629.016.186.405		
		Tenaga Kerja				3.585.000.000		3.083.913.000		2.873.293.800		2.627.809.100		12.170.015.900		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terlaksananya program-program perencanaan tenaga kerja	100,00 persen	100,00 persen	200.000.000	100,00 persen	193.306.500	100,00 persen	177.977.000	100,00 persen	163.615.000	100,00 Persen	845.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	NA Persen	25,00 Persen	1.665.000.000	25,00 Persen	1.335.163.500	25,00 Persen	1.229.283.000	25,00 Persen	1.130.085.000	100,00 Persen	6.120.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan.	NA Persen	25,00 Persen	780.000.000	25,00 Persen	701.298.000	25,00 Persen	670.518.000	25,00 Persen	593.580.000	100,00 Persen	3.150.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	NA Persen	25,00 Persen	940.000.000	25,00 Persen	854.145.000	25,00 Persen	795.515.800	25,00 Persen	740.529.100	100,00 Persen	3.824.100.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5.656.514.089		6.102.926.181		6.742.745.803		7.438.361.279		25.940.547.353		
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20,00 Persen	20,00 Persen	397.874.660	20,00 Persen	429.274.929	20,00 Persen	474.279.327	20,00 Persen	523.208.361	100,00 Persen	2.135.791.177	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00 Persen	100,00 Persen	223.951.375	100,00 Persen	241.625.618	100,00 Persen	266.957.206	100,00 Persen	294.497.850	500,00 Persen	1.202.170.982	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1,00 Lembaga a	1,00 Lembaga a	2.880.270.167	1,00 Lembaga a	3.107.581.088	1,00 Lembaga a	3.433.374.207	1,00 Lembaga a	3.787.578.312	5,00 Lembaga a	15.461.290.255	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	tercapainya APE	1,00 Kegiatan	1,00 Kegiatan	52.982.214	1,00 Kegiatan	57.163.570	1,00 Kegiatan	63.156.495	1,00 Kegiatan	69.672.035	5,00 Kegiatan	284.408.525	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100,00 Persen	100,00 Persen	952.893.191	100,00 Persen	1.028.095.521	100,00 Persen	1.135.879.176	100,00 Persen	1.253.062.169	100,00 Persen	5.115.130.648	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak	100,00 Persen	100,00 Persen	1.148.542.482	100,00 Persen	1.239.185.455	100,00 Persen	1.369.099.392	100,00 Persen	1.510.342.552	100,00 Persen	6.165.376.043	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Pangan				3.832.176.400		5.643.047.674		6.165.947.024		6.729.193.563		22.370.364.661	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga	20,00 persen	20,00 persen	1.242.881.300	20,00 persen	1.838.042.178	20,00 persen	2.005.284.243	20,00 persen	2.185.248.941	100,00 persen	8.581.169.900	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Pola Pangan Harapan	20,00 persen	20,00 persen	2.349.287.400	20,00 persen	3.238.270.758	20,00 persen	3.540.514.093	20,00 persen	3.866.390.935	100,00 persen	15.308.655.400	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan	20,00 persen	20,00 persen	84.071.300	20,00 persen	253.260.286	20,00 persen	272.154.482	20,00 persen	292.136.105	100,00 persen	1.078.406.200	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terpantaunya mutu dan keamanan pangan	20,00 persen	20,00 persen	155.936.400	20,00 persen	313.474.452	20,00 persen	347.994.206	20,00 persen	385.417.582	100,00 persen	1.431.436.400	Dinas Ketahanan Pangan
			Pertanahan				1.920.000.000		2.071.526.400		2.288.701.440		2.524.815.360		8.805.043.200	
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan pembangunan untuk kepentingan Umum dengan penyediaan lahan melalui proses ganti kerugian	NA Persen	25,00 Persen	1.200.000.000	25,00 Persen	1.294.704.000	25,00 Persen	1.430.438.400	25,00 Persen	1.578.009.600	100,00 Persen	6.441.600.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar	NA Persen	25,00 Persen	420.000.000	25,00 Persen	453.146.400	25,00 Persen	500.653.440	25,00 Persen	552.303.360	100,00 Persen	2.254.560.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Pendataan Tanah Masyarakat Di Dalam Kawasan Hutan Negara	NA Persen	25,00 Persen	300.000.000	25,00 Persen	323.676.000	25,00 Persen	357.609.600	25,00 Persen	394.502.400	100,00 Persen	1.610.400.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Lingkungan Hidup			10.850.000.000		11.218.520.250		11.878.205.675		12.557.636.744		46.504.362.669		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	280.000.000	100,00 Persen	289.510.200	100,00 Persen	306.534.340	100,00 Persen	324.068.045	100,00 Persen	1.398.145.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	1.940.000.000	100,00 Persen	2.005.892.100	100,00 Persen	2.123.845.070	100,00 Persen	2.245.328.598	100,00 Persen	9.687.147.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kegiatan Pengelolaan Kkeanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	2.000.000.000	100,00 Persen	2.067.930.000	100,00 Persen	2.189.531.000	100,00 Persen	2.314.771.750	100,00 Persen	9.986.750.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	330.000.000	100,00 Persen	341.208.450	100,00 Persen	361.272.615	100,00 Persen	381.937.339	100,00 Persen	1.647.813.750	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	1.030.000.000	100,00 Persen	1.064.983.950	100,00 Persen	1.127.608.465	100,00 Persen	1.192.107.451	100,00 Persen	5.143.176.250	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	240.000.000	100,00 Persen	248.151.600	100,00 Persen	262.743.720	100,00 Persen	277.772.610	100,00 Persen	1.198.410.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	550.000.000	100,00 Persen	568.680.750	100,00 Persen	602.121.025	100,00 Persen	636.562.231	100,00 Persen	2.746.356.250	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	250.000.000	100,00 Persen	258.491.250	100,00 Persen	273.691.375	100,00 Persen	289.346.469	100,00 Persen	1.248.343.750	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	230.000.000	100,00 Persen	237.811.950	100,00 Persen	251.796.065	100,00 Persen	266.198.751	100,00 Persen	1.148.476.250	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana	100,00 Persen	100,00 Persen	4.000.000.000	100,00 Persen	4.135.860.000	100,00 Persen	4.379.062.000	100,00 Persen	4.629.543.500	100,00 Persen	19.973.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Administrasi Kependudukan dan Capil				3.285.500.000		3.249.392.355		3.290.881.649		3.327.853.381		13.153.627.385		
		Program Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan	20,00 Persen	20,00 Persen	1.510.500.000	20,00 Persen	1.493.899.605	20,00 Persen	1.512.974.199	20,00 Persen	1.529.971.856	100,00 Persen	7.010.230.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	20,00 Persen	20,00 Persen	945.000.000	20,00 Persen	934.614.450	20,00 Persen	946.547.910	20,00 Persen	957.181.995	100,00 Persen	4.385.745.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tercapainya Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	20,00 Persen	20,00 Persen	730.000.000	20,00 Persen	721.977.300	20,00 Persen	731.195.740	20,00 Persen	739.410.430	100,00 Persen	3.387.930.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	20,00 Persen	20,00 Persen	100.000.000	20,00 Persen	98.901.000	20,00 Persen	100.163.800	20,00 Persen	101.289.100	100,00 Persen	464.100.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				6.669.000.000		2.517.390.090		5.616.780.282		2.348.224.549		19.339.799.000		
		Program Penataan Desa	Persentase penataan desa yang tertib administrasi	100,00 Persen	100,00 Persen	275.000.000	100,00 Persen	343.905.750	100,00 Persen	275.450.450	100,00 Persen	345.513.025	100,00 Persen	1.444.275.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kapasitas penatakelolaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi	100,00 Persen	100,00 Persen	5.730.000.000	100,00 Persen	1.516.781.700	100,00 Persen	4.676.242.200	100,00 Persen	1.330.151.900	100,00 Persen	14.813.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan	Pembangunan 1,00 Kawasan Perdesaan	Pembangunan 1,00 Kawasan Perdesaan	200.000.000	Pembangunan 1,00 Kawasan Perdesaan	197.802.000	Pembangunan 1,00 Kawasan Perdesaan	200.327.600	Pembangunan 1,00 Kawasan Perdesaan	202.578.200	Pembangunan 5,00 Kawasan Perdesaan	928.200.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina	100,00 Persen	100,00 Persen	464.000.000	100,00 Persen	458.900.640	100,00 Persen	464.760.032	100,00 Persen	469.981.424	100,00 Persen	2.153.424.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				15.082.012.160		22.099.806.572		25.993.116.373		35.289.442.546		98.464.377.651	
	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility rate (TFR)	20,00 Persen	20,00 Persen	316.077.827	20,00 Persen	341.022.689	20,00 Persen	376.774.884	20,00 Persen	415.644.871	100,00 Persen	1.696.705.774	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	100,00 Persen	100,00 Persen	8.101.882.451	100,00 Persen	14.568.805.026	100,00 Persen	17.672.578.395	100,00 Persen	26.110.516.137	100,00 Persen	79.965.294.296	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	20,00 Persen	20,00 Persen	6.664.051.883	20,00 Persen	7.189.978.857	20,00 Persen	7.943.763.094	20,00 Persen	8.763.281.538	100,00 Persen	35.772.630.507	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Perhubungan				54.275.000.000		54.217.977.750		54.910.250.450		56.288.145.025		219.691.373.225	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)	100,00 Persen	100,00 Persen	49.775.000.000	100,00 Persen	49.227.972.750	100,00 Persen	49.856.531.450	100,00 Persen	50.416.649.525	100,00 Persen	231.005.775.000	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Pelayaran	100,00 Persen	100,00 Persen	4.500.000.000	100,00 Persen	4.450.545.000	100,00 Persen	4.507.371.000	100,00 Persen	4.558.009.500	100,00 Persen	20.884.500.000	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase Pengelolaan Penerbangan	NA Persen		-		179.820.000	20,00 Persen	182.116.000	30,00 Persen	945.162.000	50,00 Persen	1.662.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pengelolaan Perkeretaapian	NA Persen		-		359.640.000	20,00 Persen	364.232.000	30,00 Persen	368.324.000	50,00 Persen	1.324.000.000	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika				13.065.000.000		12.921.415.650		13.086.400.470		13.233.420.915		52.306.237.035	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang disediakan	100,00 Persen	100,00 Persen	7.490.000.000	100,00 Persen	7.407.684.900	100,00 Persen	7.502.268.620	100,00 Persen	7.586.553.590	100,00 Persen	34.761.090.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas	100,00 Persen	100,00 Persen	5.575.000.000	100,00 Persen	5.513.730.750	100,00 Persen	5.584.131.850	100,00 Persen	5.646.867.325	100,00 Persen	25.873.575.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1.868.116.950		1.576.413.359		1.591.812.814		1.487.871.855		6.524.214.978	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17		
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan	257,00 Koperasi	257,00 Koperasi	380.742.228	257,00 Koperasi	345.022.637	257,00 Koperasi	319.317.416	257,00 Koperasi	299.637.836	257,00 Koperasi	1.543.968.912	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Peningkatan Kesehatan Koperasi	50,00 Koperasi	50,00 Koperasi	72.830.226	50,00 Koperasi	65.481.656	50,00 Koperasi	64.427.861	50,00 Koperasi	59.228.802	50,00 Koperasi	301.320.904	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pelatihan Bagi Pengurus Dan Anggota Koperasi	50,00 Orang	50,00 Orang	443.790.169	50,00 Orang	408.002.741	50,00 Orang	379.786.502	50,00 Orang	363.758.000	50,00 Orang	1.834.370.507	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Terbinanya UMK	15,00 UMK	15,00 UMK	485.173.227	15,00 UMK	316.824.858	15,00 UMK	418.039.000	15,00 UMK	384.305.000	15,00 UMK	1.847.553.227	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	
		Program Pengembangan UMKM	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK	15,00 UMK	15,00 UMK	485.581.100	15,00 UMK	441.081.467	15,00 UMK	410.242.035	15,00 UMK	380.942.217	15,00 UMK	1.972.324.400	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	
		Penanaman Modal				3.517.000.000		4.214.081.700		4.078.570.600		3.966.332.000		15.775.984.300		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase capaian program pengembangan iklim penanaman modal	100,00 Persen	100,00 Persen	1.050.000.000	100,00 Persen	1.753.245.000	100,00 Persen	1.680.434.000	100,00 Persen	1.617.125.000	100,00 Persen	7.155.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase capaian program promosi penanaman modal	100,00 Persen	100,00 Persen	700.000.000	100,00 Persen	786.712.500	100,00 Persen	827.800.000	100,00 Persen	856.125.000	100,00 Persen	3.700.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase capaian program pelayanan penanaman modal	100,00 Persen	100,00 Persen	1.150.000.000	100,00 Persen	1.114.884.000	100,00 Persen	1.051.306.000	100,00 Persen	1.004.520.000	100,00 Persen	4.980.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100,00 Persen	100,00 Persen	392.000.000	100,00 Persen	352.447.200	100,00 Persen	324.497.600	100,00 Persen	298.312.000	100,00 Persen	1.568.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Capaian Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100,00 Persen	100,00 Persen	225.000.000	100,00 Persen	206.793.000	100,00 Persen	194.533.000	100,00 Persen	190.250.000	100,00 Persen	940.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Kepemudaan dan Olah Raga				15.302.748.673		17.547.339.733		20.391.699.839		24.137.355.683		77.379.143.929		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik	68,00 Persen	70,00 Persen	12.492.748.673	72,00 Persen	14.658.980.983	75,00 Persen	17.475.463.914	79,00 Persen	21.061.160.627	80,00 Persen	77.583.179.482	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						target -5	Rp -6	target -7	Rp -8	target -9	Rp -10	target -11	Rp -12	target -15	Rp -16	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	55,00 persen	60,00 Persen	2.460.000.000	64,00 Persen	2.526.471.000	70,00 Persen	2.533.068.000	75,00 Persen	2.671.110.000	80,00 Persen	11.840.000.000	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Peingkatan Kegiatan Kepramukaan bagi pemuda dan Siswa/i	21,00 Kecamatan	21,00 Kecamatan	350.000.000	21,00 Kecamatan	361.887.750	21,00 Kecamatan	383.167.925	21,00 Kecamatan	405.085.056	21,00 Kecamatan	1.747.681.250	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
			Statistik				250.000.000		247.252.500		250.409.500		253.222.750		1.000.884.750	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Ketersediaan data dan Informasi	47,00 Data	47,00 Data	250.000.000	47,00 Data	247.252.500	47,00 Data	250.409.500	47,00 Data	253.222.750	47,00 Data	1.160.250.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
			Persandian				275.000.000		271.977.750		275.450.450		278.545.025		1.100.973.225	
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Index Keamanan Informasi	73,00 Persen	75,00 Persen	275.000.000	78,00 Persen	271.977.750	80,00 Persen	275.450.450	83,00 Persen	278.545.025	83,00 Persen	1.276.275.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
			Kebudayaan				1.387.036.471		1.283.048.491		1.230.968.791		1.184.904.754		5.085.958.507	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Kebudayaan yang dikembangkan	1,00 objek	1,00 Objek	511.807.362	1,00 Objek	430.120.999	1,00 Objek	365.064.134	1,00 Objek	277.535.402	1,00 Objek	1.584.527.898	Dinas Parieisata dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dibina	45,00 lembaga	45,00 lembaga	595.229.109	45,00 lembaga	535.170.492	45,00 lembaga	492.730.656	45,00 lembaga	452.969.352	45,00 lembaga	2.380.916.436	Dinas Parieisata dan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumen sejarah	NA dokume n	1,00 Dokume n	100.000.000	1,00 Dokume n	107.892.000	1,00 Dokume n	124.170.000	1,00 Dokume n	152.200.000	4,00 Dokume n	570.000.000	Dinas Parieisata dan Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dilestarikan	2,00 objek	2,00 objek	130.000.000	2,00 objek	134.865.000	2,00 objek	149.004.000	2,00 objek	152.200.000	2,00 objek	660.000.000	Dinas Parieisata dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum	NA	20,00 Persen	50.000.000	25,00 Persen	75.000.000	30,00 Persen	100.000.000	35,00 Persen	150.000.000	35,00 Persen	375.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Perpustakaan				495.323.314		566.433.000		649.823.000		882.760.000		2.594.339.314	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan	440.000,00 Pengunj ung	445.000,00 Pengunj ung	449.623.410	455.000,00 Pengunj ung	512.487.000	465.000,00 Pengunj ung	575.321.000	465.000,00 Pengunj ung	791.440.000	465.000,00 Pengunj ung	2.754.623.410	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Kuno	Adanya pengumpulan naskah kuno	30,00 Naskah	30,00 Naskah	45.699.904	30,00 Naskah	53.946.000	30,00 Naskah	74.502.000	40,00 Naskah	91.320.000	40,00 Naskah	315.699.904	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Kearsipan				199.076.725		208.591.200		244.201.000		157.070.400		808.939.325	
			Program Pengelolaan Arsip	Terlaksananya penat aan dan pengelola an arsip daerah	100,00 Persen	100,00 Persen	113.319.139	100,00 Persen	116.883.000	100,00 Persen	124.170.000	100,00 Persen	20.090.400	100,00 Persen	419.719.139	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Terlaksananya penataan dan pengelola an arsip daerah	100,00 Persen	100,00 Persen	85.757.586	100,00 Persen	91.708.200	100,00 Persen	120.031.000	100,00 Persen	136.980.000	100,00 Persen	512.757.586	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Urusan Pilihan				50.416.531.795		46.618.452.157		45.870.958.021		44.716.947.088		187.622.889.061	
			Pertanian				30.999.766.715		29.604.403.986		29.169.688.733		28.854.182.860		118.628.042.294	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	499.492.477	100,00 Persen	483.260.604	100,00 Persen	489.431.031	100,00 Persen	494.929.591	100,00 Persen	2.278.596.687	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
				Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	8.197.297.000	100,00 Persen	8.107.208.706	100,00 Persen	8.210.724.172	100,00 Persen	8.302.968.356	100,00 Persen	38.043.655.377	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	10.436.532.004	100,00 Persen	9.322.670.803	100,00 Persen	8.670.210.677	100,00 Persen	8.162.294.092	100,00 Persen	42.004.970.668	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
				Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	6.752.064.000	100,00 Persen	6.677.858.817	100,00 Persen	6.763.123.881	100,00 Persen	6.839.104.857	100,00 Persen	31.336.329.024	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00 Persen	100,00 Persen	993.714.000	100,00 Persen	982.793.083	100,00 Persen	995.341.704	100,00 Persen	1.006.523.967	100,00 Persen	4.611.826.674	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	136.375.128	100,00 Persen	134.876.365	100,00 Persen	136.598.510	100,00 Persen	138.133.139	100,00 Persen	632.916.966	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
				Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	511.488.000	100,00 Persen	505.866.747	100,00 Persen	512.325.817	100,00 Persen	518.081.592	100,00 Persen	2.373.815.808	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	120.517.191	100,00 Persen	119.192.707	100,00 Persen	120.714.598	100,00 Persen	122.070.778	100,00 Persen	559.320.283	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
				Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	990.000.000	100,00 Persen	979.119.900	100,00 Persen	991.621.620	100,00 Persen	1.002.762.090	100,00 Persen	4.594.590.000	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	722.172.915	100,00 Persen	669.467.109	100,00 Persen	636.796.216	100,00 Persen	606.057.689	100,00 Persen	3.032.429.661	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
				Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00 Persen	100,00 Persen	1.640.114.000	100,00 Persen	1.622.089.147	100,00 Persen	1.642.800.507	100,00 Persen	1.661.256.710	100,00 Persen	7.611.769.074	Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Pariwisata				3.238.088.221		3.202.501.631		2.948.538.372		2.710.603.650		12.099.731.874	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata	400,00 DTW	400,00 DTW	1.611.663.417	400,00 DTW	1.593.951.235	400,00 DTW	1.467.548.474	400,00 DTW	1.349.123.446	400,00 DTW	6.930.152.691	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase publikasi dan event wisata	100,00 Persen	100,00 Persen	786.469.303	100,00 Persen	777.826.005	100,00 Persen	716.143.218	100,00 Persen	658.353.453	100,00 Persen	3.381.818.002	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Industri Pariwisata	100,00 Persen	100,00 Persen	719.955.501	100,00 Persen	695.724.391	100,00 Persen	619.646.681	100,00 Persen	543.406.751	100,00 Persen	2.713.733.323	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	23,53 Persen	29,41 Persen	120.000.000	35,29 Persen	135.000.000	41,18 Persen	145.200.000	47,06 Persen	159.720.000	47,06 Persen	559.920.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Kelautan dan Perikanan				12.483.301.296		9.800.190.000		9.395.530.000		8.979.800.000		40.658.821.296	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.600,00 Ton	2.600,00 Ton	3.100.000.000	2.600,00 Ton	2.787.210.000	2.600,00 Ton	2.814.520.000	2.600,00 Ton	2.739.600.000	2.600,00 Ton	13.200.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	66.900,00 Ton	66.900,00 Ton	4.833.301.296	66.900,00 Ton	3.416.580.000	66.900,00 Ton	3.145.640.000	66.900,00 Ton	2.891.800.000	66.900,00 Ton	16.233.301.296	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Terjaganya Kelestarian Sumberdaya Perairan/Perikanan	100,00 Persen	100,00 Persen	2.600.000.000	100,00 Persen	1.888.110.000	100,00 Persen	1.738.380.000	100,00 Persen	1.598.100.000	100,00 Persen	8.900.000.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	8.000,00 Ton	8.000,00 Ton	1.950.000.000	8.000,00 Ton	1.708.290.000	8.000,00 Ton	1.696.990.000	8.000,00 Ton	1.750.300.000	8.000,00 Ton	8.200.000.000	Dinas Perikanan
		Perdagangan				1.045.375.563		1.403.966.539		1.501.290.916		1.242.510.579		5.193.143.597	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha	100,00 Persen	100,00 Persen	133.563.137	100,00 Persen	392.726.880	100,00 Persen	467.707.000	100,00 Persen	373.487.507	100,00 Persen	1.626.148.297	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Sarana pasar	4,00 Pasar	4,00 Pasar	258.120.465	4,00 Pasar	291.536.290	4,00 Pasar	313.008.121	4,00 Pasar	219.259.674	4,00 Pasar	1.248.614.860	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100,00 Persen	100,00 Persen	217.572.897	100,00 Persen	309.606.719	100,00 Persen	343.000.434	100,00 Persen	302.656.790	100,00 Persen	1.373.985.848	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrologian	100,00 Persen	100,00 Persen	366.097.950	100,00 Persen	342.645.167	100,00 Persen	315.472.883	100,00 Persen	290.015.540	100,00 Persen	1.509.391.800	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	2,00 Event	2,00 Event	70.021.114	2,00 Event	67.451.484	2,00 Event	62.102.478	2,00 Event	57.091.068	2,00 Event	295.084.456	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
		Perindustrian				2.650.000.000		2.607.390.000		2.855.910.000		2.929.850.000		11.043.150.000	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	100,00 Persen	100,00 Persen	2.050.000.000	100,00 Persen	2.067.930.000	100,00 Persen	2.317.840.000	100,00 Persen	2.435.200.000	100,00 Persen	10.350.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	100,00 Persen	100,00 Persen	250.000.000	100,00 Persen	224.775.000	100,00 Persen	248.340.000	100,00 Persen	228.300.000	100,00 Persen	1.100.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17						
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ruang lingkup Kabupaten Kampar	100,00 Persen	100,00	Persen	350.000.000	100,00	Persen	314.685.000	100,00	Persen	289.730.000	100,00	Persen	266.350.000	100,00	Persen	1.400.000.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Pendukung Urusan Pemerintahan					63.584.221.048			62.229.002.094			63.467.952.886			63.704.313.037			252.985.489.065	
		Sekretariat Daerah					25.651.247.311			24.771.281.020			25.667.028.758			25.955.387.501			102.044.944.590	
		Program administrasi umum								-										Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	20,00 Persen	20,00	Persen	19.060.000.000	20,00	Persen	18.294.617.070	20,00	Persen	18.528.208.666	20,00	Persen	18.736.365.637	100,00	Persen	86.410.887.000	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20,00 persen	20,00	persen	6.591.247.311	20,00	persen	6.476.663.950	20,00	persen	7.138.820.092	20,00	persen	7.219.021.864	100,00	persen	31.904.821.633	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD					37.932.973.737			37.457.721.075			37.800.924.127			37.748.925.536			150.940.544.474	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terpenuhinya Dokumen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 Persen	100,00	Persen	37.932.973.737	100,00	Persen	37.457.721.075	100,00	Persen	37.800.924.127	100,00	Persen	37.748.925.536	100,00	Persen	174.863.015.164	Sekretariat DPRD
		Penunjang Urusan Pemerintahan					180.839.943.565			166.546.542.057			156.698.250.186			150.687.843.263			654.772.579.071	
		Perencanaan					5.072.115.070			4.651.545.433			4.368.324.208			4.096.135.077			18.188.119.787	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensinya antar dokumen Pembangunan Daerah.	100,00 Persen	100,00	Persen	3.331.932.733	100,00	Persen	3.055.655.535	100,00	Persen	2.869.604.143	100,00	Persen	2.690.799.864	100,00	Persen	13.732.920.608	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00 Persen	100,00	Persen	1.740.182.337	100,00	Persen	1.595.889.898	100,00	Persen	1.498.720.065	100,00	Persen	1.405.335.213	100,00	Persen	7.172.349.442	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Keuangan					129.417.964.351			116.550.878.034			107.493.041.981			98.997.209.830			452.459.094.197	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00 Persen	100,00	Persen	123.781.127.373	100,00	Persen	111.291.611.621	100,00	Persen	102.466.017.239	100,00	Persen	94.197.437.931	100,00	Persen	495.124.509.492	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD	100,00 Persen	100,00	Persen	1.384.000.000	100,00	Persen	1.244.354.400	100,00	Persen	1.145.675.200	100,00	Persen	1.053.224.000	100,00	Persen	5.536.000.000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00 persen	100,00	persen	4.252.836.978	100,00	persen	4.014.912.013	100,00	persen	3.881.349.542	100,00	persen	3.746.547.899	100,00	persen	18.330.258.980	Bappenda
		Kepegawaian					9.982.350.000			7.274.618.100			7.094.659.900			6.883.245.000			31.234.873.000	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah	100,00 Persen	100,00	Persen	9.982.350.000	100,00	Persen	7.274.618.100	100,00	Persen	7.094.659.900	100,00	Persen	6.883.245.000	100,00	Persen	35.688.850.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		Pendidikan dan Pelatihan					3.755.585.000			6.288.651.554			5.943.856.479			5.676.439.785			21.664.532.818	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100,00 Persen	100,00	Persen	3.755.585.000	100,00	Persen	6.288.651.554	100,00	Persen	5.943.856.479	100,00	Persen	5.676.439.785	100,00	Persen	25.389.460.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target -5	Rp -6	target -7	Rp -8	target -9	Rp -10	target -11	Rp -12	target -15	Rp -16	
-1	-2	-3	-4											
	Penelitian dan Pengembangan Daerah				460.532.500		294.455.250		309.623.358		344.696.434		1.409.307.542	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase terlaksananya Penelitian dan Pengembangan daerah	100,00 Persen	100,00 Persen	460.532.500	100,00 Persen	294.455.250	100,00 Persen	309.623.358	100,00 Persen	344.696.434	100,00 Persen	1.615.016.050	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengelolaan perbatasan				500.000.000		449.550.000		455.290.000		460.405.000		1.865.245.000	
	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	20,00 persen	20,00 persen	500.000.000	20,00 persen	449.550.000	20,00 persen	455.290.000	20,00 persen	460.405.000	100,00 persen	2.155.000.000	Sekretariat Daerah
	Pengawasan				4.293.320.000		4.053.130.213		3.918.296.351		3.782.211.524		16.046.958.088	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan		25,00 Persen	3.851.170.000	25,00 Persen	3.635.716.294	25,00 Persen	3.514.768.375	25,00 Persen	3.392.698.321	100,00 Persen	16.599.024.096	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan asistensi		25,00 Persen	442.150.000	25,00 Persen	417.413.918	25,00 Persen	403.527.976	25,00 Persen	389.513.203	100,00 Persen	1.905.721.769	Inspektorat
	Kewilayahan				6.006.611.884		5.866.901.312		5.728.719.449		8.820.794.120		26.423.026.765	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN TAPUNG HILIR
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	235.308.000	20,00 persen	216.060.923	20,00 persen	207.204.962	20,00 persen	194.289.388	100,00 persen	981.232.000	KECAMATAN TAPUNG HULU
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN TAPUNG
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN TAMBANG
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	235.308.000	20,00 persen	216.060.923	20,00 persen	207.204.962	20,00 persen	194.289.388	100,00 persen	981.232.000	KECAMATAN KAMPAR
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN SIAK HULU
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	98.901.000	20,00 persen	100.163.800	20,00 persen	101.289.100	100,00 persen	464.100.000	KECAMATAN RUMBIO JAYA
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	98.901.000	20,00 persen	100.163.800	20,00 persen	101.289.100	100,00 persen	464.100.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	98.901.000	20,00 persen	100.163.800	20,00 persen	101.289.100	100,00 persen	464.100.000	KECAMATAN KAMPA
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN SALO
		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik	20,00 persen	20,00 persen	100.000.000	20,00 persen	89.910.000	20,00 persen	82.780.000	20,00 persen	76.100.000	100,00 persen	400.000.000	KECAMATAN BANGKINANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	11.283.705	20,00 persen	10.761.400	20,00 persen	10.273.500	100,00 persen	50.600.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	10.150.000	20,00 persen	10.038.452	20,00 persen	10.166.626	20,00 persen	10.280.844	100,00 persen	47.106.150	KECAMATAN SIAK HULU
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	10.150.000	20,00 persen	10.038.452	20,00 persen	10.166.626	20,00 persen	10.280.844	100,00 persen	47.106.150	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	11.423.066	20,00 persen	11.568.919	20,00 persen	11.698.891	100,00 persen	53.603.550	KECAMATAN RUMBIO JAYA
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	10.384.605	20,00 persen	9.561.090	20,00 persen	8.789.550	100,00 persen	46.200.000	KECAMATAN KAMPAR UTARA
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	11.423.066	20,00 persen	11.568.919	20,00 persen	11.698.891	100,00 persen	53.603.550	KECAMATAN KAMPA
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	10.384.605	20,00 persen	14.900.400	20,00 persen	13.698.000	100,00 persen	59.100.000	KECAMATAN SALO
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	15.000.000	20,00 persen	13.486.500	20,00 persen	12.417.000	20,00 persen	11.415.000	100,00 persen	60.000.000	KECAMATAN BANGKINANG
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	13.486.500	20,00 persen	14.486.500	20,00 persen	15.220.000	100,00 persen	64.050.000	KECAMATAN KUOK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	12.587.400	20,00 persen	12.830.900	20,00 persen	12.556.500	100,00 persen	57.550.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	11.423.066	20,00 persen	11.568.919	20,00 persen	11.698.891	100,00 persen	53.603.550	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	17.802.180	20,00 persen	17.218.240	20,00 persen	16.589.800	100,00 persen	73.950.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	16.500.000	20,00 persen	16.183.800	20,00 persen	14.900.400	20,00 persen	13.698.000	100,00 persen	70.500.000	KECAMATAN GUNUNG SAHLAN
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	16.500.000	20,00 persen	16.183.800	20,00 persen	14.900.400	20,00 persen	13.698.000	100,00 persen	70.500.000	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
		Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00 persen	20,00 persen	11.550.000	20,00 persen	11.423.066	20,00 persen	11.568.919	20,00 persen	11.698.891	100,00 persen	53.603.550	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20,00 persen	20,00 persen	399.000.000	20,00 persen	448.650.900	20,00 persen	413.072.200	20,00 persen	455.839.000	100,00 persen	1.996.000.000	KECAMATAN KAMPAR KIRI
		Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20,00 persen	20,00 persen	384.007.666	20,00 persen	377.622.000	20,00 persen	401.483.000	20,00 persen	418.550.000	100,00 persen	1.839.007.666	KECAMATAN TAMBANG
		Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20,00 persen	20,00 persen	365.998.330	20,00 persen	361.976.008	20,00 persen	366.597.835	20,00 persen	356.202.386	100,00 persen	1.679.525.939	KECAMATAN KAMPAR
		Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20,00 persen	20,00 persen	365.998.330	20,00 persen	361.976.008	20,00 persen	366.597.835	20,00 persen	356.202.386	100,00 persen	1.679.525.939	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
		Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20,00 persen	20,00 persen	757.356.558	20,00 persen	749.033.210	20,00 persen	758.597.108	20,00 persen	767.119.642	100,00 persen	3.514.891.786	KECAMATAN BANGKINANG
		Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi	20,00 persen	20,00 persen	732.000.000	20,00 persen	710.289.000	20,00 persen	711.908.000	20,00 persen	3.881.100.000	100,00 persen	7.482.000.000	KECAMATAN BANGKINANG KOTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-15	-16	-17

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023–2026 dalam RPD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kampar tahun 2005-2025 dan merupakan periode akhir RPJPD yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan Penjabat Bupati.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah, merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 8.1 dibawah ini:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kampar

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Target Capaian Tahunan			
				2023	2024	2025	2026
1	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	Persen	NA	57,47	58,30	59,45	60,25
2	Indeks toleransi	Nilai	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B
3	SAKIP	Nilai	Nilai B	Nilai B	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB
4	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,78	87,44	88,1	88,77	89,45
6	Indeks SPBE	Indeks	C	C	C	B	B
7	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,02	73,90	74,18	74,54	74,90
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,83	71,04	71,19	71,34	71,49
9	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	9,27	9,53	9,63	9,73	9,82
10	Harapan Lama sekolah	Tahun	13,55	14,40	14,14	14,26	14,40
11	Persentase Pengurangan kriminalitas	Persen	0,34	0,30	0,25	0,21	0,18

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Target Capaian Tahunan			
				2023	2024	2025	2026
12	Persentase Indeks melek Alquran (Kitab Suci)	Persen	65,71	68,45	69,81	71,17	72,53
13	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen	34,15	34,27	34,39	34,51	34,63
15	Kontribusi PDRB Sektor Industri	Persen	31,15	31,75	32,37	33,00	33,64
16	Pertumbuhan Investasi	Persen	4,40	2,87	3,83	4,79	5,75
17	Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	Persen	4,27	4,20	4,13	4,06	3,99
18	Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persen	7,82	7,51	7,25	7,04	6,88
19	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	Na	80,42	85,31	90,21	95,10
20	Persentase Penurunan emisi GRK terhadap baseline	GgCO2-e	36.620,73	35.940,55	34.102,87	33.762,78	32.840,49

Sedangkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 8.2 dibawah ini:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Kampar

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	PDRB						
	a. Harga Berlaku dengan Migas (Rp Milyar)	86.670,330	87.596,386	90.208,595	92.820,804	95.433,013	95.433,013
	b. Harga Konstan Dengan Migas (Rp Milyar)	53.196,370	55.121,493	55.948,981	57.163,628	58.080,071	58.080,071
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,45	2,21-3,46	2,47-3,47	2,56-3,48	2,62-3,49	2,62-3,49
3	Laju inflasi (%)	14,64	2,76-14,04	2,75-13,89	2,74-13,87	2,73-13,80	2,73-13,80
4	PDRB per kapita						
	a. Harga Berlaku Dengan Migas (Rp Juta)	106,14	106,48	109,43	111,83	113,92	113,92
	b. Harga Konstan Dengan Migas (Rp Juta)	65,15	67,00	67,87	68,87	69,33	69,33
5	Indek Gini Ratio	0,281	0,277	0,274	0,271	0,268	0,268
6	Kemiskinan						
	a. Penduduk Miskin (Jiwa)	68,74	67,74	67,57	67,39	67,21	67,21
	b. Tingkat Kemiskinan (%)	7,82	7,51	7,30	7,05	6,91	6,91
	c. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Tahun)	477.603	505.352	524.243	543.124	562.401	562.401
	d. Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,99	0,87	0,83	0,80	0,70	0,70
	e. Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	73,02	73,90	74,18	74,54	74,90	74,90
	a. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,27	9,53	9,63	9,73	9,82	9,82
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,55	14,02	14,14	14,26	14,40	14,40
	c. Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,83	71,04	71,19	71,34	71,49	71,49
	d. Pengeluaran Per Kapita Riil (Rp 000)	10.858	11.153	11.197	11.242	11.283	11.283
2	Angka Melek Huruf (%)	99,38	99,47	99,56	99,65	99,74	99,74
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) (%)	67,29	67,99	68,70	69,41	70,13	70,13
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,06	63,58	64,24	64,91	65,59	65,59
5	Rasio Penduduk Bekerja (%)	67,56	68,78	69,47	70,65	71,85	71,85
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,27	4,20	4,13	4,06	3,99	3,99
7	Laju Pertumbuhan PDRB HK per Tenaga Kerja (%)	0,140	0,142	0,144	0,147	0,149	0,149
8	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dan II (Prasejahtera)	14.959	14.575	14.201	13.836	13.481	13.481
9	Index Kepuasan Masyarakat	86,78	87,44	88,10	88,77	89,45	89,45
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan	11,38	11,83	12,29	12,34	12,39	12,39
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Pangan (PPH dan Rawan Pangan)	89,86	91,50	93,16	94,86	96,58	96,58
13	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK (%)	34,15	34,27	34,39	34,51	34,63	34,63
14	Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB ADHK (%)	19,86	20,00	20,14	20,29	20,43	20,43

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
15	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB ADHK (%)	3,18	3,20	3,23	3,25	3,28	3,28
16	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHK (%)	31,15	31,75	32,37	33,00	33,64	33,64
17	Jumlah grup kesenian 10.000 per penduduk.	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	92,00
18	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	135,00	150,00	165,00	180,00	195,00	195,00
II	PELAYANAN UMUM						
2.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
2.1.1	PENDIDIKAN						
1	Rata - Rata Lama Sekolah	9,27	9,53	9,63	9,73	9,82	9,82
2	Harapan Lama Sekolah	13,55	14,02	14,14	14,26	14,40	14,40
3	Angka Partisipasi Kasar						
	a. SD/MI (%)	102,18	102,41	102,64	102,87	103,10	103,10
	b. SMP/MTS (%)	100,30	100,35	100,40	100,45	100,50	100,50
4	Angka Partisipasi Murni						
	a. SD/MI (%)	97,80	97,94	98,07	98,21	98,35	98,35
	b. SMP/MTS (%)	84,64	84,79	84,94	85,10	85,25	85,25
5	Angka Partisipasi Sekolah						
	a. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	100,98	101,47	101,96	102,45	102,95	102,95
	b. Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	91,79	92,23	92,68	93,13	93,58	93,58
6	Angka Putus Sekolah						
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,260	1,254	1,248	1,242	1,236	1,236
7	Angka Kelulusan (AL)						
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Angka Melanjutkan						
	a. Angka Melanjutkan SD/MI	103,62	103,64	103,66	103,68	103,70	103,70
	b. Angka Melanjutkan SMP/MTs	110,43	110,45	110,47	110,49	110,51	110,51
9	Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah						
	a. SD/MI	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
	b. SMP/MTs	275,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
10	Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar						
	a. SD/MI	15,08	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	b. SMP/MTs	11,54	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11	Guru Kualifikasi S1/D-IV						
	a. Guru SD/MI	91,40	92,04	92,68	93,33	93,98	93,98
	b. Guru SMP/MTs	96,00	96,17	96,34	96,51	96,68	96,68
12	Guru Bersertifikat						
	a. Guru SD/MI	40,14	42,55	45,10	47,81	50,68	50,68

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	b. Guru SMP/MTs	38,67	40,99	43,45	46,06	48,82	48,82
2.1.2	KESEHATAN						
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	31,00	28,91	26,96	25,14	23,44	23,44
2	AKBA/1.000 kelahiran	32,00	29,84	27,83	25,95	24,20	24,20
3	Angka Relatif Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	2,50	2,33	2,17	2,03	1,89	1,89
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	7,00	6,53	6,09	5,68	5,29	5,29
5	Rasio Posyandu per 1000 balita	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00
6	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,0310	0,0313	0,0317	0,0320	0,0324	0,0324
7	Rasio Rumah sakit Per satuan Penduduk	0,0050	0,0054	0,0058	0,0063	0,0068	0,0068
8	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,0220	0,0226	0,0227	0,0228	0,0233	0,0233
9	Rasio poliklinik per satuan penduduk (poliklinik)	0,0306	0,0333	0,0363	0,0395	0,0431	0,0431
10	Rasio dokter umum per satuan penduduk	0,2119	0,2156	0,2195	0,2234	0,2274	0,2274
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90,00	93,95	98,08	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96,00	97,79	99,60	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Balita Gizi Kurang	3,22	2,68	2,24	1,88	1,57	1,57
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	4,42	3,70	3,10	2,59	2,17	2,17

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
15	Persentase Balita Kurus	3,15	2,91	2,64	2,44	2,21	2,21
16	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	78,80	84,12	89,80	95,86	100,00	100,00
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Prevalensi Tuerkulosi (%)	62,00	82,47	88,03	93,97	100,00	100,00
19	Prevalensi HIV/AIDS (kasus)	135,00	116,29	100,17	86,29	74,33	74,33
20	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Persentase jalan dan jembatan kondisi baik	58,63	62,03	65,63	69,43	73,46	73,46
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	5,23	5,53	5,85	6,19	6,55	6,55
4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	55,01	58,20	61,58	65,15	68,93	68,93
5	Persentase Rumah Tangga Tinggal Bersanitasi Layak	0,55	0,58	0,62	0,65	0,69	0,69
6	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	63,25	66,92	70,80	74,91	79,25	79,25
7	Rasio Jaringan Irigasi	1,814	1,92	2,03	2,15	2,27	2,27
8	Presentase peningkatan layanan air minum bersih	73,85	78,13	82,67	87,46	92,53	92,53
9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	11,56	12,23	12,94	13,69	14,48	14,48
10	Rasio bangunan ber-IMB	18,94					

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
			20,04	21,20	22,43	23,73	23,73
2.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,160	0,163	0,166	0,170	0,173	0,173
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	0,033	0,034	0,034	0,035	0,036	0,036
3	Rasio pemukiman layak huni	0,042	0,043	0,044	0,045	0,045	0,045
4	Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	0,090	0,092	0,094	0,096	0,097	0,097
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	17,000	17,340	17,687	18,041	18,401	18,401
2.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.471,00	1.588,83	1.716,09	1.853,55	2.002,02	2.002,02
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/kota	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
3	Jumlah Aparat Pamong Praja	385,00	415,84	449,15	485,12	523,98	523,98
4	Jumlah Patroli Petugas satpol PP dalam melaksanakan pemantauan dan penyelesaian K3 dalam 24 jam	672,00	725,83	783,97	846,76	914,59	914,59
5	Jumlah Pelanggaran K3	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah Perda	9,00	10,00	11,00	12,00	12,96	12,96
8	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.6	SOSIAL						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PSKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase PSKS yang Tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa tanggap Darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar						
2.2.1	TENAGA KERJA						
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27	4,20	4,13	4,06	3,99	3,99
2	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,06	63,58	64,24	64,91	65,59	66,59
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	44,00	46,20	48,51	50,94	53,48	53,48
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12,00	12,60	13,23	13,89	14,59	14,59
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	112,00	117,60	123,48	129,65	136,14	136,14
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	324,00	340,20	357,21	375,07	393,82	393,82
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,00
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	14,00	14,70	15,44	16,21	17,02	18,02
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,00
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	300,00	315,00	330,75	347,29	364,65	364,65
11	Rasio lulusan S1/S2/S3	245,00	257,25	270,11	283,62	297,80	297,80

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
2.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	5.081,00	5.089,13	5.089,13	5.097,27	5.105,43	5.105,43
2	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	63,24	63,34	63,34	63,44	63,54	63,54
3	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD	8,89	8,89	8,89	15,56	15,56	15,56
4	Proporsi Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	61,41	61,51	61,51	61,61	61,71	61,71
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35,43	35,49	35,49	35,54	35,60	35,60
6	Jumlah perempuan di lembaga swasta	120,19	120,38	120,38	120,57	120,77	120,77
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,79	89,93	89,93	90,08	90,22	90,22
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,62	53,71	53,71	53,79	53,88	53,88
9	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,00
2.2.3	PANGAN						
1	Rasio Ketersediaan	21,37	21,92	22,48	23,05	23,64	23,64
2	Padi-padian	388,19	398,13	408,32	418,77	429,49	429,49
3	Umbi-umbian	90,32	92,63	95,00	97,44	99,93	99,93
4	Pangan hewani	149,09	152,91	156,82	160,84	164,95	164,95
5	Minyak lemak	20,47	20,99	21,53	22,08	22,65	22,65
6	Buah biji berminyak	20,91					

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
			21,45	21,99	22,56	23,13	23,13
7	Kacang-kacangan	40,12	41,15	42,20	43,28	44,39	44,39
8	Gula	40,52	41,56	42,62	43,71	44,83	44,83
9	Sayur dan buah	119,88	122,95	126,10	129,32	132,64	132,64
2.2.4	PERTANAHAN						
1	Penyelesaian izin Lokasi	Na	Na	Na	Na	Na	Na
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Na	Na	Na	Na	Na	Na
3	Persentase luas lahan bersertifikat	27,09	27,89	28,71	29,56	30,43	30,43
2.2.5	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,13	70,73	71,33	71,93	72,54	72,54
2	Indeks Kualitas Air	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Indeks Kualitas Udara	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
4	Status tingkat pencemaran udara	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Status Tingkat Pencemaran Air	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Persentase penanganan sampah	0,390	0,44	0,50	0,57	0,65	0,65
7	Cakupan Area Pelayanan Persampahan	50,00	56,82	64,57	73,38	83,39	83,39
2.2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,77	0,75	0,73	0,71	0,70	0,70

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,78	87,44	88,10	88,77	89,45	89,45
4	Rasio bayi ber akte kelahiran	96,23	97,06	97,89	98,73	100,00	100,00
2.2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase LSM Aktif	62,78	66,15	70,46	75,05	79,94	79,94
2	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	82,64	87,07	87,82	88,57	89,34	89,34
3	Persentase LPM Berprestasi	50,00	52,68	53,13	53,59	54,05	54,05
4	Persentase PKK aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Posyandu aktif	71,40	75,23	79,26	83,51	87,98	87,98
2.2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,77	0,75	0,73	0,71	0,70	0,70
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,40	2,55	2,72	2,90	2,90
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	30,00	31,96	34,04	36,26	38,62	38,62
4	Rasio Akseptor KB	41,10	43,78	46,63	49,67	52,91	52,91
5	Rata-rata Usia Kawin Pertama	22,00	23,43	24,96	26,59	28,32	28,32
6	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1.724,00	1.836,40	1.956,14	2.083,68	2.219,53	2.219,53
2.2.9	PERHUBUNGAN						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	5.784,00	5.991,65	6.206,75	6.429,57	6.660,39	6.660,39
2	Rasio ijin trayek	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,52
3	Jumlah uji kir angkutan umum	6.178,00	6.399,79	6.629,54	6.867,54	7.114,09	7.114,09
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3,00	3,11	3,22	3,33	3,45	3,45
5	Persentase layanan angkutan darat	59,49	60,04	74,20	86,60	100,00	100,00
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	92,00	95,30	98,72	102,27	105,94	105,94
7	Pemasangan Rambu-rambu	172,00	178,17	184,57	191,20	198,06	198,06
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	30,00	31,08	32,19	33,35	34,55	34,55
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	9.866,00	10.220,19	10.587,09	10.967,17	11.360,89	11.360,89
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	9.866,00	10.220,19	10.587,09	10.967,17	11.360,89	11.360,89
2.2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	99,00	99,11	99,22	99,33	99,44	99,44
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	99,04	99,15	99,26	99,37	99,48	99,48
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	60,05	60,12	60,18	60,25	60,31	60,31
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	8,27	8,61	8,96	9,33	9,71	9,71
2.2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Jumlah UMKM yang produktif	18.380	19.971,71	21.701,26	23.580,59	25.622,67	25.622,67

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
2	Jumlah Koperasi aktif	93,00	101,05	109,81	119,31	129,65	129,65
3	Persentase Koperasi Aktif	33,70	40,27	48,12	57,51	68,72	68,72
2.2.12	PENANAMAN MODAL						
1	PMDN	4.966,37	5.184,89	5.438,95	5.699,92	5.978,97	5.899,85
2	PMA	2.948,43	3.078,16	3.228,99	3.383,92	3.549,59	3.502,62
3	Daya Serap Tenaga Kerja	10.644	11.112,34	11.656,84	12.216,15	12.814,22	12.644,65
2.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Persentase wirausaha muda	77,58	77,67	77,75	77,84	77,92	77,92
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	14,00	14,72	15,47	16,26	17,10	17,10
3	Jumlah prestasi olahraga	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00
2.2.14	STATISTIK						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.15	PERSANDIAN						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
2	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
2.2.16	KEBUDAYAAN						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2.2.17	PERPUSTAKAAN						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	34.237,00	35.175	36.139	37.129	38.146	38.146
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	20.788,00	21.297	21.819	22.354	22.901	22.901
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,0046	0,0050	0,0053	0,0057	0,0062	0,0062
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	11.412,00	11.727	12.051	12.383	12.725	12.725
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	84.169,00	86.164	88.206	90.296	92.436	92.436
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	4,00	7,00	12,00	17,00	22,00	22,00
2.2.18	KEARSIPAN						
1	Indeks Manajemen Kearsipan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Pengelola Kearsipan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penilaian/ predikat kearsipan	5,00	5,67	6,42	7,27	8,24	8,24
2.3	Urusan Pilihan						
2.3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Konsumsi Ikan	63,65	63,78	63,90	64,03	64,16	64,16

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
2	Cakupan bina kelompok nelayan	50,00	56,82	64,57	73,38	83,39	83,39
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	1.836,95	1.967,56	2.107,45	2.257,29	2.417,78	2.417,78
4	Nilai Tukar Nelayan	101,03	109,42	118,50	128,33	138,98	138,98
5	Produksi perikanan	59.103,12	62.808,89	66.747	70.932,04	75.379,48	75.379,48
2.3.2	PARIWISATA						
1	Jumlah Kunjungan wisata	1,10	1,15	1,20	1,25	1,31	1,31
2	Lama kunjungan Wisata	7,00	7,31	7,64	7,98	8,34	8,34
3	PAD sektor pariwisata	54,80	57,26	59,82	62,50	65,30	65,30
2.3.3	PERTANIAN						
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHK (%)	34,15	34,27	34,39	34,51	34,63	34,63
	a. Produksi Padi (Ton)	28.965,54	29.046,06	29.126,81	29.207,78	29.288,98	29.288,98
	b. Produksi Jagung (Ton)	3.148	3.249	3.354	3.462	3.573	3.573
2	Jumlah produksi perkebunan rakyat:						
	a. Produktivitas Karet (Ton)	1,20	1,22	1,25	1,28	1,30	1,30
	b. Produktivitas Kelapa Sawit	12,68	13,25	13,85	14,47	15,11	15,11
3	Jumlah Produksi Ternak						
	Produksi daging Kerbau (kg)	1.138.544	1.189.551	1.242.843	1.298.522	1.356.696	1.356.696
	Produksi daging Sapi (kg)	1.029.557	1.099.876	1.174.997	1.255.250	1.340.983	1.340.983
4	Cakupan Kelompok Binaan (Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.4	PERDAGANGAN						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Kontibusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	3,18	3,20	3,23	3,25	3,28	3,28
2	Volume Perdagangan CPO	885.960,52	901.464,82	917.240,46	933.292,17	949.624,78	949.624,78
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.5	PERINDUSTRIAN						
1	Kontribusi Sub Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB (%)	31,15	31,75	32,37	33,00	33,64	33,64
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN						
2.4.1	PERENCANAAN						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4.2	KEUANGAN						
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	11,38	12,57	12,75	12,94	13,12	13,12
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
2.4.3	KEPEGAWAIAN						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	31,83	33,23	34,69	36,22	37,81	37,81
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6,72	7,02	7,32	7,65	7,98	7,98
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
2.4.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	60,00	62,64	65,40	68,27	71,28	71,28
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	60,00	62,64	65,40	68,27	71,28	71,28
2.5	FUNGSI PENGAWASAN						
2.6.1	PENGAWASAN						
	Persentase tindak lanjut temuan	54,22	56,61	59,10	61,70	64,41	64,41
2.6	Aspek Daya Saing						
2.6.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	52,98	53,27	53,57	53,86	54,16	54,16
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	50,27	53,08	56,05	59,19	62,49	62,49
2.6.2	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur						
1	Rasio Kendaraan Per Panjang Jalan	188,90	206,66	226,08	247,33	270,58	270,58
2	Rasio Luas Wilayah Produktif	91,71	92,21	92,72	93,23	93,74	93,74
2.6.3	Fokus Iklim Berinvestasi						

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD 2021	Target capaian setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Angka Kriminalitas	340,00	224,40	148,10	97,75	64,51	64,51
2	Jumlah Demonstrasi	20,00	13,20	8,71	5,75	3,79	3,79
2.6.4	Fokus Sumber Daya Manusia						
1	Rasio Lulusan S1, S2 dan S3	4,93	5,30	5,70	6,13	6,60	6,60
2	Rasio Keregantungan	44,27	45,26	44,14	43,04	41,97	41,97